MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 80 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pimpinan Kementerian/Lembaga menetapkan Peraturan mengenai Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang telah disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional;

b. bahwa rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2020-2024 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1555);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
2. Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Kementerian untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
3. Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA-Renstra adalah aplikasi yang bersifat *web based* yang memuat data perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja Renstra K/L.

4. Rencana Kerja Kementerian Perhubungan yang selanjutnya disebut Renja Kementerian adalah dokumen perencanaan Kementerian Perhubungan untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
6. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
7. Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja.
8. Unit Kerja Eselon I adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan di lingkungan Kementerian.
9. Unit Kerja Eselon II adalah Direktorat, Biro, Sekretariat Direktorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Sekretariat Badan, Pusat, Inspektorat, Balai Besar, dan unit kerja lainnya yang setara di lingkungan Kementerian.
10. Unit Kerja Eselon IV adalah subbagian, seksi, sub bidang, dan unit kerja lainnya yang setara di lingkungan Kementerian.
11. Satuan Kerja adalah Unit Kerja Mandiri/Unit Pelaksana Teknis yang mengelola APBN dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
13. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

BAB II
PELAKSANAAN RENSTRA

Pasal 2

(1) Renstra disusun untuk periode 5 (lima) tahun dengan mengacu pada RPJMN 2020-2024.

(2) Renstra Unit Kerja Eselon I disusun paling lambat 1 (satu) bulan setelah Renstra ditetapkan dan disahkan melalui Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I.

(3) Renstra Unit Kerja Eselon II dan Satuan Kerja disusun paling lambat 2 (dua) bulan setelah Renstra Unit Kerja Eselon I ditetapkan dan disahkan melalui Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon II.

Pasal 3

(1) Renstra Kementerian memuat target dan indikator kinerja yang menggambarkan dampak dan hasil yang dihasilkan dan indikator kinerja lain yang relevan.

(2) Renstra Unit Kerja Eselon I memuat target dan indikator kinerja yang menggambarkan hasil dan/atau keluaran setingkat lebih tinggi dari keluaran unit kerja di bawahnya, yang dihasilkan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan Unit Kerja Eselon I.

(3) Renstra Unit kerja Eselon II dan Satuan Kerja memuat target dan indikator kinerja yang menggambarkan hasil atau keluaran yang dihasilkan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan Unit Kerja Eselon II dan Satuan Kerja.

(4) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. spesifik (*specific*);
   b. dapat terukur (*measurable*);
   c. dapat dicapai (*attainable*);
   d. berjangka waktu tertentu (*time bound*); dan
   e. dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*).

Pasal 4

Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Data dan informasi kinerja Renstra yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra merupakan satu kesatuan dengan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Renstra dapat dilakukan perubahan/penyesuaian setelah mendapatkan persetujuan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Evaluasi Renstra dilakukan untuk melihat capaian kinerja kebijakan, program, atau kegiatan dengan membandingkan antara target dengan capaian dalam satu periode Renstra.
(2) Evaluasi Renstra Kementerian dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal.
(3) Evaluasi Renstra Unit Kerja Eselon I dikoordinasikan oleh:
    a. Biro Perencanaan untuk Sekretariat Jenderal;
    b. Sekretariat Direktorat Jenderal untuk Direktorat Jenderal;
    c. Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk Inspektorat Jenderal; dan
    d. Sekretariat Badan untuk Badan.
(4) Evaluasi Renstra Unit Kerja Eselon II dan Satuan Kerja dilakukan oleh masing-masing Unit Kerja Eselon II dan Satuan Kerja.

Pasal 8

Indikasi target dan pendanaan Renstra dapat dimutakhirkan melalui Rencana Kinerja Pemerintah dan Renja Kementerian dengan mempertimbangkan:

a. kesiapan dan kapasitas pelaksanaan;
b. ketersediaan dan sumber pendanaan; dan
c. keterlibatan peran pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2020

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1390

Salinan ya,
KEPALA BIRO

WAHJU NO

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 80 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Sejalan dengan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020 – 2024, maka Kementerian Perhubungan perlu mempersiapkan penyusunan Rencana Strategis sebagai dokumen pendukung dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode tahun 2020 – 2024 menggantikan RPJMN 2015 – 2019 yang akan segera berakhir. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan adalah dokumen perencanaan Kementerian Perhubungan untuk periode 5 (lima) tahunan atau dokumen perencanaan jangka menengah. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan pembangunan, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2020 – 2024 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Renstra Kementerian Perhubungan 2020 – 2024 sebagai dokumen perencanaan pembangunan sektoral, dalam hal ini sektor perhubungan, yang harus disusun oleh Kementerian Perhubungan untuk periode

tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, secara substansi, Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahap IV yaitu periode 2020 – 2024 atau yang merupakan periode terakhir pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. Tujuan RPJMN Tahap IV, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, bahwa Kementerian Perhubungan mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri Perhubungan yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perhubungan. Struktur organisasi Kementerian Perhubungan telah mengalami beberapa kali perubahan sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Indikasi perubahan ini ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Pada tahun 2017 terjadi 2 (dua) kali perubahan struktur organisasi, yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, dan kemudian disempurnakan kembali dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Perubahan di atas disempurnakan dengan diterbitkannya PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan dan sekaligus mencabut PM 189 Tahun 2015. Sesuai peraturan-peraturan tersebut dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Pengelola Transportasi Jabodetabek yang mencabut PM 3 Tahun 2016, struktur organisasi Kementerian Perhubungan terdiri dari: 8 (delapan) unit Eselon I.A, 4 (empat) Staf Ahli Menteri, dan 3 (tiga) Pusat di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal yang dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. Jumlah pegawai Kementerian Perhubungan per April 2020 sebanyak 30.526 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 24.093 dan perempuan sebanyak 6.433, dengan komposisi pegawai terdiri dari:

1. Sekretariat Jenderal, sebanyak 898 orang dengan komposisi laki-laki sebanyak 594 orang dan perempuan sebanyak 304;
2. Inspektorat Jenderal, sebanyak 271 orang dengan komposisi laki-laki sebanyak 183 orang dan perempuan sebanyak 88;
3. Ditjen Perhubungan Darat, sebanyak 3.586 orang dengan komposisi laki-laki sebanyak 3.092 orang dan perempuan sebanyak 494;
4. Ditjen Perhubungan Laut, sebanyak 13.994 orang dengan komposisi laki-laki sebanyak 11.543 orang dan perempuan sebanyak 2.451;
5. Ditjen Perhubungan Udara, sebanyak 6.440 orang dengan komposisi laki-laki sebanyak 4.798 orang dan perempuan sebanyak 1.642;
6. Ditjen Perkeretaapian, sebanyak 613 orang dengan komposisi laki-laki sebanyak 405 orang dan perempuan sebanyak 208;
7. Badan Pengembangan SDM Perhubungan, sebanyak 2.742 orang dengan komposisi laki-laki sebanyak 1.847 orang dan perempuan 895;
8. Badan Litbang sebanyak 173 orang dengan komposisi laki-laki sebanyak 87 orang dan perempuan 86;
9. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebanyak 147 orang dengan komposisi laki-laki sebanyak 108 orang dan perempuan 39;
10. serta Pegawai Perbantuan sebanyak 1.662 orang dengan komposisi laki-laki sebanyak 1.436 orang dan perempuan 226.

Kementerian Perhubungan senantiasa berusaha mewujudkan transportasi nasional yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah serta berorientasi *zero accident* dengan sumber daya manusia perhubungan yang prima, profesional, dan beretika. Adapun capaian-capaian pembangunan transportasi selama tahun 2015 – 2019 antara lain:

Transportasi Darat

1. Dalam rangka peningkatan keselamatan, pelayanan dan peningkatan kapasitas serta aksesibilitas transportasi darat telah dilakukan kegiatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan di jalan nasional, kampanye keselamatan jalan dalam mendukung Dekade Aksi Keselamatan Jalan sesuai program Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011 – 2035.
2. Pembangunan terminal, pengembangan transportasi massal berbasis bus melalui pengembangan Bus Rapid Transit, dengan capaian pembangunan transportasi darat selama tahun 2015 – 2017, meliputi: pembangunan terminal sebanyak 18 lokasi, rehabilitasi terminal sebanyak 30 lokasi, pembangunan *Area Traffic Control System* (ATCS) sebanyak 19 paket, pembangunan UPPKB sebanyak 2 lokasi, rehabilitasi UPPKB sebanyak 29 lokasi. Sedangkan capaian pembangunan transportasi darat selama tahun 2017 – 2019, meliputi: pembangunan terminal baru sebanyak 13 terminal, pembangunan terminal lanjutan sebanyak 13 terminal, peningkatan/rehabilitasi terminal sebanyak 61 paket, pembangunan *Area Traffic Control System* (ATCS) baru sebanyak 17 lokasi, pembangunan *Area Traffic Control System* (ATCS) lanjutan sebanyak 17 lokasi pembangunan UPPKB sebanyak 3 lokasi, rehabilitasi/peningkatan UPPKB sebanyak 69 lokasi.
3. Pembangunan dan rehabilitasi dermaga sungai, danau dan penyeberangan dengan capaian pembangunan selama tahun 2017-2019, meliputi: pembangunan pelabuhan penyeberangan baru sebanyak 15 lokasi, pembangunan pelabuhan penyeberangan lanjutan sebanyak 49 lokasi, rehabilitasi/peningkatan pelabuhan penyeberangan sebanyak 18 lokasi, pembangunan pelabuhan sungai baru sebanyak 7 lokasi, pembangunan pelabuhan sungai lanjutan sebanyak 8 lokasi, rehabilitasi/peningkatan pelabuhan sungai sebanyak 3 lokasi, pembangunan pelabuhan danau baru sebanyak 8 lokasi, pembangunan pelabuhan danau lanjutan sebanyak 15 lokasi, dan rehabilitasi/peningkatan pelabuhan danau sebanyak 5 lokasi.
4. Meningkatnya konektivitas nasional diindikasikan dari waktu tempuh jalan lintas utama pulau menjadi 2,3 jam per 100 km (2019).

Transportasi Perkeretaapian

1. Pembangunan jalur KA baru termasuk pembangunan jalur baru, ganda, dan reaktivasi sepanjang 1025,62 Km'sp dan peningkatan/rehabilitasi jalur kereta api guna meningkatkan kondisi dan keandalannya sepanjang

745,97 Km'sp, dan

2. Pelayanan angkutan KA perintis sebanyak 6 lintas, diantaranya: lintas Krueng Mane – Bungkah – Krueng Geukeuh (Aceh), lintas Lubuk Alung – Kayu Tanam – Padang Panjang – Solok (Sumbar), lintas Kertapati – Indralaya (Sumsel), lintas Purwosari – Wonogiri (Jateng), lintas Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II – Ogan Permata Indah (LRT Palembang) dan lintas Bandara Internasional Minangkabau – Padang (Sumbar).
3. Pengoperasian KA Angkutan motor gratis selama periode masa lebaran di Pulau Jawa dengan total terangkut 15.276 unit (2017), 17.147 unit (2018), dan 19.141 unit (2019).
4. Realisasi *Public Service Obligation* (PSO) 2015 – Februari 2019 sejumlah 10.140,89 Milyar.
5. Kegiatan peningkatan keselamatan perjalanan kereta api 2017-2019 berupa pengadaan dan pemasangan pintu perlintasan sebidang sejumlah 3 unit; pengadaan peralatan berat untuk mengangkat dan menggeser beban akibat kecelakaan KA; pengadaan peralatan penunjang monitoring dan evaluasi program keselamatan sebanyak 1 paket; perawatan peralatan balai yasa di depo; pengadaan peralatan penunjang sistem monitoring dan evaluasi keselamatan perkeretaapian sebanyak 1 paket.

Transportasi Laut

1. Peningkatan trayek tol laut tersubsidi dari 3 trayek (2015) menjadi 21 trayek yang dilayani oleh 19 kapal (2019) yang berdampak pada penurunan disparitas harga berbagai kebutuhan bahan pokok, dan penyelenggaraan angkutan laut perintis sebanyak 113 trayek dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dengan mayoritas pelayanan pada wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI). Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan laut barang dalam rangka mendukung program Tol Laut Nasional sebanyak 21 trayek, subsidi pengoperasian kapal ternak sebanyak 6 trayek, penyelenggaraan kapal rede 20 unit, penyelenggaraan mudik gratis sepeda motor dengan kapal laut dengan rute Pelabuhan Tanjung Priok – Tanjung Emas.
2. Penurunan *dwelling time* pada layanan di pelabuhan utama dari semula 5 hari menjadi kurang dari 3 – 4 hari pada tahun 2019 yang turut mempengaruhi *Logistics Performance Index* dari target 3,40 hari terealisasi menjadi 3,14 hari.
3. Pada Kegiatan Pembangunan Lanjutan Pelabuhan Laut Non Komersial di Tahun 2017 sebanyak 37 lokasi dan Tahun 2018 sebanyak 10 lokasi.

Penyelesaian Pelabuhan Laut Non Komersial di Tahun 2017 sebanyak 33 lokasi dan Tahun 2018 sebanyak 22 lokasi, Pengembangan/Rehabilitasi Pelabuhan Laut Non Komersial di Tahun 2017 sebanyak 45 lokasi dan Tahun 2018 sebanyak 31 lokasi. Pada tahun 2019 terdapat 3 pembangunan pelabuhan, penyelesaian KDP fasilitas pelabuhan pada 22 lokasi, pengembangan fasilitas pelabuhan utama pada 24 lokasi, alur pelayaran pada 2 lokasi, dan pengadaan bongkar muat sejumlah 3 unit.

4. Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi bidang keselamatan dan keamanan pelayaran dilakukan untuk memenuhi tingkat kecukupan dan kehandalan sarana dan prasarana transportasi laut dalam rangka peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran selama 2017 – 2019 meliputi: Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) sebanyak 208 lokasi, stasiun *Vessel Traffic Services* (VTS) sebanyak 8 unit, GMDSS sebanyak 25 unit, *docking* dan *repowering* kapal sebanyak 7 unit, pengadaan perangkat pengembangan pelayanan sistem informasi buku pelaut pada 69 lokasi, pengembangan dan penambahan perangkat sistem informasi SID di 9 lokasi, pengadaan sistem informasi perkapalan (SIMKAPEL) sebanyak 1 paket, pengadaan peralatan sistem observasi laut sebanyak 4 set, pengadaan *Rigid Bouyant Boat* (RBB) pada 7 lokasi, kapal patroli KPLP sebanyak 17 unit.

Transportasi Udara

1. Untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah dan meningkatkan perekonomian daerah selama tahun 2015 – 2019 telah selesai dibangun 14 bandar udara baru;
2. Angkutan udara perisntis sebagai pelaksana program jembatan udara tahun 2017 sebanyak 12 rute, tahun 2018 sebanyak 41 rute, dan tahun 2019 sebanyak 39 rute. Serta subsidi angkutan udara perintis tahun 2017 sebanyak 188 rute, tahun 2018 sebanyak 214 rute, dan tahun 2019 sebanyak 190 rute.
3. Rata-rata pencapaian *On Time Performance* (OTP) Penerbangan tahun 2015-2019 sebesar 80,85%.
4. Jumlah penumpang angkutan udara mencapai 116.744902 penumpang (untuk rute domestik dan internasional) pada tahun 2019 dengan rata-rata pertumbuhan penumpang per tahun (dari tahun 2015 – 2019) sebesar 4,19%.
5. Untuk meningkatkan keamanan penerbangan, telah dilakukan pengadaan dan pemasangan peralatan keamanan penerbangan antara lain peralatan

X-Ray Cabin, X-Ray Bagasi dan X-Ray Cargo serta peralatan CCTV sebanyak 194 paket pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebanyak 115 paket, dan pada tahun 2017 sebanyak 104 paket. Pada tahun 2018 dilakukan pengadaan X-Ray Cabin dan X-Ray bagasi sejumlah 47 unit dan pengadaan WTMD dan Hand Held sebanyak 87 unit. Sedangkan pada tahun 2019 dilakukan pengadaan X-Ray Cabin dan X-Ray bagasi 14 unit dan pengadaan WTMD dan Hand Held sebanyak 48 unit.

6. Dalam rangka memenuhi tingkat kecukupan dan kehandalan peralatan penanggulangan dan pertolongan pada kecelakaan penerbangan, dilakukan melalui pengadaan dan rehabilitasi kendaraan PKP-PK sebanyak 27 paket pada tahun 2015, pada tahun 2016 sebanyak 53 paket pada tahun 2017 sebanyak 59 paket, pada tahun 2018 sebanyak 39 paket, dan pada tahun 2019 sebanyak 8 paket.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Dalam rangka peningkatan kualitas SDM sebagai upaya menunjang kelancaran tugas pada sektor perhubungan, telah dilakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan jumlah peserta pada tahun 2017 sebanyak 395.822 orang dan jumlah lulusan sebanyak 378.912 orang (95,73% peserta dinyatakan lulus), pada tahun 2018 jumlah peserta sebanyak 414.687 orang dan jumlah lulusan sebanyak 385.325 orang (92,92% peserta dinyatakan lulus), dan pada tahun 2019 hingga triwulan III jumlah peserta sebanyak 380.406 orang dan jumlah lulusan 335.600 orang (88,22% peserta dinyatakan lulus).

Peningkatan prasarana pendidikan dan pelatihan berupa pengembangan kampus dan pengembangan kampus terpadu. Serta peningkatan sarana pendidikan dan pelatihan pada transportasi darat dan perkeretaapian, transportasi laut, dan transportasi udara.

Badan Penelitian Dan Pengembangan Perhubungan

Seiring dengan perkembangan isu strategis di bidang transportasi serta pemenuhan target pada Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019, telah dilaksanakan 966 kegiatan penelitian dan pengembangan dalam kerangka transportasi sebagai bagian dari kewilayahan dan perkembangan teknologi. Penelitian dan pengembangan dilaksanakan melalui kegiatan survei, *masterplan*, rencana induk, studi, pengembangan desain teknis dan *prototype*, evaluasi, identifikasi, *review*, kajian, uji simulasi *design*, dan penyusunan rekomendasi kebijakan pada transportasi darat, SDP, KA, laut, udara, dan multimoda.

Dalam mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan, telah dilaksanakan peningkatan kompetensi SDM peneliti, pengembangan sarana dan prasarana penelitian, peningkatan kolaborasi dengan stakeholders yang terkait termasuk perguruan tinggi, serta keaktifan peneliti dalam forum kerjasama nasional dan internasional baik secara bilateral maupun multilateral.

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

1. Terlaksananya 8 kegiatan pembangunan dan prasarana transportasi darat termasuk diantaranya pembangunanan terminal Tipe A Jatijajar di Kota Depok. Terlaksananya 6 kegiatan bidang Prasarana Perkeretaapian diantaranya optimalisasi pemanfaatan jalur kereta api di Jabodetabek. Terlaksananya 12 kegiatan angkutan orang antara lain pembangunan sistem perizinan online andalalin BPTJ, pengawasan pelaksanaan perizinan angkutan umum di 9 wilayah Jabodetabek, pemantauan arus mudik di Jabodetabek, perluasan rute Jabodetabek Residence Connexion (JRC) dan Jabodetabek Airport Connexion (JAC). Terlaksananya 14 kegiatan peningkatan lalu lintas termasuk diantaranya pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan di wilayah Jabodetabek, serta pengadaan dan pemasangan ATCS di persimpangan Jalan Nasional di Kota Bekasi, Kota Bogor, Depok dan Tanggerang, pengaturan lalu lintas di pintu Tol / Ganjil Genap di ruas pintu tol. Terlaksananya 4 kegiatan termasuk diantaranya pembuatan rencana induk terminal barang di Jabodetabek serta pembatasan angkutan barang di koridor tol JORR - Cikarang.
2. Terlaksananya kegiatan rencana teknis, basic design, dan studi terkait pengelolaan transportasi di wilayah Jabodetabek.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Transportasi merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi dan tulang punggung dari proses distribusi orang maupun barang serta memiliki peran sebagai pembuka keterisolasian wilayah. Ketersediaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu aspek dalam meningkatkan daya saing produk nasional sehingga harus didukung dengan sumber daya manusia yang profesional, tanggap terhadap perkembangan teknologi dan kondisi sosial masyarakat. Kementerian Perhubungan senantiasa berupaya untuk dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat atas kualitas transportasi baik dari aspek keselamatan, keamanan, pelayanan dan ketersediaan kapasitas.

Sementara itu, proses transformasi ekonomi harus dimulai pada tahun 2020 – 2024 untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju. Dalam

arahan RPJMN 2020 – 2024 telah tercatat tantangan yang akan dihadapi meliputi: Produktivitas Tenaga Kerja Rendah, Produktivitas Kapital Rendah (ICOR tinggi 6,7), dan *Total Factor Productivity* (TFP) Rendah. Di sisi lain, target pertumbuhan ekonomi 2020 – 2024 berada pada kisaran 5,2% – 5,5% (rendah) hingga pada kisaran 5,4% – 6,5% (tinggi) agar dapat keluar dari *Middle Income Trap* (MIT) menuju Negara Sejahtera Berpendapatan Tinggi di Tahun 2036. Target pertumbuhan 5,4% – 6,0% memerlukan dukungan aspek transportasi baik dari sisi permintaan ataupun sisi produksi. Dari sisi permintaan (jangka pendek), investasi di kawasan industri dan KEK memerlukan konektivitas akses dari lokasi asal produksi hingga ke lokasi simpul terdekat untuk proses selanjutnya. Oleh karena itu kebijakan fiskal yang pro-investasi penyelenggaraan infrastruktur transportasi sangat diperlukan sebagai stimulus perekonomian Indonesia (*counter-cyclical policy*). Sementara itu, sejalan dengan sisi produksi (jangka menengah), maka konektivitas layanan dalam distribusi logistik akan mendorong peningkatan produktivitas (TFP, modal, tenaga kerja) melalui penciptaan lapangan kerja baru berbasis ekonomi domestik yang lebih tangguh.

Hingga tahun 2019, Kementerian Perhubungan, pada sektor perhubungan darat telah mengoperasikan sebanyak 310 trayek angkutan jalan perintis dan 213 lintas penyeberangan, sedangkan untuk Tahun 2018 dioperasikan sebanyak 296 trayek angkutan jalan perintis dan 222 lintas penyeberangan. Penurunan pelayanan lintas penyeberangan perintis pada tahun 2019 disebabkan oleh adanya 16 lintas perintis yang dikelola oleh operator pengelola (BUMD) Kapal tersebut tidak dapat mengoperasikan kembali kapalnya dikarenakan ketidaksanggupan mengaktifkan kembali dokumen kapal dengan melakukan *docking* yang membutuhkan biaya yang cukup besar. Secara umum trayek-trayek tersebut telah mampu menjangkau hingga sekitar 114 daerah tertinggal, terpencil, dan terluar di seluruh NKRI (atau 74%) dari total 152 daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Sementara, subsidi angkutan orang perintis dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan untuk menghubungkan antara daerah terisolir, terpencil dan tertinggal, daerah yang tidak memiliki layanan angkutan jalan dan daerah dengan pelayanan angkutan jalan yang secara ekonomi tidak mencapai nilai keekonomiannya (tidak menguntungkan). Pelayanan angkutan jalan perintis dilaksanakan sejak tahun 2001 dengan 74 trayek di 12 provinsi, sampai tahun 2018 angkutan jalan perintis telah melayani 296 trayek di 32 provinsi, pada tahun 2019 jumlah pelayanan meningkat menjadi 307 trayek di

32 provinsi dengan 41% trayek berada di Indonesia Bagian Timur. Secara umum pelayanan angkutan jalan perintis memberikan manfaat dalam:

1. Meningkatkan perekonomian suatu daerah yang telah dilayani oleh angkutan jalan perintis dengan mempermudah akses warga sekitar yang terisolir menuju pusat perekonomian di pusat kota;
2. Memberikan akses dan kemudahan pelajar di daerah yang dilintasi trayek angkutan jalan perintis dalam menjangkau sekolahnya;
3. Menghubungkan wilayah perbatasan dan/atau wilayah lainnya yang karena pertimbangan aspek sosial politik harus dilayani serta membantu melayani angkutan di lokasi pasca bencana alam.

Pada sektor perhubungan laut telah mengoperasikan sebanyak 113 trayek angkutan perintis dan 18 trayek tol laut, sedangkan untuk Tahun 2017 dioperasikan sebanyak 96 trayek angkutan perintis dan 13 trayek tol laut. Secara umum trayek-trayek tersebut telah mampu menjangkau hingga sekitar 84 daerah tertinggal, terpencil, dan terluar di seluruh NKRI (atau 68%) dari total 122 daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah). Adapun terkait dengan pelayaran rakyat, di Tahun 2017, Pemerintah telah melakukan pembangunan sebanyak 24 kapal yang akan segera diserahkan pengoperasiannya ke sejumlah Pemerintah Daerah. Ke depan, bukan saja jangkauan pelayanan pelayaran perintis dan tol laut yang perlu ditingkatkan, tetapi juga regularitas serta efektivitasnya dalam menciptakan konektivitas dan pemerataan pembangunan nasional. Untuk fasilitas bongkar muat pelabuhan-pelabuhan dalam melayani wilayah 3T, saat ini sebagian besar dilayani dengan menggunakan fasilitas *crane* yang terdapat pada kapal. Sedangkan pelayanan angkutan udara perintis tercatat sebanyak 184 rute pada tahun 2017, dan 211 rute pada tahun 2018. Dukungan aksesibilitas daerah 3T sektor udara dilaksanakan melalui peningkatan cakupan layanan penerbangan perintis, implementasi Program Jembatan Udara terpadu dengan Tol Laut di Papua, serta revitalisasi skema subsidi perintis penerbangan yang menjamin kepastian dan keberlanjutan layanan (*multiyears*), termasuk menggali potensi pemanfaatan skema pembiayaan KPBU-AP. Kebutuhan konektivitas udara di wilayah terpencil, terutama di Papua yang tergambar dari keberadaan lapangan terbang (*airstrip*) yang cukup dominan, perlu diakomodasi melalui dukungan regulasi, pembinaan dan pengawasan termasuk aspek keselamatan.
Pada sektor transportasi perkotaan masih terdapat masalah transportasi perkotaan khususnya terkait keterpaduan baik fisik maupun non fisik seperti

fasilitas keterpaduan antarmoda antara bus perkotaan/ Bus Rapid Transit dengan Perkeretaapian Perkotaan/ Moda Raya Terpadu (MRT), keterpaduan tarif layanan transportasi perkotaan khususnya layanan transportasi dari daerah penunjang kota yang berbeda provinsi seperti di Jabodetabek.

Permasalahan transportasi yang masih dihadapi saat ini sangat beragam sehingga perlu pendekatan secara menyeluruh dari berbagai aspek untuk menyelesaikannya. Kendati demikian, Kementerian Perhubungan selalu berupaya menyelesaikan berbagai permasalahan transportasi yang ada, yaitu:

1.2.1. Aksesibilitas

1. Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan angkutan keperintisan.
   Keperintisan merupakan jalur pembuka terisolasinya suatu daerah untuk menghubungkan daerah satu dengan yang lain atau dari daerah minus ke daerah maju maupun berkembang. Guna menjaga kesinambungan pelayanan keperintisan, maka perlu adanya pengaturan sarana dan cadangannya apabila terjadi kerusakan atau pelaksanaan pemeliharaan tahunan. Permasalahan penyelenggaraan angkutan perintis yang paling menonjol adalah waktu pelayanan karena keterbatasan sarana angkutan laut perintis dan keterbatasan penerbangan perintis.
2. Masih kurangnya minat swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi.
   Masih rendahnya minat swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi dipengaruhi oleh faktor komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan atas risiko dan permasalahan lahan termasuk masalah perizinan yang berlaku di Indonesia.
3. Kondisi infrastruktur transportasi yang masih belum memadai.
   Sampai dengan awal tahun 2017, pertumbuhan panjang jalan KA belum menunjukkan pertumbuhan panjang yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar alokasi pembangunan jalan KA diprioritaskan pada peremajaan/penggantian rel karena kondisi rel yang telah cukup tua serta peningkatan jalan KA jalur tunggal menjadi jalur ganda. Penggantian rel dimaksudkan untuk peningkatan daya dukung kapasitas beban rel yang dilakukan dengan mengganti tipe rel dengan tipe yang lebih kuat seperti R-42 dan R-54. Sampai dengan tahun 2017, jumlah total panjang rel di Indonesia adalah 6.301,09 km dengan berbagai jenis rel.
4. Terdapat beberapa PKN/PKW/KSN dan simpul transportasi belum terhubung dengan jalur kereta api seperti pelabuhan tanjung emas karena masalah penertiban lahan oleh PT. KAI dan progres konstruksi jalur kereta

api Bandar Udara Adi Soemarmo yang terkendala pengadaan lahan masyarakat dan pemanfaatan lahan milik TNI AU.

1.2.2. Kinerja Pelayanan

1. Menurunnya peran angkutan umum dan maraknya transportasi *online*.
2. Belum adanya penyuluhan/perbaikan pelayanan untuk pelaksanaan angkutan pemadu yang diharapkan melalui subsektor, dimana standar pelayanan minimal dirasakan masih jauh dari kelayakan pelayanan baik dari kapal maupun fasilitasnya.
3. Belum optimalnya peran angkutan laut dikarenakan adanya ketimpangan muatan.
4. Belum optimalnya peralihan transportasi barang yang didominasi moda angkutan jalan.
5. Belum optimalnya pelayanan transportasi multimoda dan antarmoda yang terintegrasi.
6. Adanya keterbatasan infrastruktur bandara khususnya dalam mendukung pemberian alokasi waktu terbang (*slot time*) akan mengakibatkan terhambatnya penambahan kapasitas angkutan udara.
7. Dalam upaya penambahan kapasitas bandar udara seringkali terbentur permasalahan kepemilikan lahan yang kerap kali menghambat proses pembangunan bandar udara.
8. Sebagian bandar udara mengalami *overcapacity* sementara upaya pembangunan bandar udara tidak mungkin dapat terselesaikan dalam satu tahun anggaran.
9. Faktor utama kenaikan tarif tiket pesawat dipengaruhi oleh 3 (tiga) komponen utama antara lain harga *avtur*, nilai tukar rupiah dan komponen biaya lainnya (pajak, *sparepart*, sewa pesawat, dll). Selain dipengaruhi juga oleh pengaturan *slot* dan penugasan pada rute yang tidak menguntungkan. Bahwa pertumbuhan industri penerbangan akan semakin membaik apabila didukung oleh kondisi yang lebih kondusif seperti menguatnya mata uang rupiah, adanya insentif *avtur*, insentif biaya bandara dan navigasi. Kondisi tersebut akan menarik minat untuk melahirkan Badan Usaha Bandar Udara baru, sehingga tidak akan terjadi monopoli, duopoli, kartel atau sejenisnya.

1.2.3. Keselamatan dan Keamanan

1. Belum optimalnya tingkat kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap keselamatan dan keamanan transportasi.

Keselamatan dan keamanan transportasi merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan transportasi yang meliputi angkutan jalan, angkutan sungai, angkutan danau, angkutan penyeberangan, kereta api, pelayaran, dan penerbangan. Jumlah kejadian dan fatalitas kecelakaan lalu lintas jalan merupakan yang paling tinggi bila dibandingkan moda lainnya. Masih tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan ini salah satunya diakibatkan kurangnya disiplin dari pengguna jalan dan rendahnya tingkat kelaikan armada.

2. Belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi meliputi kecukupan dan kehandalan sarana prasarana keselamatan dan keamanan transportasi sesuai dengan perkembangan teknologi.
3. Kurang optimalnya pelaksanaan perlindungan lingkungan yang diakibatkan penyelenggaraan transportasi.

   Perlindungan lingkungan terkait dengan penyelenggaraan transportasi saat ini dapat dikatakan belum optimal, mengingat peningkatan emisi gas buang dari kendaraan tidak diiringi dengan usaha mereduksi pengaruh emisi gas buang, misalnya melalui pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH), mekanisme *punishment* untuk kendaraan yang tidak lolos uji emisi maupun penyediaan lokasi pengolahan limbah B3 yang dapat mengakomodir limbah pembuangan oli bekas tersebut.
4. Kurangnya tenaga berlisensi di bandar udara terutama keamanan penerbangan dan PKP-PK.

   Kurangnya tenaga berlisensi di bandar udara terutama personil keamanan penerbangan (AVSEC Bandara dan teknisi fasilitas keamanan penerbangan) dan PKP-PK Bandara.
5. Belum optimalnya penanganan perlintasan sebidang jalur KA dengan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

   Menyangkut penanganan perlintasan sebidang antara jalan KA dengan jalan, dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2009 tentang Perkeretaapian diamanahkan tidak diizinkan perlintasan sebidang antara jalan KA dengan jalan, hingga saat ini pembangunan perlintasan tidak sebidang masih mengalami kendala khususnya terkait masalah wewenang status jalan dan kemampuan anggaran dalam pembuatan *flyover/underpass,* sementara pembangunan perlintasan tidak sebidang sangat penting dalam rangka menekan angka kecelakaan.

1.2.4. Restrukturisasi dan Reformasi

1. Permasalahan Kelembagaan (Institusi Penyelenggara Perkeretaapian)
   Melalui ditetapkannya Undang-Undang 23/2007 Pemerintah membuka kesempatan kepada badan usaha lain untuk turut serta dalam penyelenggaraan perkeretaapian guna menghindari terjadinya monopoli dalam penyelenggaraan perkeretaapian. Penyelenggaraan perkeretaapian dibedakan atas perkeretaapian umum dan perkeretaapian khusus yang keduanya terbuka kesempatan kepada badan usaha sebagai penyelenggara prasarana dan penyelenggara sarana. Sesuai dengan Undang-Undang 23/2007 penyelenggaraan prasarana dan/atau sarana ini dilakukan oleh Badan Usaha Penyelenggara (BUP). Dalam hal tidak terdapat BUP, maka penyelenggaraan tersebut dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
2. Lembaga pelatihan penerbangan secara jumlah sudah sangat memadai namun daya serap pada industri penerbangan masih terkendala dengan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan maskapai penerbangan.
   (Jumlah Inspektur berkualifikasi Penguji Kecakapan Personel dan Inspektur Pengawas Lembaga Pelatihan Penerbangan belum sesuai dengan perkembangan jumlah personel pengoperasian pesawat udara termasuk jumlah lembaga pelatihan penerbangan).
3. Kebijakan nasional mengenai integrasi lembaga penelitian menjadi isu penting dalam perkembangan kelembagaan Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai bagian dari unit kerja Kementerian Perhubungan. Sebagai Kementerian Teknis, Kementerian Perhubungan tetap memerlukan unit kerja yang melaksanakan kajian dan menyusun suatu rekomendasi kebijakan, sehingga kebijakan yang disusun adalah kebijakan berdasarkan penelitian dan pengkajian *(research-based policy making)*.

1.2.5. Teknologi

1. Terbatasnya kualitas, kuantitas, standar kompetensi SDM Transportasi dan tenaga pendidik transportasi.
   Meningkatnya pembangunan infrastruktur transportasi menimbulkan konsekuensi akan pemenuhan sumber daya manusia transportasi yang berdaya saing. Pemenuhan akan sumber daya manusia transportasi (regulator dan operator) yang berdaya saing menemui beberapa hambatan antara lain adalah kurangnya standar kompetensi SDM transportasi, terbatasnya ketersediaan kesempatan sekolah dan diklat transportasi, keterbatasan sarana dan prasarana serta kurangnya tenaga pendidik

transportasi. Selain itu, perkembangan teknologi yang cepat dalam penyelenggaraan transportasi menyebabkan sumber daya manusia transportasi perlu ditingkatkan agar tetap memiliki daya saing.

2. Belum optimalnya tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan masih kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga auditor internal serta penggunaan aspek pengaruh teknologi informasi secara optimal.

   Terkait dengan belum optimalnya tindak lanjut hasil audit lebih banyak disebabkan karena permasalahan sumber daya manusia, serta kompleksitas kasus yang terjadi. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang belum sesuai kebutuhan, kompetensi tenaga auditor yang belum merata, *Standard Operating Procedure* (SOP) kegiatan internal belum tersusun dengan baik, Sistem Informasi Pengawasan (SIP) yang belum dimanfaatkan secara maksimal, dan kurangnya kesadaran objek audit untuk menindaklanjuti hasil audit menjadi beberapa permasalahan terkait dengan sumber daya manusia tenaga auditor internal. Dalam kaitannya dengan hal tersebut tindaklanjut rekomendasi hasil audit perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan reformasi birokrasi.

3. Belum terpenuhinya target jumlah dan kompetensi peneliti, dimana peneliti merupakan modal utama yang cukup menentukan kualitas dan produktivitas hasil penelitian dan pengembangan transportasi.

   Tingkat penguasaan seorang peneliti terhadap bidang keilmuan akan sangat mempengaruhi performa penelitian, dan sampai dengan saat ini peneliti dengan penguasaan bidang teknis transportasi masih sangat terbatas, terlebih lagi untuk bidang keilmuan perekayasaan teknologi kompetensi peneliti Badan Litbang Perhubungan dapat dikatakan masih sangat minim. Adanya tuntutan peran yang lebih besar untuk melaksanakan kegiatan penelitian terapan yang berorientasi ke arah pengembangan teknologi juga memberikan implikasi terhadap kebutuhan sarana prasarana pendukung. Salah satunya adalah melalui rencana pengadaan unit pelaksana teknis (balai penelitian/laboratorium) guna mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian terapan di samping penyiapan rencana kebutuhan sumber daya manusia yang sesuai kebutuhan teknis. Namun demikian karena adanya moratorium pegawai, rencana kebijakan nasional mengenai integrasi lembaga penelitian dan penundaan pembangunan balai dikarenakan kebijakan penghematan anggaran menjadikan rencana tersebut tidak dapat terealisasi.

4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan bidang perhubungan.

   Teknologi berbasis *startup* di bidang transportasi pada prinsipnya memberikan dampak signifikan terhadap penataan dan pengaturan sistem transportasi di Indonesia. Beberapa konsep pengembangan teknologi melalui *Intelligent Transport System* (ITS) akan memberikan kemudahan dalam manajemen transportasi. Namun kendala yang dihadapi saat ini bahwa permasalahan transportasi di Indonesia tidak serta merta karena masalah teknologi, melainkan lebih pada masalah sosial dan ekonomi. Terkait hal tersebut, Kementerian Perhubungan telah *launching Transhub Community* pada Tahun 2018 untuk mengawal semua ide bisnis menjadi bentuk aplikasi yang bisa diimplementasikan dan membawa manfaat bagi peningkatan kinerja transportasi dan pelayanan masyarakat. Kementerian Perhubungan berupaya menjembatani kebutuhan pengembangan dan implementasi ide bisnis dari para pelaku *startup* dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

5. Masih tingginya penggunaan bahan bakar minyak (BBM) berbasis fosil dalam penyelenggaraan transportasi.

   Masalah lain yang dihadapi sektor transportasi adalah besarnya jumlah penggunaan BBM sebagai sumber energi transportasi. Penggunaan BBM untuk pengoperasian kendaraan/angkutan saat ini menjadi beban berat bagi pemerintah. Dengan semakin menipisnya cadangan minyak bumi dan meningkatnya harga BBM di pasar dunia, penggunaan energi alternatif/bahan bakar non BBM yang ramah lingkungan untuk pengoperasian kendaraan/angkutan saat ini merupakan suatu keharusan. Selain mempunyai keuntungan ekonomis penggunaan energi alternatif non BBM juga dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan.

1.2.6. Pemindahan Ibu Kota Negara

Pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Pulau Jawa dirasakan perlu disebabkan serangkaian permasalahan yang terjadi. Beberapa permasalahannya adalah sekitar 57% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa sehingga perlu adanya pendistribusian penduduk ke daerah yang masih memiliki jumlah penduduk yang rendah, kontribusi ekonomi per pulau terhadap PDB Nasional yang belum merata dimana saat ini 58,49% dari PDB Nasional dikontribusikan oleh Pulau Jawa, mulai terjadinya krisis ketersediaan air di Pulau Jawa terutama DKI Jakarta dan Jawa Timur, konversi lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa, pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi dimana konsentrasi

terbesar terdapat di Jakarta dan Jabodetabekpunjur, serta meningkatnya beban Jakarta sehingga terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan besarnya kerugian ekonomi yang dihadapi.

Upaya-upaya penentuan lokasi IKN telah dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Lokasi Strategis, secara geografis berada di tengah wilayah Indonesia untuk merepresentasikan keadilan dan mendorong percepatan pengembangan wilayah KTI (Indonesia Centris).
2. Tersedia lahan luas milik negara untuk mengurangi biaya investasi.
3. Lahan harus bebas bencana gempa bumi, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, serta kebakaran hutan dan lahan gambut.
4. Tersedia sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan.
5. Dekat dengan kota eksisting yang sudah berkembang untuk efisiensi investasi awal infrastruktur, meliputi:
   - Akses mobilitas/logistik: bandara, pelabuhan dan jalan;
   - Ketersediaan pelabuhan laut dalam sangat penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim melalui konektivitas tol laut antar pulau;
   - Tingkat layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai untuk dikembangkan.
6. Potensi konflik sosial rendah dan memiliki budaya terbuka terhadap pendatang, serta memiliki dampak negatif minimal terhadap komunitas lokal.
7. Memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan, terutama (a) *to minimize vulnerability of State*; (b) *Safeguard its territorial*; (c) *help to gain Regional and International Affairs*; (d) Tidak dekat wilayah perbatasan negara.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diputuskan calon IKN yaitu di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Provinsi Kalimantan Utara) dengan beberapa pertimbangan konektivitas yang dapat dilihat pada **Gambar 1.1** Rencana Lokasi IKN.

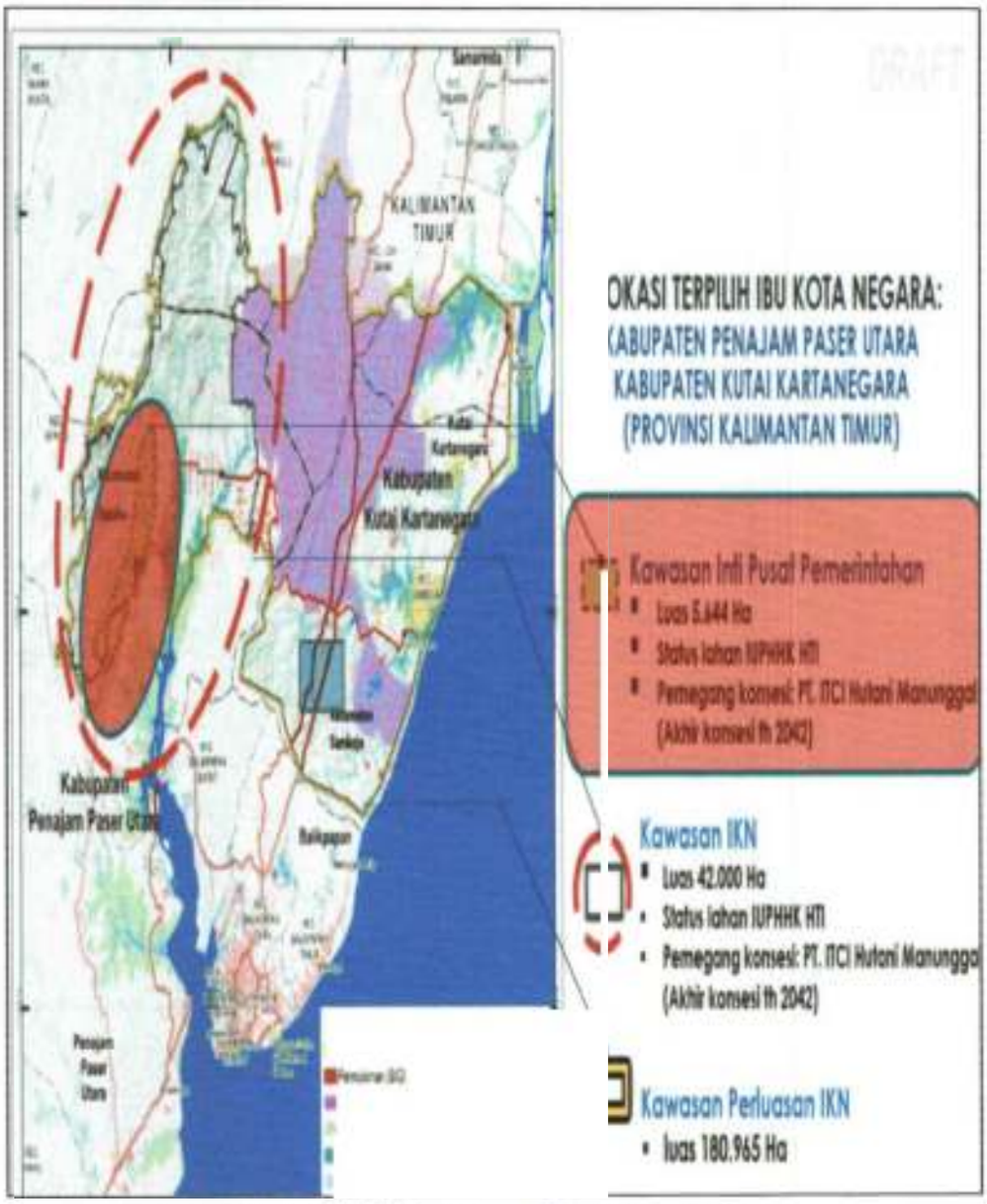

Gambar 1. 1. Rencana Lokasi IKN

(sumber: Badan Litbang Kemenhub, 2020)

Kementerian Perhubungan memiliki peran penting dalam upaya pembangunan IKN, diantaranya:

1. Mengembangkan transportasi multimoda dan konektivtas antarwilayah melalui:
   a. meningkatkan konektivitas regional via darat, air, dan udara;
   b. mengupayakan keselamatan dan keamanan dalam bertransportasi;
   c. mengupayakan infrastruktur transportasi yang tahan bencana;
   d. merancang pelayanan transportasi terpadu dan berkualitas *(service level).*
2. Menyediakan aksesabilitas untuk mendukung aktivitas di IKN mengikuti master plan pembangunan IKN dengan pengintegrasian sistem transportasi perkotaan ke perumahan dan permukiman yang memadai, aman dan terjangkau (BRT,LRT,MRT,AGT)
3. Mengembangkan transportasi berbasis digital dengan pengintegrasian sistem transportasi dan sistem teknologi informasi dan komunikasi;
4. Mengembangkan transportasi hijau dan ramah lingkungan melalui penggunaan transportasi umum berbasis ramah lingkungan dan mendukung penggunaan *charging station.*

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Ibu Kota Negara (IKN) baru dirancang memiliki konsep *Smart City, Green City dan Sustainable City.* Dengan memperhatikan arahan Presiden tersebut, maka Kementerian Perhubungan memberikan arahan target capaian layanan untuk pembangunan sistem transportasi Ibu Kota Negara diantaranya sebagai berikut:

1. terintegrasi antar moda transportasi dan antar moda dengan tata guna lahan;
2. waktu perjalanan kurang dari 30 menit dari bandara dengan KA-Ekspress *line*;
3. angkutan perairan dengan kecepatan paling tinggi 30 knot;
4. sumber tenaga penggerak dengan listrik;
5. sistem pengendalian transportasi dengan sistem transportasi cerdas.

Sebagai *derived demand*, perencanaan transportasi menyesuaikan perencanaan tata guna lahan di Ibu Kota Negara. Yang secara garis besar, terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Konektivitas utama, yaitu jaringan transportasi yang menghubungkan simpul-simpul transportasi, kawasan penyangga, dan titik integrasi moda Ibu Kota Negara;

2. Jaringan transportasi perkotaan, yaitu pelayanan transportasi di kawasan internal perkotaan Ibu Kota Negara.

Adapun gambaran umum rencana jaringan transportasi umum di IKN adalah sebagai berikut.

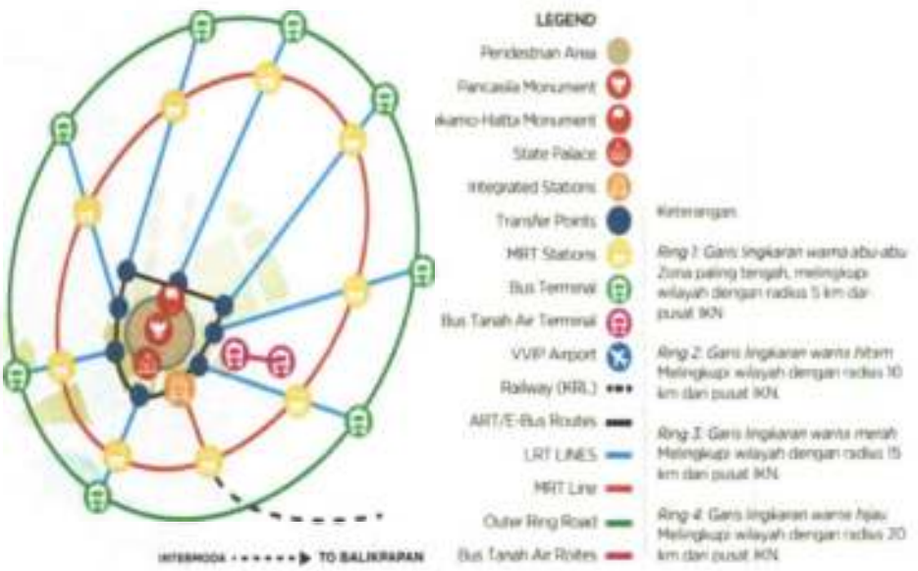

Gambar 1. 2. Rencana Jaringan Transportasi Umum IKN
(sumber: Kementerian Perhubungan, 2020)

Selain rencana pembangunan jaringan, dibutuhkan pula moda transportasi yang memadai baik dari moda transportasi darat dan moda transportasi laut. Pengembangan *multi airport system* juga diperlukan guna mendukung rute pelayanan moda transportasi udara menuju IKN dari provinsi lainnya, terutama provinsi-provinsi di luar Jawa. Terdapat 3 (tiga) bandara pokok, yaitu Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Bandar Udara Domestik Aji Pangeran Tumenggung Pranoto *Airport*, dan Bandar Udara VVIP pada jarak 15 – 20 km dari pusat pemerintahan untuk menerima jet privat tamu negara. Pengembangan bandar udara non APBN juga menjadi penting dalam pengembangan *multi airport system*.

Berdasarkan pemetaan terhadap 6 (enam) permasalahan di atas, akan menjadi pertimbangan dalam rencana pelaksanaan agenda pembangunan sektor transportasi pada tahun 2020 – 2024. Terdapat 4 (empat) agenda baru Kementerian Perhubungan untuk mempercepat pencapaian prioritas nasional, yaitu:

a. Dukungan terhadap Aksesibilitas Pariwisata;
b. Penguatan Rantai Logistik;
c. Dukungan Aksesibilitas pada Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK); serta

d. Pembangunan Sistem Transportasi di Ibu Kota Negara (IKN) Baru.

Pengembangan potensi Pariwisata memiliki tujuan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Program pembangunan aksesibilitas dan konektivitas berbasis pengembangan kawasan pariwisata serta pengembangan transportasi multimoda yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata diharapkan mampu berperan nyata dalam optimalisasi pengembangan potensi kawasan pariwisata yang dapat mendatangkan jumlah wisatawan mancanegara sebesar 28 juta, dengan nilai devisa USD 36,5 miliar atau kontribusi pariwisata terhadap PDB sebesar 5,5%.

Keterlibatan sektor transportasi dalam penguatan rantai logistik terkait dengan distribusi barang dan jasa, diharapkan juga akan meningkatkan perekonomian nasional. Kinerja logistik Indonesia tercermin dalam tujuan strategis peningkatan konektivitas dan daya saing ekonomi. Upaya penguatan program tol laut dalam rangka konektivitas antar wilayah menunjukkan tren nilai positif dengan didukung *Public Service Obligation* (PSO) yang tepat sasaran. Pembangunan simpul-simpul transportasi baru yang saling terkoneksi dengan jaringan layanan antar moda diharapkan mampu menaikkan nilai *Logistics Performance Index* menjadi 3,5 dengan target biaya logistik sebesar 19% terhadap PDB.

Perhatian pada Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) bertujuan untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi wilayah dan percepatan pembangunan. Melalui upaya pengembangan aksesibilitas dan konektivitas pada DTPK, maka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut diharapkan dapat meningkat mencapai koefisien Gini 0,38. Penguatan sarana dan prasarana transportasi pada Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan diharapkan juga akan mengurangi ketimpangan wilayah antara Kawasan Barat dengan Kawasan Timur Indonesia.

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru memerlukan perencanaan yang baik dan terstruktur dalam kerangka waktu yang sesuai menuju pengembangan sistem perkotaan modern didukung penguatan ekonomi wilayah di sekitarnya. Program pembangunan pada aspek transportasi diarahkan pada pengembangan infrastruktur perkotaan dan pengembangan transportasi berbasis teknologi dan ramah lingkungan menuju *smartcity, greencity dan sustainable city.*

BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN

Sasaran Pembangunan Jangka Menengah 2020 – 2024 sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 adalah:

> *mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.*

Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020 – 2024 yang juga merupakan RPJMN ke IV dalam RPJPN 2005 – 2025, terdapat 4 (empat) pilar pembangunan yakni:

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh;
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Ke-empat pilar tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional untuk mempermudah dalam pelaksanaan implementasinya. Ke-7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Gambar 2. 1. Tujuh Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020 – 2024
(Sumber: Perpres No 18 Tahun 2020)

7 (tujuh) agenda pembangunan nasional tersebut menjadi dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan pembangunan pada tahun 2020 – 2024 dengan memperhatikan Visi dan Misi Presiden pada tahun 2020 – 2024.

2.1. VISI DAN MISI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Visi Presiden Republik Indonesia 2020 – 2024 adalah:

Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

Visi Presiden ini selaras dengan sasaran pembangunan nasional pada tahun 2020 – 2024 yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan menjadi landasan dalam Tema dan Agenda Pembangunan Nasional tahun 2020 – 2024, yakni:

Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan

Untuk mendukung tercapainya keberhasilan dari Visi Presiden Tahun 2020 – 2024 tersebut, ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden yang harus dilaksanakan dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan pada kurun waktu 2020 – 2025, yakni:

1. peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. sinergi Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Di dalam Arahan Presiden, terkait dengan pelaksanaan 9 Misi yang telah disampaikan, sektor perhubungan mempunyai fokus kegiatan yang harus ditangani untuk menunjang capaian misi, terutama pada misi 2, misi 3 dan misi 4 sebagai berikut:

Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

1. mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri;
2. mengembangkan infrastruktur perkotaan: perumahan/tempat tinggal/hunian, transportasi massal, sentra-sentra ekonomi yang terintegrasi, serta memastikan ketersediaan infrastruktur air bersih, tenaga listrik, dan pengolahan limbah/sampah;

3. meneruskan revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana logistik domestik dan internasional, seperti pelabuhan dan gudang dengan fasilitas pengolahan pascapanen, agar biaya logistik dapat bersaing dengan memanfaatkan kemajuan digital;
4. memfasilitasi berkembangnya ekonomi digital, termasuk transportasi *online*, dengan menciptakan peluang bisnis, kepastian hukum pada pelaku usaha dan perlindungan pada konsumen, serta meningkatkan daya saing demi kepentingan nasional.

Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan

1. pembenahan Infrastruktur (Tol Laut) terutama di Indonesia bagian Timur;
2. meningkatkan konektivitas antarpulau, pelabuhan, dan tol laut;
3. membangun infrastruktur jalan tol, jalan kereta rel ganda, dan bandara di Sukabumi.

Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

- mengurangi emisi karbon dan meningkatkan transportasi massal ramah lingkungan.

Kata kunci dalam Arahan Presiden untuk pelaksanaan pembangunan Sektor Perhubungan pada Tahun 2020 – 2024 adalah: penguatan aksesibilitas dan konektivitas antar kawasan, transportasi perkotaan, penguatan rantai logistik, dukungan IPTEK dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

2.2. VISI DAN MISI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2020 – 2024

Didasarkan pada Tema dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020 – 2024, yakni untuk mewujudkan Indonesia yang berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan, maka untuk mendukung Visi Presiden 2020 – 2024 guna menjalankan agenda pembangunan dimaksud, ditetapkan Visi Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

"Kementerian Perhubungan yang berupaya Mewujudkan Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong".

Penjabaran Visi Kementerian Perhubungan dapat dimaknai sebagai berikut:

Konektivitas merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Konektivitas nasional adalah terhubungnya antar wilayah di seluruh nusantara, termasuk angkutan perkotaan baik dengan transportasi darat, kereta api, laut, sungai dan penyeberangan serta udara.

Handal berarti tersedianya layanan transportasi yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah tanah air.

Berdaya saing berarti tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan produktif, serta berdaya saing internasional.

Nilai tambah berarti penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan, serta berperan dalam pengembangan wilayah.

Relevansi perwujudan Visi Presiden dalam Sektor Perhubungan ini apabila dilihat dalam konteks 7 Agenda Pembangunan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

Pertama, konektivitas nasional memberikan andil yang strategis dan menentukan dalam rangka **mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan**, terutama terkait ketimpangan akses dan pemerataan pembangunan antar kawasan Indonesia Bagian Barat dengan Indonesia Bagian Timur, maupun antar kesenjangan pembangunan secara sektoral.

Kedua, konektivitas nasional mampu **memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar**, terutama dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah mewujudkan konsep Tol Laut, mengurangi disparitas ekonomi, peningkatan daya saing perekonomian antar wilayah, serta pemerataan akses dan kualitas pelayanan dasar.

Ketiga, konektivitas nasional mampu menjembatani pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk **memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas**, sehingga cita-cita nasional untuk menjadikan Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan dapat tercapai.

Keempat, melalui konektivitas nasional, strategi pembangunan untuk **meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing** dapat dilakukan melalui peningkatan aksesibilitas masyarakat ke fasilitas

pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, serta sentra-sentra kegiatan ekonomi produktif di suatu wilayah.

Pengurangan kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan merupakah salah satu fokus kebijakan pembangunan Indonesia 2005 – 2025. Pemerintah menempuh strategi pembangunan yang menekankan upaya terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pembangunan transportasi nasional merupakan salah satu strategi kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif antar wilayah. Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya Visi Kementerian Perhubungan guna mewujudkan **Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing, dan Memberikan Nilai Tambah, ditetapkan Misi Kementerian Perhubungan**, sebagai berikut:

Kementerian Perhubungan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 dengan uraian sebagai berikut:

1. memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
2. memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi kebencanaan;
3. memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif;
4. melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten;
5. mewujudkan pengembangan pemanfaatan hasil inovasi teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Misi yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan tersebut di atas, sudah selaras dan sejalan dengan Arahan Presiden untuk melaksanakan

pembangunan di Sektor Perhubungan dengan mengacu pada amanat yang tertuang dalam 9 (sembilan) Misi Presiden.

2.3. TUJUAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2020 – 2024

Dengan mendasarkan pada Visi dan Misi Presiden yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan pada tahun 2020 – 2024. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategis pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis sektor transportasi dan permasalahan yang ada. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan Kementerian Perhubungan dengan memperhatikan visi. Untuk mewujudkan misi Kementerian Perhubungan, dapat dicapai melalui beberapa tujuan.

Tujuan Pembangunan sektor Perhubungan Tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi;
2. meningkatnya kinerja layanan transportasi;
3. meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi;
4. tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;
5. terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Indikator pada Tujuan yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Tujuan Kementerian Perhubungan tahun 2020 – 2024 disusun sebagai indikator *outcome* dan bukan merupakan indikator *output*. Indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. meningkatnya rasio konektivitas nasional menjadi 0,763 pada tahun 2024;
2. meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan diindikasikan dengan:
   a. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi sebesar 88,5 pada tahun 2024;
   b. capaian *on time Performance* (OTP) layanan transportasi sebesar 82,08% pada tahun 2024.
3. meningkatnya keselamatan transportasi yang diukur dengan rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan sebesar 23,71 pada tahun 2024.

2.4. SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2020 – 2024

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang harus memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bound dan continously improve* (SMART-C), maka sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dan penetapan sasaran akan lebih mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025, sasaran pembangunan lima tahunan tahap ke-4 (RPJMN 2020 – 2024) diarahkan pada ***Terwujudnya masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif***. Tema dan Agenda Pembangunan Nasional tahun 2020 – 2024 juga mencantumkan target **Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan.** Perwujudan kondisi maju dan sejahtera akan dapat dicapai dengan dukungan penyelenggaraan jaringan transportasi yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah NKRI. Berpijak pada pendekatan tersebut, maka fokus pembangunan sektor perhubungan/transportasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional adalah:

1) konektivitas Poros Maritim;
2) konektivitas Multimoda;
3) keselamatan Transportasi; dan
4) transportasi Perkotaan.

4 (empat) fokus pembangunan sektor perhubungan/transportasi menjadi dasar penanganan terhadap isu strategis pembangunan transportasi Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1) peningkatan aksesibilitas antar wilayah untuk mencapai pemerataan ekonomi;
2) perkuatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian wilayah;
3) integrasi layanan antar sektor unggulan dalam pengembangan kawasan;
4) memperkuat layanan transportasi perkotaan dalam rangka mendukung kualitas mobilitas perkotaan.

Sasaran strategis pembangunan Kementerian Perhubungan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, sasaran strategis dirumuskan dari sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2015 – 2019 serta menjabarkan misi Kementerian Perhubungan.

Dengan berlandaskan pada isu strategis dimaksud dan capaian/kesinambungan terhadap Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019 serta dinamika diskusi dan pembahasan selama penyusunan studi ini, maka penyusunan sasaran strategis berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) nya dapat dijelaskan sebagai berikut.

SS 1. Terwujudnya Konektivitas Nasional

Untuk mewujudkan tujuan: Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi.

SS 2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi

Untuk mewujudkan tujuan:

1) meningkatnya layanan transportasi yang diindikasikan dengan capaian *on time performance* dan penurunan emisi gas rumah kaca serta indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi;
2) tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan yang diindikasikan dengan meningkatnya akuntabilitas Kementerian Perhubungan, meningkatnya tata kelola pelayanan publik, meningkatnya tata kelola kebijakan, regulasi, dan hukum, dan meningkatnya tata kelola organisasi;
3) terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

SS 3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi

Untuk mewujudkan tujuan: Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi.

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Perhubungan tahun 2020 – 2024 disusun sebagai indikator *outcome* dan bukan merupakan indikator *output*, yang dijabarkan menjadi 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) sasaran penunjang menggunakan pendekatan metode *Balanced Score Card* (BSC) yang dibagi dalam 4 (empat) perspektif yaitu *stakeholder perspective*,

costumer perspective, internal process perspective dan *learning and growth perspective*, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Stakeholders Perspective*

   Mencakup SS-1 dengan Indikator Kinerja Utama:

   - IKSS 1 Rasio Konektivitas Nasional.

   Dan mencakup SS-3 dengan Indikator Kinerja Utama:

   - IKSS 3 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 1 juta keberangkatan.

2. *Customer Perspective*

   Mencakup SS-2 dengan Indikator Kinerja Utama:

   - IKSS 2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi;
   - IKSS 2.2 *On Time Performance* Layanan Transportasi.

3. *Internal Process Perspective*

   a. Mencakup SSp-4 dengan Indikator Kinerja Penunjang:
      - IKSp 4 Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum.

   b. Mencakup SSp-5 dengan Indikator Kinerja Penunjang:
      - IKSp 5 Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Yang Kompeten.

   c. Mencakup SSp-6 dengan Indikator Kinerja Penunjang:
      - Persentase penurunan emisi GRK sektor transportasi.

   d. Mencakup SSp-7 dengan Indikator Kinerja Penunjang:
      - Opini BPK "Wajar Tanpa Pengecualian".

   e. Mencakup SSp-8 dengan Indikator Kinerja Penunjang:
      - Indeks RB Kementerian Perhubungan.

Perwujudan Visi Presiden dalam sektor Perhubungan dan untuk mencapainya yang dijabarkan ke dalam Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan, tersaji pada **Tabel 2.1.** berikut.

Tabel 2. 1. Langkah Konkret Pencapaian Visi Presiden dalam Sektor Perhubungan, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024

NO	MISI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
1	Meningkatnya integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah	Meningkatnya konektivitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi	Rasio konektivitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi	Terwujudnya konektivitas nasional	Rasio konektivitas nasional
2	Meningkatnya kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi kebencanaan	Meningkatnya kinerja layanan transportasi	Indeks kinerja layanan transportasi	Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan	▪ *On Time Perfomance* Layanan Transportasi ▪ Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi
3	Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	Persentase penurunan tingkat kecelakaan pengguna	Meningkatnya keselamatan transportasi	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan

NO	MISI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
	peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif.		jasa transportasi	Meningkatnya Kualitas SDM transportasi yang kompeten	Tingkat pemenuhan SDM transportasi yang kompeten
4	Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten	Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi dengan Kategori "Sangat Baik"	Meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, regulasi dan hukum Meningkatnya pengawasan dan pengendalian Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum Opini BPK "Wajar Tanpa Pengecualian" Indeks RB Kementerian Perhubungan

NO	MISI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
5	Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim	Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi	Tingkat penggunaan Teknologi Transportasi yang ramah lingkungan	Meningkatnya kualitas transportasi berkelanjutan	Persentase penurunan emisi GRK sektor transportasi sebesar 5,13 juta ton CO_2 pada tahun 2024

Selengkapnya kompilasi secara lengkap memuat Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan dapat dilihat pada **Gambar 2.2** dan **Tabel 2.2.** di bawah ini.

Gambar 2. 2. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024

Tabel 2.2. Sasaran Strategis, IKSS, dan Meta Indikator Kementerian Perhubungan 2020 – 2024

SASARAN STRATEGIS (UTAMA)			INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)		FORMULASI	META INDIKATOR
STAKEHOLDERS	SS 1	Terwujudnya Konektivitas Nasional	IKSS 1	Rasio Konektivitas Nasional	$K_{Tnas} = (K_{TD} \times W_{TD}) + (K_{TL} \times W_{TL}) + (K_{TU} \times W_{TU}) + (K_{KA} \times W_{KA}) + (K_{TP} \times W_{TP})$ W_{TD} = bobot konektivitas transportasi darat (23,75%) W_{TL} = bobot konektivitas transportasi laut (23,75%) W_{TU} = bobot konektivitas transportasi udara (23,75%) W_{KA} = bobot konektivitas transportasi KA (23,75%) W_{TP} = bobot konektivitas transportasi perkotaan (5,00%)	**Rasio Konektivitas Transportasi Darat (K_{TD})** = (Jumlah KSN, DTPK, dan Pusat Kegiatan Nasional yang terlayani Angkutan Umum dan Angkutan Penyeberangan **DIBANDINGKAN** Jumlah KSN, DTPK, dan Pusat Kegiatan Nasional yang ditetapkan) Angka Rasio adalah 1 s/d 0 Dimana: 1 = seluruh lokasi yang ditetapkan **TELAH** terlayani 0 = seluruh lokasi yang ditetapkan **BELUM** terlayani Catatan : **A. Kawasan Strategis Nasional (KSN):** 1. 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) yang telah diberi subsidi

SASARAN STRATEGIS (UTAMA)			INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS		FORMULASI	META INDIKATOR
						2. 13 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang telah diberi subsidi 3. 9 Kawasan Industri (KI) yang telah diberi subsidi **B. DTPK: Daerah Terpencil, Perbatasan dan Perbatasan** yang telah diberi subsidi **C. Pusat Kegiatan Nasional** **D. Angkutan Umum:** 1. AKAP 2. Keperintisan Jalan 3. Lintas Penyeberangan (Komersil+Perintis) *Baseline 2019: 98 Kawasan (PKN, DTPK, PKN)*
						Rasio Konektivitas Transportasi Laut Nasional (K_{TL}) = Jumlah pelabuhan yang telah dilayani angkutan laut (tahun n0) ditambah dengan Jumlah Penambahan rute pelayaran atau pelabuhan yg disinggahi angkutan laut (tahun n) dibandingkan dengan jumlah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan laut. Keterangan: jumlah lokasi

SASARAN STRATEGIS (UTAMA)	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	FORMULASI	META INDIKATOR
			pelabuhan laut yang digunakan angkutan laut sesuai dengan Sub Lampiran A1 dalam KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) dan dapat berubah jika terdapat Reviu RIPN. Angka Rasio adalah 1 s/d 0 Dimana: 1 = seluruh Pelabuhan Laut yang digunakan untuk angkutan laut **TELAH** terlayani 0 = seluruh Pelabuhan Laut yang digunakan untuk angkutan laut **BELUM** terlayani
			Rasio Konektivitas Udara (K_{TU}) = (Jumlah Bandara yang hanya melayani penerbangan niaga berjadwal dalam negeri + Bandara yang hanya melayani penerbangan perintis sesuai dalam KP Perintis + Bandara yang melayani penerbangan niaga berjadwal dalam negeri dan perintis sesuai dalam KP

SASARAN STRATEGIS (UTAMA)	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	FORMULASI	META INDIKATOR
			Perintis) **DIBANDINGKAN** (Jumlah Bandara dalam RINBU (Rencana Induk Nasional Bandar Udara) sesuai KM 166 Tahun 2019 + Bandara yang melayani penerbangan perintis sesuai dengan KP Perintis (tidak masuk dalam RINBU) Angka Rasio adalah 1 s/d 0 Dimana: 1 = seluruh Bandara yang ditetapkan **TELAH** terlayani 0 = seluruh Bandara yang ditetapkan **BELUM** terlayani
			Rasio Konektivitas Transportasi KA (K_{KA}) = (Jumlah wilayah terhubung jaringan layanan KA pada tahun berjalan **DIBANDINGKAN** jumlah wilayah terhubung jaringan layanan KA sesuai RIPNAS) Angka Rasio adalah 1 s/d 0 Dimana: 1 = seluruh jaringan KA yang ada di RIPNAS

SASARAN STRATEGIS (UTAMA)	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	FORMULASI	META INDIKATOR
			TELAH terlayani 0 = seluruh jaringan KA yang ada di RIPNAS **BELUM** terlayani
			Rasio Konektivitas Perkotaan (K_{TP}) = (Jumlah kawasan perkotaan prioritas yang telah dikembangkan sistem angkutan umum massal berbasis jalan **DIBANDINGKAN** Jumlah kawasan perkotaan prioritas) Dimana: 1. Apabila dalam 1 kota sudah ada layanan sistem angkutan umum massal (SAUM) perkotaan maka dihitung = 1 2. Apabila dalam 1 kota belum ada layanan sistem angkutan umum massal (SAUM) maka dihitung = 0 3. Kawasan perkotaan prioritas : a. 9 Kota Metropolitan (DKI Jakarta, Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Palembang, Denpasar, Banjarmasin);

SASARAN STRATEGIS (UTAMA)			INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS		FORMULASI	META INDIKATOR
						b. 3 DPP (Yogyakarta-Borobudur, Mataram-Mandalika, Manado-Likupang) c. 4 Kota Baru (Maja, Tanjung Selor, Sofifi, Sorong) d. IKN (Balikpapan) e. 5 Kota lainnya (Pekanbaru, Batam, Surakarta, Salatiga, Singkawang)
CUSTOMER	SS 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	IKSS 2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Persentase rata-rata capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Transportasi Darat, Laut, Udara dan KA **(C_{IKM})**	*Hasil survei* **penilaian** *publik atas penyelenggaraan angkutan pada masa Lebaran* terhadap pelayanan angkutan mudik gratis, angkutan Antarkota Antarprovinsi (AKAP), dan angkutan penyeberangan, serta tingkat pelayanan lalu lintas di jalan. (Pelaksana survei: PPTB – Balitbang – eksternal)
						Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap **Layanan Angkutan Laut** (Sesuai dengan Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM)

SASARAN STRATEGIS (UTAMA)			INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS		FORMULASI	META INDIKATOR
						Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap **Layanan Angkutan Udara** (Sesuai dengan Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM)
						Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap **Layanan Angkutan Kereta Api** (Sesuai dengan Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM)
			IKSS 2.2	*On Time Performance* Layanan Transportasi	Persentase capaian rata-rata nilai on *Time Performance* (OTP) Angkutan SDP, Laut, Udara, KA dan Perkotaan berbasis jalan **(C_{otp})**	Nilai OTP Angkutan Jalan (Perkotaan) = Nilai OTP pada **layanan BRT** di 21 LOKPRI Pengembangan Transportasi Metropolitan / Perkotaan Angka Nilai OTP adalah 1 s/d 0 Dimana: 1 = seluruh layanan BRT pada 21 lokpri **TELAH** tepat waktu 0 = seluruh layanan BRT pada 21 lokpri **BELUM** tepat waktu
						Nilai OTP Angkutan Penyeberangan = (Jumlah pelayaran tepat waktu dalam 1 tahun pada 7 lintas utama

SASARAN STRATEGIS (UTAMA)	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	FORMULASI	META INDIKATOR
			/ Jumlah pelayaran 1 tahun pada 7 lintas utama) Angka Nilai OTP adalah 1 s/d 0 Dimana: 1 = seluruh layanan penyeberangan pada lintas utama **TELAH** tepat waktu 0 = seluruh layanan penyeberangan pada 7 lintas utama **BELUM** tepat waktu
			Nilai OTP Angkutan Laut = Nilai OTP pada pelabuhan utama dan pengumpul yang telah mencapai target kinerja yang ditetapkan (WT, AT, ET/BT) Angka Nilai OTP adalah 1 s/d 0 Dimana: 1 = seluruh layanan angkutan laut pada pelabuhan utama dan pengumpul **TELAH** tepat waktu 0 = seluruh layanan angkutan pada Pelabuhan utama dan pengumpul **BELUM**

SASARAN STRATEGIS (UTAMA)	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	FORMULASI	META INDIKATOR
			tepat waktu
			Nilai OTP Angkutan Udara = (Jumlah penerbangan tepat waktu / Jumlah total penerbangan) Angka Nilai OTP adalah 1 s/d 0 Dimana: 1 = seluruh layanan penerbangan **TELAH** tepat waktu 0 = seluruh layanan penerbangan **BELUM** tepat waktu
			Nilai OTP Angkutan KA = (keberangkatan / kedatangan angkutan penumpang KA yang tepat waktu pada tahun berjalan **DIBANDINGKAN** total keberangkatan / kedatangan angkutan penumpang KA) Angka Nilai OTP adalah 1 s/d 0 Dimana: 1 = seluruh layanan angkutan KA **TELAH** tepat waktu 0 = seluruh layanan angkutan KA **BELUM** tepat

SASARAN STRATEGIS (UTAMA)		INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS		FORMULASI	META INDIKATOR
					waktu
SS 3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	IKSS 3	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dalam 1 Juta Keberangkatan	**Rasio kejadian kecelakaan transportasi:** $\frac{k_{AJ} + k_{ASP} + k_{laut} + k_{udara} + k_{KA}}{5}$	**Rasio kejadian kecelakaan angkutan jalan (k_{AJ})** $\frac{\sum kecelakaan\,(AKAP + PERINTIS)_i}{\sum trip(AKAP + PERINTIS)_i}$
					Rasio kejadian kecelakaan angkutan penyeberangan (k_{ASDP}) $\frac{\sum kecelakaan\,A_{ASP}\,(KOMERSIL + PERINTIS)_i}{\sum trip(KOMERSIL + PERINTIS)_i}$
					Rasio kejadian kecelakaan angkutan laut (k_{laut}) $\frac{\sum kecelakaan\,A_{laut,i}}{\sum SPB_{\text{dgn lalin}}}$
					Rasio kejadian kecelakaan angkutan udara(k_{udara}) $\frac{\sum kecelakaan\,A_{udara}\,(\text{ASDP, KA} - \text{ASDP, KA})}{\sum Keberangkatan_{(\text{ASDP, KA} - \text{ASDP, KA})}}$
				Catatan: Penyebut rasio kejadian kecelakaan angkutan KA diasumsikan sama dengan jumlah keberangkatan	**Rasio kejadian kecelakaan angkutan KA (k_{KA})** $\frac{\sum kecelakaan\,A_{KA}}{\sum KM\ tempuh\ perjalanan_{KA}}$
SSp 4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan	IKSp 4	Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum	Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum: $C_{reg} \times W_{reg} + C_{hkm} \times W_{hkm} + C_{hkmnt} \times W_{hkmnt}$ Wreg = 65%	**Regulasi Kemenhub yang Implementatif (C_{reg})** Rasio jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang mendapat "*Class Action*" oleh masyarakat

SASARAN STRATEGIS (UTAMA)	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	FORMULASI	META INDIKATOR
Hukum		WKaj = 25% Wkajst = 10%	dibandingkan dengan jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang dikeluarkan/ditetapkan Pada tahun 2024, diharapkan seluruh Regulasi yang dikeluarkan oleh Kemenhub tidak mendapatkan "*Class Action*" dari masyarakat Angka Rasio adalah 1 s/d 0 Dimana: 1 = seluruh regulasi yang dikeluarkan oleh Kemenhub di"*Class Action*" oleh masyarakat 0 = seluruh regulasi yang dikeluarkan oleh Kemenhub **tidak** di"*Class Action*" oleh masyarakat
			Tingkat kemanfaatan rumusan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan (C_{Kaj}) Prosentase Rumusan Rekomendasi Kebijakan pada (t-2) yang dimanfaatkan/diterima oleh Menteri Perhubungan, sub sektor dan

SASARAN STRATEGIS (UTAMA)			INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS		FORMULASI	META INDIKATOR
						stakeholder **Tingkat kemanfaatan rumusan Rekomendasi Kebijakan Isu Strategis di Bidang Perhubungan (C_{Kajlet})** Persentase Rekomendasi kebijakan isu strategis yang dimanfaatkan/diterima oleh Menteri Perhubungan, sub sektor dan *stakeholder*
	SSp 5	Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten	IKSp 5	Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten	Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten dan Berkeselamatan: $C_{vokasi} \times W_{vokasi} + C_{kompetensi} \times W_{kompetensi}$ Dimana: W_{vokasi} = Bobot Persentasi penyerapan lulusan diklat pembentukan 60% $W_{kompetensi}$ = Bobot persentase lulusan diklat transportasi yang bersertifikat kompetensi 40%	1. Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Pembentukan Transportasi (C_{vokasi}) 2. Persentase Lulusan Diklat Transportasi yang bersertifikat kompetensi ($C_{kompetensi}$)
LEARN & GROWTH	SSp 6	Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan	IKSp 6	Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi	Persentase penurunan emisi GRK sektor transportasi : $C_{grk} = \frac{R_{grk}}{T_{grk_{t-1,t2}}} \times 100\%$	Penurunan kadar CO2 sektor transportasi yang semakin banyak menunjukkan aksi penggunaan moda transportasi yang ramah lingkungan berhasil, termasuk di dalamnya pemanfaatan teknologi transportasi yang ramah lingkungan. Target penurunan CO_2 pada tahun 2024 sebesar 5,13 juta

SASARAN STRATEGIS (UTAMA)		INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS		FORMULASI	META INDIKATOR
					ton CO_2 (T_{grk})
SSp 7	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian	IKSp 7	Opini BPK "Wajar Tanpa Pengecualian"	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan	
SSp 8	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKSp 8	Indeks RB Kementerian Perhubungan	Nilai Indeks RB atas kinerja organisasi Kementerian Perhubungan oleh Kementerian PAN-RB	

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

3.1.1. Fokus Kerja 2020 – 2024

Berdasarkan pidato pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo juga mengemukakan 5 (lima) fokus kerja selama 5 (lima) tahun yang akan datang yaitu:

1. Pembangunan SDM

   Pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama dengan tujuan membangun SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengundang talenta-talenta global untuk bekerja sama. Cara baru yang perlu dikembangkan salah satunya dengan *endowment fund* yang besar untuk manajemen SDM, pengoptimalan kerjasama dengan industri, serta penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.

2. Pembangunan Infrastruktur

   Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan membangun infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi dan mempermudah akses ke kawasan wisata sehingga dapat mendongkrak lapangan kerja baru dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

   Penyederhanaan, pemotongan, dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi. Langkah pertama adalah dengan cara menerbitkan 2 (dua) undang-undang besar yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Kedua Undang-Undang tersebut akan menjadi *Omnibus Law*, yaitu satu Undag-Undang yang sekaligus merevisi beberapa Undang-Undang, bahkan puluhan Undang-Undang.

4. Penyederhanaan Birokrasi

   Penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran dengan memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, pemotongan prosedur yang panjang, dan pemangkasan birokrasi yang panjang. Penyederhanaan eselonisasi juga diperlukan sehingga menjadi 2 level saja yaitu diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan

menghargai kompetensi. Tujuan program pembangunan juga harus dilakukan secara serius oleh Menteri, Pejabat, dan Birokrat.

5. Transformasi Ekonomi

   Transformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3.1.2. Arahan RPJMN 2005 – 2024

Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (*goals)* dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 Agenda Pembangunan. 7 agenda tersebut adalah:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

   Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

   Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

   Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

   Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di

dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

   Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

   Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

   Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat.

Berdasarkan ketujuh agenda di atas, agenda yang memiliki keterkaitan erat dan utama dengan Kementerian Perhubungan adalah Agenda Kelima yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Meskipun demikian, Kementerian Perhubungan juga tetap dapat mendukung agenda-agenda lainnya terutama melalui dukungan sektor transportasi.

3.1.3. *Highlight* RPJMN 2020 – 2024 Sektor Transportasi

***HIGHLIGHT* 1: Pembangunan Keselamatan dan Keamanan Transportasi**

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi adalah:

1. Pendekatan sistem yang berkeselamatan (*safe system approach*) melalui koordinasi 5 pilar;
2. Perencanaan berbasis data dan riset melalui pusat keselamatan jalan (*road safety center*);
3. Penghapusan praktek muatan dan dimensi berlebih melalui penegakan hukum dan pengembangan jembatan timbang;
4. Pengadaan sarana navigasi transportasi perairan (*aids to navigation*).

5. Pengembangan SDM transportasi perairan melalui pusat pendidikan dan pelatihan (*regional training center*).

HIGHLIGHT* 2: *Integrated Port Network

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka membangun *interated port network* adalah:

1. Pengembangan 7 Pelabuhan Utama (hub) kawasan *hinterland* yang dapat dilihat pada **Gambar 3.1.**

Gambar 3. 1. Rencana 7 Pelabuhan Hub dengan kriteria *Integrated Port Network*

(Sumber: Perpres No 18 Tahun 2020)

2. Standarisasi kinerja infrastruktur pelabuhan.
3. Efisiensi pelayaran dengan melakukan konsolidasi *cargo* dan penggunaan kapal ukuran besar.
4. Pembangunan kawasan pada *hinterland*.

***HIGHLIGHT* 3: Konektivitas Transportasi Kereta Api**

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka memperkuat konektivitas transportasi kereta api, adalah:

1. Pembangunan Kereta Api Kecepatan Tinggi Pulau Jawa:
   a. Kereta Api Kecepatan Tinggi Jakarta – Bandung; dan
   b. Kereta Api Berkecepatan Lebih Tinggi Jakarta – Surabaya Phase I (Jakarta – Semarang).
2. Kereta Api Makassar-Parepare.
3. Pengembangan skema pengadaan sarana KA.
4. Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan prasarana (*Infrastructure Maintenance and Operation*/IMO).

***HIGHLIGHT* 4: Konektivitas Jalan**

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka memperkuat konektivitas transportasi jalan, adalah:

1. Perluasan Program Hibah Jalan Daerah dengan:
   a. Perbaikan tata Kelola;
   b. Kualitas dan kelengkapan jalan (drainase, rambu);
   c. Kelembagaan forum lalu lintas.
2. Pembangunan jalan tol dan non tol (*high grade*) pada lintas utama pada:
   a. Tol Trans Sumatera;
   b. Jalan Trans Kalimantan;
   c. Jalan Trans Papua;
   d. Lintas Pansela Jawa.
3. Pembangunan jalan akses menuju simpul transportasi prioritas pada:
   a. Pelabuhan Parlimbungan Ketek, Teluk Tapang, Patimban, Depapre;
   b. Bandara Ahmad Yani, Buntu Kunik, Nabire Baru, Syamsudin Noor, Siboru Fakfak, Tebelian, Bolaang Mangondow;
   c. Terminal Anak Air Padang, Meulaboh, Liwas, Kefamenanu.

***HIGHLIGHT* 5: Transportasi Perkotaan**

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka pengembangan sistem angkutan umum masal perkotaan, adalah:

1. Program Pembangunan Angkutan Umum Massal Perkotaan
   a. Penyediaan dukungan pemerintah yang dapat dilihat pada **Gambar 3.2.**

Gambar 3. 2. Pembagian porsi dukungan Pemerintah
(sumber: Perpres No 18 Tahun 2020)

b. Pengembangan otoritas transportasi wilayah metropolitan dengan skema yang dapat dilihat pada **Gambar 3.3.**

Gambar 3. 3. Skema Pengembangan Otoritas Transportasi Wilayah Metropolitan

(sumber: Perpres No 18 Tahun 2020)

2. Prioritas 6 Kota Metropolitan pada:
   a. Metropolitan Jakarta;
   b. Metropolitan Surabaya;
   c. Metropolitan Medan;
   d. Metropolitan Bandung;
   e. Metropolitan Makassar;
   f. Metropolitan Semarang.

3.1.4. Kerangka Pembangunan dan Sasaran Utama Infrastruktur 2020 – 2024

Kerangka pembangunan infrastruktur berdasarkan amanat RPJMN 2020 – 2024 terbagi menjadi 3 (tiga) bagian utama yaitu Infrastruktur Pelayanan Dasar, Infrastruktur Ekonomi, dan Infrastruktur Perkotaan. Ketiga bagian utama tersebut didukung pula oleh Pembangunan Energi dan Ketenagalistrikan dan ICT untuk Transformasi Digital. Kerangka pembangunan infrastruktur dapat dilihat pada **Gambar 3.4.**

Gambar 3. 4. Kerangka Pembangunan Infrastruktur 2020 – 2024
(Sumber: Perpres No 18 Tahun 2020)

Sasaran utama pembangunan infrastruktur yang perlu dicapai Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

1. Konektivitas Wilayah
   - Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan sebesar 65% terhadap angka dasar tahun 2010;
   - Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau sebesar 1,9 jam/100 km.
2. Infrastruktur Ekonomi
   - Panjang jaringan KA yang terbangun (kumulatif) sepanjang 7.451 km's;
   - Kondisi jalur KA sesuai standar Track Quality Indeks (TQI) kategori 1 dan 2 (94%);
   - Jumlah rute subsidi tol laut (25 rute);
   - Pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun (36 pelabuhan penyeberangan);
   - Jumlah bandara baru yang dibangun (21 Bandara);
   - Jumlah rute jembatan udara (43 Rute);
   - Rute pelayaran yang paling terhubung (loop) sebanyak 27%;
   - Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar (7 lokasi).
3. Infrastruktur Perkotaan
   - Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (6 kota).

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Ke-4 (empat)

pengarusutamaan (*mainstreaming*) memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Selain mempercepat dalam mencapai target-target dari fokus pembangunan, *mainstreaming* juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan. Hal ini perlu dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai tujuan global. Berikut adalah 4 (empat) pengarusutamaan RPJMN 2020 – 2024:

1. Gender

   Strategi pembangunan nasional harus memasukkan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan.

   Indikator:

   1) Indeks Pembangunan Gender (IPG);
   2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

   Pembangunan yang berkelanjutan harus dapat menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip keadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional, pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang sejalan dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN dengan memanfaatkan EBT di dalam sarana dan prasarana transportasi, termasuk pada gedung-gedung yang dimiliki. Untuk itu perlu disusun *roadmap* penggunaan energi baru dan terbarukan sektor transportasi. Tentu saja hal tersebut sesuai dengan tujuan utama Kebijakan Energi Nasional yaitu tercapainya kemandirian dan ketahanan energi nasional, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

   Indikator:

   1) Pertumbuhan PDB;
   2) Indeks Pembangunan Manusia;
   3) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
   4) Indeks Anti Korupsi;
   5) Indeks Pelayanan Publik (K/L);
   6) Indeks Akuntabilitas;

7) Indeks Resiko Bencana Indonesia.

3. Modal Sosial dan Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya dimaksudkan untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya dan memanfaatkan (mendayagunakan) kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.

Indikator:

1) Inklusi Sosial Masyarakat (toleransi, kesetaraan gender, inklusif);
2) Kohesi Sosial (kerja sama, jejaring, aksi kolektif, kepercayaan sosial);
3) HaKI komunal berbasis ekosistem;
4) Persentase wilayah adat yang tersertifikasi;
5) Nilai ekspor ekonomi budaya terhadap total ekspor;
6) Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pertemuan/rapat di lingkungan sekitar.

4. Transformasi Digital

Perkembangan pesat teknologi khususnya teknologi digital telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Sehingga perlu untuk menyelaraskannya dengan pembangunan nasional.

Indikator:

1) meningkatnya NRI (*Network Readiness Index*) untuk mengukur bagaimana teknologi khususnya teknologi komunikasi dan informasi (TIK) dapat memberikan dampak terhadap suatu negara;
2) memperkuat IDI (ICT *Development Index*) untuk melihat bagaimana pengembangan TIK suatu negara dari sisi infrastrukturnya.

3.1.5. *Major Projects* RPJMN 2020 – 2024

Berdasarkan *highlight* RPJMN 2020 – 2024, kerangka pembangunan infrastruktur 2020 – 2024, serta sasaran utama pembangunan infrastruktur 2020 – 2024, maka ditetapkan sejumlah *Major Project* sektor transportasi yang ditugaskan untuk Kementerian Perhubungan dan *Major Project* kewilayahan yang membutuhkan dukungan Kementerian Perhubungan.

A. *Major Project* Transportasi

Untuk sektor transportasi dalam RPJMN, *major project* terdiri dari (jaringan pelabuhan utama, pengembangan saum perkotaan di metropolitan, jembatan udara, KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa, Kereta Api Makassar – Pare Pare). **Tabel 3.1** menunjukkan *Major Project* Transportasi guna mendukung Prioritas Nasional berdasarkan RPJMN 2020 – 2024.

Tabel 3. 1. Major Project Sektor Transportasi

No.	Proyek Prioritas	MP
1	Peningkatan Jalur KA di Jawa Timur (Surabaya - Banyuwangi; Surabaya-Malang; Bangil-Kertosono)	MP02: 10 Destinasi Pariwisata Prioritas
2	Pembangunan Bandara Perairan Raja Ampat	
3	Pengembangan Bandara Pitu-Morotai	
4	Pengembangan Pelabuhan Likupang	
5	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Siompu	
6	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Siladen	
7	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kadatua	
8	Pembangunan Jalur KA Pemantang Siantar - Danau Toba	
9	Pengembangan Pelabuhan Kaledupa	
10	Pengembangan Bandara Matahora (Wakatobi)	
11	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Tomia	
12	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Binongko	
13	Pembangunan kapal penyeberangan perintis Kaledupa-Tomia-Binongko	
14	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Salawati	
15	Pembangunan Bandara Bali Baru	
16	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Kadatua	
17	Pembangunan Akses Kereta Api Menuju Bandara Juanda	
18	Peningkatan Jalur KA di Jawa Tengah (Semarang-Solo; Banjar-Kroya)	
19	Elektrifikasi Jalur KA Jogja-Solo	

No.	Proyek Prioritas	MP
20	Pengembangan Bandara Dewadaru-Karimunjawa	
21	Pembangunan KA akses Pelabuhan Tanjung Emas	
22	Pembangunan KA akses Bandara Adi Sumarmo	
23	Elektrifikasi Jalur KA Jogja-Solo	
24	Pembangunan KA akses Bandara Internasional Yogyakarta	
25	Pembangunan pelabuhan penyeberangan Tj. Kelayang (Tj. Nyato)	
26	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Manggar	
27	Pengembangan Bandara Sibisa	
28	Pembangunan pelabuhan penyeberangan KSPN Danau Toba	
29	Pengembangan Pelabuhan Gili Trawangan	
30	Pengembangan Bandara Silangit	
31	Pengembangan Bandara JB Soedirman, Kab. Purbalingga	
32	Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas	
33	Pengembangan Bandara Kulon Progo	
34	Pengembangan Bandara Kualanamu	
35	Pengembangan Bandara Adi Sumarmo Solo	
36	Pengembangan Pelabuhan Wanci	
37	Pengembangan Pelabuhan Benoa	
38	Pengembangan Bandara Lombok	
39	Pengembangan Pelabuhan Labuan Bajo (Terminal Multipurpose)	
40	Pengembangan Bandara HAS Hanandjoedin	
41	Pengembangan Bandara Ngurah Rai*	

No.	Proyek Prioritas	MP
42	Pengembangan Bandara Marinda (Waisai)**	
43	Pengembangan Pelabuhan Sorong***	
44	Pengembangan Bandara Mutiara	MP03: 9 Kawasan Industri di luar Jawa dan 31 *smelter*
45	Pengembangan Bandara Babo	
46	Pembangunan KA Barang Kalimantan (Gunung Mas-Katingan)	
47	Pembangunan Bandara Weda	
48	Rekonstruksi Pelabuhan Pantoloan	
49	Pengembangan Bandara Bersujud (Batulicin)	
50	Pembangunan Bandara Ketapang Baru/Kayong Utara	
51	Pembangunan KA Barang Kalimantan (Puruk Cahu-Bangkuang-Batanjung)	
52	Pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulupandan	
53	Pengembangan Bandara Tanjung Harapan****	
54	Pengembangan Bandara Rendani**	
55	Pengembangan Pelabuhan Belawan/Kuala Tanjung***	
56	Pengembangan Pelabuhan Bau-Bau	MP08: Pembangunan Wilayah Batam – Bintan
57	Pengembangan KI Bintan Aerospace	
58	Pengembangan Pelabuhan Anggrek	
59	Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar	
60	Pengembangan sistem angkutan umum perkotaan Banjarmasin berbasis jalan	MP09: Pengembangan Wilayah Metropolitan
61	Pengembangan Pelabuhan Sanur, Bali	
62	Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Denpasar berbasis jalan	
63	Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Palembang berbasis jalan	

No.	Proyek Prioritas	MP
64	Pembangunan Infrastruktur Transportasi Perkeretaapian di IKN	MP10: Ibu Kota Negara (IKN)
65	Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut di IKN	
66	Pembangunan Infrastruktur Transportasi Darat di IKN	
67	Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Transportasi IKN	
68	Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Tanjung Selor berbasis jalan	MP11: Pengembangan Kota Baru
69	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Sorong berbasis jalan	
70	Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Sofifi berbasis jalan yang dikembangkan	
71	Pengembangan Bandara Domine Eduard Osok**	
72	Pembangunan Bandara Wasior Baru	MP12: Wilayah Adat Papua
73	Pembangunan Bandara Manokwari Selatan	
74	Pengembangan Bandara Tiom	
75	Pembangunan Bandara Anggi	
76	Pembangunan KA Ekspres Jakarta-Semarang	MP20: KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta – Semarang dan Jakarta – Bandung)
77	Lanjutan Pembangunan KA Cepat Jakarta-Bandung (KCIC) (KPBU)	
78	Pembangunan Jalur KA Makassar - Pare Pare	MP21: Kereta Api Makassar – Pare Pare
79	Pengembangan Pelabuhan Makassar	MP22: Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu
80	Pengembangan Pelabuhan Bitung	
81	Pengembangan Pelabuhan Kijing	
82	Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok	
83	Pengembangan Pelabuhan Tanjung	

No.	Proyek Prioritas	MP
	Perak	
84	Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Medan Berbasis Jalan	MP23: Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan
85	Pengembangan Terminal Type A Pondok Cabe	
86	KA Outer Jabodetabek	
87	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Logistik Perkotaan di Jabodetabek	
88	Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Jakarta Berbasis Jalan	
89	Pengembangan Inland Waterways sebagai Bagian Pengembangan Sistem Logistik Perkotaan Jabodetabek	
90	Pengembangan Sistem Pengendalian Lalu Lintas Modern (termasuk ERP) di Jabodetabek	
91	Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Jakarta Berbasis Rel	
92	Pembangunan Jalur Ganda dan elektrifikasi KA Kiaracondong - Cicalengka	
93	Pengembangan /Peningkatan Jalur KA Komuter (Medan-Binjai-Besitang)	
94	Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Medan Berbasis Rel	
95	Pengembangan Sistem BRT sebagai Feeder Transportasi Umum Jabodetabek yang ramah lingkungan	
96	Pengembangan integrasi simpul transportasi Jabodetabek	
97	Perkeretaapian Jabodetabek	
98	Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Surabaya Berbasis Jalan	
99	Pengembangan Angkutan Umum Massal	

No.	Proyek Prioritas	MP
	Perkotaaan Makassar Berbasis Rel	
100	Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Semarang Berbasis Jalan	
101	Pembangunan Terminal Type A Jatijajar	
102	Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Makassar Berbasis Jalan	
103	Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Surabaya Berbasis Rel	
104	Pengembangan KA Komuter Surabaya Gerbang Kertasusila	
105	*Elevated Loopline*	
106	Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Semarang Berbasis Rel	
107	Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Bandung Berbasis Rel	
108	Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaaan Bandung Berbasis Jalan	
109	Pengembangan Bandara Nop Goliath	MP29: Jembatan Udara 37 Rute di Papua
110	Penyediaan Subsidi perintis penumpang, Kargo dan BBM	
111	Pengembangan Bandara Ilaga	
112	Pengembangan Bandara Korowai Batu	
113	Pengembangan Bandara Elelim	
114	Pengembangan Bandara Korupun	
115	Pengembangan Bandara Magellum	
116	Pengembangan Bandara Mulia	
117	Pengembangan Bandara Oksibil	
118	Pengembangan Bandara Tanah Merah	
119	Pengembangan Bandara Wamena	
120	Pengembangan Bandara Mozes Kilangin	

* *Proyek Prioritas ini juga mendukung MP09*

(Sumber: Perpres No 18 Tahun 2020)

** *Proyek Prioritas ini juga mendukung MP12*

*** *Proyek Prioritas ini juga mendukung MP22*

**** *Proyek Prioritas ini juga mendukung MP11*

B. *Major Project* Kewilayahan

- penyelesaian Kawasan Pariwisata: Danau Toba, Borobudur dan sekitarnya, Lombok, Labuan Bajo, Bromo – Tengger – Semeru, Wakatobi, Likupang, dan Revitalisasi Bali;
- pemindahan Ibu Kota Negara;
- integrasi pembangunan wilayah Batam – Bintan;
- pengembangan Wilayah Metropolitan Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar;
- pemulihan Pasca Bencana Daerah Terdampak Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Banten;
- pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Paloh-Aruk, Nunukan, Atambua, Kefamenanu, Jayapura, Merauke;
- Pengembangan Kota Baru Sofifi, Sorong, Tanjung Selor, Maja.

3.1.6. *Highlight* Program Prioritas Berdasarkan Kepulauan 2020-2024

Selain Major Project, terdapat *highlight* program prioritas infrastruktur pada tiap wilayah Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Berikut adalah *highlight* program prioritas infrastruktur yang berkaitan dengan Kementerian Perhubungan.

A. *Highlight* program prioritas infrastruktur Pulau Sumatera

1. Pembangunan Pelabuhan *Hub* Belawan/Kuala Tanjung sebagai bagian dari 7 pelabuhan *hub Integrated Port Network*;
2. Pengembangan Angkutan Umum Massal di Metropolitan Medan dalam rangka mengurangi kemacetan perkotaan;
3. Bandara Baru: Bukit Malintang, dan Labuan Batu dalam rangka mendukung daerah terluar dan perbatasan dan sebagai bagian dari 21 bandara baru 2020 – 2024;
4. KA Trans Sumatera dalam rangka mendukung angkutan logistik di Pulau Sumatera.

B. *Highlight* program prioritas infrastruktur Pulau Kalimantan

1. Pembangunan Pelabuhan *Hub* Kijing/Pontianak sebagai bagian dari 7 pelabuhan *hub Integrated Port Network*.;
2. Bandara Baru di Singkawang, Ketapang Baru/Kayong Utara, dan Murung Raya dalam rangka mendukung pariwisata, bagian dari 21 bandara baru 2020 – 2024;

3. KA Regional Kalimantan dalam rangka mendukung Ibu Kota Negara dan mendukung angkutan barang.

C. *Highlight* program prioritas infrastruktur Pulau Jawa – Bali

1. Bandara Baru: Bali Utara, Kediri, dan Sukabumi, Wirasaba, Ngloram, dan Noto Hadinegoro dalam rangka mendukung pariwisata dan industri, bagian dari 21 bandara baru 2020 – 2024;
2. Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan pada metropolitan Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Denpasar.
3. Pelabuhan *Hub* Tanjung Priok dan Tanjung Perak sebagai bagian dari 7 pelabuhan *Integrated Port Network*;
4. Pengembangan Pelabuhan Sanur dalam rangka mendukung pariwisata;
5. Pembangunan KA Kecepatan Tinggi Jakarta - Bandung dan KA Berkecepatan Lebih Tinggi Jakarta – Surabaya Phase I (Jakarta – Semarang) dalam rangka mendukung mobilitas penumpang antar kota metropolitan.

D. *Highlight* program prioritas infrastruktur Pulau Sulawesi

1. Pembangunan Pelabuhan *Hub* Makassar sebagai bagian dari 7 pelabuhan *hub Integrated Port Network*;
2. Pengembangan Angkutan Umum Massal di Metropolitan Makassar dalam rangka mengurangi kemacetan perkotaan;
3. Bandara Baru: Banggai Laut, Pahuwato, Bolaang Mongondow, Pohuwato dan Buntu Kunik dalam rangka mendukung pariwisata dan konektivitas wilayah dan sebagai bagian dari 21 bandara baru 2020 – 2024;
4. KA Angkutan Barang Sulawesi (KA Makassar – Pare pare) dalam rangka mendukung angkutan barang.

E. *Highlight* program prioritas infrastruktur Pulau Nusa Tenggara

Pelabuhan

1. Pengembangan Pelabuhan Labuan Bajo dalam rangka mendukung KSPN Labuan Bajo;
2. Pengembangan Pelabuhan Larantuka, Kedindi Reo, Waikelo, Gili Trawangan, Baa, Raijua dan Kilo dalam rangka mendukung konektivitas wilayah kepulauan;
3. Pengembangan Pelabuhan Seba dan Pelabuhan Wini dalam rangka embuka isolasi dan mendorong pertumbuhan kawasan perbatasan dan tertinggal.

Bandara

1. Pengembangan Bandara Labuhan Bajo dalam rangka mendukung KSPN Labuan Bajo;
2. Pengembangan BIL/Bandara Z.A. Majid dalam rangka mendukung KSPN Mandalika dan konektivitas utama wilayah NTB;
3. Pengembangan Bandara A.A. Bere Tallo/Atambua dalam rangka mendukung aksesibilitas kawasan perbatasan dan tertinggal.

F. *Highlight* program prioritas infrastruktur Pulau Maluku

1. Pengembangan Program Tol Laut Bersubsidi sebagai penyediaan Rute Tol Laut Bersubsidi dan Pengembangan Pelabuhan Mendukung Konektivitas Tol Laut serta dalam rangka pendukung Pengembangan Daerah 3T yang meliputi: Ambon, Dobo, Moa, Saumlaki, Gorom, Tobelo, Soasio Molu, Geser, Namlea, Gane Dalam dan Tual

   Bandara Baru: Weda dan Gorom dalam rangka mendukung KI Teluk Weda dan konektivitas wilayah dan bagian dari 21 bandara baru 2020 – 2024.

G. *Highlight* program prioritas infrastruktur Pulau Papua

1. Pengembangan Program Tol Laut Bersubsidi dalam rangka penyediaan Rute Tol Laut Bersubsidi dan Pengembangan Pelabuhan Mendukung Konektivitas Tol Laut: Moor (Mappi), Kaimana, Merauke, Serui;
2. Pengembangan Jembatan Udara yaitu Pengembangan Bandara Mendukung Jembatan Udara: Wamena; Koroway Batu; Magellum; Tanah Merah; Nop Goliath - Dekai; Oksibil; Mulia; Elelim; Korupun; Ilaga; Mozes Kilangin;
3. Bandara Baru Siboru Fak-Fak, Nabire Baru, Wasior Baru, Sobaham, Manggelum, Manokwari Selatan sebagai bagian dari 21 bandara baru 2020 – 2024);
4. Pembangunan Pelabuhan *Hub* Sorong dalam rangka mendukung KEK Sorong dan sebagai bagian dari 7 pelabuhan *hub Integrated Port Network*;
5. Pengembangan Bandara Babo dalam rangka mendukung KI Teluk Bintuni;
6. Pelabuhan Penyeberangan Klademak, Batanta & Salawati dalam rangka mendukung KSPN Raja Ampat.

3.1.7. Program Nasional (PN), Program Prioritas (PP), dan Kegiatan Prioritas (KP) RPJMN 2020 – 2024

Berdasarkan ketujuh agenda pembangunan, agenda yang memiliki keterkaitan erat dan utama dengan Kementerian Perhubungan adalah agenda kelima (Program Nasional 5) yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung

Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Meskipun demikian, Kementerian Perhubungan juga tetap dapat mendukung agenda-agenda lainnya terutama melalui dukungan sektor transportasi. Program Nasional (PN) akan diturunkan menjadi Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP). Program prioritas dan kegiatan prioritas yang berkaitan dengan Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut. **Gambar 3.5** menunjukkan Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas pada Program Nasional 5 dan **Tabel 3.2** menunjukkan penyandingan antara target RPJMN dengan target Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2020 – 2024.

Program Prioritas 1: Infrastruktur Pelayanan Dasar

- Kegiatan Prioritas 4: Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Program Prioritas 2: Infrastruktur Ekonomi

- Kegiatan Prioritas 2: Konektivitas Transportasi Kereta Api
- Kegiatan Prioritas 3: Konektivitas Transportasi Laut
- Kegiatan Prioritas 4: Konektivitas Transportasi Udara
- Kegiatan Prioritas 5: Konektivitas Transportasi Darat

Program Prioritas 3: Infrastruktur Perkotaan

- Kegiatan Prioritas 1: Sistem Angkutan Masal Umum Perkotaan

Gambar 3. 5. Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas RPJMN 2020 – 2024 pada PN 5

(sumber: Bappenas, 2020)

Tabel 3. 2. Persandingan Target RPJMN dengan Renstra Kemenhub 2020 – 2024

SASARAN	INDIKATOR	TARGET RPJMN		TARGET RENSTRA KEMENHUB		PROYEK PRIORITAS	KETERANGAN
		BASE LINE 2019	TARGET 2024	*BASELINE* 2019	TARGET 2024		
PROGRAM NASIONAL (PN) 5 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar							
Meningkatnya konektivitas nasional	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau	2,3 jam per 100 km	1,9 jam per 100 km	2,3 jam per 100 km	1,9 jam per 100 km		Dalam mencapai target 2024 perlu adanya kontribusi kementerian PUPR (infrastruktur jalan) serta Korlantas (manajemen

SASARAN	INDIKATOR	TARGET RPJMN		TARGET RENSTRA KEMENHUB		PROYEK PRIORITAS	KETERANGAN
		BASE LINE 2019	TARGET 2024	*BASELINE* 2019	TARGET 2024		
							rekayasa lalu lintas jalan) di Jalan Nasional
	Porsi rute pelayaran kapal peti kemas yang membentuk *loop*	23%	27%	23%	27%		
PROGRAM PRIORITAS (PP) 1: Infrastruktur Pelayanan Dasar							
Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap *baseline* 2010 (persen)	53%	65%	53%	65%		5 pilar RUN: 1. Manajemen Keselamatan Jalan (Bappenas) 2. Jalan yang berkeselamatan (PUPR) 3. Kendaraan yang berkeselamatan (Kemenhub) 4. Perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan (POLRI)

SASARAN	INDIKATOR	TARGET RPJMN		TARGET RENSTRA KEMENHUB		PROYEK PRIORITAS	KETERANGAN
		BASE LINE 2019	TARGET 2024	*BASELINE* 2019	TARGET 2024		
							5. Penanganan pra dan pasca kecelakaan (Kemenkes)
	Penurunan rasio fatalitas kecelakaan AKAP dan Angkutan Perintis per 10.000 armada terhadap *baseline* 2019 (persen)			-	11%		• Target 2024 merupakan persentase penurunan rasio fatalitas kecelakaan AKAP dan Bus Perintis per 10.000 armada per tahun 2024 terhadap *baseline* 2019 • *Baseline* 2019 sebesar 6,63 per 10.000 armada (14 korban MD per 21.128 armada/kartu pengawasan yang diterbitkan)

SASARAN	INDIKATOR	TARGET RPJMN		TARGET RENSTRA KEMENHUB		PROYEK PRIORITAS	KETERANGAN
		BASE LINE 2019	TARGET 2024	*BASELINE* 2019	TARGET 2024		
KEGIATAN PRIORITAS (KP) 4: Keselamatan dan Keamanan Transportasi							
Menurunnya rasio kecelakaan transportasi	Rasio kejadian kecelakaan pelayaran per 10.000 pelayaran (rasio)	1,27	1,19	Darat: 0,089 (1,27)[7] Laut: 1,27	Darat: 0,083 (0,84)[7] Laut: 0,85	• Pembangunan SBNP • Pembangunan Kapal Patroli • Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai • Pembangunan Alat Penimbangan/Jembatan timbang pada Lintas Penyeberangan • Pemasangan VTS	• Target merupakan bagian dari target penurunan rasio kecelakaan pelayaran yang ditetapkan oleh Ditjen Hubla • Tahun 2018, terdapat 5 kejadian kecelakaan pada Kapal SDP dengan 392 kapal yang beroperasi (1,27 kecelakaan per 100 kapal operasi) • Perlu adanya penyesuaian IKU dengan

SASARAN	INDIKATOR	TARGET RPJMN		TARGET RENSTRA KEMENHUB		PROYEK PRIORITAS	KETERANGAN
		BASE LINE 2019	TARGET 2024	*BASELINE* 2019	TARGET 2024		
							pembanding jumlah pelayaran selama 1 (tahun) • *) Merupakan total target rasio kejadian kecelakaan pelayaran per 10.000 pelayaran (Ditjen Hubla)
	Rasio kejadian kecelakaan penerbangan per 1 juta penerbangan (rasio)	70	50	2,45	2,15	• Pemenuhan sarana, prasarana, dan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi • Pembinaan dan pendidikan SDM keselamatan dan keamanan transportasi	

SASARAN	INDIKATOR	TARGET RPJMN		TARGET RENSTRA KEMENHUB		PROYEK PRIORITAS	KETERANGAN
		BASE LINE 2019	TARGET 2024	*BASELINE* 2019	TARGET 2024		
	Rasio kejadian kecelakaan KA per 1 juta km perjalanan KA (rasio)	0,26	0.23	0,15	0,24		
	Jumlah lulusan Diklat Vokasi Pendidikan Perhubungan Darat (orang)		5.660	5.371	5.660		
	Jumlah Lulusan Diklat Teknis Pendidikan Perhubungan Darat (orang)		9.574	14.053	9.574		
	Diklat Pemberdayaan		29.071	40.030	29.071		

SASARAN	INDIKATOR	TARGET RPJMN		TARGET RENSTRA KEMENHUB		PROYEK PRIORITAS	KETERANGAN
		BASE LINE 2019	TARGET 2024	*BASELINE* 2019	TARGET 2024		
	Masyarakat Keselamatan *Safety and Security* SDM Transportasi Darat (orang)						
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Darat (paket)		6	6	6		
	Jumlah Diklat Vokasi Pendidikan Perhubungan Laut		18.822	14.780	18.822		
	Jumlah Lulusan Diklat Teknis Pendidikan Perhubunga		179.545	249.165	179.570		

SASARAN	INDIKATOR	TARGET RPJMN		TARGET RENSTRA KEMENHUB		PROYEK PRIORITAS	KETERANGAN
		BASE LINE 2019	TARGET 2024	*BASELINE* 2019	TARGET 2024		
	n Laut (orang)						
	Jumlah lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat Keselamatan *Safety and Security* SDM Transportasi Laut (orang)		73.942	112.653	73.942		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Laut (paket)		12	-	12		
	Jumlah Lulusan Diklat Vokasi Pendidikan Perhubunga		5.883	4.490	5.883		

SASARAN	INDIKATOR	TARGET RPJMN		TARGET RENSTRA KEMENHUB		PROYEK PRIORITAS	KETERANGAN
		BASE LINE 2019	TARGET 2024	*BASELINE* 2019	TARGET 2024		
	n Udara (orang)						
	Diklat Teknis Pendidikan Perhubungan Udara		8.303	10.626	8.303		
	Diklat Pemberdayaan Masyarakat Keselamatan *Safety and Security* SDM Transportasi Udara		8.452	17.548	8.452		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Udara (paket)		8	-	8		

Keterangan: Juga mendukung PN 3: Meningkatkan SDM Berkualitas Dan Berdaya Saing, PP : Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing, KP : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri

SASARAN	INDIKATOR	TARGET RPJMN		TARGET RENSTRA KEMENHUB		PROYEK PRIORITAS	KETERANGAN
		BASE LINE 2019	TARGET 2024	*BASELINE* 2019	TARGET 2024		
PROGRAM NASIONAL (PN) 5 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar							
PROGRAM PRIORITAS (PP) 2 : INFRASTRUKTUR EKONOMI							
	Jumlah pelabuhan *hub* yang mencapai standar sesuai kriteria Integrated Port Network (IPN)	1	7	1	7		7 Pelabuhan Hub yang mencapai standar sesuai kriteria Integrated Port Network (IPN): 1. Belawan/Kualatanjung; 2. Tanjung Perak; 3. Tanjung Priok; 4. Makassar; 5. Pontianak/Kijing; 6. Bitung; 7. Sorong.
	On Time Performance (OTP) penerbangan	-	90%	-	90%		• Adanya parameter perhitungan yang berbeda untuk mengukur target besaran OTP untuk periode tahun

SASARAN	INDIKATOR	TARGET RPJMN		TARGET RENSTRA KEMENHUB		PROYEK PRIORITAS	KETERANGAN
		BASE LINE 2019	TARGET 2024	*BASELINE* 2019	TARGET 2024		
							2020 – 2024 dari 7 maskapai penerbangan nasional yang melayani rute niaga berjadwal dalam negeri sangat padat dan padat di seluruh bandara • Berdasarkan standar IATA, minimum OTP berkategori "BAIK" adalah 80%

SASARAN	INDIKATOR	TARGET RPJMN	TARGET RENSTRA KEMENHUB	PROYEK PRIORITAS	KETERANGAN

		BASE LINE 2019	TARGET 2024	*BASELINE* 2019	TARGET 2024		
KEGIATAN PRIORITAS (KP) 2 : KONEKTIVITAS KERETA API							
• Terwujudnya konektivitas perkeretaapian • Meningkatnya integrasi multimoda dengan KA	Panjang jalur KA yang beroperasi (km's)	6.164 km's	7.451 km's	6.221k m's	7301 km's	• Pembangunan Jalur KA Regional (angkutan Barang dan penumpang)	• Capaian hingga 2014: 5.434 km'sp • Capaian 2015 – 2019: 967 km'sp • Target 2020 – 2024: 1.422 km'sp
	Persentase kondisi jalur KA sesuai standar Track Quality Index kategori 1 dan 2 (persen)	81,5 %	94%	81,5%	94%	• Pembangunan Jalur KA Regional (angkutan barang dan penumpang) • Pemeliharaan, perawatan, dan pengoperasian prasarana dan fasilitas perkeretaapian (IMO) • Penyediaan PSO dan perintis KA • Pembangun	
	Jumlah simpul transportasi yang terakses Kereta Api (bandara dan pelabuhan) (lokasi)	-	8 lokasi	-	16 lokasi		

SASARAN	INDIKATOR	TARGET RPJMN		TARGET RENSTRA KEMENHUB		PROYEK PRIORITAS	KETERANGAN
		BASE LINE 2019	TARGET 2024	*BASELINE* 2019	TARGET 2024		
						an KA Akses Bandara: Kertajati, Juanda, Adi Sumarmo, Kulonprogo, Raden Inten II. • Pembangunan Akses Pelabuhan : Kamal, Patimban, Panarukan, JIIPE Manyar, Tegal, Probolinggo, Garongkong, Tanjung Mas, Tarahan, Teluk Lamong, Tanjung Perak	

SASARAN	INDIKATOR	TARGET RPJMN		TARGET RENSTRA KEMENHUB		PROYEK PRIORITAS	KETERANGAN
		BASE LINE 2019	TARGET 2024	*BASELINE* 2019	TARGET 2024		
KEGIATAN PRIORITAS (KP) 3 : KONEKTIVITAS LAUT							
Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan transportasi laut	Jumlah pelabuhan utama yang mencapai standar pelayanan (lokasi)	14 pelabuhan	28 pelabuhan	28 pelabuhan	28 pelabuhan	• Pengembangan pelabuhan utama Tol Laut • Pembangunan pelabuhan *cruise* • Penyelenggaraan subsidi Tol Laut • Pengadaan sarana dan prasarana transportasi laut • Pengembangan teknologi informasi pelayaran • Pengadaan *crane* darat/mobile *crane*	Pengembangan pelabuhan utama tol laut 28 pelabuhan merupakan pelabuhan utama yang terdapat dalam rencana induk pelabuhan nasional (RIPN) KP 432 Tahun 2017
	Jumlah trayek subsidi tol laut (trayek)	14 trayek	25 trayek	21 trayek	25 trayek		

SASARAN	INDIKATOR	TARGET RPJMN		TARGET RENSTRA KEMENHUB		PROYEK PRIORITAS	KETERANGAN
		BASE LINE 2019	TARGET 2024	*BASELINE* 2019	TARGET 2024		
						untuk pelabuhan yang disinggahi kapal tol laut	

SASARAN	INDIKATOR	TARGET RPJMN		TARGET RENSTRA KEMENHUB		PROYEK PRIORITAS	KETERANGAN
		BASE LINE 2019	TARGET 2024	*BASELINE* 2019	TARGET 2024		
KEGIATAN PRIORITAS (KP) 4 : KONEKTIVITAS UDARA							
• Meningkatnya konektivitas dan pelayanan transportasi udara • Meningkatnya kapasita	Jumlah rute jembatan udara (Rute)	35	43	40	41	• Jembatan udara Papua	• Target tahun 2019 adalah 40 rute terdiri dari 39 rute kargo perintis dan 1 rute subsidi kargo. • Target rute jembatan udara sampai tahun 2024 adalah 41 Rute, terdiri

SASARAN	INDIKATOR	TARGET RPJMN		TARGET RENSTRA KEMENHUB		PROYEK PRIORITAS	KETERANGAN
		BASE LINE 2019	TARGET 2024	*BASELINE* 2019	TARGET 2024		
s sarana dan prasarana transportasi udara							dari 39 rute kargo perintis dan 2 rute subsidi kargo (35 rute khusus untuk jembatan udara Papua)
	Jumlah bandara baru yang dibangun (lokasi)	15*) tahun 2015 – 2019	21**) tahun 2020 – 2024	15*	9**	• Pembangunan bandara baru • Pengembangan bandara mendukung kawasan prioritas	Target pembangunan 9 bandara baru adalah bandara baru yang selesai dibangun dan siap operasi di tahun 2020 – 2024 (Bukit Malintang, Bolaang Mangondow, Pahuwato, Sobaham, Singkawang – Kalbar, Ngloram – Cepu, Nabire Baru, Siboru, Banggai Laut)

SASARAN	INDIKATOR	TARGET RPJMN		TARGET RENSTRA KEMENHUB		PROYEK PRIORITAS	KETERANGAN
		BASE LINE 2019	TARGET 2024	*BASELINE* 2019	TARGET 2024		
	Jumlah bandara hub primer yang ditingkatkan kapasitasnya (10 lokasi)	8 lokasi	10 lokasi	9 lokasi	7 lokasi	• Pengembangan bandara *hub* primer: 7	• Sesuai PM 166 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional: Jumlah bandara pengumpul *hub* primer eksisting 2019 berjumlah 7 bandara (Soekarno Hatta, Kualanamu, Sultan Hasanudin, Kulon Progo, SAM. Sulaiman, Ngurah Rai, Juanda). • Untuk peningkatan kapasitas sarana dan prasarana bandar udara

SASARAN	INDIKATOR	TARGET RPJMN		TARGET RENSTRA KEMENHUB		PROYEK PRIORITAS	KETERANGAN
		BASE LINE 2019	TARGET 2024	*BASELINE* 2019	TARGET 2024		
							sampai tahun 2024 berjumlah 7 bandara (tidak termasuk Bandara Adi Sutjipto karena secara bertahap penerbangan akan dipindahkan ke YIA/Kulonprogo, Bandara Halim Perdana Kusuma tidak bisa dikembangkan lagi karena keterbatasan lahan)
KEGIATAN PRIORITAS (KP) 5 : KONEKTIVITAS DARAT							
• Terwujudnya konektivitas	Jumlah layanan lintas *long distance ferry*	2 lintas	3 lintas	2 lintas	2 lintas	• Subsidi lintas penyeberangan LDF • Pemba	• Belum ada usulan penetapan lintas penyeberangan

SASARAN	INDIKATOR	TARGET RPJMN		TARGET RENSTRA KEMENHUB		PROYEK PRIORITAS	KETERANGAN
		BASE LINE 2019	TARGET 2024	*BASELINE* 2019	TARGET 2024		
darat yang andal • Terwujudnya aksesibilitas darat	Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun (lokasi)	24 Lokasi	36 Lokasi	24 Lokasi	36 Lokasi	ngunan pelabuhan Penyeberangan	LDF baru • Dalam Pembahasan RITN (yang masih dalam proses), ada usulan lintas penyeberangan LDF pada wilayah Kalimantan • Target 2020 – 2024 adalah pembangunan 36 Pelabuhan Penyeberangan baru
PROGRAM PRIORITAS (PP) 3 : INFRASTRUKTUR PERKOTAAN							
Meningkatnya layanan angkutan umum	Jumlah kota metropolitan dengan sistem	1 kota metropolitan	6 kota metropolitan	1 kota metropolitan	6 kota metropolitan		• 6 kota Metropolitan (Jakarta, Surabaya, Medan,

SASARAN	INDIKATOR	TARGET RPJMN		TARGET RENSTRA KEMENHUB		PROYEK PRIORITAS	KETERANGAN
		BASELINE 2019	TARGET 2024	*BASELINE* 2019	TARGET 2024		
massal di 6 (enam) kota metropolitan	angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan						Bandung, Makassar dan Semarang) • Transportasi perkotaan diantaranya: LRT, MRT, Tram • Target tidak harus berupa konstruksi, dapat dimulai dari dokumen perencanaan (OBC KPBU)

KEGIATAN PRIORITAS (KP) 1 : SISTEM ANGKUTAN UMUM MASSAL PERKOTAAN							
Meningkatnya layanan angkutan umum massal perkotaan* *) Di luar 6 kota metropolitan (Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Makassar, Semarang)	Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal yang dibangun dan dikembangkan*	1 kota	20 kota	1 kota	15 kota	• Angkutan Umum Massal Perkotaan di 5 Kota Metropolitan (Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Makassar) • Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan • Penyediaan subsidi angkutan umum massal perkotaan	• Penyediaan subsidi angkutan umum massal perkotaan • Pembangunan Fasilitas Integrasi Moda • Pembangunan ATCS ***Baseline* 2019:** DKI Jakarta **Target 2020 – 2024:** 15 kota (5 Kota Metropolitan + 10 kota lainnya)

(sumber: Perpres No 18 Tahun 2020)

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Untuk mencapai prioritas pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, sektor transportasi memiliki prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. perkuatan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan serta Keselamatan Transportasi;
2. perkuatan Jalur Logistik Utama;
3. dukungan Infrastruktur untuk Sektor Unggulan Industri dan Pariwisata; dan
4. pengembangan Transportasi Perkotaan

didasarkan pada prioritas pembangunan di sektor transportasi tersebut, maka kebijakan pembangunan transportasi nasional harus diarahkan agar dapat merefleksikan dan mengimplementasikan prioritas pembangunan transportasi. Arah kebijakan pengembangan dan pembangunan transportasi nasional antara lain:

1. **Membuka Aksesibilitas untuk Mencapai Pemerataan Ekonomi** untuk Perkuatan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan serta Keselamatan Transportasi;
2. **Merajut Konektivitas Antar Wilayah** sebagai upaya Perkuatan Jalur Logistik Utama;
3. **Dukungan Aksesibilitas dalam Pengembangan Kawasan Industri, Pariwisata dan KEK Luar Jawa** sebagai wujud Dukungan Infrastruktur untuk Sektor Unggulan Industri dan Pariwisata; dan
4. **Peningkatan Kualitas Mobilitas Perkotaan** guna mewujudkan Pengembangan Transportasi Perkotaan.

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan pada tahun 2020 – 2024 merupakan metode pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 2020-2024 serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional maupun Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan 2020 – 2024.

Arah Kebijakan dan Strategi memuat langkah yang berupa program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang teridentifikasi dan mendesak untuk segera dilaksanakan guna mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. Program indikatif tersebut harus mendukung sasaran RPJMN 2020 – 2024 sesuai dengan bidang terkait.

Sebagai bagian dari sektor transportasi, maka sesuai dengan arah kebijakan pengembangan dan pembangunan transportasi nasional sebagaimana disebut sebelumnya, maka Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan 2020 – 2024 sebagaimana tertuang pada **Tabel 3.3.** di bawah ini.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan diperoleh dengan mendasarkan pada potensi yang ada, yang diharapkan akan dapat mengatasi permasalahan yang ada di sektor perhubungan.

Tabel 3. 3. Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2020 – 2024

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
Terwujudnya Konektivitas Nasional	1. Optimalisasi simpul transportasi eksisting 2. Pembangunan simpul transportasi baru 3. Pembagian komoditi barang ekspor-impor pada pelabuhan di seluruh Indonesia 4. Reaktivasi jalur moda transportasi 5. Sinergitas angkutan umum dengan moda transportasi lokal 6. Penguatan distribusi barang di seluruh wilayah Indonesia 7. Penguatan jaringan layanan moda eksisting	1. Penguatan jaringan transportasi eksisting 2. Perluasan jaringan layanan transportasi 3. Penguatan transportasi antar moda dan multi moda 4. Pembangunan fasilitas alih moda di simpul transportasi 5. Penerapan Traffic Demand Management pada semua layanan transportasi 6. Optimalisasi rute layanan distribusi angkutan barang di seluruh wilayah Indonesia 7. Pembangunan pergudangan pada simpul utama transportasi 8. Peningkatan aksesibilitas menuju KEK, KSPN, dan PSN 9. Mengoptimalkan sinergi angkutan umum dengan moda transportasi lokal 10. Penempatan Pejabat Fungsional sesuai kebutuhan pembangunan dan

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
	terhadap simpul utama dan kawasan rawan bencana, perbatasan, terluar, dan terpencil. 8. Peningkatan aksesibilitas melalui perluasan jaringan layanan moda menuju simpul utama dan kawasan rawan bencana, perbatasan, terluar, dan terpencil 9. Mengoptimalkan sinergi angkutan umum dengan moda transportasi local 10. Pengembangan kelembagaan pengelolaan transportasi perkotaan di wilayah aglomerasi.	pengembangan simpul transportasi 11. Penyiapan kompetensi keahlian profesional pada jabatan fungsional pembangunan dan pengembangan serta pengoperasian simpul transportasi di seluruh wilayah Indonesia 12. Perumusan tindak lanjut pembangunan berkelanjutan setelah operasional simpul transportasi seluruh wilayah Indonesia 13. Mendorong pembentukan Badan Pengelola Transportasi Perkotaan 14. Kajian peraturan yang mendukung terwujudnya kegiatan multimoda 15. Mendorong peluang kerja sama dengan Badan Usaha/swasta untuk melaksanakan proyek potensial
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	1. Pengurangan waktu tunggu dan waktu perjalanan transportasi	1. Pengukuran tingkat kepuasan layanan pengguna jasa moda transportasi 2. Penyusunan instrumen untuk

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
	2. Optimalisasi SDM pelayanan sarana dan prasarana 3. Peningkatan pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi 4. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja OTP pada pelayanan moda transportasi 5. Penerapan pelayanan umum massal berbasis moda unggulan di daerah perkotaan 6. Penguatan skema pendanaan pengembangan sistem transportasi perkotaan 7. Mendukung kinerja logistik nasional	mengukur tingkat kepuasan layanan pengguna jasa transportasi 3. Penyusunan program pengembangan SDM pelaku jasa layanan transportasi untuk memenuhi harapan pengguna jasa transportasi sesuai standar pelayanan yang diberlakukan 4. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja pelayanan 5. Mengembangkan prototipe sistem informasi transportasi sebagai inovasi teknologi layanan yang mampu menyajikan kondisi *real time* OTP 6. Dukungan terhadap transportasi ramah lingkungan, gender, difabel, dan lansia 7. Peningkatan pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana 8. Evaluasi sistem dan peraturan yang telah ada untuk mencari akar permasalahan *delay* yang terjadi pada sistem layanan transportasi 9. Subsidi Pengembangan Transportasi Perkotaan (*Buy The Service*) 10. Standarisasi kinerja pada 7 pelabuhan utama (kedalaman,

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
		panjang dermaga, kinerja bongkar muat) 11. Pengembangan rute jaringan saling terhubung (*loop*) distribusi domestic 12. Pengembangan sistem informasi logistik (*e-logistic*) 13. Pengembangan angkutan multimoda dan antarmoda ke kawasan hinterland 14. Peremajaan kapal niaga dengan mengutamakan peran galangan kapal dalam negeri 15. Penguatan keterpaduan angkutan tol laut dengan moda lain (jembatan udara dan perintis darat)
Meningkatnya Keselamatan Transportasi	1. Penegakan hukum atas aturan yang diberlakukan 2. Pemanfaatan teknologi untuk penyusunan *database* kecelakaan darat, laut, udara dan perkeretaapian, KIR *online, travel data recording.* 3. Pengembangan aplikasi pengaduan pelayanan transportasi untuk	1. Penegakan hukum 2. Mengoptimalkan kegiatan peningkatan keselamatan dan keamanan 3. Pembatasan usia sarana prasarana transportasi 4. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Perhubungan 5. Peningkatan monitoring dan audit secara berkala kualitas sarana dan prasarana transportasi 6. Pemanfaatan teknologi keamanan dan keselamatan transportasi 7. Penyiapan SOP perbaikan fasilitas transportasi yang

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
	menunjang keamanan dan keselamatan transportasi 4. Kontrol kelengkapan keselamatan dan keamanan moda angkutan 5. Pembatasan usia kendaraan layanan moda angkutan umum 6. Penyediaan fasilitas ZoSS (Zona Selamat Sekolah) dan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) dan taman edukasi 7. Peningkatan pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan dan pengujian 8. Pengembangan sistem informasi terkait *security awareness* di setiap lokasi simpul utama transportasi 9. Pemenuhan SDM Keselamatan dan	mengalami gangguan 8. Edukasi keselamatan transportasi 9. Penyusunan dan penerapan SOP keamanan di setiap lokasi simpul utama transportasi 10. Peningkatan sertifikasi sarana dan prasarana kereta api 11. Perbaikan dan pengembangan SOP keselamatan untuk setiap moda

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
	Keamanan Transportasi Darat, KA, Laut, Udara	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum	1. Peningkatan kualitas formulasi kebijakan yang mampu merespon dengan cepat dinamika kondisi transportasi 2. Peningkatan pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang transportasi yang telah ditetapkan	1. Pengendalian kualitas formulasi kebijakan yang mampu merespon dengan cepat dinamika kondisi transportasi 2. Jangka waktu proses pengusulan kebijakan hingga menjadi Keputusan atau Peraturan Menteri Perhubungan 3. Pelaksanaan kebijakan bidang transportasi yang telah ditetapkan dalam Keputusan atau Peraturan Menteri Perhubungan 4. Peningkatan EST *(Environmentally Sustainable Transportation)* / transportasi berkelanjutan untuk setiap kota metropolitan dan kota besar 5. Efisiensi energi dan pemanfaatan energi ramah lingkungan Penyusunan SOP layanan transportasi ramah lingkungan
Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten	1. Pemenuhan kebutuhan SDM unggul yang *link and match* dengan kebutuhan	1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni; 2. Peningkatan *Link and Match* SDM Transportasi; 3. Penguatan SDM Transportasi

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
	industri dan pengembangan sarana prasarana transportasi; 2. Pembentukan SDM Yang Berkarakter Dan Berintegritas; 3. Peningkatan Relevansi dan Daya Saing Lembaga Diklat SDM Transportasi; 4. Optimalisasi peran kelembagaan (BPSDM Perhubungan) dalam pengembangan SDM transportasi.	Berbasis Wilayah dan Kemasyarakatan; 4. Peningkatan Pendidikan Agama, Karakter dan Budi Pekerti; 5. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-nilai Agama; 6. Peningkatan Pendidikan Kewarganegaraan dan Bela Negara; 7. Melakukan reformasi di sistem pendidikan dan pelatihan vokasi di sektor Transportasi yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi; 8. Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Penelitian (*Research & Development*); 9. Transformasi kelembagaan Balai/ UPT BPSDM Perhubungan menuju BLU/BHMN; 10. Peningkatan peran BPSDM Perhubungan dalam pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan SDM transportasi.
Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan	Pembangunan berkelanjutan yang menjamin keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan	1. Menghitung Nilai indeks berkelanjutan (*sustainability index*) pada sarana dan/atau prasarana transportasi sebagai acuan dan *feedback* bagi peningkatan kualitas sistem transportasi 2. Perumusan kebijakan adaptasi

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
	hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.	dan/atau mitigasi perubahan iklim di sektor transportasi serta pelaporan rencana aksi penurunan emisi GRK di sektor transportasi Melakukan Pemetaan Dan Intensifikasi Dokumen Lingkungan
Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian	Mengoptimalkan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap kinerja Kementerian Perhubungan	1. Melakukan reviu Renstra dan Renja Kemenhub secara kontinu 2. Melakukan Evaluasi Kemanfaatan Terhadap Rencana Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi 3. Pengembangan dan penyempurnaan untuk monitor capaian kinerja seluruh pegawai Kementerian Perhubungan 4. Pengembangan sistem e-monev untuk penilaian kinerja Kementerian Perhubungan 5. Mendorong peningkatan tindak lanjut terhadap rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Baik	1. Optimalisasi reformasi regulasi dalam pembentukan ataupun	1. Penertiban paket-paket deregulasi perijinan di lingkungan Kementerian Perhubungan 2. Peningkatan pemahaman dan

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
	pengaturan kembali tata kelembagaan di lingkungan Kementerian Perhubungan 2. Pemanfaatan teknologi dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas penegakan hukum secara konsisten 3. Penyempurnaan SOP layanan transportasi 4. Pembentukan ataupun pengaturan kembali tata kelembagaan di lingkungan Kementerian Perhubungan 5. Penguatan kelembagaan dalam rangka peningkatan peran Balai atau UPT 6. Deregulasi peraturan dan perijinan serta sinkronisasi regulasi antar	kesadaran pengguna dalam penerapan SOP layanan transportasi 3. Penggunaan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan transportasi baik komersil maupun non komersil 4. Pelaksanaan edukasi dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 5. Peningkatan pengelolaan / manajemen transportasi untuk mendukung *smart city* pada kota besar dan metropolitan Peraturan pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi
	Lembaga 7. Penilaian atas capaian maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian	

3.3 KERANGKA REGULASI

Untuk melaksanakan pengembangan dan pembangunan transportasi nasional yang diwujudkan melalui penguatan konektivitas nasional diperlukan beberapa aturan/kebijakan. Saat ini, aturan teknis untuk masing-masing sub sektor baik Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara maupun Perkeretaapian sudah dilegalisasikan dalam bentuk Undang-Undang, sedangkan peraturan yang mengintegrasikan layanan dari masing-masing moda tersebut, sampai dengan saat ini belum tersedia. Keberadaan Sistem Transportasi Nasional yang dilegalkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2005 hanya mengatur tentang tata cara penyusunan dan pengintegrasian layanan transportasi serta kebutuhan dukungan dari *stakeholders* yang diperlukan dalam membentuk suatu Sistem Transportasi Nasional.

Untuk mendukung amanat pembangunan nasional, yang memandatkan kepada Kementerian Perhubungan untuk mendukung aksesibilitas antar kawasan dan peningkatan pelayanan transportasi guna pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi antar wilayah, maka diperlukan suatu peraturan perundangan yang dapat mengintegrasikan layanan antar moda transportasi yang ada, termasuk di dalamnya penempatan simpul transportasi yang saling terintegrasi dan berhubungan sehingga akan memudahkan bagi calon pengguna jasa transportasi dalam melakukan mobilitas.

Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan suatu Rencana Induk Transportasi Nasional yang dilegalkan sekurangnya melalui suatu Peraturan Pemerintah, sehingga layanan masing-masing moda transportasi dapat terintegrasi baik secara sistem maupun dalam implementasi pelaksanaannya.

Selain Rencana Induk Transportasi Nasional, beberapa perundangan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan layanan transportasi yang lebih baik, antara lain:

1. Penguatan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) berupa Naskah Akademik RUU Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk Penyediaan Infrastruktur.
2. Dukungan terhadap Optimalisasi Layanan Angkutan Perkotaan untuk mendukung mobilitas orang berupa Peraturan Presiden untuk Pengembangan Transportasi Perkotaan.
3. Dukungan pelaksanaan Tol Laut berupa Peraturan Presiden tentang Integrasi Pengelolaan Pelabuhan *Hub* Tol Laut.
4. Keselamatan Jalan berupa Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan dan Rancangan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan (RAK) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia memiliki posisi strategis dalam kerangka negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Lebih lanjut dinyatakan pada Pasal 17 ayat (1), (2), (3), dan (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, menteri-menteri diangkat oleh presiden, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, serta pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Penguatan mengenai keberadaan kementerian dalam Negara Republik Indonesia diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara yang merupakan pengganti dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara, dimana untuk Kementerian Perhubungan termasuk dalam jajaran kementerian kelompok II yang merupakan Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan untuk organisasi Kementerian Perhubungan sendiri, keberadaannya diperkuat dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan. Menindaklanjuti Peraturan Presiden tersebut, Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang diberlakukan sejak Desember 2018 merupakan penyempurnaan struktur organisasi Kementerian Perhubungan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Struktur organisasi Kementerian Perhubungan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 terdiri dari 9 (sembilan) unit Eselon 1.A, 4 (empat) Staf Ahli Menteri dan 3 (tiga) Pusat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018, struktur kelembagaan Kementerian Perhubungan dapat dilihat pada **Gambar 3.6.** berikut.

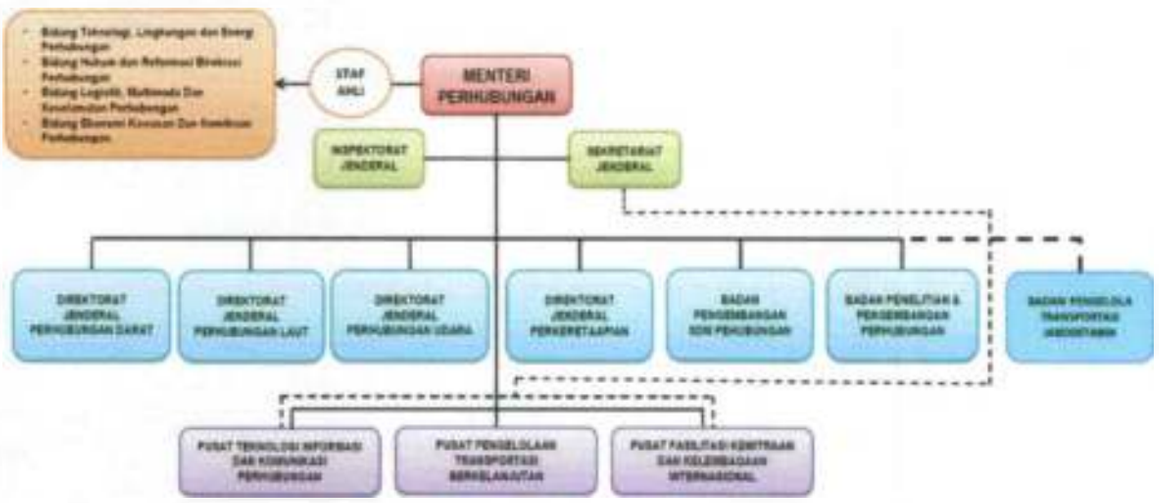

Gambar 3. 6. Struktur Organisasi Kementerian Perhubungan
(sumber: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018)

Pembentukan Badan Kebijakan Transportasi

Untuk mewujudkan kebijakan transportasi dalam mendukung pembangunan inklusif diperlukan penguatan kelembagaan dan kapasitas analisis serta kebijakan transportasi secara holistik dan terintegrasi melalui pembentukan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) yang menggantikan peran dari Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

Fungsi Strategis Badan Kebijakan Transportasi (BKT) dalam mewujudkan kebijakan transportasi dalam mendukung pembangunan inklusif adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Knowledge Hub.Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di dalam analisis dan penyusunan rekomendasi perumusan kebijakan transportasi serta kerjasama nasional dan internasional untuk analisis kebijakan transportasi;

2. Pelaksanaan analisis dan rekomendasi perumusan kebijakan transportasi yang berorientasi research based dan evidance based serta dukungan teknis analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan transportasi;
3. Pelaksanaan analisis dan rekomendasi perumusan Norma, Standard, Prosedur, Kriteria (NSPK) Di bidang transportasi;
4. Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi di bidang analisis perencanaan dan evaluasi sistem transportasi;
5. Pelaksanaan kerjasama nasional dan internasional di bidang analisis kebijakan transportasi;
6. Penyiapan kebutuhan peralatan, metode, data dan informasi penunjang kebijakan transportasi, dokumentasi, publikasi, standarisasi, fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual dan diseminasi hasil analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan transportasi;
7. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan transportasi serta kerjasama pengkajian transportasi internasional;
8. Pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Transportasi;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Melalui peran tersebut Kontribusi Badan Kebijakan Transportasi (BKT) adalah sebagai berikut:

1. *Government think-tank*, yaitu memberikan dukungan bagi pengambilan keputusan strategis dalam pembangunan perhubungan (*decision support system*), dan penugasan khusus dari Pimpinan;
2. Analisis dan pengembangan kebijakan arah pengembangan strategis dalam pembangunan perhubungan yang bersifat holistik-integratif (*cross-cutting issues*);
3. Analisis dan rekomendasi multi-perspektif bagi peningkatan konektivitas dan efektivitas transportasi bagi pembangunan berbasis THIS (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial);

Rekomendasi pengembangan bagi peningkatan kinerja dan nilai tambah publik dalam penyelenggaraan pelayanan perhubungan secara terintegrasi.

Pembentukan Badan Layanan Umum Nasional sebagai pengelola subsidi (Buy the Service) serta pengembangan Layanan Transportasi Perkotaan

- Dalam melaksanakan pengelolaan subsidi transportasi perkotaan serta pengembangan layanan, diperlukan suatu badan taktis yang bertindak sebagai perpanjangan Pemerintah (tingkatan stratejik) dalam mengelola layanan. Contoh PT. Transjakarta sebagai pengelola layanan transportasi perkotaan (sebelumnya berbentuk UPTD);

- Dalam menjalankan Program *Buy the Service* di tahun 2020, Ditjen Perhubungann Darat berkontrak dengan pihak ke-3 (Manajemen Pengelola) untuk menjadi perpanjangan tangan dalam mengelola layanan (operasional, *monitoring* dan evaluasi), namun Manajemen Pengelola memiliki keterbatasan dalam pengelolaan keuangan. Sebagai contoh PT. Transjakarta dapat bekerjasama dengan pihak ke-3 untuk memanfaatkan bus sebagai media iklan, pendapatan tersebut kemudian digunakan kembali untuk pengembangan layanan. Fleksibilitas pengelolaan keuangan oleh PT. Transjakarta memungkinkan beban subsidi layanan transportasi perkotaan dapat berkurang atau layanan dapat makin berkembang karena sumber pendapatan/pengurang subsidi bukan hanya dari tiket penumpang (*Fare Box*) namun juga sumber pendapatan lain (*non fare box*)
- Dengan demikian diperlukan suatu Badan Layanan Umum Nasional yang bisa menjalankann peran pengelolaan subsidi angkutan perkotaan serta pengembangan layanan. Badan Layanan Umum Nasional memungkinkan pendanaan bukan hanya dari APBN dan pengelolaan yang lebih profesional.
- Pemerintah Pusat dapat menjalankan peran pembinaan serta bimbingan teknis kepada Pemerintah Daerah dalam menyiapkan Rencana Mobilitas Perkotaan serta kelembagaan transportasi perkotaan.

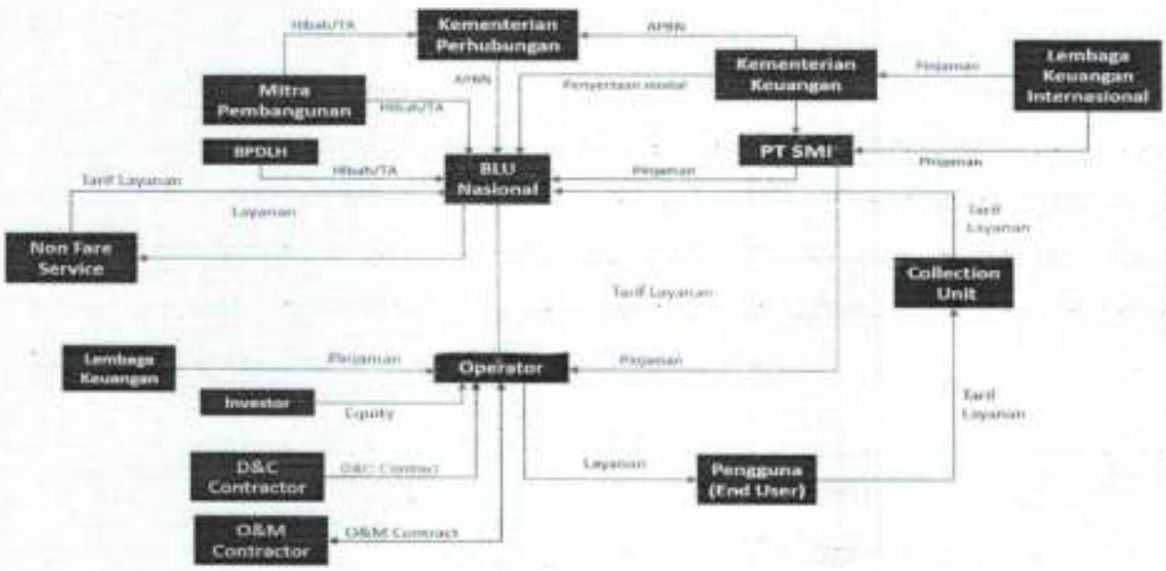

PENATAAN DAN PENINGKATAN STATUS UPT BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD)

Sejalan dengan impian mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang akan ditopang dengan mewujudkan Pemerintahan Kelas Dunia (*World Class Government*), Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga berkomitmen untuk melakukan perubahan-perubahan guna mewujudkan pemerintahan yang gesit (*agile*

government) melalui penataan kelembagaan, dimana hal ini sejalan dengan arahan Presiden untuk melakukan penyederhanaan birokrasi yang bertujuan untuk mempercepat pengambilan keputusan khususnya terkait proses perizinan dan pelayanan masyarakat diberbagai bidang. Dengan dialihkan/ disetarakannya jabatan Eselon III dan Eselon IV, maka fungsi dan peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) sangat strategis dan perlu diperkuat guna meningkatkan efektifitas, kinerja dan layanan dalam penyelenggaraan transportasi darat.

Dalam upaya meningkatkan peran transportasi sebagai urat nadi perekonomian dan menunjang kehidupan berbangsa dan bernegara, di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah dibentuk 25 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Maksud dibentuknya BPTD adalah untuk meningkatkan kesinambungan dan kualitas penyelenggaraan transportasi darat serta tata kelola hasil pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat di daerah, dimana konektifitas dan aksesibilitas yang handal dan terjangkau menjadi harapan yang selalu *up to date* seiring tuntutan masyarakat akan peningkatan kinerja dan layanan.

Kondisi saat ini, dengan kelembagaan BPTD yang ada harapan akan peningkatan kinerja dan layanan di bidang perhubungan darat belum sepenuhnya dapat direspon dengan cepat dan diwujudkan. Kondisi tersebut terjadi mengingat cakupan wilayah kerja BPTD yang luas tidak seimbang dengan jumlah sumber daya manusia yang ada, fasilitasi dan pemantauan penyelenggaraan perhubungan darat ekuivalen dengan jumlah Kabupaten/ Kota, panjang jalan Nasional, Terminal Tipe A, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dan pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (SDP) yang menjadi kewenangannya, tingkat koordinasi yang tidak setara dengan pemangku kepentingan lain di daerah, variasi beban kerja antar BPTD, serta beralihnya fungsi keselamatan pelayaran Sungai, Danau, dan Penyeberangan menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Untuk meningkatkan efektifitas, kinerja dan layanan di bidang perhubungan darat, maka perlu dilakukan penataan kelembagaan UPT di lingkungan

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, yaitu dengan menyesuaikan jumlah BPTD sesuai cakupan wilayah adminstratif Provinsi dimana sebagiannya ditingkatkan status eseloneringnya dengan perincian sebagai berikut :

a. 11 Balai Besar Pengelola Transportasi Darat (B2PTD) setingkat Eselon II.a, yaitu :

NO	UNIT	PROPINSI	TIPE
1	B2PTD WILAYAH II	Provinsi Sumatera Utara	A
2	B2PTD WILAYAH VIII	Provinsi Lampung	A
3	B2PTD WILAYAH IX	Provinsi Sumatera Selatan	A
4	B2PTD WILAYAH XI	Provinsi Banten	A
5	B2PTD WILAYAH XII	Provinsi Jawa Barat	A
6	B2PTD WILAYAH XIII	Provinsi Jawa Tengah	A
7	B2PTD WILAYAH XV	Provinsi Jawa Timur	A
8	B2PTD WILAYAH XVI	Provinsi Bali	A
9	B2PTD WILAYAH XXV	Provinsi Sulawesi Selatan	A
10	B2PTD WILAYAH XXII	Provinsi Kalimantan Timur	A
11	B2PTD WILAYAH XXX	Provinsi Maluku	B

b. 22 Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) setingkat Eselon III.a, yaitu :

NO	UNIT	PROPINSI	TIPE
1	BPTD WILAYAH I	Provinsi Aceh	A
2	BPTD WILAYAH III	Provinsi Sumatera Barat	A
3	BPTD WILAYAH IV	Provinsi Riau	A
4	BPTD WILAYAH V	Provinsi Kepulauan Riau	B
5	BPTD WILAYAH VI	Provinsi Jambi	A
6	BPTD WILAYAH VII	Provinsi Bengkulu	A
7	BPTD WILAYAH X	Provinsi Bangka Belitung	A
8	BPTD WILAYAH XIV	Provinsi D.I. Yogyakarta	A
9	BPTD WILAYAH XVII	Provinsi Nusa Tenggara Barat	A
10	BPTD WILAYAH XVIII	Provinsi Nusa Tenggara Timur	B
11	BPTD WILAYAH XIX	Provinsi Kalimantan Barat	A
12	BPTD WILAYAH XX	Provinsi Kalimantan Selatan	A
13	BPTD WILAYAH XXI	Provinsi Kalimantan Tengah	A
14	BPTD WILAYAH XXIII	Provinsi Kalimantan Utara	A
15	BPTD WILAYAH XXIV	Provinsi Sulawesi Tenggara	A
16	BPTD WILAYAH XXVI	Provinsi Sulawesi Barat	A

NO	UNIT	PROPINSI	TIPE
17	BPTD WILAYAH XXVII	Provinsi Sulawesi Tengah	A
18	BPTD WILAYAH XXVIII	Provinsi Gorontalo	A
19	BPTD WILAYAH XXIX	Provinsi Sulawesi Utara	B
20	BPTD WILAYAH XXXI	Provinsi Maluku Utara	B
21	BPTD WILAYAH XXXII	Provinsi Papua	A
22	BPTD WILAYAH XXXIII	Provinsi Papua Barat	A

Adapun struktur UPT untuk usulan tersebut diatas adalah:

a. UPT Tipe A (dominan moda jalan) :

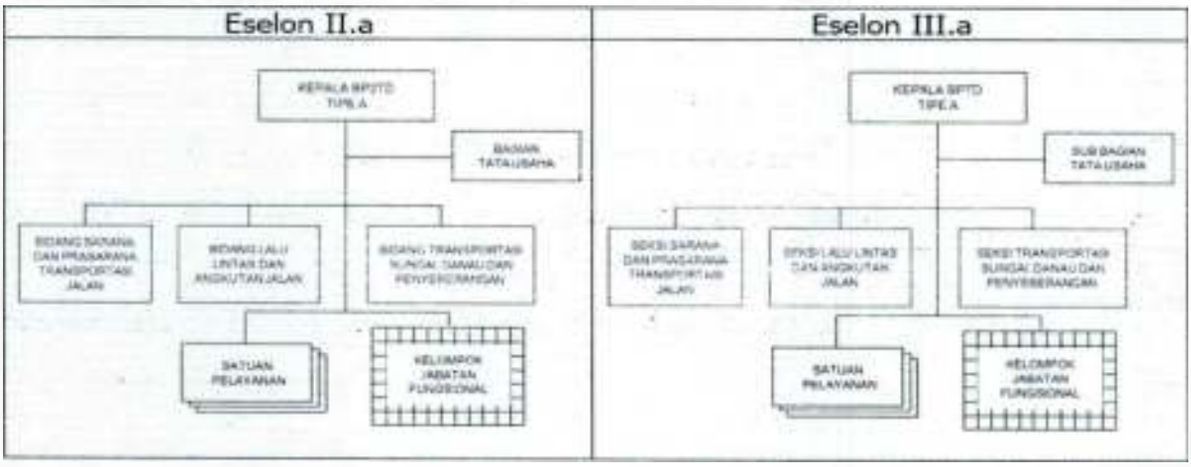

b. UPT Tipe B (dominan moda sungai, danau, dan penyeberangan):

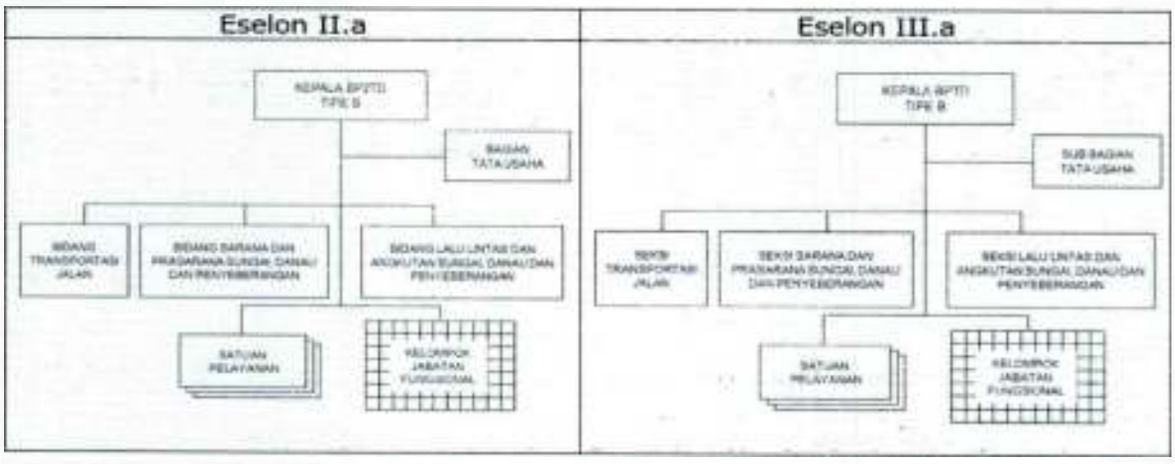

Ke depan, mengingat subtansi penyelenggaraan transportasi darat terdiri dari transportasi jalan dan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan, maka untuk meningkatkan efektifitas dan tata kelola penyelenggaraan transportasi darat agar fokus kedua substansi tersebut secara kelembagaan UPT dapat dipisah guna memenuhi harapan masyarakat akan kinerja dan layanan

transportasi yang selamat, aman, nyaman, memberikan nilai tambah, handal dan terjangkau.

Pembentukan Staf Ahli Bidang Keselamatan Dan Konektivitas Perhubungan

Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Perhubungan memiliki 2 Peraturan Presiden yaitu Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan dan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang BPTJ, oleh karena itu diusulkan untuk dijadikan satu Peraturan Presiden. Sedangkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal, di lingkungan Kementerian Perhubungan dibentuk Mahkamah Pelayaran, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi dibentuk Sekretariat Komite Nasional KNKT yang berkedudukan di bawah Kementerian Perhubungan.

Sesuai dengan Pasal 67 Ayat (4) Perpres 68/2019 tentang Organisasi Kementerian Negara diamanahkan bahwa Staf Ahli dapat dibentuk paling banyak 5 (lima) Staf Ahli dan tidak melebihi jumlah unsur pelaksana. Di lingkungan Kementerian Perhubungan terdapat 5 (lima) unsur pelaksana yaitu:

1. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
2. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
3. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
4. Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan
5. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

Oleh karena itu Kementerian Perhubungan mengusulkan 1 (satu) staf ahli lagi yaitu Staf Ahli Bidang Keselamatan dan Konektivitas Perhubungan, mengingat keselamatan transportasi menjadi hal yang disoroti oleh seluruh masyarakat Indonesia, dan keselamatan merupakan salah satu tujuan utama dari dilaksanakannya pelayanan transportasi selain kenyamanan.

Pembentukan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi

Kementerian Perhubungan merupakan Kementerian yang membina lebih dari 31.000 pegawai dimana sejumlah 2.574 pegawai memangku sebagai jabatan struktural dan lebih dari 18.000 ribu pegawai memangku sebagai jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Kementerian Perhubungan bertanggung jawab terhadap pembinaan 16 Jabatan fungsional yaitu:

1. Penguji Kendaraan Bermotor (terampil);
2. Pengawas Keselamatan Pelayaran (terampil);

3. Teknisi Penerbangan (terampil);
4. Inspektur Bandar Udara (ahli);
5. Inspektur Operasi Bandar Udara (ahli);
6. Inspektur Navigasi Penerbangan (ahli);
7. Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara (ahli);
8. Inspektur Keamanan Penerbangan (ahli);
9. Inspektur Angkutan Udara (ahli)
10. Teknisi Penerbangan (terampil);
11. Asisten Inspektur Bandar Udara (terampil);
12. Asisten Inspektur Operasi Pesawat Udara (terampil);
13. Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan (terampil);
14. Asisten Inspektur Kebandarudaraan Pesawat Udara (terampil);
15. Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan (terampil); dan
16. Asisten Inspektur Angkutan Udara (terampil).

Sehingga keseluruhan jumlah Jabatan Fungsional yang dibina oleh Kementerian Perhubungan adalah 19 Jabatan Fungsional.

Saat ini Kementerian Perhubungan telah menyampaikan 6 Naskah Akademis Pembentukan Jabatan Fungsional bidang Transportasi Perkeretaapian kepada Kementerian PAN RB, dan seiring dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi yang digulirkan pemerintah maka Kementerian Perhubungan saat ini sedang fokus menyusun jabatan fungsional yang dibutuhkan untuk mewadahi kegiatan yang ada di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Jumlah SDM pemangku Jabatan Fungsional yang ada sementara ini ada:

1.	Jabatan Fungisonal Kendaraan Bermotor	Pengujian =	21
2.	Jabatan Fungisonal Keselamatan Pelayaran	Pengawas =	891
3.	Jabatan Fungisonal Penerbangan	Teknisi =	518
	Jumlah	=	**1.430**

Jumlah dimaksud masih belum didata oleh pemangku jabatan fungsional yang ada di Dinas Perhubungan, jumlah dimaksud juga belum menampung penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional sejumlah 2.466 pegawai.

Mengingat banyaknya jumlah jabatan fungsional yang dibina oleh Kementerian Perhubungan maka diusulkan untuk membentuk 1 (satu) pusat yaitu Pusat

Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi sehingga Kementerian Perhubungan memiliki suatu unit yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jabatan fungsional transportasi bertanggung jawab dalam hal:

1. Pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan dan pertimbangan pengangkatan jabatan fungsional bidang transportasi;
2. Pelaksanaan sertifikasi, akreditasi dan pemberdayaan jabatan fungsional bidang transportasi;
3. Pelaksanaan penyiapan penilaian dan penetapan angka kredit serta uji kompetensi jabatan fungsional bidang transportasi yang menjadi kewenangan Instansi Pembina;
4. Perumusan kebijakan pengembangan kompetensi jabatan fungsional bidang transportasi; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pembentukan Pusat Pembiayaan Infrastruktur

Beberapa beban kerja yang dapat menjadi dasar atau justifikasi pengusulan pembentukan unit kerja eselon II yang khusus menangani kemitraan/investasi adalah sebagai berikut:

1. Pada saat ini terdapat proyek KPBU di lingkungan Kementerian Perhubungan yang sudah masuk ke dalam *project pipeline* yang antara lain:
   a. Cikarang – Bekasi Laut *Inland Waterways*;
   b. *New Bali Airport*;
   c. Manado – Bitung *Railway*;
   d. Patimban *Railway*;
   e. KA Lahat – Tarahan;
   f. KA Cibungur – Tanjungrasa;
   g. LRT Cibubur – Bogor;
   h. Pengembangan UPPKB di Pulau Jawa dan Sumatera;
   i. Pelabuhan penyeberangan di Papua Barat (Klademak, Batanta, Salawati);
   j. LRT Semarang;
   k. Pelabuhan Baubau;
   l. *Proving ground* BPLJSKB Bekasi;
   m. Pelabuhan Patimban;
   n. Singkawang *Airport*;
   o. Anggrek *Port*;

p. Komodo *Airport*;

q. Makassar Parepare *Railway*.

Kesceluruhan proyek KPBU dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja eselon III mulai dari kegiatan **perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan dan evaluasi seluruh kegiatan KPBU di Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan sub sektor.**

2. Nilai rupiah dan jenis pembangunan KPBU yang telah ditangani dan akan ditangani (tahun 2017-2022).

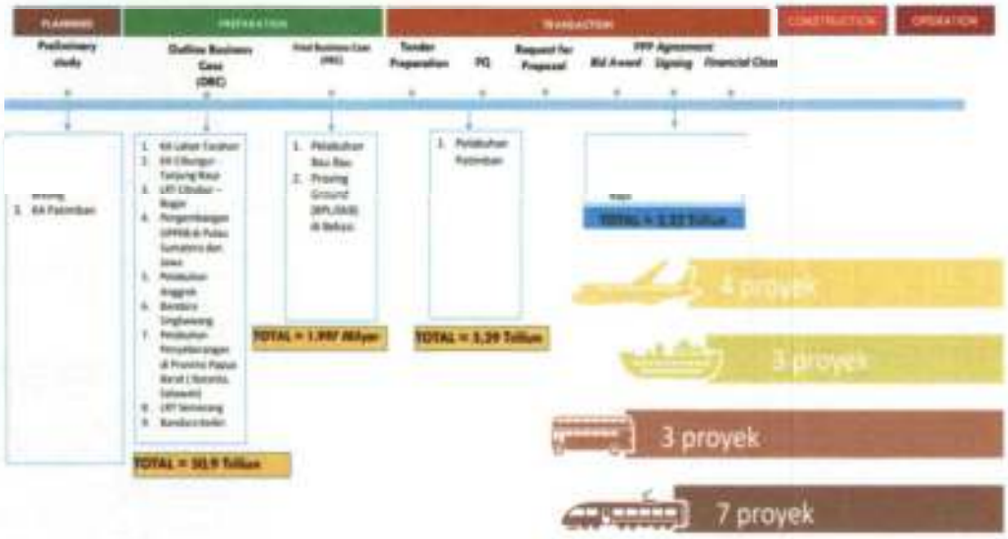

3. Matriks lain yang merupakan beban kerja Bidang Kemitraan/Investasi. Contoh perbandingan struktur organisasi yang mewadahi kegiatan kemitraan/investasi di Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR:

Mengacu pada beban kerja yang semakin tinggi, dan merupakan kegiatan strategi nasional serta merujuk pada prinsip penataan organisasi maka dapat diusulkan alternatif penataan unit kerja berupa Pembentukan Pusat

Pembiayaan Infrastruktur yang akan menangani isu-isu strategis terkait kerjasama kemitraaan dan investasi sebagai berikut:

Pusat Pembiayaan Infrastruktur akan berfungsi sebagai organisasi simpul KPBU di lingkungan Kementerian Perhubungan dapat setara dengan unit kerja eselon 2 dimana pada unit kerja ini akan didukung oleh 4 unit eselon 3 yang terdiri dari 1 Bagian TU dan 3 Bidang Substansi, pada bidang substansi pelaksanaan KPBU dibagi menjadi proyek per subsektor sebagai contoh bidang 1 (Bidang Pembiayaan Infrastruktur Darat dan Perkeretaapian) bertanggung jawab untuk pelaksanaan KPBU untuk sektor darat dan perkeretaapian dimana secara garis besar bidang ini akan melakukan pengawalan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Proyek KPBU darat dan perkeretaapian dari mulai tahap perencanaan dan penyiapan, serta bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kelayakan proyek kepada PJPK, mengawal pelaksanaan KPBU setelah ditandatanganinya perjanjian KPBU mulai dari tahap pra konstruksi, konstruksi dan operasi (selama masa konsesi 25 tahun atau 30 tahun).

Seiring dengan penataan unit kerja PFKKI, dengan mempertimbangkan prinsip organisasi serta batasan jumlah unit kerja pada Sekretariat Jenderal dipandang perlu dilakukan evaluasi/penataan organisasi eksisting di lingkungan Sekretariat Jenderal guna efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tusi organisasi Kementerian Perhubungan dapat berupa penajaman tusi, proporsional beban kerja, pengelompokan tusi yang serumpun serta juga perubahan nomenklatur pada Sekretariat Jenderal.

Penambahan 2 (Dua) Unit Kerja Baru (Direktorat Baru) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Saat ini beban tugas dan tanggung jawab di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang dilaksanakan oleh 5 (lima) direktorat sudah sangat tinggi, sehingga kondisi tersebut dapat mempengaruhi capaian kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang akan berdampak terhadap capaian bidang logistik dan angka penurunan kecelakaan kapal.

Adapun uraian beban kerja masing-masing direktorat meliputi:

1. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan, yang mana fungsi penyelenggaraan program tol laut (perintis, kapal rede, kapal ternak, kapal barang, pelayaran rakyat) dan logistik angkutan laut belum terwadahi dalam organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan;
2. Direktorat Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal laut, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, yang mana penyelenggaraan dukungan untuk pelabuhan wisata dan sistem informasi kepelabuhanan belum terwadahi dalam organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan;
3. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaiklautan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, perlindungan lingkungan maritim dan kepelautan, yang mana penyelenggaraan sistem informasi perkapalan dan kepelautan belum terwadahi dalam organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan;
4. Direktorat Kenavigasian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di

bidang kenavigasian, yang mana *e-piloting* belum terwadahi organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan;

5. Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib pelayaran di laut dan pantai, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana, yang mana penyelenggaraan sistem informasi KPLP belum terwadahi dalam organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan.

Kegiatan-kegiatan yang belum terwadahi dimaksud harus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan selama ini dilaksanakan secara *ad-hoc*, sedangkan di lain sisi beban kerja direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sudah maksimal. Oleh karena itu walaupun tugas dimaksud dapat dilaksanakan namun belum mencapai level yang maksimal.

Dengan justifikasi di atas, maka diusulkan penambahan unit kerja eselon 2 di lingkungan kantor pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang bertujuan untuk:

1. Peningkatan efektivitas fungsi pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan di bidang pelayaran, khususnya pengurangan angka kecelakaan transportasi laut;
2. Peningkatan indeks capaian biaya logistik, *logistic perform*, *dwelling time* dan pertumbuhan ekonomi;
3. Capaian target Proyek strategis nasional dan program baru (Program Destinasi Wisata Super Prioritas dan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut untuk rencana Ibu Kota Negara, pengembangan tol laut dan dukungan wisata) sesuai dengan waktu yang ditetapkan; dan
4. Peningkatan layanan kepada masyarakat pada umumnya dan di 3T pada khususnya.

Kebijakan di bidang pelayaran yang meliputi penyelenggaraan angkutan di perairan, kepelabuhanan, sarana dan prasarana pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, serta peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi sistem logistik nasional.

Pelaksanaan tugas dan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan, pembangunan dan pengoperasian sarana dan prasarana pelayaran yang saat ini dilaksanakan oleh seluruh direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, perlu untuk dilakukan penataan dengan:

1. Pemisahan tugas dan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan, pembangunan dan pengoperasian sarana dan prasarana pelayaran. Unsur pengembangan (perencanaan dan pembangunan) sarana dan prasarana pada masing-masing direktorat dialihkan pada unit kerja sarana dan prasarana.
2. Pengendalian dan pengawasan sistem logistik dan tarif, termasuk pelaksanaan kebijakan bidang sistem informasi pelayaran. Pelaksanaan tugas dan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan bidang tarif dan layanan di bidang pelayaran yang saat ini dilaksanakan secara terpisah oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Direktorat Kepelabuhanan akan disinergikan dalam unit kerja sistem logistik dan tarif pelayaran yang dalam pelaksanaan tugasnya akan menjadi pembina terhadap penyelenggaraan pelabuhan non komersil, pengoperasian angkutan perintis dan tol laut, penetapan usaha dan tarif jasa pelayaran, serta pengoperasian sistem informasi pelayaran.

Adapun usulan unit kerja baru akan menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana bidang pelayaran yang meliputi:
   a. Perencanaan dan pembangunan pelabuhan non komersil termasuk fasilitas pelabuhan;
   b. Perencanaan dan pembangunan angkutan laut berupa kapal perintis, tol laut, kapal rede, kapal pelayaran rakyat, dan kapal ternak;
   c. Perencanaan dan pembangunan kenavigasian berupa kapal kenavigasian, SBNP dan telekomunikasi pelayaran kapal negara, serta SBNP dan Telkompel;
   d. Perencanaan dan pembangunan Penunjang Pengawasan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran berupa kapal patroli, Peralatan SAR, Penanggulangan Pencemaran, Pemadaman Kebakaran, dan Senjata.
2. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria logistik dan informasi pelayaran yang meliputi:
   a. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pelaksanaan kebijakan bidang Usaha Jasa dan Tarif Angkutan di perairan;
   b. Penyusunan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan bidang kinerja dan tarif pelabuhan;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan pelabuhan;
d. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengoperasian angkutan laut;
e. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pelaksanaan kebijakan pengumpulan, penganalisisan, penyimpanan, pengajian serta penyebaran data dan informasi pelayaran yang terintegrasi (BIG Data Pelayaran).

Diharapkan dengan adanya pemisahan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan dengan fungsi pembangunan dan pengoperasian diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi.

Reorganisasi dan Peningkatan Status UPT Balai Teknik Perkeretaapian di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Seiring dengan pesatnya pembangunan daerah dan perkotaan, diharapkan pembangunan transportasi perkeretaapian nasional mampu menjadi tulang punggung angkutan barang dan angkutan penumpang perkotaan sehingga dapat menjadi salah satu penggerak utama perekonomian nasional. Penyelenggaraan transportasi perkeretaapian nasional yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya dapat meningkatkan efisiensi penyelenggaraan perekonomian nasional. Oleh karena itu, penyelenggaraan perkeretaapian nasional di masa depan harus mampu menjadi bagian penting dalam struktur perekonomian nasional.

Terkait dengan hal diatas maka dalam rangka pengembangan sistem perkeretaapian nasional dan amanah yang diemban oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, maka dibutuhkan reorganisasi atau menata ulang struktur organisasi dan peningkatan status UPT Balai Teknik Perkeretaapian. Konsep yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Reorganisasi Unit Kerja (Direktorat Baru) di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian. Pertimbangan kebutuhan penataan organisasi diantaranya karena :
   a. Faktor Internal

   Perubahan beban kerja, Perluasan wilayah kegiatan sehiggga terdapat potensi penerimaan negara yang belum tergali dan Pengembangan strategi yang dilakukan pimpinan

b. Faktor Eksternal

Adanya kebijakan pemerintah yang berimplikasi perlunya perubahan struktur, tugas dan fungsi organisasi. Kemudian adanya tuntutan stakeholder dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Dan yang terakhir dalam rangka adaptasi terhadap kemajuan teknologi.

c. Perubahan Lingkungan

Mitigasi bencana dan konflik, Kolaborasi layanan antara Pemda dan Badan Usaha, Modernisasi layanan, Komplemen Layanan, SDM Perkeretaapian, Kerjasama dan Konektivitas Regional, *Green Transport*.

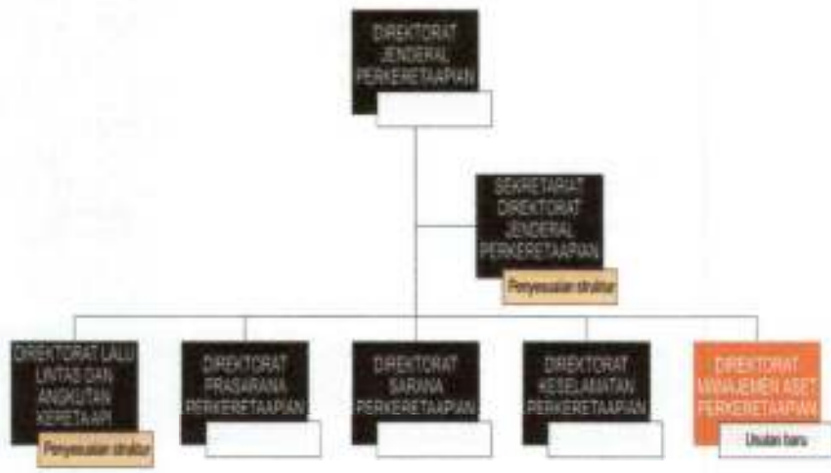

Unit kerja Eselon II baru yang diusulkan adalah Direktorat Manajemen Aset Perkeretaapian dengan tugas dan fungsinya adalah melaksanakan kebijakan dan NSPK serta bimbingan teknis dan supervisi di bidang manajemen aset perkeretaapian, inventarisasi dan pengawasan aset, pengadaan lahan, pengelolaan aset, penyelenggaraan kerjasama dan pengembangan usaha.

Hal-hal yang perlu disiapkan terkait adanya perubahan organisasi adalah dibutuhkan penyesuaian jumlah SDM, penyesuaian sarana dan prasarana fasilitas kerja serta memerlukan penyesuaian alokasi anggaran.

2. Peningkatan status UPT Balai Teknik Perkeretaapian menjadi Balai Besar Perkeretaapian.

Sebagai bagian dari upaya mengembangkan sistem perkeretaapian nasional di dalam struktur Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis yaitu Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) berdasar Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM No.63 Tahun 2014. Pertimbangan utama pembentukan UPT Balai Teknik Perkeretaapian adalah dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan peningkatan prasarana,

fasilitasi bimbingan dan pengawasan teknis, serta koordinasi pelaksanaan operasional penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan kereta api.

Kondisi saat ini, beberapa elemen dari sistem tersebut masih mengalami ketimpangan antara lain: jumlah SDM yang ada tidak memadai untuk bisa menangani seluruh tugas fungsi yang diamanatkan peraturan; pertambahan volume prasarana yang ditingkatkan belum bisa diimbangi dengan SDM yang memadai baik secara kuantitas, kualitas maupun kelembagaan untuk pengawasan, pemantauan penyelenggaraannya. Selain itu, tugas-tugas baru pemerintah terkait dengan percepatan Proyek Strategis Nasional dan rencana ke depan sebagaimana diamanatkan RIPNAS akan semakin sulit dipenuhi jika ketimpangan yang ada masih terjadi.

Usaha untuk mewujudkan target tersebut, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian, menyadari pentingnya penataan organisasi dan peningkatan status unit pelaksana teknis yang akan menjadi motor pelaksana dalam menata kembali penyelenggaraan perkeretaapian nasional secara menyeluruh sehingga tujuan penyelenggaraan perkeretaapian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian serta Peraturan Presiden nomor 58 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Proyek dapat terlaksana dengan baik. Usulan struktur organisasi Balai Besar Perkeretaapian terdiri dari:

a. Kepala Balai Besar
b. Bagian Umum
c. Bidang Lalu Lintas
d. Bidang Prasarana
e. Bidang Sarana dan Keselamatan Perkeretaapian
f. Kelompok Jabatan Fungsional

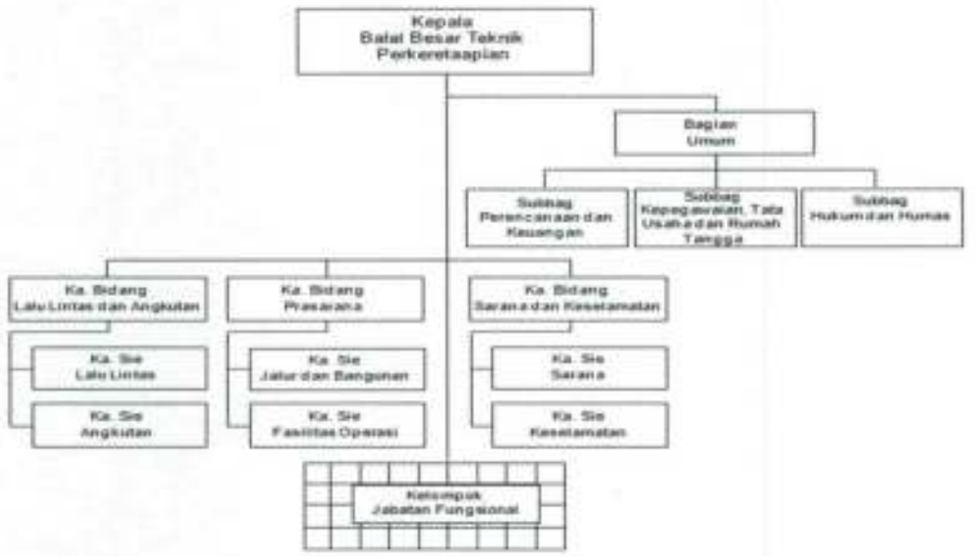

Balai Besar Teknik Perkeretaapian (BBTP) memiliki otoritas penuh dalam melaksanakan koordinasi program, pelaksanaan kerjasama dengan mitra strategis dan pengguna layanan, proses ini mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi BBTP. Rentang kendali organisasi Balai Besar Perkeretaapian dapat digambarkan sebagaimana gambar di bawah ini:

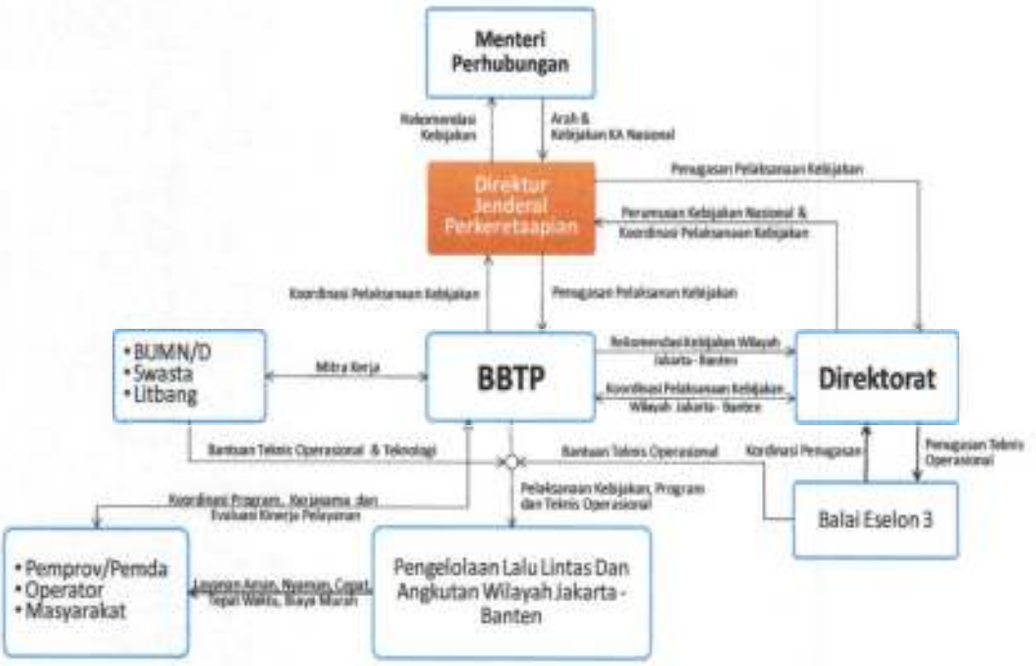

Penataan organisasi dengan meningkatkan status Balai Teknik Perkeretaapian menjadi Balai Besar Teknik Perkeretaapian memberi dampak yang optimal dalam pengelolaan perkeretapian wilayah kerja dikarenakan Balai Besar Teknik Perkeretaapian memiliki kewenangan tugas strategis dan tugas teknis operasional dan/atau teknis, sehingga pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, pembangunan, peningkatan, operasi dan pemeliharaan perkeretaapian wilayah kerja dapat berjalan lebih efisien dan efektif.

Berdasarkan adanya kewenangan tugas yang baru, maka jenis layanan yang diselenggarakan oleh Balai Besar Teknik Perkeretaapian sesuai dengan amanat tugas dan fungsinya mencakup banyak aspek, yaitu:

1. penyiapan perumusan rekomendasi teknis di bidang lalu lintas dan angkutan, prasarana, sarana dan keselamatan perkeretapaian;
2. penyusunan pola dan perencanaan konektivitas angkutan perkeretaapian dan integrasi antar moda;
3. pelaksanaan penetapan dan pemantauan kinerja dan standar pelayanan minimum angkutan penumpang dan barang;
4. pelaksanaan pemetaan dan analisis kebutuhan prasarana perkeretaapian;
5. pelaksanaan penetapan ijin perpotongan dan persinggungan jalur kereta api;
6. pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan perawatan prasarana perkeratapaian;
7. pelaksanaan pencegahan dan penindakan pelanggaran perundang-undangan di bidang perkeretaapian;
8. pelaksanaan analisis dan penanganan kecelakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. pengawasan penyelenggaraan di bidang prasarana, sarana, lalu lintas dan keselamatan perkeretaapian;
10. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan prasarana perkeretaapian;
11. pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, sumber daya manusia, ketatausahaan, pengadaan, dan rumah tangga.

Penambahan 2 (Dua) Unit Kerja Baru (Direktorat Baru) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Konsep reorganisasi pada Direktorat dilakukan dengan menata ulang pembagian tugas fungsi dan pembentukan Direktorat baru:

1. Direktorat yang ada, 5 (lima) Direktorat saat ini nomenklaturnya tetap hanya saja dilakukan penataan dan pembagian tugas dan fungsi dengan memperhatikan target-target organisasi dan adanya isu-isu baru, yaitu:
   a. Direktorat ke-1, Direktorat Angkutan Udara diperkuat dengan penataan tugas fungsi dan pembinaan penerbangan dari sisi ekonomi bisnis dan pengembangan angkutan;
   b. Direktorat ke-2, Direktorat Bandar Udara yang saat ini merupakan Direktorat dengan sebaran tugas fungsi yang luas dan heterogen,

dimulai dari pembinaan bidang keselamatan bandar udara, pembangunan dan pengembangan bandar udara, penyelenggaraan hingga pelayanan Bandar Udara. Direktorat ini akan dilakukan restrukturisasi dengan pemisahan-pemisahan fungsi yang menimbulkan *conflict of interest* terhadap keselamatan sehingga Direktorat Bandar Udara dapat berkonsentrasi dan fokus pada peningkatan keselamatan dan pelaksanaan ICAO Annex 14;

c. Direktorat ke-3, Direktorat Keamanan Penerbangan akan diperkuat dengan fungsi-fungsi dan isu-isu baru bidang keamanan seperti FAL, *Cyber Security*, sehingga Direktorat ini dapat fokus pada pelaksanaan Annex 9 dan 17. Sedangkan kelompok Penyidik Pegawai Negeri Sipil/Penyidik Penerbangan Sipil akan diperluas dengan bergabung pada kelompok Penegakan Hukum pada Direktorat ke-6;

d. Direktorat ke-4, Direktorat Navigasi Penerbangan akan diperkuat dengan tugas dan fungsi antisipasi penggunaan teknologi penerbangan seperti *drone*, dan Direktorat ini tetap difokuskan pada pelaksanaan Annex 1, 2, 3, 4, 5,10, 11,12, 15, PANS-ATM).

e. Direktorat ke-5, Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, akan dilakukan penataan minor dan fokus pada pelaksanaan Annex Annex 1, 6, 7, 8, 16, 18, PANS-OPS).

2. Pembentukan Direktorat ke-6, Direktorat Manajemen Keselamatan dan Penegakan Hukum, untuk menampung tugas fungsi yang berkaitan dengan:

   a. memenuhi kewajiban menerapkan *State Safety Program/Quality Manajemen System* (SSP/QMS) dan ICAO akan mengaudit Implementasi SSP secara terpisah, sehingga diperlukan unit organisasi untuk menangani program keselamatan secara konsisten, implementasi Annex 19;

   b. perlindungan lingkungan hidup sebagai pelaksanaan Annex 16 dan doc turunannya saat ini baru ditangani secara Ad-hoc, padahal Indonesia punya peran besar dalam program reduksi karbon dunia di bidang penerbangan, pengunaan *biofuel*, serta DJPU sebagai anggota *The Committee on Aviation Environmental Protection* (CAEP).

   c. penegakan Hukum Penerbangan sesuai amanat Undang-Undang No 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan perlu mendapat penguatan terstruktur dalam organisasi, karena merupakan rumpun besar pelaksanaan tugas fungsi yang menjamin berkurangnya tindakan

melawan hukum penerbangan dan saat ini sulit dimasukkan dalam kelompok struktur organisasi yang ada.

Beban kerja yang merupakan tugas dan fungsi pada Direktorat ini dikelompokkan dengan tugas-tugas utama yaitu: Penyusunan Program Keselamatan, Promosi Keselamatan, Penanganan Pelaporan Wajib dan Sukarela bidang Keselamatan (MOR/VRS), Analisis Data Keselamatan dan rekomendasi, Pencegahan Tindakan melawan ketentuan penerbangan, penindakan, sanksi, serta kegiatan perlindungan lingkungan.

3. Pembentukan Direktorat ke-7, Direktorat Pengembangan Fasilitas untuk menjawab pemisahan regulator-operator pada indikasi *conflict of interest* dengan keselamatan penerbangan, hal ini berhubungan dengan adanya temuan pada ICAO USOAP PQ 2021 dimana perlu dilakukan dengan memisahkan unsur-unsur *Development*, Ekonomi Bisnis, dan Pelayanan dari kelompok Bandar Udara agar Keselamatan BU sesuai Annex 14 dan dokumen turunannya dapat terlaksana secara baik/independen, pemisahan ini merupakan upaya pemisahan internal mengingat tugas-tugas pembangunan dan penyelenggaraan juga dimandatkan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

   Pembentukan Direktorat ini merupakan penguatan dan pemisahan unsur-unsur keselamatan dan unsur pembangunan/penyelenggaraan yang saat ini ditangani oleh Direktorat Bandar Udara ditambah dengan beban kerja baru, konsep pembagian beban kerja menjadi:

Unsur Keselamatan:	Unsur Pembangunan/
• Pegaturan	Penyelenggaraan:
• Pengendalian	• *Planning* (Perencanaan)
• Pengawasan (Audit, Inspeksi, Pengamatan, Pengujian, *Test*)	• Desain
Terhadap:	• Konstruksi
• Sistem/Prosedur Operasi Bandar Udara	• *Maintenance*
• Personel Bandar Udara	• Jasa Kebandarudaraan
• Prasarana	• Jasa Terkait
• Peralatan	• Kerjasama penyelenggaraan
	• Inovasi pendanaan pembangunan
	• Pelayanan publik
	• Tarif

Dalam perkembangannya, khususnya untuk menghadapi perubahan arah kebijakan pemerintahan yang baru, termasuk Arahan Presiden untuk

memangkas jabatan struktural pada tingkat eselon 3 dan eselon 4 maka perlu untuk melakukan penyempurnaan terhadap struktur organisasi Kementerian Perhubungan. Akan tetapi sampai dengan saat ini, keberadaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan belum dicabut, sehingga secara regulasi keberadaan struktur organisasi Kementerian Perhubungan masih mengacu pada Peraturan Presiden tersebut. Sesuai dengan Edaran MenPAN RB, dalam penyempurnaan/ penyederhanaan birokrasi perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan tugas dan fungsi jabatan dengan kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran atau pengguna barang/jasa;
2. Mempertimbangkan tugas dan fungsi jabatan yang berkaitan dengan kewenangan/otoritas, legalisasi, pengesahan, persetujuan dokumen atau kewenangan wilayah;
3. Kriteria dan syarat lain yang bersifat khusus, berdasarkan usulan masing-masing Kementerian/Lembaga kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Penyempurnaan tersebut diharapkan memperkuat fungsi, tugas dan peran Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan tugas dan tantangan lingkungan yang semakin berkembang.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Target kinerja Kementerian Perhubungan tahun 2020 – 2024 dalam rangka memperkuat konektivitas untuk layanan perhubungan yang berkualitas merupakan salah satu dari Prioritas Pembangunan Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan adalah serangkaian kebijakan yang dilaksanakan melalui Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Pada Pasal 1 dalam PP No. 17 Tahun 2017 disebutkan bahwa Prioritas Nasional adalah program/kegiatan/proyek untuk pencapaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan kebijakan Presiden lainnya. Sedangkan Proyek Prioritas adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau badan usaha yang memiliki sifat strategis dan jangka waktu tertentu untuk mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan.

Sejalan dengan Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian Perhubungan dalam lima tahun mendatang, Target Kinerja sebagai Prioritas Pembangunan yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat konektivitas untuk layanan perhubungan yang berkualitas ditunjukkan sebagaimana tabel Kinerja dan Pendanaan Kementerian Perhubungan.

Beberapa hal yang masih memerlukan percepatan antara lain pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi, pemerataan pelayanan dasar di seluruh Indonesia, dan pembangunan infrastruktur untuk menopang perkembangan berbagai kota seiring dengan urbanisasi di Indonesia. Untuk itu pada periode 2020-2024, pembangunan infrastruktur akan diprioritaskan pada tiga fokus utama, yaitu Infrastruktur untuk Pemerataan Pembangunan, Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi, dan Infrastruktur untuk Pembangunan Perkotaan. Ketiga fokus utama tersebut akan ditopang oleh pembangunan energi dan ketenagalistrikan, pelaksanaan transformasi digital. Selain itu, pembangunan infrastruktur 2020 – 2024 juga akan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa pengarusutamaan seperti ketangguhan menghadapi bencana, kesetaraan gender, tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan, serta modal sosial dan budaya.

Dalam rangka mendukung tiga fokus utama pembangunan tersebut, Kementerian Perhubungan terlibat dalam *Major Projects* tahun 2020 – 2024 dalam rangka mendukung pembangunan yang terfokus pada Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang meliputi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), dan Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Terluar (DTPK). Bentuk dukungan dari Kementerian Perhubungan ditunjukkan pada peta dari masing-masing subsektor di bawah ini.

Gambar 4. 1. Dukungan Direktorat Jenderal Transportasi Darat terhadap Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

Gambar 4. 2. Dukungan Direktorat Jenderal Transportasi Darat terhadap Kawasan Ekonomi Khusus

Gambar 4. 3. Dukungan Direktorat Jenderal Transportasi Darat terhadap Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan Terluar

Gambar 4. 4. Dukungan Direktorat Jenderal Transportasi Laut terhadap Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

Gambar 4. 5. Dukungan Direktorat Jenderal Transportasi Laut terhadap Kawasan Ekonomi Khusus

Gambar 4. 6. Dukungan Direktorat Jenderal Transportasi Laut terhadap Kawasan Industri

Gambar 4. 7. Dukungan Direktorat Jenderal Transportasi Laut terhadap Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan Terluar

Gambar 4. 8. Dukungan Direktorat Jenderal Transportasi Udara terhadap Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan Kawasan Ekonomi Khusus

Gambar 4. 9. Dukungan Direktorat Jenderal Transportasi Udara terhadap Daerah Terisolir, Perbatasan, dan Rawan Bencana

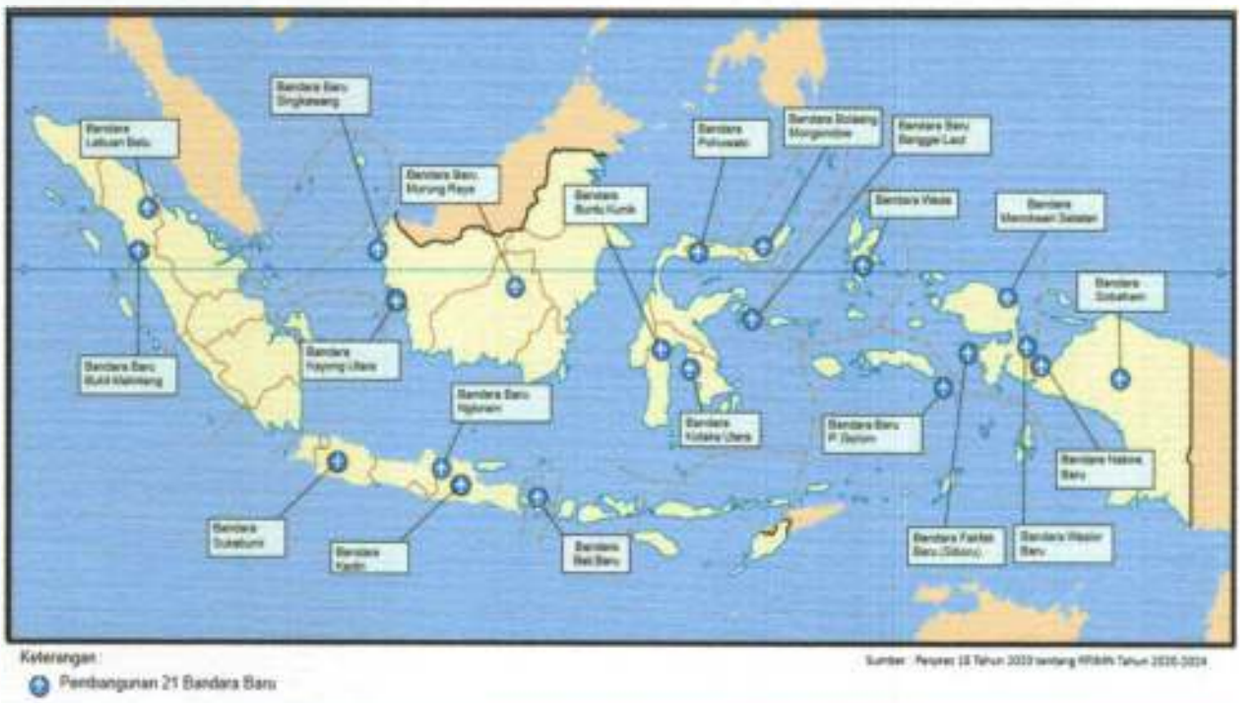

Gambar 4. 10. Pembangunan Bandar Udara Baru pada tahun 2020 – 2024

Gambar 4. 11. Indikasi Program Pembangunan Perkeretaapian 2020 – 2024 di Pulau Sumatera

Gambar 4. 12. Indikasi Program Pembangunan Perkeretaapian 2020 – 2024 di Pulau Jawa

Gambar 4. 13. Indikasi Program Pembangunan Perkeretaapian 2020 – 2024 di Pulau Kalimantan

Gambar 4. 14. Indikasi Program Pembangunan Perkeretaapian 2020 – 2024 di Pulau Sulawesi

Gambar 4. 15. Indikasi Program Pembangunan Perkeretaapian 2020 – 2024 di Pulau Papua

Gambar 4. 16. Peta Pengembangan Wilayah Sumatera (Sumber: Bappenas, 2020)

Gambar 4. 17. Peta Pengembangan Wilayah Kalimantan

(Sumber: Bappenas, 2020)

Gambar 4. 18. Peta Pengembangan Wilayah Jawa

(Sumber: Bappenas, 2020)

Gambar 4. 19. Peta Pengembangan Wilayah Sulawesi

(Sumber: Bappenas, 2020)

Gambar 4. 20. Peta Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara

(Sumber: Bappenas, 2020)

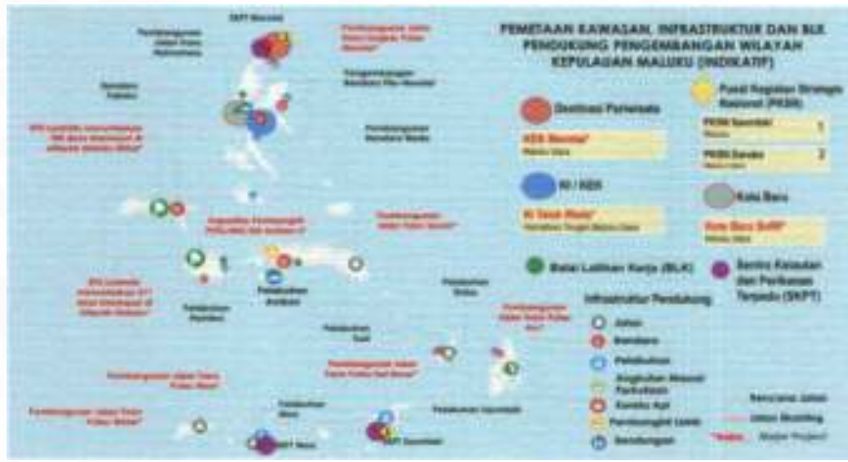

Gambar 4. 21. Peta Pengembangan Wilayah Maluku

(Sumber: Bappenas, 2020)

Gambar 4. 22. Peta Pengembangan Wilayah Papua

(Sumber: Bappenas, 2020)

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Aspek pendanaan merupakan salah satu kunci utama dalam tercapainya pembangunan infrastruktur karena memerlukan dana yang besar. Pembangunan infrastruktur transportasi membutuhkan pembiayaan yang terstruktur dalam periode yang panjang. Pemerintah dapat meningkatkan pembelanjaan sektor publik hingga mencapai 5% bahkan hingga 7% PDB. Pemerintah mempunyai kewajiban (*Public Sector Obligation*) membangun infrastruktur dasar yang layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara komersial. Kemitraan pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*) atau Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) diperlukan untuk mendukung proyek-proyek yang layak secara ekonomi namun kurang layak secara finansial.

Kerangka Pendanaan dilakukan melalui pengintegrasian sumber pendanaan, baik sumber pendanaan pemerintah maupun non-pemerintah, yang dimanfaatkan dalam rangka pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019, Kerangka Pendanaan dapat berasal dari integrasi pendanaan berikut:

Subsidi/Hibah – Kebijakan;

- BUMN - Proyek Prioritas;
- Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) - Proyek Prioritas dan
- Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) - Proyek prioritas.

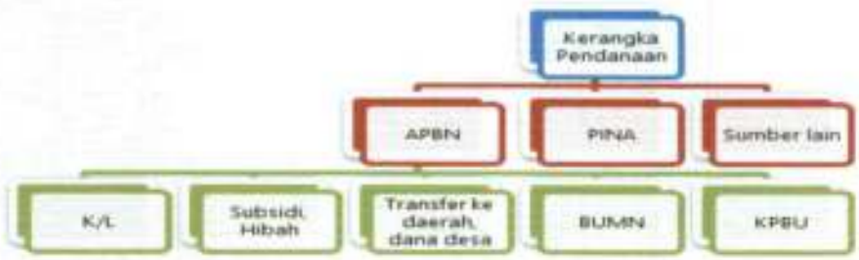

Gambar 4. 23. Kerangka Integrasi Sumber Pendanaan

Skenario pendanaan memberikan implikasi terhadap beberapa skenario di dalam peningkatan perjanjian dan pengembangan investasi dengan pihak swasta maupun BUMN. Mekanisme Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dan lembaga-lembaga internasional maupun negara lain akan menjadi salah satu komponen yang harus dibangun. Peningkatan hubungan bilateral antar negara akan berpotensi meningkatkan investasi, sedangkan peningkatan komponen pinjaman luar negeri berpotensi untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Berdasarkan skema pendanaan pembangunan infrastruktur yang diterbitkan Bappenas, mekanisme optimalisasi peran BUMN dan Swasta menjadi alternatif positif mengingat sumber pendanaan negara belum optimal memberikan upaya pemerataan pembangunan infrastruktur. Peran swasta dan BUMN menjadi sangat penting dalam memberikan *multiplier effect* terhadap peningkatan iklim investasi, serta percepatan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional maupun wilayah yang akan berdampak pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Skema kerangka pendanaan yang cocok digunakan pada suatu proyek tergantung pada karakteristik kelayakan proyek dari sisi ekonomi dan finansial. Hubungan skema kerangka pendanaan dan karakteristik kelayakan proyek ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

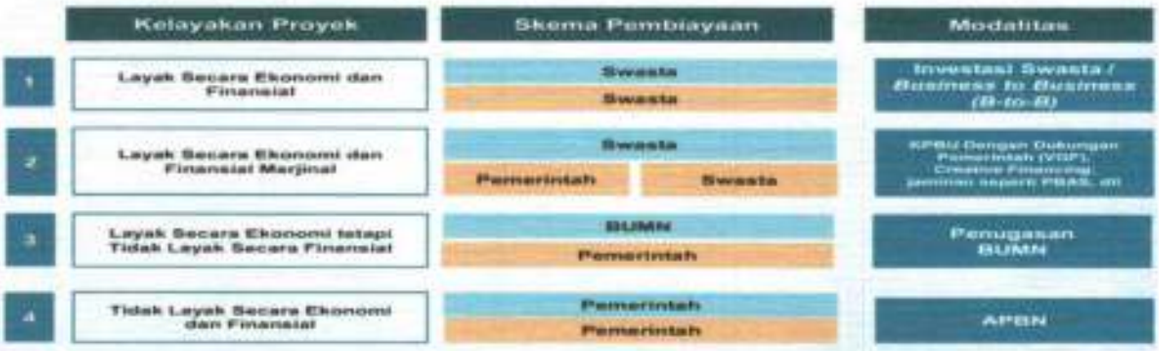

Gambar 4. 24. Hubungan Skema Pendanaan dan Kelayakan Proyek

Kerangka pembiayaan infrastruktur transportasi terdiri dari beberapa skema finansial kreatif yang didasarkan pendanaan APBN *on Budget*, DCM *off Budget*, dan *Off Budget Private Financing*. Pembiayaan transportasi sendiri dibagi dalam dua strategi, yaitu: (1) PPP Konvensional dan (2) Aliansi Strategis. Proyek-proyek yang layak secara ekonomi dan finansial dapat diserahkan sepenuhnya kepada pembiayaan sektor swasta (*Private Financing Initiatives*), termasuk proyek-proyek khusus yang bersifat *unsolicited* dan tidak memerlukan lelang kompetitif. Pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan SDM harus ditingkatkan untuk mempersiapkan, mengelola, dan mengawasi pelaksanaan proses dan prosedur PPP sesuai dengan prinsip-prinsip internasional. Pembiayaan proyek-proyek PPP berkaitan dengan pembiayaan proyek modern. Proyek skala besar membutuhkan *Equity Financing, Debt Financing* yang canggih, dan aliansi pendanaan global (konsorsium perbankan, *investment fund, bond,* dan rekayasa finansial lainnya).

Pada gambar di atas ditunjukkan hubungan skema kerangka pendanaan dan karakteristik kelayakan proyek. Terdapat empat kondisi kelayakan proyek

dimana pada setiap kondisi kelayakan tersebut memiliki skema pembiayaan dan modalitas yang berbeda antara satu kondisi dan kondisi yang lain.

Pada proyek yang memiliki kelayakan yang baik secara ekonomi dan finansial, skema pembiayaan dapat berasal dari pihak swasta murni dengan modalitas berupa investasi swasta/*Business to Business (B-to-B)*. Sedangkan pada proyek yang memiliki kelayakan ekonomi yang cukup namun memiliki manfaat yang besar, skema pembiayaan dapat berasal dari pihak pemerintah dan swasta dengan modalitas berupa Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Bentuk dukungan pemerintah dapat berupa *Viability Gap Funding* (VGF), *Availability Payment* (AP), *Creative Financing,* jaminan seperti PBAS, dan bentuk kerjasama yang lain selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Pada proyek yang tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomi, skema pendanaan dapat berasal dari kerjasama Pemerintah dan BUMN dengan modalitas berupa penugasan BUMN. Namun bila proyek tersebut tidak layak secara ekonomi maupun finansial, pemerintah harus hadir untuk tetap dilaksanakannya proyek tersebut dengan skema pendanaan yang berasal dari APBN. Pada kondisi tertentu, apabila diperlukan pemerintah dapat menerbitkan hutang sesuai nilai proyek tersebut.

Adapun penjabaran dari beberapa skema pendanaan proyek-proyek investasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Investasi Pemerintah.

Pemerintah dalam melakukan investasi pada proyek-proyek yang dianggap layak secara ekonomi dengan memanfaatkan dana APBN/APBD, DAU, DAK, dan Dana Daerah, Pinjaman Luar Negeri dan Kredit Ekspor.

a. Contoh pemanfaatan dana APBN/APBD adalah Subsidi dan *Public Service Obligation* (PSO). Subsidi adalah sumbangan atau pembayaran uang oleh pemerintah pada barang dan jasa untuk dapat menghasilkan produk barang/jasa yang lebih murah. Biasanya subsidi digunakan oleh pemerintah untuk melakukan proteksi terhadap produk-produk dalam negeri ataupun untuk memberikan peluang yang sama dalam mengakses fasilitas publik terhadap masyarakat yang marginal. *Public Service Obligation* (PSO) merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan layanan publik kepada masyarakat untuk jasa non komersial, yang dilakukan melalui BUMN atau swasta dan didukung oleh pemerintah melalui skema dukungan sistem *non-financial* atau *financial.*
b. Sumber pendanaan luar negeri, baik berupa Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), diupayakan tetap mengutamakan kedaulatan,

kepentingan nasional dan meningkatkan efektivitas pemanfaatannya sesuai prioritas pembangunan nasional. Pemanfaatan PHLN seharusnya dilihat bukan hanya dari sisi pendanaan tetapi juga sebagai sarana untuk bertukar informasi dan pembelajaran yang bertujuan untuk memperkuat dan menyempurnakan sistem perencanaan, anggaran, pengadaan, pemantauan dan evaluasi nasional serta kapasitas kelembagaan serta sumber daya manusia. Sumber pendanaan melalui hibah luar negeri dapat berasal dari mitra pembangunan internasional, baik negara maupun lembaga/badan internasional.

c. Sesuai arahan Presiden dalam rangka memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran, Pemerintah melakukan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang mencakup Redesain Program, Redesain Kegiatan dan Redesain *Output* (Keluaran) Kegiatan dalam bentuk Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output, yang berlaku efektif untuk Tahun Anggaran 2021 sedangkan untuk Tahun Anggaran 2020 masih menggunakan Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang eksisting. Tujuan dari Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran antara lain adalah:
   1) Mewujudkan implementasi kebijakan money follow program;
   2) Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
   3) Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga;
   4) Meningkatkan keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
   5) Menyusun informasi kinerja perencanaan dan penganggaran yang mudah dipahami oleh publik;
   6) Mendorong K/L menerapkan *value for money* dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
   7) Meningkatkan integrasi belanja antar Kementerian/Lembaga (level pemerintah pusat) dan belanja Pusat-Daerah;
   8) Mewujudkan keterkaitan dan keselarasan antara Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah;
   9) Mewujudkan keselarasan rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan "real work" (konkret)

   Sedangkan anfaat yang diharapkan dari Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran antara lain:

1) Terwujudnya penjabaran yang logis dan jelas antara Program, Kegiatan, *output* dan outcome;
2) Terwujudnya sinergi antar Unit Kerja Eselon I dalam mencapai sasaran pembangunan;
3) Terwujudnya efisiensi belanja Kementerian/Lembaga secara lebih optimal;
4) Terwujudnya integrasi teknologi dan system Informasi yang dapat mendukung sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional;
5) Terwujudnya penataan organisasi yang dapat mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja unit kerja di Kementerian/ Lembaga;
6) Terwujudnya keterkaitan dan keselarasan antara Visi dan Misi Presiden dengan Fokus Pembangunan, 7 (tujuh) Agenda Pembangunan serta Tugas dan Fungsi Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
7) Terciptanya rumusan nomenklatur Program, Kegiatan dan Keluaran (Output) yang mencerminkan "*real work* (*eye catching*)";
8) Terwujudnya efisiensi dengan tidak adanya *overlapping* antar Kegiatan dan *Output* Program.

Sesuai Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor: S-357/MK.02/2020; B.308/M.PPN/D.8/PP.04.03/2020 tanggal 8 Mei 2020 perihal Daftar Program Kementerian/Lembaga TA 2021, Kementerian Perhubungan yang semula memiliki 9 (Sembilan) Program disederhanakan menjadi 4 (empat) Program. Rincian Matrik semula-menjadi Restrukturisasi Program dan Kegiatan Kementerian Perhubungan ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 1 Matrik Semula-Menjadi Restrukturisasi program dan Kegiatan Kementerian Perhubungan

SEMULA					MENJADI					
No.	**UKE 1/ UKE 2**	**Kode**	**Program/ Kegiatan**	**Fungsi/ Sub-Fungsi**	**UKE 1/ UKE 2**	**Kode**	**Program/ Kegiatan**	**Koordinator Kegiatan**	**Fungsi/ Sub-Fungsi**	**Keterangan Perubahan**
	SEKRETARIAT JENDERAL									
1.	**Sekretariat Jenderal (Koord.)**	**022. WA**	**Program Dukungan Manajemen**		**Sekretariat Jenderal (Koord.)**	**022.WA**	**Program Dukungan Manajemen**			**TETAP**
	Biro Hukum	1932	Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Produk dan Pelayanan Hukum	Ekonomi/ Transportasi	Biro Hukum	xxxx	Legislasi dan Litigasi	**Biro Hukum**	Ekonomi/ Transportasi	BARU
	Biro Kepegawaian dan Organisasi	1933	Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian	Ekonomi/ Transportasi	Biro Kepegawaian dan Organisasi	xxxx	Pengelolaan Organisasi dan SDM	**Biro Kepegawaian dan Organisasi**	Ekonomi/ Transportasi	BARU
	Biro Keuangan	1934	Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perlengkapan di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Ekonomi/ Transportasi	Biro Keuangan	xxxx	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum	**Biro Perencanaan**	Ekonomi/ Transportasi	BARU
	Biro Perencanaan	1935	Penyusunan Dokumen Rencana, Program, Evaluasi serta Penetapan Kebijakan Pentarifan di Sektor Perhubungan	Ekonomi/ Transportasi	Biro Perencanaan					
	Biro Umum	1936	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas Biro Umum Setjen Kementerian Perhubungan	Ekonomi/ Transportasi	Biro Umum					
	Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara	1942	Pembinaan, dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, dan Pemilihan Mitra Kerjasama serta Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Ekonomi/ Transportasi	Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara					
	Komite Nasional Keselamatan Transport	1937	Pelayanan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Moda	Ekonomi/ Transportasi	Komite Nasional Keselamatan Transportasi	xxxx	Pelayanan Pemeriksaan Kecelakaan Moda	**Komite Nasional Keselamatan Transportas**	Ekonomi/ Transportasi	BARU

SEMULA					MENJADI					
No.	UKE 1/ UKE 2	Kode	Program/ Kegiatan	Fungsi/ Sub-Fungsi	UKE 1/ UKE 2	Kode	Program/ Kegiatan	Koordinator Kegiatan	Fungsi/ Sub-Fungsi	Keterangan Perubahan
	asi		Transportasi				Transportasi	i		
	Mahkamah Pelayaran	1938	Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan Pelayaran	Ekonomi/ Transportasi	Mahkamah Pelayaran	xxxx	Penegakan Hukum Keselamatan Pelayaran	**Mahkamah Pelayaran**	Ekonomi/ Transportasi	BARU
	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan	1939	Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan	Ekonomi/ Transportasi	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan	xxxx	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	**Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan**	Ekonomi/ Transportasi	BARU
	Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan	1940	Dukungan Manajemen Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup, Penataan Sistem dan Inovasi Pelayanan Transportasi yang Berkelanjutan	Ekonomi/ Transportasi	Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan	xxxx	Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan	**Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan**	Ekonomi/ Transportasi	BARU
	Biro Komunikasi dan Informasi Publik	1941	Penggelolaan Komunikasi Publik dan Pemberian Informasi di Bidang Perhubungan	Ekonomi/ Transportasi	Biro Komunikasi dan Informasi Publik	xxxx	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	**Biro Komunikasi dan Informasi Publik**	Ekonomi/ Transportasi	BARU
	Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional	5877	Pembinaan dan Koordinasi Kerja Sama dan Kemitraan/Investasi Dalam dan Luar Negeri serta Ratifikasi Konvensi Perjanjian Internasional di Bidang Transportasi	Ekonomi/ Transportasi	Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional	xxxx	Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama	**Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional**	Ekonomi/ Transportasi	BARU
INSPEKTORAT JENDERAL										
2.	**Sekretariat Jenderal (Koord.)**	**022. WA**	**Program Dukungan Manajemen**		**Sekretariat Jenderal (Koord.)**	**022.WA**	**Program Dukungan Manajemen**			**TETAP**
	Inspektorat I	1943	Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat I	Ekonomi/ Transportasi	Inspektorat I	xxxx	Pelaksanaan Pengawasan Internal	**Inspektorat Jenderal**	Ekonomi/ Transportasi	BARU
	Inspektorat II	1944	Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat II	Ekonomi/ Transportasi	Inspektorat II	xxxx			Ekonomi/ Transportasi	BARU
	Inspektorat III	1945	Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat III	Ekonomi/ Transportasi	Inspektorat III	xxxx			Ekonomi/ Transportasi	BARU

SEMULA					MENJADI					
No.	UKE 1/ UKE 2	Kode	Program/ Kegiatan	Fungsi/ Sub-Fungsi	UKE 1/ UKE 2	Kode	Program/ Kegiatan	Koordinator Kegiatan	Fungsi/ Sub-Fungsi	Keterangan Perubahan
	Inspektorat IV	1946	Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat IV	Ekonomi/ Transportasi	Inspektorat IV	xxxx			Ekonomi/ Transportasi	BARU
	Inspektorat Investigasi	1947	Pelaksanaan Pengawasan Oleh Inspektorat Investigasi	Ekonomi/ Transportasi	Inspektorat Investigasi	xxxx			Ekonomi/ Transportasi	BARU
	Sekretariat Inspektorat Jenderal	1948	Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	Ekonomi/ Transportasi	Sekretariat Inspektorat Jenderal	xxxx	Pengelolaan Organisasi dan SDM Pengawasan	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Ekonomi/ Transportasi	BARU
						xxxx	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Pengawasan		Ekonomi/ Transportasi	BARU
						xxxx	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Pengawasan		Ekonomi/ Transportasi	BARU
						xxxx	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Pengawasan		Ekonomi/ Transportasi	BARU
						xxxx	Legislasi dan Litigasi Pengawasan		Ekonomi/ Transportasi	BARU
						xxxx	Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan		Ekonomi/ Transportasi	BARU
					Sekretariat Inspektorat Jenderal	xxxx	Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama Pengawasan		Ekonomi/ Transportasi	BARU
	DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT									
3a.	**Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Koord.)**	**022.GA**	**Program Infrastruktur Konektivitas**		Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Koord.)	**022.GA**	**Program Infrastruktur Konektivitas**			**TETAP**
	Direktorat Lalu Lintas Jalan	1160	Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Jalan	Ekonomi/ Transportasi						
	Direktorat Angkutan Jalan	1161	Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan Jalan	Ekonomi/ Transportasi						
	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	1162	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Transportasi Jalan	Ekonomi/ Transportasi						

SEMULA					MENJADI					
No.	UKE 1/ UKE 2	Kode	Program/ Kegiatan	Fungsi/ Sub-Fungsi	UKE 1/ UKE 2	Kode	Program/ Kegiatan	Koordinator Kegiatan	Fungsi/ Sub-Fungsi	Keterangan Perubahan
	Direktorat Sarana Transportasi Jalan	1163	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Transportasi Jalan	Ekonomi/ Transportasi						
	Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	1164	Pembangunan dan Pengelolaan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Ekonomi/ Transportasi						
					1. Direktorat Angkutan Jalan; 2. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, dan 3. Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	xxxx	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	**Ditjen Perhubungan Darat**	Ekonomi/ Transportasi	BARU
					1. Direktorat Angkutan Jalan; 2. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, dan 3. Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	xxxx	Pelayanan Transportasi Darat		Ekonomi/ Transportasi	BARU
					1. Direktorat Lalu Lintas Jalan; 2. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 3. Direktorat Sarana Transportasi Jalan; dan 4. Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan	xxxx	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat		Ekonomi/ Transportasi	BARU

DIHAPUS						MENJADI					
No.	UKE 1/ UKE 2	Kode	Program/ Kegiatan	Fungsi/ Sub-Fungsi		UKE 1/ UKE 2	Kode	Program/ Kegiatan	Koordinator Kegiatan	Fungsi/ Sub-Fungsi	Keterangan Perubahan
						1. Direktorat Lalu Lintas Jalan; 2. Direktorat Angkutan Jalan; 3. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 4. Direktorat Sarana Transportasi Jalan; dan 5. Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan;	xxxx	Penunjang Teknis Transportasi Darat		Ekonomi/ Transportasi	BARU
3b.	Sekretariat Jenderal (Koord.)	022. WA	Program Dukungan Manajemen			Sekretariat Jenderal (Koord.)	022.WA	Program Dukungan Manajemen			TETAP
	Setditjen Perhubungan Darat	1953	Dukungan Manajemen Perhubungan Darat	Ekonomi / Transportasi		Setditjen Perhubungan Darat	xxxx	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Setditjen Perhubungan Darat	Ekonomi/ Transportasi	BARU
						Setditjen Perhubungan Darat	xxxx	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat		Ekonomi/ Transportasi	BARU
						Setditjen Perhubungan Darat	xxxx	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat		Ekonomi/ Transportasi	BARU
						Setditjen Perhubungan Darat	xxxx	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Darat		Ekonomi/ Transportasi	BARU
						Setditjen Perhubungan Darat	xxxx	Legislasi dan Litigasi Transportasi Darat		Ekonomi/ Transportasi	BARU
						Setditjen Perhubungan Darat	xxxx	Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama Transportasi Darat		Ekonomi/ Transportasi	BARU

SEMULA					MENJADI					
No.	UKE 1/ UKE 2	Kode	Program/ Kegiatan	Fungsi/ Sub-Fungsi	UKE 1/ UKE 2	Kode	Program/ Kegiatan	Koordinator Kegiatan	Fungsi/ Sub-Fungsi	Keterangan Perubahan
	DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN									
4a.	**Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Koord.)**	**022.GA**	**Program Infrastruktur Konektivitas**		**Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Koord.)**	**022.GA**	**Program Infrastruktur Konektivitas**			**TETAP**
	Direktorat Sarana Perkeretaapian	1966	Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Sarana Perkeretaapian	Ekonomi / Transportasi						
	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	1967	Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	Ekonomi / Transportasi						
	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	1968	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api	Ekonomi / Transportasi						
	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	5031	Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Keselamatan Perkeretaapian	Ekonomi / Transportasi						
					Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	xxxx	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	**Ditjen Perkeretaapian**	Ekonomi/ Transportasi	BARU
					Direktorat Keselamatan Perkeretaapian	xxxx	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian		Ekonomi/ Transportasi	BARU
					1. Direktorat Sarana Perkeretaapian 2. Direktorat Prasarana Perkeretaapian	xxxx	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian		Ekonomi/ Transportasi	BARU
					1. Direktorat Sarana Perkeretaapian 2. Direktorat Prasarana Perkeretaapian 3. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api 4. Direktorat Keselamatan	xxxx	Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian		Ekonomi/ Transportasi	BARU

DIUBAH DARI						DIUBAH MENJADI					
No.	UKE 1/ UKE 2	Kode	Program/ Kegiatan	Fungsi/ Sub-Fungsi		UKE 1/ UKE 2	Kode	Program/ Kegiatan	Koordinator Kegiatan	Fungsi/ Sub-Fungsi	Keterangan Perubahan
						Perkeretaapian					
4k.	Sekretariat Jenderal (Koord.)	022.WA	Program Dukungan Manajemen			Sekretariat Jenderal (Koord.)	022.WA	Program Dukungan Manajemen			TETAP
	Setditjen Perkeretaapian	1968	Dukungan Manajemen Perkeretaapian	Ekonomi / Transportasi		Setditjen Perkeretaapian	xxxx	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	Setditjen Perkeretaapian	Ekonomi/ Transportasi	BARU
						Setditjen Perkeretaapian	xxxx	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian		Ekonomi/ Transportasi	BARU
						Setditjen Perkeretaapian	xxxx	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian		Ekonomi/ Transportasi	BARU
						Setditjen Perkeretaapian	xxxx	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian		Ekonomi/ Transportasi	BARU
						Setditjen Perkeretaapian	xxxx	Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian		Ekonomi/ Transportasi	BARU
						Setditjen Perkeretaapian	xxxx	Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Transportasi Perkeretaapian		Ekonomi/ Transportasi	BARU
	DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT										
5a.	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Koord.)	022.GA	Program Infrastruktur Konektivitas			Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Koord.)	022.GA	Program Infrastruktur Konektivitas			TETAP

DENTILA					MENJADI					
No.	UKE 1/ UKE 2	Kode	Program/ Kegiatan	Fungsi/ Sub-Fungsi	UKE 1/ UKE 2	Kode	Program/ Kegiatan	Koordinator Kegiatan	Fungsi/ Sub-Fungsi	Keterangan Perubahan
	Direktorat Kenavigasian	1954	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian	Ekonomi/ Transportasi	Direktorat Kenavigasian	xxxx	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut	Ditjen Perhubungan Laut	Ekonomi/ Transportasi	BARU
	Direktorat Penjagaan Laut dan Pantai	1955	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai	Ekonomi/ Transportasi	Direktorat Penjagaan Laut dan Pantai	xxxx			Ekonomi/ Transportasi	BARU
					Direktorat Perkapalan dan Kepelautan	xxxx				
	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut	1956	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut	Ekonomi/ Transportasi	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut	xxxx	Pelayanan Transportasi Laut		Ekonomi/ Transportasi	BARU
	Direktorat Kepelabuhanan	1957	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan	Ekonomi/ Transportasi	Direktorat Kepelabuhanan	xxxx	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut		Ekonomi/ Transportasi	BARU
					1. Direktorat Kenavigasian 2. Direktorat Penjagaan Laut dan Pantai 3. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut 4. Direktorat Kepelabuhanan 5. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan	xxxx	Penunjang Teknis Transportasi Laut		Ekonomi/ Transportasi	BARU
5b.	**Sekretariat Jenderal (Koord.)**	**022. WA**	**Program Dukungan Manajemen**		**Sekretariat Jenderal (Koord.)**	**022.WA**	**Program Dukungan Manajemen**			**TETAP**
	Setditjen Perhubungan Laut	1959	Dukungan Manajemen Perhubungan Laut	Ekonomi / Transportasi	Setditjen Perhubungan Laut	xxxx	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Laut	Setditjen Perhubungan Laut	Ekonomi/ Transportasi	Baru
					Setditjen Perhubungan Laut	xxxx	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi		Ekonomi/ Transportasi	Baru

SEMULA					MENJADI					
No.	UKE 1/ UKE 2	Kode	Program/ Kegiatan	Fungsi/ Sub-Fungsi	UKE 1/ UKE 2	Kode	Program/ Kegiatan	Koordinator Kegiatan	Fungsi/ Sub-Fungsi	Keterangan Perubahan
							i Laut			
					Setditjen Perhubungan Laut	xxxx	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Laut		Ekonomi/ Transportasi	Baru
					Setditjen Perhubungan Laut	xxxx	Legislasi dan Litigasi Transportasi Laut		Ekonomi/ Transportasi	Baru
					Setditjen Perhubungan Laut	xxxx	Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama Transportasi Laut		Ekonomi/ Transportasi	Baru
	DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA									
6a.	**Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Koord.)**	**022.GA**	**Program Infrastruktur Konektivitas**	**Ekonomi/ Transportasi**	**Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Koord.)**	**022.GA**	**Program Infrastruktur Konektivitas**		**Ekonomi/ Transportasi**	**TETAP**
	Direktorat Angkutan Udara	1960	Pelayanan Angkutan Udara	Ekonomi/ Transportasi	Direktorat Angkutan Udara	xxxx	Pelayanan Transportasi Udara	**Ditjen Perhubungan Udara**	Ekonomi/ Transportasi	Baru
	Direktorat Bandar Udara	1961	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara	Ekonomi/ Transportasi	Direktorat Bandar Udara	xxxx	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara		Ekonomi/ Transportasi	Baru
					Direktorat Bandar Udara	xxxx	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara		Ekonomi/ Transportasi	Baru
	Direktorat Keamanan Penerbangan	1962	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan	Ekonomi/ Transportasi	Direktorat Keamanan Penerbangan	xxxx			Ekonomi/ Transportasi	Baru
	Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	1963	Pengawasan dan Pembinaan Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	Ekonomi/ Transportasi	Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	xxxx			Ekonomi/ Transportasi	Baru
	Direktorat Navigasi Penerbangan	1964	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbangan	Ekonomi/ Transportasi	Direktorat Navigasi Penerbangan	xxxx			Ekonomi/ Transportasi	Baru
					1. Direktorat Angkutan Udara; 2. Direktorat Bandar Udara; 3. Direktorat Keamana	**xxxx**	Penunjang Teknis Transportasi Udara		Ekonomi/ Transportasi	Baru

SEMULA					MENJADI					
No.	UKE 1/ UKE 2	Kode	Program/ Kegiatan	Fungsi/ Sub-Fungsi	UKE 1/ UKE 2	Kode	Program/ Kegiatan	Koordinator Kegiatan	Fungsi/ Sub-Fungsi	Keterangan Perubahan
					n Penerbangan 4. Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara 5. Direktorat Navigasi Penerbangan					
6b.	Sekretariat Jenderal (Koord.)	022.WA	Program Dukungan Manajemen	Ekonomi/ Transportasi	Sekretariat Jenderal (Koord.)	022.WA	Program Dukungan Manajemen		Ekonomi/ Transportasi	TETAP
	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	1965	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan Udara	Ekonomi/ Transportasi	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	xxxx	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN Dan Umum Transportasi Udara	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Ekonomi/ Transportasi	Baru
						xxxx	Legislasi Dan Litigasi Transportasi Udara		Ekonomi/ Transportasi	Baru
						xxxx	Pengelolaan Organisasi Dan SDM Transportasi Udara		Ekonomi/ Transportasi	Baru
						xxxx	Pengelolaan Kemitraan Dan Kerjasama Transpotasi Udara		Ekonomi/ Transportasi	Baru
						xxxx	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Udara		Ekonomi/ Transportasi	Baru
						xxxx	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Udara		Ekonomi/ Transportasi	Baru
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK										
7a.	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Koord.)	022.GA	Program Infrastruktur Konektivitas		Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Koord.)	022.GA	Program Infrastruktur Konektivitas			TETAP
	Direktorat Lalu Lintas	1165	Peningkatan, Penyediaan serta Pengembangan Lalu Lintas di Wilayah	Ekonomi/ Transportasi						

SEMULA						MENJADI					
No.	UKE 1/ UKE 2	Kode	Program/ Kegiatan	Fungsi/ Sub-Fungsi		UKE 1/ UKE 2	Kode	Program/ Kegiatan	Koordinator Kegiatan	Fungsi/ Sub-Fungsi	Keterangan Perubahan
			Jabodetabek								
	Direktorat Angkutan	1166	Peningkatan, Penyediaan Pelayanan Angkutan Orang, Angkutan barang serta Pengawasan Angkutan di Wilayah Jabodetabek	Ekonomi/ Transportasi							
	Direktorat Prasarana	4990	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Transportasi Jabodetabek	Ekonomi/ Transportasi							
						1. Direktorat Prasarana; 2. Direktorat Angkutan.	xxxx	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Jabodetabek	BPTJ	Ekonomi/ Transportasi	BARU
						1. Direktorat Angkutan; 2. Direktorat Lalulintas.	xxxx	Pelayanan Transportasi Jabodetabek		Ekonomi/ Transportasi	BARU
						1. Direktorat Angkutan; 2. Direktorat Lalu Lintas	xxxx	Keselamatan Transportasi Jabodetabek		Ekonomi/ Transportasi	BARU
						1. Direktorat Prasarana; 2. Direktorat Angkutan; 3. Direktorat Lalulintas.	xxxx	Penunjang Teknis Transportasi Jabodetabek		Ekonomi/ Transportasi	BARU
Ts.	**Sekretariat Jenderal (Koord.)**	**022.GA**	**Program Dukungan Manajemen**			**Sekretariat Jenderal (Koord.)**	**022.GA**	**Program Dukungan Manajemen**			**TETAP**
	Sekretariat	4988	Dukungan Manajemen Pengelola Transportasi Jabodetabek	Ekonomi / Transportasi		Sekretariat BPTJ	xxxx	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Jabodetabek	Sekretariat BPTJ	Ekonomi/ Transport	BARU
							xxxx	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi		Ekonomi/ Transport	BARU

DIUBAH					DIJADIKAN					
No.	UKE 1/ UKE 2	Kode	Program/ Kegiatan	Fungsi/ Sub-Fungsi	UKE 1/ UKE 2	Kode	Program/ Kegiatan	Koordinator Kegiatan	Fungsi/ Sub-Fungsi	Keterangan Perubahan
							i Jabodetabek			
						xxxx	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Jabodetabek		Ekonomi/ Transport	BARU
						xxxx	Legislasi dan Litigasi Transportasi Jabodetabek		Ekonomi/ Transport	BARU
	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN									
8a.	**Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan**	**022.K/B**	**Program Riset dan Inovasi, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi**		**Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan**	**022.K/B**	**Program Riset dan Inovasi, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi**			**TETAP**
	Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda	1970	Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda	Ekonomi/ Transportasi	Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda	xxxx	Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi	**Badan Litbang Perhubungan**	Ekonomi/ Transportasi	BARU
	Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	1971	Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	Ekonomi/ Transportasi	Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	xxxx	Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi		Ekonomi/ Transportasi	BARU
	Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan	1972	Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan	Ekonomi/ Transportasi	Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan	xxxx	Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi		Ekonomi/ Transportasi	BARU
	Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara	1973	Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara	Ekonomi/ Transportasi	Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara	xxxx	Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi		Ekonomi/ Transportasi	BARU

DEMULA					MENJADI					
No.	**UKE 1/ UKE 2**	**Kode**	**Program/ Kegiatan**	**Fungsi/ Sub-Fungsi**	**UKE 1/ UKE 2**	**Kode**	**Program/ Kegiatan**	**Koordinator Kegiatan**	**Fungsi/ Sub-Fungsi**	**Keterangan Perubahan**
					Sekretariat Badan Litbang Perhubungan	xxxx	Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi	**Badan Litbang Perhubungan**	Ekonomi/ Transportasi	BARU
					1. Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda; 2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretapian 3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyebrangan; 4. Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara; 5. Sekretariat Badan Litbang Perhubungan.	xxxx	Penunjang Teknis Riset dan Rekomendasi Kebijakan Transportasi		Ekonomi/ Transportasi	BARU
Sb	**Sekretariat Jenderal (Koord.)**	**022. WA**	**Program Dukungan Manajemen**		**Sekretariat Jenderal (Koord.)**	**022.WA**	**Program Dukungan Manajemen**			**TETAP**
	Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1974	Dukungan Manajemen Litbang Kementerian Perhubungan	Ekonomi/ Transportasi	Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	xxxx	Pengelolaan Organisasi dan SDM Riset Kebijakan	**Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan**	Ekonomi/ Transportasi	BARU
						xxxx	Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Riset		Ekonomi/ Transportasi	BARU

SEMULA						MENJADI					
No.	UKE 1/ UKE 2	Kode	Program/ Kegiatan	Fungsi/ Sub-Fungsi		UKE 1/ UKE 2	Kode	Program/ Kegiatan	Koordinator Kegiatan	Fungsi/ Sub-Fungsi	Keterangan Perubahan
								Kebijakan			
							xxxx	Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama Riset Kebijakan		Ekonomi/ Transportasi	BARU
							xxxx	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Riset Kebijakan		Ekonomi/ Transportasi	BARU
						1. Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda; 2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretapian 3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan; 4. Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara.	xxxx	Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Riset Kebijakan	**Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan**	Ekonomi/ Transportasi	BARU
	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN										
9a.	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan**	**022.D L**	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**			**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan**	**022.D L**	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**			**TETAP**

SEMULA					MENJADI					
No.	UKE 1/ UKE 2	Kode	Program/ Kegiatan	Fungsi/ Sub-Fungsi	UKE 1/ UKE 2	Kode	Program/ Kegiatan	Koordinator Kegiatan	Fungsi/ Sub-Fungsi	Keterangan Perubahan
	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat	1975	Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi Darat	Pendidikan/ Pendidikan Kedinasan	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat	xxxx	Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi	**BPSDM Perhubungan**	Pendidikan/ Pendidikan Kedinasan	BARU
	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut	1976	Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi Laut	Pendidikan/ Pendidikan kedinasan	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut					
	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara	1977	Pengembangan Sumber Daya Manusia Transportasi Udara	Pendidikan/ Pendidikan Kedinasan	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara					
		3996	Pendidikan Transportasi Darat	Pendidikan/ Pendidikan Tinggi		xxxx	Pendidikan Transportasi		Pendidikan/ Pendidikan Tinggi	BARU
		3997	Pendidikan Transportasi Laut	Pendidikan/ Pendidikan Tinggi						
		3998	Pendidikan Transportasi Udara	Pendidikan/ Pendidikan Tinggi						
9b.	**Sekretariat Jenderal (Koord.)**	**022. WA**	**Program Dukungan Manajemen**		**Sekretariat Jenderal (Koord.)**	**022.WA**	**Program Dukungan Manajemen**			**TETAP**
	Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	1978	Dukungan Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	Ekonomi / Transportasi						
					Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	xxxx	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi	**Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan**	Ekonomi / Transportasi	BARU
						xxxx	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum SDM Transportasi		Ekonomi / Transportasi Pendidikan/ Pendidikan Tinggi	Perubahan Nomenklatur Kegiatan (fungsi pendidikan merupakan alokasi Anggaran Pendidika

SEMULA					MENJADI					
No.	UKE 1/ UKE 2	Kode	Program/ Kegiatan	Fungsi/ Sub-Fungsi	UKE 1/ UKE 2	Kode	Program/ Kegiatan	Koordinator Kegiatan	Fungsi/ Sub-Fungsi	Keterangan Perubahan
										n layanan perkantoran satker BPSDMP)
						xxxx	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik SDM Transportasi		Ekonomi / Transportasi	BARU
						xxxx	Legislasi dan Litigasi SDM Transportasi		Ekonomi / Transportasi	BARU
						xxxx	Pengelolaan Kemitraan dan Kerjasama SDM Transportasi		Ekonomi / Transportasi	BARU
	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan	1979	Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan	Ekonomi / Transportasi	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan	1979	Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan	**Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan**	Ekonomi / Transportasi	TETAP

2. Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak. Skema pendanaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) bertujuan untuk mencukupi kebutuhan pendanaan penyediaan infrastruktur secara berkelanjutan melalui pengerahan dana swasta, penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran dan tepat waktu, menciptakan iklim investasi yang mendorong partisipasi Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur, mendorong prinsip pakai-bayar oleh pengguna, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna dan memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha melalui pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada Badan Usaha. Skema KPS berfokus pada pendanaan sarana dan prasarana pembangunan infrastruktur transportasi yang memiliki kelayakan finansial tinggi (*full cost recovery*) atau kelayakan marginal terkait kontribusi pemerintah dalam bentuk *government support*. Skema KPS juga dapat disinergikan dengan optimasi penggunaan pinjaman dan hibah luar negeri, khususnya untuk pendanaan prasarana dasar.

3. Investasi Swasta.

Pihak swasta berpartisipasi secara langsung dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur, yaitu melalui proyek KPS dengan skema *unsolicited, special purpose*, dan pemanfaatan hak kompensasi.

a. Penilaian dan evaluasi kelayakan berupa pemeriksaan semua dokumen administrasi di hadapan Tim Penilai;
b. Proses penetapan BLU penuh atau BLU bertahap.

4. *Creative financing* sebagai pembiayaan alternatif, terbagi menjadi:

a. *Infrastructure Bond* yang penggunaannya secara khusus untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur;
b. Penugasan BUMN (seperti penugasan Hutama Karya dalam proyek Trans Sumatera Highway) didukung melalui penyertaan modal pemerintah dan *direct-lending* yang dijamin oleh pemerintah;
c. *Private Finance Initiative* (PFI) – *multiyears contract* 15 – 30 tahun;
d. *Performance-Based Annuity Scheme* (PBAS) atau *Availability Payment*;

e. Pengenaan tarif/biaya akses seperti *Electronic Road Pricing* (ERP);
f. Infrastruktur swasta (*private infrastructure*);
g. Pembangunan infrastruktur berbasis partisipasi masyarakat (*community-based infrastructure*).

Secara umum, total kebutuhan pendanaan Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 sebesar Rp. 718.605,4 Milyar dengan porsi 51,6% APBN dan

48,4% Non APBN. Secara rinci total kebutuhan selama 5 (lima) tahun ke depan dapat disampaikan sebagai berikut.

Skema pendanaan infrastruktur sebagaiamana tersebut di atas dibiayai melalui skema APBN dan Non APBN. Namun demikian, skema lainnya dapat dilakukan melalui pendekatan institusional dan pendekatan kebijakan

1. Pendekatan Institusional

Pendekatan institusional dalam perumusan kerangka pendanaan infrastruktur dijelaskan, sebagai berikut:

a. Penugasan BUMN (seperti: konsep penugasan Hutama Karya dalam proyek Trans Sumatera Highway) didukung melalui modal pemerintah dan *direct-lending* yang dijamin oleh pemerintah;
b. Infrastruktur swasta (*private infrastructure*) untuk proyek-proyek yang memiliki kelayakan ekonomi dan finansial baik;
c. Pembangunan infrastruktur berbasis partisipasi masyarakat (*community-based infrastructure*) khususnya untuk proyek infrastruktur skala kecil;
d. Bank khusus pendanaan infrastruktur (*infrastructure bank*) untuk mengelola *project development revolving fund* dan pengelolaan dana dari *infrastructure bond* maupun dana dukungan pemerintah;
e. Bank khusus pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur (bank tanah).

2. Pendekatan Kebijakan

Pendekatan kebijakan dalam pendanaan infrastruktur di sektor transportasi, sebagai berikut:

a. *Infrastructure Bond*, obligasi yang penggunaannya dikhususkan untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur;
b. *Private Finance Initiative* (PFI) – pembiayaan *multiyear contract* selama 15 – 30 tahun;
c. *Performance-Based Annuity Scheme* (PBAS) atau *Availability Payment* untuk menjamin kelangsungan penerimaan investor dalam rentang waktu konsesi;
d. Pengenaan tarif/biaya akses penggunaan infrastruktur seperti *Electronic Road Pricing* (ERP)
e. *Asset Sale/Lease back* – penjualan aset untuk pendanaan pembangunan atau kontrak-sewa jangka panjang, seperti kerja sama 10 bandar udara UPBU di Kementerian Perhubungan, untuk peningkatan layanan infrastruktur.

Pentingnya ketersediaan infrastruktur membuat pemerintah sebagai pihak yang berwenang untuk menyediakan infrastruktur, di sisi lain pemerintah juga membutuhkan suatu anggaran dana yang sangat besar untuk merealisasikan rencana-rencana pembangunan infrastruktur yang menyeluruh dan berkesinambungan. Ironisnya, bahwa kemampuan pemerintah Indonesia untuk menyediakan dana infrastruktur jauh dari kata cukup. Infrastruktur yang baik juga dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi, khususnya sektor transportasi. Keberhasilan sektor transportasi secara makro dapat terlihat dari sumbangan nilai tambahnya dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), dampak ganda (multiplier effect) yang ditimbulkannya terhadap pertumbuhan sektor-sektor lain dan kemampuannya meredam laju inflasi melalui kelancaran distribusi barang dan jasa ke seluruh pelosok tanah air.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I Tahun 2020 tumbuh 2,97% atau lebih kecil dari proyeksi semula di level 4,5% – 4,7% akibat pandemi Covid-19 yang menghentikan sebagian besar aktivitas ekonomi. Dalam hal ini 90% kontribusi perekonomian Indonesia yang berasal dari segmen konsumsi dan investasi mengalami penurunan drastis. Dari sisi konsumsi hanya tumbuh sebesar 2,7%, sedangkan investasi hanya tumbuh sebesar 1,7%. Dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional tersebut, perlu adanya langkah strategis dan terarah untuk penguatan infrastruktur sebagai salah satu

strategi yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menggerakkan roda perekonomian, membuka lapangan pekerjaan, serta menarik masuknya investasi dan menunjang kegiatan usaha di Indonesia. Pada masa pandemi Covid-19, PSN diharapkan dapat menjadi instrumen untuk pemulihan perekonomian nasional. Beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian terhadap usulan PSN baru dan pelaksanaan PSN yang berjalan di antaranya adalah mampu menyerap banyak tenaga kerja sebagai respon atas meningkatnya jumlah pengangguran dampak pandemi Covid-19; dan menunjang investasi asing yang akan masuk ke Indonesia maupun investasi dalam negeri.

PSN sektor transportasi berdasarkan Perpres 56/2018 berjumlah 33 kegiatan yang terdiri atas 16 kegiatan bidang perkeretaapian, 7 kegiatan bidang udara dan 10 proyek bidang laut dengan nilai Total investasi 33 kegiatan PSN sebesar Rp. 300,36 Triliun. Berdasarkan evaluasi dan Progres Pelaksanaan Kegiatan terdapat 17 proyek yang telah selesai, 19 proyek yang dilanjutkan dan 13 yang menjadi proyek usulan baru.

Dukungan lainnya yaitu upaya untuk meringankan dan memudahkan para petani dan nelayan akibat efek pandemi COVID-19, Kementerian Perhubungan berkomitmen melakukan sejumlah kebijakan insentif berupa akselerasi sertifikasi nelayan demi menopang kebutuhan nelayan baik dari aspek kelaiklautan kapal maupun keselamatan khusus bagi kapal. Sedangkan untuk para petani, Kementerian Perhubungan berupaya menjamin alur dan rute distribusi hasil pertanian dengan menyiapkan sarana dan infrastruktur transportasi logistik melalui program tol laut dan jembatan udara. Wujud konkret Kementerian Perhubungan antara lain adalah:

- Melakukan akselerasi pengukuran kapal penangkap ikan dan sertifikasi. Data Maret 2020 mencatat kapal yang disertifikasi pas kecil (Surat Tanda Kebangsaan Kapal Tonase Kurang dari GT 7) mencapai 67.810 kapal. Selain hal tersebut, sertifikasi terhadap para nelayan turut dilakukan dengan menerbitkan buku pelaut sebagai salah satu dokumen yang wajib dimiliki pelaut yang hingga Maret tahun 2020 mencapai 289.582 nelayan yang tersertifikasi. Dalam rangka memudahkan pelayanan terhadap para nelayan kecil, maka saat ini sedang dilakukan proses perubahan bentuk pas kecil yang selama ini berbentuk blanko kertas menjadi bentuk layanan digital atau e-pas. Kemudahan lainnya adalah penerbitan SE. 5 Tahun 2019, tentang pembebasan biaya atas PNBP terhadap semua jenis kapal dengan tonase kotor (*Gross Tonnage*) kurang dari 7 GT (termasuk bagi

kapal nelayan). Sampai dengan TW I tahun 2020 telah dilakukan Diklat Pembentukan Masyarakat (DPM) untuk sertifikasi nelayan berupa kegiatan *Basic Safety Training* (BST) Kapal Layar Motor oleh BPSDM Perhubungan di beberapa lokasi yaitu STIP Jakarta, PIP Semarang, PIP Makassar, Poltekpel Banten, Poltekpel Barombong dan BPPTL Jakarta sebanyak 17.530 peserta dengan anggaran Rp.27.556.596.3082.

- Meningkatkan efisiensi biaya logistik dengan terus melakukan upaya pembangunan dan pengelolaan kinerja pelabuhan, mulai dari waktu tunggu kapal hingga efisiensi bongkar muat. Selain itu juga dilakukan dengan pengembangan pelabuhan terpadu yang terintegrasi dengan kawasan industri (Pelabuhan Kuala Tanjung/Belawan, Tanjung Priok, Kijing, Tanjung Perak, Makassar, Bitung dan Sorong) yang diharapkan dapat menghemat biaya logistik sekitar 35– 40% dengan konsep pelayaran langsung dari pelabuhan dalam negeri ke pelabuhan akhir (*direct call*).
- Selain program tol laut untuk memacu distribusi bahan pangan dilakukan pembukaan 28 rute jembatan udara tahun ini yang diharapkan dapat semakin efektif dan memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan di Indonesia dan menjamin rantai pasok barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting). Pada tahun 2020 Kemenhub mengalokasi dana sebesar Rp.439.791.173.000 untuk program tol laut untuk 26 trayek. Tidak hanya itu, sebagai upaya menurunkan biaya dan meningkatkan daya saing komoditi, dalam program tol laut 2020 juga memberikan subsidi muatan kepada pengangkut logistik bahan pangan dan hasil pertanian lainnya.

BAB V
PENUTUP

Naskah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2020 - 2024 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Perhubungan Tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024, yang akan menjadi pedoman bagi Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan kebijakan dan program Pemerintah di sektor transportasi.

Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan nasional khususnya di sektor transportasi serta untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan bagi seluruh unit kerja dan *stakeholders* sektor transportasi. Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 dengan sebaik-baiknya.
2. Rencana Strategis Kementerian Perhubungan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 dan menjadi acuan bagi Direktorat Jenderal, Badan-Badan, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal dan UPT-UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
3. Rencana Strategis Kementerian Perhubungan diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 s.d. 2024 dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 s.d. 2024 khususnya sektor transportasi.
4. Kementerian Perhubungan berkewajiban menjaga konsistensi antara Renstra Kementerian Perhubungan dengan Rencana Kerja Direktorat Jenderal, Badan-Badan, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal dan UPT-UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan.
5. Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan Renstra Kementerian Perhubungan 2020 – 2024, masing-masing Direktorat Jenderal, Badan-Badan, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal dan UPT-UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Renstra dalam keterkaitannya dengan Rencana Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024.

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2020-2024

REKAPITULASI INDIKASI PENDANAAN BERDASARKAN PROGRAM

dalam miliar rupiah

No	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024										NON APBN 2020-2024					PIC
				2020	2021	2022	2023	2024	SUMBER DANA (RM)						PMN / BLU	PNBP	PHLN	TOTAL APBN	APBD I	APBD II	APBD	SWASTA	NON APBN	
									2020	2021	2022	2023	2024	RM										
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN								98.116,93	78.195,89	62.637,02	60.944,99	60.194,08	381.048,90	22.004,44	27.294,84	7.599,91	545.153,72	148.990,19	133.942,80	62.379,80	6.264,00	370.993,13	
01	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**								2.097,28	1.613,56	1.470,47	1.193,50	1.685,29	28.014,2	2.165,84	0,00	0,00	31.400,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pelatihan Nasional								1.035,33	1.712,91	1.788,99	1.846,21	1.904,83	9.508,31	1.101,78	0,00	0,00	12.968,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pelatihan Daerah								161,97	865,80	891,79	920,64	944,97	1.932,17	138,08	0,00	0,00	3.195,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pelatihan K/L								6,27	5,81	5,99	11,11	5,81	43,80	818,46	0,00	0,00	871,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Infrastruktur/Prasarana Operasional/Teknologi Manajemen/ Pendidikan Vokasi								894,21	336,98	373,41	334,54	870,60	2.410,42	114,52	0,00	0,00	2.838,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Infrastruktur Pelatihan di Luar BPSDM								366,16	4.193,91	2.151,83	2.791,28	2.774,11	12.183,09	42,12	0,00	0,00	12.225,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	**Program Infrastruktur Konektivitas**								19.286,9	40.629,1	47.442,7	50.849,8	49.328,4	207.936,	13.804,9	27.254,3	7.599,91	257.995,	148.990,	133.942,	62.379,8	6.264,00	370.993,	
	Pelatihan Nasional								8.603,79	20.190,79	25.363,26	26.747,78	24.480,44	105.385,77	811,41	10.965,00	7.046,21	127.208,38	142.227,80	127.360,80	62.379,80	2.374,40	334.342,80	
	Pelatihan Daerah								3.323,17	9.136,23	9.172,81	9.145,23	8.785,26	39.469,51	3.993,26	13.699	0,00	57.159,28	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	
	Pelatihan K/L								1.371,23	3.302,03	3.278,05	3.124,37	3.146,14	14.221,87	1.111,90	3,84	1,91	15.339,49	2.511,20	0,00	0,00	0,00	2.511,20	
	Infrastruktur Sarana Non Operasional Teknologi Manajemen / Pendidikan Vokasi								1.371,23	566,11	599,11	1.072,27	1.101,20	5.171,91	18.270,44	0,00	0,00	23.451,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Infrastruktur Sarana Operasional								0,00	0,00	0,10	0,10	0,11	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Infrastruktur Pelatihan di Luar BPSDM								5.513,71	9.429,01	10.033,69	11.013,86	11.363,93	46.736,19	155,61	2.315,34	44,00	49.249,15	2.264,80	5.972,00	0,00	390,00	10.845,80	
03	**Program Riset dan Inovasi Iptek Pengelolaan dan Teknologi**								79,20	108,80	123,81	118,80	140,31	571,72	0,00	0,00	0,00	571,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pelatihan Nasional								7,70	8,80	9,90	9,75	9,48	45,63	0,00	0,00	0,00	45,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pelatihan Daerah								30,80	35,20	72,00	38,50	84,37	260,86	0,00	0,00	0,00	260,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR / KEY ACTIVITY / PROJECTION	SATUAN	BATASAN	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024										SUN APBN 2020-2024						KETER
					2020	2021	2022	2023	2024	SATUAN KEGIAN (KRO)						PRPP / KLU	HIBAH	DLN-B	TOTAL APBN	APBN	KI/BUN	APBD	PRIVATE	SUN APBN	
										2020	2021	2022	2023	2024	DIK											
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN									28.119,03	56.190,28	62.637,03	66.893,99	68.195,98	281.207,93	22.826,58	27.193,26	1.329,91	340.150,72	134.784,14	172.082,58	62.279,00	3.323,00	372.093,14	
	Indikasi Belanja Non Operasional Dukungan Manajemen (Tersinyang Tribute									19,61	17,87	21,27	21,31	23,71	104,16	0,00	0,00	0,00	104,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Indikasi Belanja Operasional									7,30	20,50	22,21	24,24	27,24	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WA	**Program Dukungan Manajemen**									**8.241,09**	**8.840,99**	**9.463,51**	**10.083,8**	**10.844,7**	**47.275,8**	**2.631,79**	**0,00**	**0,00**	**50.001,8**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Tribute Hibah									71,40	82,51	83,51	97,74	127,74	465,66	25,20	0,00	0,00	490,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tribute BLU									745,94	806,36	983,84	987,14	964,14	3.945,42	92,41	0,00	0,00	3.837,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Indikasi Belanja Non Operasional Dukungan Manajemen (Tersinyang Tribute									980,84	980,84	1.141,04	1.160,81	1.320,48	5.328,71	1.128,77	0,00	0,00	6.645,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Indikasi Belanja Operasional									6.934,74	7.264,32	7.753,97	8.184,51	8.644,80	38.772,34	474,41	0,00	0,00	39.246,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Indikasi Indikasi Di Luar BP-BH									2,00	10,47	24,82	44,28	48,82	147,56	965,42	0,00	0,00	1.112,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	LOKASI	SATKER	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024										BLU-APBN 2020-2024					PEND
										RUPIAH MURNI (RM)						PNBP / BLU	BMUN	PHLN	TOTAL APBN	APBN	BUMN	APBD	KHARTA	SUB APBN	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	RM											
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN									30.116,16	36.193,28	42.637,22	46.404,93	48.194,38	181.547,9	23.656,36	27.299,26	7.599,61	240.104,7	148.783,1	193.362,0	42.379,00	6.220,00	370.661,1	
01	Sekretariat Jenderal									709,20	741,88	844,20	955,35	1.097,11	4.358,94	0,00	0,00	0,00	4.358,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prioritas Eselon									16,22	21,96	29,12	40,96	52,94	161,22	0,00	0,00	0,00	161,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prioritas K/L									244,93	296,83	363,07	428,90	512,79	1.846,55	0,00	0,00	0,00	1.846,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Indikasi Belanja Non Operasional Dukungan Manajemen / Penunjang Teknis									190,01	140,89	148,37	162,44	185,22	826,03	0,00	0,00	0,00	826,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Indikasi Belanja Operasional									257,22	275,22	294,49	318,11	337,16	1.479,19	0,00	0,00	0,00	1.479,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Indikasi Kebutuhan di Luar RPJMN									0,00	6,96	8,96	8,96	9,96	35,84	0,00	0,00	0,00	35,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Inspektorat Jenderal									134,61	132,00	146,88	160,11	194,14	768,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Indikasi/Belanja Non-Operasional Dukungan Manajemen / Penunjang Teknis									70,63	70,48	98,41	119,81	144,29	518,63	0,00	0,00	0,00	518,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Indikasi Belanja Operasional									64,08	46,81	48,44	49,30	49,85	259,38	0,00	0,00	0,00	259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Ditjen Perhubungan Darat									5.100,72	9.123,27	8.393,89	6.949,63	10.220,25	42.788,64	961,58	868,88	0,00	45.179,47	5.027,00	255,00	2.100,00	0,00	7.382,00	
	Prioritas Nasional									2.286,04	3.800,00	3.695,39	4.349,18	4.410,63	18.484,29	0,00	545,88	0,00	19.010,17	5.027,00	255,00	2.100,00	0,00	7.382,00	
	Prioritas Eselon									1.121,09	1.736,27	1.543,04	2.074,48	1.808,80	8.284,37	161,63	209,89	0,00	8.655,89	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
	Prioritas K/L									284,50	969,50	239,00	270,00	308,50	1.472,02	0,00	0,00	0,00	1.472,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Indikasi Belanja Non Operasional Dukungan Manajemen / Penunjang Teknis									273,80	246,38	258,90	271,85	283,23	1.336,36	244,10	0,00	0,00	1.580,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Indikasi Belanja Operasional									1.084,06	1.075,60	1.151,06	1.203,10	1.310,50	5.785,31	0,00	0,00	0,00	5.785,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Indikasi Kebutuhan di Luar RPJMN									130,50	1.757,27	2.462,11	1.850,52	2.163,79	8.404,19	155,83	112,91	0,00	8.672,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Ditjen Perhubungan Laut									6.559,23	8.881,66	10.320,04	11.386,70	11.440,94	48.387,97	9.440,01	810,32	5.380,71	64.228,00	4.966,36	125.875,0	0,00	0,00	130.441,3	
	Prioritas Nasional									1.775,10	2.259,36	2.761,88	4.089,14	3.946,43	14.832,10	189,29	214,32	5.876,21	20.111,96	4.966,36	125.875,00	0,00	0,00	130.441,36	
	Prioritas Eselon									761,28	1.985,34	2.139,01	2.547,14	2.422,17	9.855,02	3.859,82	305,00	4,80	14.018,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prioritas K/L									406,21	965,69	672,07	702,00	751,96	3.499,92	4,00	0,00	0,00	3.503,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Indikasi Belanja Non Operasional Dukungan Manajemen / Penunjang Teknis									498,43	463,41	375,60	307,00	603,02	2.487,07	5.387,89	0,00	0,00	7.837,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Indikasi Belanja Operasional									2.917,87	2.210,24	3.372,87	3.839,42	3.716,79	16.765,31	0,00	0,00	0,00	16.765,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Ditjen Perhubungan Udara									6.021,26	15.186,19	16.769,12	17.343,43	17.020,63	72.344,64	6.918,09	2.167,42	48,20	81.478,32	1.000,00	10.420,00	0,00	3.974,00	17.394,00	
	Prioritas Nasional									1.938,43	5.747,41	5.936,17	5.801,69	4.039,44	23.573,13	41,82	2.162,59	0,00	25.777,53	1.000,00	10.420,00	0,00	3.974,00	17.394,00	
	Prioritas Eselon									194,78	262,00	310,01	326,11	388,26	1.481,26	0,00	0,00	0,00	1.481,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prioritas K/L									2.189,42	3.276,13	3.762,50	5.812,27	3.837,97	16.880,29	1.170,58	4,84	0,00	18.055,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Indikasi/Belanja Non-Operasional Dukungan Manajemen / Penunjang Teknis									558,56	555,06	557,93	590,66	565,48	2.755,62	5.705,86	0,00	0,20	8.501,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Indikasi Belanja Operasional									1.870,06	1.678,07	1.794,80	1.918,96	2.081,71	9.014,20	0,00	0,00	0,00	9.014,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Indikasi Kebutuhan di Luar RPJMN									0,00	3.644,93	4.387,79	4.922,63	5.694,08	18.650,04	0,00	0,00	48,20	18.698,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Ditjen Perkeretaapian									7.830,24	13.748,19	17.862,11	19.346,12	16.308,03	75.092,79	99,41	23.798,84	1.471,00	101.462,0	124.246,7	16.952,00	32.769,00	350,00	174.317,7	
	Prioritas Nasional									3.002,20	6.144,01	11.572,77	13.097,40	11.341,73	46.149,11	0,00	20.642,81	1.470,00	68.461,92	117.783,94	1.010,00	32.769,00	0,00	151.562,94	
	Prioritas Eselon									149,00	363,90	180,28	196,31	221,14	912,63	0,00	0,00	0,00	912,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Prioritas K/L									1.197,22	1.198,00	1.539,91	1.271,80	1.620,86	6.762,37	37,41	0,00	1,80	6.801,79	2.914,00	0,00	0,00	0,00	2.914,00	
	Indikasi/Belanja Non-Operasional Dukungan Manajemen / Penunjang Teknis									267,76	290,08	306,60	338,30	371,53	1.574,14	52,00	0,00	0,00	1.626,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Indikasi Belanja Operasional									172,43	184,33	197,35	210,64	225,28	989,03	0,00	0,00	0,30	989,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Indikasi Kebutuhan di Luar RPJMN									3.100,73	3.767,87	4.087,10	4.240,07	4.528,10	19.703,88	0,00	2.156,03	0,00	22.860,19	3.348,84	15.942,00	0,00	350,00	19.640,84	

dalam miliyar rupiah

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	LOKASI	SATKER	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024																	PRIO
					2020	2021	2022	2023	2024	RUPIAH MURNI (RM)						PHLN / SLO	SBSN	PNBP	TOTAL APBN	KODE APBN 2020-2024							
										2020	2021	2022	2023	2024	RM												
11	**Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan**									161,38	204,94	225,21	227,77	258,14	1.077,58	0,00	0,00	0,00	1.077,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Prioritas Nasional									7,76	6,09	5,90	4,79	5,48	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Prioritas Bidang									53,73	62,76	76,02	71,40	87,34	351,25	0,00	0,00	0,00	351,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Indikasi Belanja Non-Operasional Dukungan Manajemen / Perusahaan Teknis									52,97	49,93	43,47	43,17	46,51	238,05	0,00	0,00	0,00	238,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Indikasi Belanja Operasional									44,91	36,31	30,40	82,12	96,07	289,81	0,00	0,00	0,00	289,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Indikasi Kebutuhan di Luar RPJMN									1,99	29,84	47,42	84,81	112,74	276,80	0,00	0,00	0,00	276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan**									1.985,72	1.638,00	6.525,16	7.309,53	6.989,14	21.913,56	6.647,76	0,00	0,00	28.561,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Prioritas Nasional									1.586,32	1.723,43	1.798,90	1.886,21	1.994,85	9.028,90	4.051,78	0,00	0,00	13.080,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Prioritas Bidang									213,02	314,84	321,34	377,80	373,30	2.200,28	128,25	0,00	0,00	2.328,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Prioritas K/L									93,19	106,20	120,34	137,59	147,71	607,10	870,87	0,00	0,00	1.477,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Indikasi Belanja Non-Operasional Dukungan Manajemen / Perusahaan Teknis									398,61	633,92	493,27	676,87	800,76	3.004,43	114,42	0,00	0,00	3.118,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Indikasi Belanja Operasional									768,51	769,01	784,30	800,08	816,10	3.938,00	474,91	0,00	0,00	4.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Indikasi Kebutuhan di Luar RPJMN									360,10	4.085,50	3.051,83	2.781,28	2.704,33	13.183,05	1.007,54	0,00	0,00	14.190,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	**Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek**									218,84	348,49	388,75	736,92	761,00	2.874,00	0,00	0,00	0,00	2.874,00	13.640,00	0,00	27.510,00	0,00	41.150,00			
	Prioritas Nasional									32,68	369,96	379,33	390,33	339,75	1.862,10	0,00	0,00	0,00	1.862,10	13.640,00	0,00	27.510,00	0,00	41.150,00			
	Prioritas K/L									64,19	34,24	76,06	76,63	75,09	346,51	0,00	0,00	0,00	346,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	IndikasiBelanjaNon-OperasionalDukunganManajemen/ Perusahaan Teknis									67,84	65,28	70,48	72,69	74,09	350,32	0,00	0,00	0,00	350,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Indikasi Belanja Operasional									84,12	87,91	91,97	96,30	70,85	411,23	0,00	0,00	0,00	411,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Indikasi Kebutuhan di Luar RPJMN									0,00	0,80	0,90	1,00	1,12	3,82	0,00	0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

REKAPITULASI INDIKASI PENDANAAN BERDASARKAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA STRATEGIS

INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN

dalam miliar rupiah

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	LOKASI	SATKER	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024										RKK APBN 2020-2024					PRIO
										RUPIAH MURNI (RM)						PNBP / BLU	SBSN	PHLN	TOTAL APBN	KEMU	SUMB	APBD	SWASTA	RKK APBN	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	RM										
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN									31.116,32	39.191,28	63.637,03	66.404,95	66.194,36	281.543,94	23.056,59	27.204,26	7.399,81	340.196,74	146.980,14	153.502,80	62.179,80	6.320,00	370.595,74	
08 01	**Terwujudnya Konektivitas Nasional**									8.795,32	18.274,41	23.113,74	24.310,62	23.856,07	98.200,17	478,94	26.743,39	7.551,71	133.024,21	143.880,14	143.082,80	56.229,00	950,00	345.311,14	
01	*Rasio Konektivitas Nasional*			rasio	0,624	0,666	0,693	0,725	0,763	8.795,32	18.274,41	23.113,74	24.310,62	23.856,07	98.200,17	478,94	26.743,39	7.551,71	133.024,21	143.880,14	143.082,80	56.229,00	950,00	345.311,14	
08 02	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi**									5.440,77	13.820,99	15.940,88	16.977,29	16.195,96	68.535,36	905,16	586,27	44,80	68.568,80	1.890,00	10.420,00	6.100,00	3.374,00	23.834,00	
02A	*Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi*			Indeks	80	82	82	88,4	88,5	2.859,65	4.221,71	4.312,13	4.306,74	4.241,82	19.944,05	311,88	45,38	0,00	20.301,31	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
02B	*On Time Performance Layanan Transportasi*			%	74,8	76,62	78,44	80,26	82,08	2.581,12	9.597,28	11.628,22	11.770,56	11.954,13	46.991,32	288,28	540,89	48,80	47.868,29	1.890,00	10.420,00	2.100,00	3.374,00	19.784,00	
08 03	**Meningkatnya Keselamatan Transportasi**									3.808,28	7.007,43	7.468,10	8.050,67	7.733,73	33.818,24	3.384,64	34,60	0,00	39.224,49	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	
03	*Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 1 Juta Keberangkatan*			rasio	31,99	31,53	28,83	26,39	23,71	3.505,28	7.007,43	7.468,10	8.050,67	7.733,73	33.818,24	3.384,64	34,60	0,00	39.224,49	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	
08y 04	**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum**									601,86	713,28	832,83	868,44	938,98	3.955,36	282,12	0,00	0,00	4.137,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	*Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum*			%	73,8	80	86,2	88,3	94,8	601,86	713,28	832,83	868,44	938,98	3.955,36	282,12	0,00	0,00	4.137,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08y 05	**Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten**									1.876,17	3.343,69	3.112,10	3.614,06	3.121,18	15.067,21	4.934,22	0,00	0,00	20.001,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	*Tingkat Penanaman SDM Transportasi yang Kompeten*			%	80	85	85	85	85	1.876,17	3.343,69	3.112,10	3.614,06	3.121,18	15.067,21	4.934,22	0,00	0,00	20.001,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08y 06	**Meningkatnya Kualitas Transportasi yang Berkelanjutan**									3,38	5,07	7,86	11,67	17,12	45,11	0,00	0,00	0,00	45,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	*Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Transportasi*			%	66,67	72,51	81,09	89,86	100	3,38	5,07	7,86	11,67	17,12	45,11	0,00	0,00	0,00	45,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08y 07	**Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian**									341,16	347,61	403,73	425,24	448,28	1.965,96	1.577,30	0,00	0,00	3.543,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	*Opini BPK "Wajar Tanpa Pengecualian"*			%	100	100	100	100	100	341,16	347,61	403,73	425,24	448,28	1.965,96	1.577,30	0,00	0,00	3.543,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08y 08	**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**									9.693,56	12.650,83	13.289,33	13.146,95	13.933,07	61.611,55	9.798,99	0,00	0,00	71.410,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	*Indeks RB Kementerian Perhubungan*			nilai	78	79	79,5	80	80,5	9.652,38	12.630,82	13.258,33	13.146,95	13.923,07	61.611,55	9.798,99	0,00	0,00	71.410,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

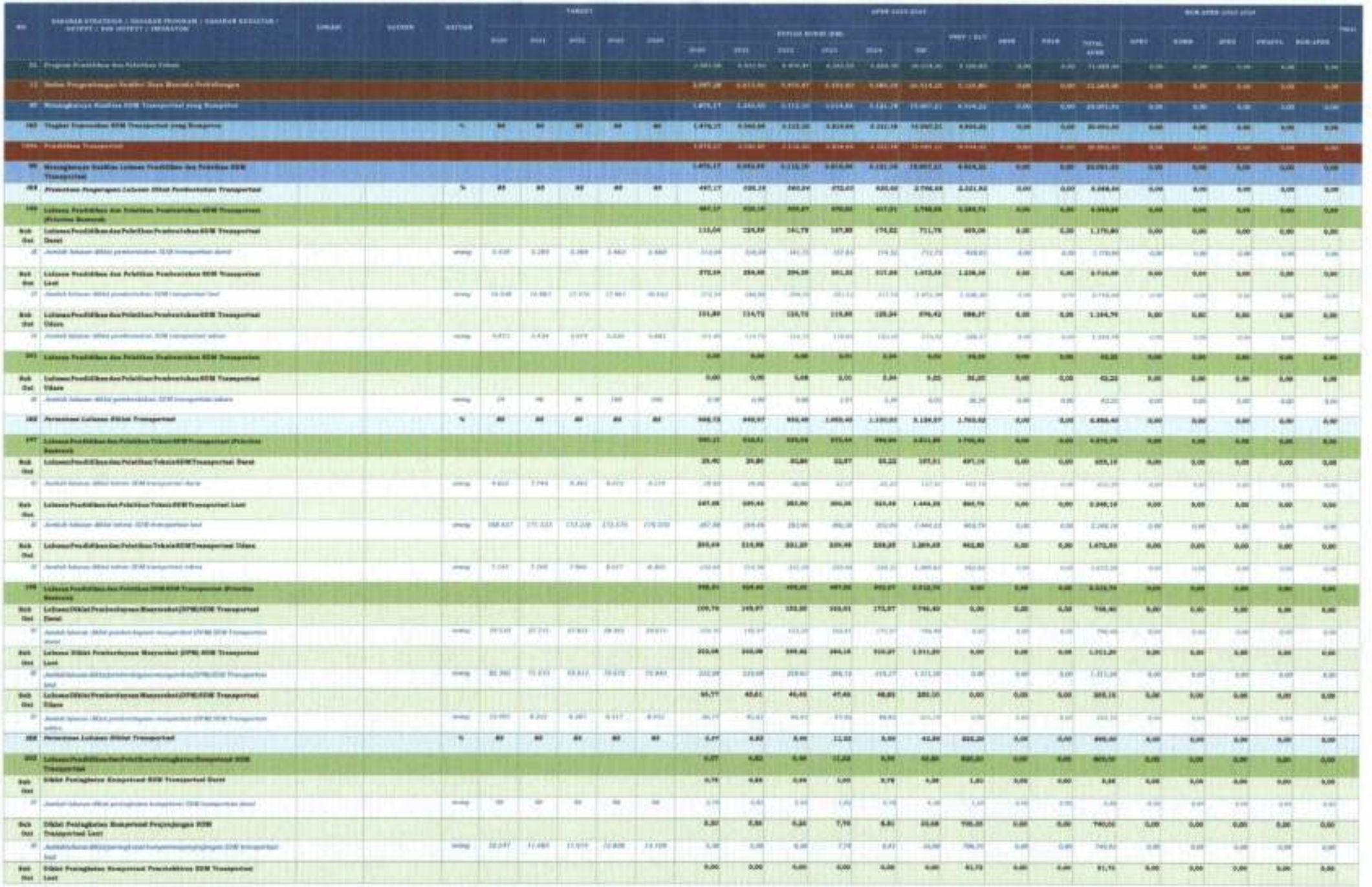

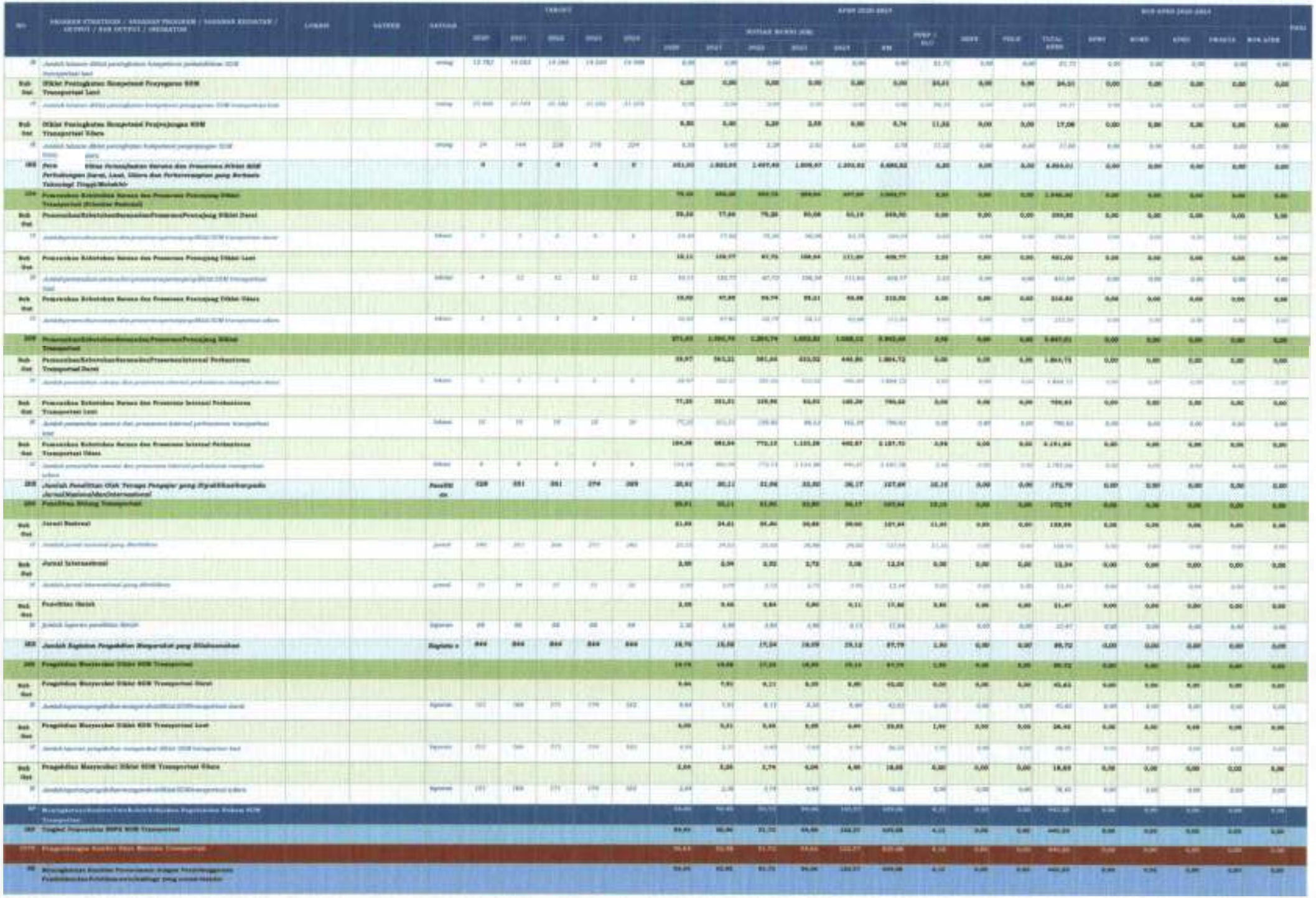

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / LEVERATAN	LOKASI	KATEGORI	SATUAN	TARGET					APBN TAHUN 2024										RKA APBN TAHUN 2025-2029					PAGU
					2020	2021	2022	2023	2024	RUPIAH MURNI (RM)					PNBP / BLU	HIBAH	PHLN	TOTAL APBN						
										2020	2021	2022	2023	2024	RM										
000	Persentase Keterpaduan Jalur Pemerintah dengan Pengelinggaran Pendidikan dan Pelatihan yang sesuai standar serta lembaga yang terakreditasi			%	100	100	100	100	100	38,84	33,49	91,73	84,44	102,37	429,08	4,12	0,00	0,00	443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Pengembangan Model dan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi									38,84	48,84	44,84	43,22	44,74	217,14	4,12	0,00	0,00	221,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Pengembangan Model dan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi Diklat SDM Transportasi Darat									9,87	12,33	14,47	12,33	13,46	66,14	0,00	0,00	0,00	66,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah model dan bahan ajar berbasis kompetensi SDM transportasi darat yang dikembangkan			Dokumen	100	100	100	100	100	9,87	12,33	14,47	12,33	13,46	66,14	0,00	0,00	0,00	66,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Pengembangan Model dan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi Diklat SDM Transportasi Laut									12,11	12,01	14,00	17,22	14,84	70,48	4,12	0,00	0,00	83,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah model dan bahan ajar berbasis kompetensi SDM transportasi laut yang dikembangkan			Dokumen	100	100	100	100	100	12,11	12,01	14,00	17,22	14,84	70,48	4,12	0,00	0,00	83,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Pengembangan Model dan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi Diklat SDM Transportasi Udara									8,86	11,84	14,84	17,00	16,74	70,48	0,00	0,00	0,00	70,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah model dan bahan ajar berbasis kompetensi SDM transportasi udara yang dikembangkan			Dokumen	100	100	100	100	100	8,86	11,84	14,84	17,00	16,74	70,48	0,00	0,00	0,00	70,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	Lulusan Tidak dan Jabatannya Yang Anggarannya Diatur SDM Transportasi									38,98	39,02	39,14	44,14	44,84	166,01	0,00	0,00	0,00	166,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Sertifikasi, Akreditasi dan Manajemen Mutu Diklat SDM Transportasi Darat									2,44	2,00	2,00	2,00	2,00	22,44	0,00	0,00	0,00	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah lapanan sertifikasi, akreditasi dan manajemen mutu diklat SDM transportasi darat			Dokumen	2	2	2	2	2	2,44	2,00	2,00	2,00	2,04	22,44	0,00	0,00	0,00	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Sertifikasi, Akreditasi dan Manajemen Mutu Diklat SDM Transportasi Laut									2,87	2,02	2,04	2,02	13,29	41,24	0,00	0,00	0,00	41,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah lapanan sertifikasi, akreditasi dan manajemen mutu diklat SDM transportasi laut			Dokumen	10	10	10	10	10	2,87	2,02	2,04	2,02	13,29	41,24	0,00	0,00	0,00	41,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Sertifikasi, Akreditasi dan Manajemen Mutu Diklat SDM Transportasi Udara									8,80	11,02	14,00	13,14	16,22	74,23	0,00	0,00	0,00	74,23	0,00					
	Jumlah lapanan sertifikasi, akreditasi dan manajemen mutu diklat SDM transportasi udara			Dokumen	70	81	20	20	20	8,80	11,02	14,00	13,14	16,22	74,23	0,00									
Sub Out	Penyusunan AKREDI SDM Transportasi Darat									0,85	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	0,00									
	Jumlah lapanan AKREDI SDM transportasi darat			Dokumen	1	1	1	1	1	0,85	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	0,00									
Sub Out	Penyusunan AKREDI SDM Transportasi Laut									1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
	Jumlah lapanan AKREDI SDM transportasi laut			Dokumen	1	0	0	0	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00									
Sub Out	Penyusunan AKREDI SDM Transportasi Udara									1,00	1,00	1,01	1,77	1,90	6,68	0,00	0,00	0,00	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah lapanan AKREDI SDM transportasi udara			Dokumen	1	1	1	1	1	1,00	1,00	1,01	1,77	1,90	6,68	0,00	0,00	0,00	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Penyusunan Grand Desain SDM Transportasi Darat									1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah lapanan grand desain SDM transportasi darat			Dokumen	1	0	0	0	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Penyusunan Grand Desain SDM Transportasi Laut									1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah lapanan grand desain SDM transportasi laut			Dokumen	1	0	0	0	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Penyusunan Grand Desain SDM Transportasi Udara									1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,01	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah lapanan grand desain SDM transportasi udara			Dokumen	1	0	0	0	0	1,00	0,00	0,00	0,00	1,01	4,01	0,00	0,00	0,00	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	Layanan Perencanaan									8,49	12,00	12,84	13,84	14,00	61,40	0,00	0,00	0,00	61,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Perencanaan Kebijakan Teknis Bidang Kualitas Depo Manula Transportasi Darat									0,82	1,08	1,87	1,89	1,71	7,30	0,00	0,00	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah lapanan perencanaan dan kebijakan teknis bidang SDM transportasi darat			Dokumen	2	2	2	2	2	0,82	1,08	1,87	1,89	1,71	7,30	0,00	0,00	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Perencanaan dan Kebijakan Teknis Bidang Kualitas Depo Manula Transportasi Laut									3,44	3,84	4,82	4,84	7,44	21,44	0,00	0,00	0,00	21,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah lapanan perencanaan dan kebijakan teknis bidang SDM transportasi laut			Dokumen	2	12	12	10	10	2,44	3,84	4,82	4,84	7,44	21,44	0,00	0,00	0,00	21,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Perencanaan dan Kebijakan Teknis Bidang Kualitas Depo Manula Transportasi Udara									1,20	2,41	4,97	4,82	2,42	18,24	0,00	0,00	0,00	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah lapanan perencanaan dan kebijakan teknis bidang SDM transportasi udara			Dokumen	2	0	0	0	0	1,20	2,41	4,97	4,82	2,42	18,24	0,00	0,00	0,00	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	Tingkat Pengawasan dan Pengendalian SDM Transportasi									8,00	8,80	8,80	8,81	7,00	31,10	0,01	0,00	0,00	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000	Pendidikan Transportasi									7,00	0,97	0,00	0,00	7,00	21,10	0,01	0,00	0,00	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005	Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi									8,00	8,80	8,80	8,81	7,00	31,10	0,01	0,00	0,00	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
022	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			%	0	0	0	0	0	8,00	8,80	8,80	8,81	7,00	31,10	0,01	0,00	0,00	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	Sasaran Pasca Diklat									8,00	8,80	8,80	8,81	7,00	31,10	0,01	0,00	0,00	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Sasaran Pasca Diklat SDM Transportasi Darat									9,97	1,98	1,18	1,28	1,00	3,99	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR / KEGIATAN	LOKASI	SATUAN	TARGET					KINERJA MENURUT OPD										KINERJA APBDES 2020-2024					KET
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	RATA-RATA	PROP / KAB	PUSAT	PROV	KAB/KOTA	TOTAL APBDES	APBDES	APBDES	APBDES	APBDES	APBDES	

KODE	KEGIATAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR / DATA OUTPUT / DESKRIPSI	LOKASI	SATUAN	TARGET					KINERJA 2020-2024															
				2020	2021	2022	2023	2024	STATUS AKHIR (KAB.						PROP / KOT									
									2020	2021	2022	2023	2024	RATA										
01	Terwujudnya Keselamatan Transportasi Darat								1.206,00	1.772,41	3.427,77	4.205,41	4.964,19	15.577,77	0,00	922,11	0,00	16.749,77	1.697,00	600,00	0,00	0,00	1.852,00	
01.2	Kasie Keselamatan Transportasi Darat		satu	0,84	0,71	0,79	0,84	0,93	1.206,00	1.772,41	3.427,77	4.205,41	4.964,19	15.577,77	0,00	922,11	0,00	16.749,77	1.697,00	600,00	0,00	0,00	1.852,00	
0201	Subkoordinasi Keselamatan Transportasi Darat								1.206,00	1.772,41	3.427,77	4.205,41	4.964,19	15.577,77	0,00	922,11	0,00	16.749,77	1.697,00	600,00	0,00	0,00	1.852,00	
03	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat dan Kenyamanan Antarmoda Transportasi								1.206,00	1.772,41	3.427,77	4.205,41	4.964,19	15.577,77	0,00	922,11	0,00	16.749,77	1.697,00	600,00	0,00	0,00	1.852,00	
03.2	Jumlah/Ketiadaan/Ringan/Kebijaksanaan/pelanggaran/kecelakaan maksimal		Unggok	3800	3800	3810	3810	3820	135,00	180,00	200,00	220,00	220,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104	Layanan Keselamatan Transportasi (Prioritas Nasional)								135,00	180,00	200,00	220,00	240,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0104 Dak	Sapertainan Angkutan Jalan								146,00	166,00	206,00	200,00	260,00	948,00	0,00	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.01	Jumlah rute angkutan jalan perintis	Trayek	222	223	224	226	240	182,00	168,00	200,00	220,00	220,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
202	Persentase peningkatan kelayakan sarananda terhadap kuantitas 2019		%	14,29	28,57	42,86	57,14	71,43	60,00	60,70	61,70	61,70	61,70	316,90	0,00	0,00	0,00	316,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Layanan Keselamatan Transportasi Darat								60,00	60,70	61,70	61,70	61,70	316,90	0,00	0,00	0,00	316,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0204 Dak	Layanan Angkutan Perairan Rinin								60,00	60,70	61,70	61,70	61,70	316,90	0,00	0,00	0,00	316,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.01	Jumlah kelengkapan kesiapsiagaan angkutan perairan rinin	Nihil	12	14	14	14	14	60,00	60,70	61,70	61,70	61,70	316,90	0,00	0,00	0,00	316,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
203	Persentase pelaksanaanpenekbit angkutan barang sesuai ketentuan		%	31,3	31,7	62,5	82	100	20,00	46,88	60,94	80,27	153,13	317,00	0,00	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	Layanan Keselamatan Transportasi Darat								20,00	46,88	60,94	80,27	153,13	317,00	0,00	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0205 Dak	Layanan Kesperlainan Angkutan Barang								20,00	46,88	60,94	80,27	153,13	317,00	0,00	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.01	Jumlah rute pelayanan perlilit antar angkutan barang di jalan	lapanan	13	22	40	50	63	20,00	46,88	60,94	80,27	153,13	317,00	0,00	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
203	Waktu tempuh pada jalan kiras utama per paket	menit/1 00 km	0	240	200	171	150	0,00	800,00	666,00	760,00	800,97	2.266,97	0,00	0,00	0,00	2.266,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
206	Layanan Keselamatan Transportasi Darat								0,00	800,00	666,00	760,00	800,97	2.266,97	0,00	0,00	0,00	2.266,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0206 Dak	Pembangunan Intelligent Transport Management System(ASMS)								0,00	000,00	350,00	760,00	800,97	2.266,97	0,00	0,00	0,00	2.266,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.01	Jumlah ASMS yang Dibangun	lokasi	0	11	11	11	11	0,00	800,00	0,00	760,00	800,97	2.266,97	0,00	0,00	0,00	2.266,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
203	Tingkat pemanfaatan pembaritan kendaan dua sebelah	unit	72	220	230	220	220	240,00	270,00	286,00	260,00	680,00	2.204,00	0,00	0,00	0,00	2.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
204	Layanan Keselamatan Transportasi Darat								240,00	270,00	286,00	260,00	680,00	2.204,00	0,00	0,00	0,00	2.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0204 Dak	Pembelian Bantuan Bus Sekolah								140,00	174,00	180,00	280,00	280,00	1.324,00	0,00	0,00	0,00	1.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.01	Jumlah pembelian bus sekolah bantuan	unit	294	294	294	300	300	140,00	174,00	180,00	280,00	280,00	1.324,00	0,00	0,00	0,00	1.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
203	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal barang yang beroperasi dan siap dioperasikan	lokasi	204	204	211	212	214	120,00	000,00	120,00	60,00	140,00	812,70	0,00	104,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
101	Pembangunan/Pembinaan Keselamatan(Prioritas Nasional)								000,00	040,00	0,00	0,00	100,00	440,00	0,00	00,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101 Dak	Pembangunan Terminal Tipe A (Prioritas Nasional)								0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.01	Jumlah terminal tipe A (prioritas nasional) yang dibangun	unit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0101 Dak	Pembangunan Terminal Barang (Prioritas Nasional)								100,00	240,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	00,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.01	Jumlah terminal barang (prioritas nasional) yang dibangun	unit	0	0	1	0	0	100,00	240,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	00,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
201	Pembangunan Infrastruktur Keselamatan Transportasi Darat								00,00	110,00	100,00	00,00	00,00	300,00	0,00	00,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201 Dak	Pembangunan / Rehabilitasi Terminal Tipe A								00,00	110,00	100,00	00,00	00,00	300,00	0,00	00,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.01	Jumlah terminal tipe A yang dibangun	unit	0	0	0	1	1	00,00	110,00	100,00	00,00	00,00	300,00	0,00	00,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
202	Jumlah pengedaan/bertiba pendaftaran/registrasi awak	lokasi	0	11	20	30	30	20,00	00,00	40,00	00,00	00,00	200,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.697,00	0,00	0,00	0,00	1.697,00		
109	Kompensasi dan Pembangunan Infrastruktur Lainnya(Prioritas Nasional)								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,00	0,00	0,00	0,00	1.697,00	
0109 Dak	Pembangunan Infrastruktur Transportasi Darat di IKN								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,00	0,00	0,00	0,00	1.697,00	
.01	Jumlah pembangunan infrastruktur transportasi darat di IKN	lokasi	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,00	0,00	0,00	0,00	1.697,00		
104	Layanan Keselamatan Transportasi Darat								20,00	00,00	00,00	00,00	00,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0104 Dak	Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Rinin								20,00	00,00	00,00	00,00	00,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.01	Jumlah simpul transportasi nasional yang terintegrasi fasilitas pendukung dan integrasi rinin	lokasi	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
.02	Jumlah kawasan strategis nasional yang terhigasi fasilitas pendukung dan integrasi rinin	lokasi	0	0	0	0	0	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
102	Jumlah kinian pelayanan angkutan penyeberangan	Kinian	222	227	232	232	232	222,02	227,12	222,02	222,12	702,02	2.122,02	0,00	0,00	0,00	2.122,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

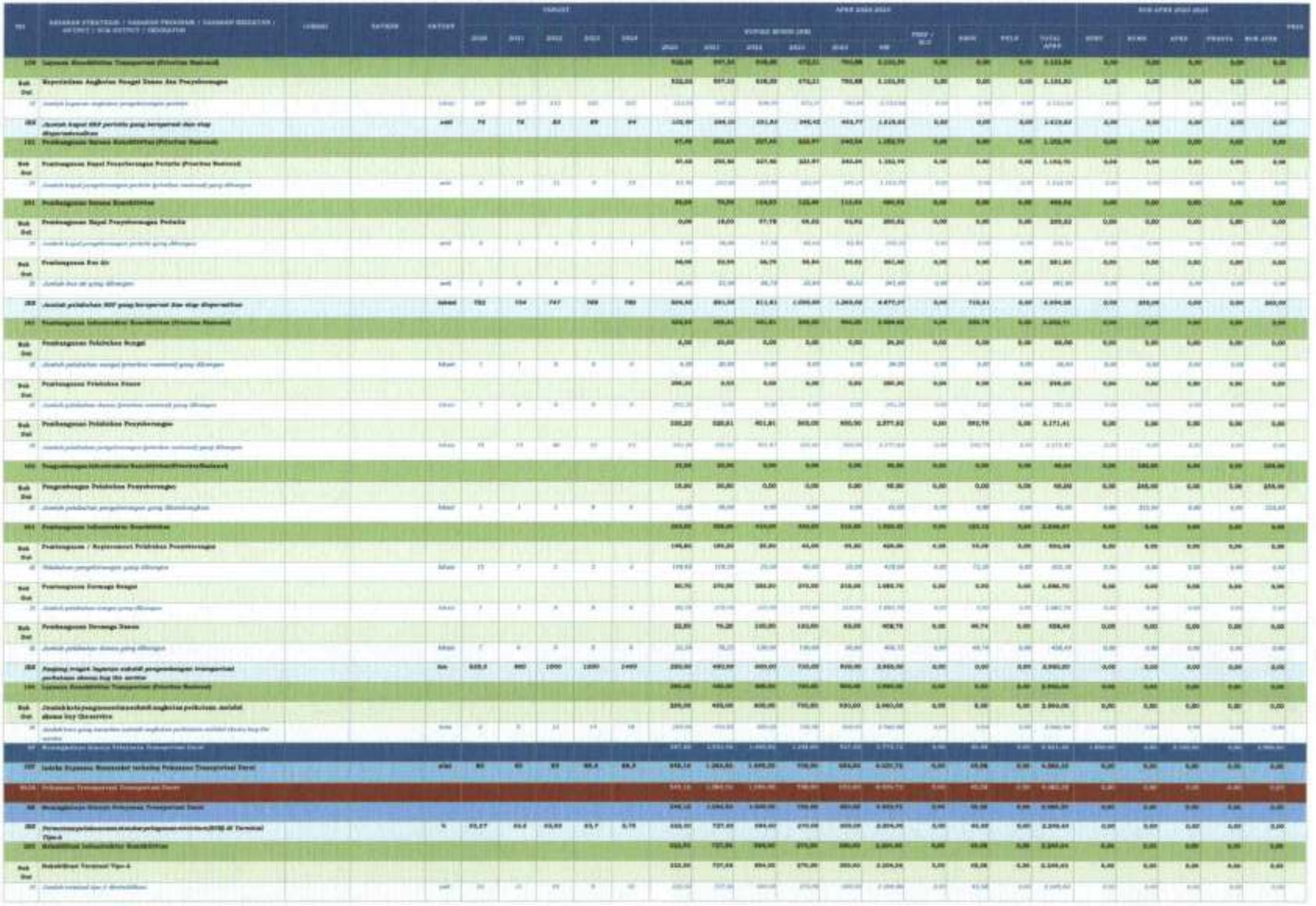

No	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Output / Sub Output / Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi 2020-2024									Realisasi 2020-2024					Ket
				2020	2021	2022	2023	2024	Rupiah Murni (RM)						Pinjaman Luar Negeri (PLN)								
									2020	2021	2022	2023	2024	Jml	Pinjaman	Hibah	Total PLN	Total	2020	2021	2022	2023	2024	
[illegible]	**Persentase pelabuhan utama yang memenuhi SPM di pelabuhan** **KSP**		%	71	72	74	76	79	295,00	280,00	300,00	340,00	280,00	1.495,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	**Kebutuhan kapasitas kendaraan**								300,00	280,00	300,00	340,00	295,00	1.495,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Keluaran	**Jumlah pelabuhan penyeberangan yang dioperasikan**			145,00	150,00	315,00	315,00	181,00	916,00	0,00	0,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
[illegible]	Jumlah pelabuhan penyeberangan yang dioperasikan		unit	8	8	9	9	7	132,00	130,00	174,00	174,00	100,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Keluaran	**Jumlah lintasan sungai yang dioperasikan**			98,00	100,00	140,00	140,00	100,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
[illegible]	Jumlah pelabuhan sungai yang dioperasikan		unit	5	7	8	8	5	98,00	100,00	140,00	140,00	100,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Keluaran	**Jumlah lintasan danau yang dioperasikan**			16,00	50,00	35,00	35,00	15,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
[illegible]	Jumlah pelabuhan danau yang dioperasikan		unit	1	1	1	1	1	13,00	30,00	35,00	35,00	15,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	**Persentase penumpang BRATT Terminal Tipe A**		%	70,24	72,7	77,24	82,4	83,73	77,64	75,00	230,00	68,00	82,00	302,64	0,00	0,00	0,00	302,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	**Pengelolaan Infrastruktur Kendaraan Transportasi Darat**			77,64	77,00	230,00	68,00	82,00	302,64	0,00	0,00	0,00	302,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Keluaran	**Digitalisasi Terminal Tipe A**			17,00	77,00	108,00	68,00	82,00	302,64	0,00	0,00	0,00	302,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
[illegible]	Jumlah lokasi digitalisasi terminal tipe A		unit	4	11	12	14	9	17,64	77,00	108,00	68,00	82,00	302,64	0,00	0,00	0,00	302,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	**ATP Transportasi Jalan**		%	50	60	65	67	70	42,72	600,00	600,00	650,00	210,00	1.722,72	0,00	0,00	0,00	1.722,72	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	**Pengelolaan Transportasi Transportasi Darat**			42,72	600,00	600,00	650,00	210,00	1.722,72	0,00	0,00	0,00	1.722,72	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00						
[illegible]	**Meningkatnya Fasilitas dan Layanan Transportasi Perairan Berbasis Jalan**			42,72	600,00	600,00	650,00	210,00	1.722,72	0,00	0,00	0,00	1.722,72	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00						
[illegible]	**Baku mutu parameter ekspansi penumpang angkutan umum massal perhatian berbasis jalan yang ditingkatkan log the service**		%	20	40	60	60	70	42,72	600,00	600,00	650,00	210,00	1.722,72	0,00	0,00	0,00	1.722,72	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	**Layanan Transportasi Perairan Pedalaman**			42,72	600,00	600,00	650,00	210,00	1.722,72	0,00	0,00	0,00	1.722,72	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00						
Sub Out	**Pengembangan Kereta Angkutan Massal Perkotaan Berbasis Jalan**			42,72	600,00	600,00	650,00	210,00	1.722,72	0,00	0,00	0,00	1.722,72	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00						
[illegible]	Jumlah kereta yang beroperasi untuk angkutan massal perkotaan		lokasi	12	4	6	11	11	42,72	600,00	600,00	650,00	210,00	1.722,72	0,00	0,00	0,00	1.722,72	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	Jumlah kota yang mengoperasikan sistem angkutan massal perkotaan		lokasi	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	**Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	**Biaya Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Kendaraan**		Index	0,02	0,019	0,018	0,018	0,017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	**Kecelakaan Lalu Kendaraan Transportasi Darat**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	**Meningkatnya Kecelakaan Transportasi Darat**			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	**Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal**		%	2	9	19	32	39	650,22	1.700,79	2.312,01	2.800,34	1.800,79	7.866,77	0,00	0,00	0,00	7.866,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	**Peningkatan Keselamatan Transportasi (Prioritas Nasional)**			618,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Sub Out	**Peningkatan Jalan**			618,00	1.700,00	1.700,00	1.538,00	1.538,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
[illegible]	Jumlah lokasi perambuan dan penerangan perlengkapan jalan		provinsi	10	20	30	30	30	618,00	1.700,00	1.700,00	1.538,00	1.538,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	**Pengelolaan Infrastruktur Kendaraan Transportasi Darat**			32,22	70,24	32,01	70,74	32,22	302,27	0,00	0,00	0,00	302,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Sub Out	**Pengawasan Lokasi Kamsa Kendaraan**			5,10	5,00	5,00	5,70	5,70	25,10	0,00	0,00	0,00	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
[illegible]	Jumlah lokasi perbaikan rutin kendaraan		unit	10	10	10	10	9	5,10	5,00	5,00	5,70	5,70	25,10	0,00	0,00	0,00	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	**Pemeliharaan Rutin Kendaraan Jalan**			34,00	70,24	30,01	70,70	30,22	302,27	0,00	0,00	0,00	302,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
[illegible]	Jumlah lokasi pemeliharaan perlengkapan jalan		provinsi	30	30	30	30	30	34,22	70,24	30,01	70,70	30,22	302,27	0,00	0,00	0,00	302,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	**Persentase Penanggulangan/Penanganan Kecelakaan Angkutan Perlintasan Sebidang**		%	50	50	50	50	50	77,00	150,00	400,00	800,00	400,00	1.827,00	0,00	0,00	0,00	1.827,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
[illegible]	**Pembangunan / Pengadaan Fasilitas Keselamatan Jalan**			77,00	150,00	400,00	800,00	400,00	1.827,00	0,00	0,00	0,00	1.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Sub Out	**Pembangunan Unit Pelaksana Pembangun Keselamatan Perlintasan (UPPKB)**			32,00	50,00	275,00	270,00	180,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	1.207,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00						
[illegible]	Jumlah prasarana pembangunan keselamatan lainnya dibangun		unit	0	0	12	20	20	32,00	50,00	275,00	270,00	180,00	1.207,00	0,00	0,00	0,00	1.207,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Sub Out	**Rehabilitasi Unit Pelaksana Pembangun Keselamatan Perlintasan (UPPKB)**			39,00	110,00	130,00	130,00	140,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
[illegible]	Jumlah prasarana pembangunan keselamatan lainnya dibangun		unit	0	10	20	20	20	32,00	110,00	130,00	130,00	140,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	**Jumlah kecelakaan/kejadian kecelakaan di KA, Jalan dan Simpang di Jalan Nasional**		lokasi	80	81	110	100	100	32,22	50,00	102,00	82,00	80,00	426,22	0,00	0,00	0,00	426,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	**Pengelolaan dan Infrastruktur Kendaraan Transportasi Darat**			32,22	50,00	102,00	82,00	80,00	426,22	0,00	0,00	0,00	426,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

IKU	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI	SATUAN	TARGET					APBN TAHUN 2024										RKAP TAHUN 2024					PMN
				2020	2021	2022	2023	2024	KEGIATAN BERSUMBER						PMN / PLN	RKAKL	PLN	TOTAL APBN	KEMEN	BUMN	APBN	PRIVATE	RKAP NON APBN	
									2020	2021	2022	2023	2024	RM											
Sub Out	**Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)**								22,51	55,00	156,50	55,00	93,00	420,51	0,00	0,00	0,00	420,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah lokasi zona selamat sekolah (ZoSS) dibangun	unit	7	20	20	20	20	78,51	75,00	75,00	75,00	75,00	378,51	0,00	0,00	0,00	378,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah lokasi implementasi kesiapsiagaan bencana dibangun	unit	0	0	0	0	0	0,00	12,00	12,00	12,00	18,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah lokasi rute rawan kecelakaan (RKK) dibangun	unit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKU	**Jumlah keterediaan taksi ekonomi**	lokasi	0	0	0	0	0	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	**Pengelolaan Sub Kelembagaan Kendaraan Transportasi Darat**								0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	**Pembangunan Taksi Ekonomi**								0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah taksi ekonomi yang dibangun	unit	0	0	0	0	0	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKU	**Jumlahmasyarakatyangterselamatkandalamkecelakaan transportasi jalan**	orang	19000	20000	20000	20000	20000	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	107,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB	**Pengelolaan Kendaraan Transportasi Darat**								19,00	32,00	20,00	20,00	20,00	107,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	**Jumlah Pelaku Kendaraan Dioperasikan**								19,00	32,00	20,00	20,00	20,00	107,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah pelaku kendaraan dioperasikan	unit	11	11	11	11	11	11,00	16,00	10,00	10,00	10,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKU	**Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan standar internasional (OIML)**	unit	0	0	17	14	17	0,00	20,00	20,00	220,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	
143	**Fasilitasi Kendaraan Transportasi (Prioritas Nasional)**								0,00	20,00	20,00	220,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	
Sub Out	**Pemerian Alat Uji Kendaraan Bermotor**								0,00	20,00	20,00	220,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	
IK	Jumlah fasilitas pengujian (KIR/OIML) dibangun	fasilitas	0	0	0	0	0	0,00	20,00	20,00	220,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	
IKU	**Persentase standarisasi pengujian berbasis kendaraan bermotor**	%	49	51	55	59	63	17,94	19,78	21,73	23,90	26,07	109,42	317,25	0,00	0,00	426,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300	**Fasilitasi dan Sertifikasi Kendaraan Transportasi Darat**								17,94	19,78	21,73	23,90	26,07	109,42	0,00	0,00	0,00	109,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	**Pengelolaan Alat Uji Berbasis Kendaraan Bermotor**								17,94	19,78	21,73	23,90	26,07	109,42	0,00	0,00	0,00	109,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah alat kalibrasi uji berbasis kendaraan bermotor yang dioperasikan	unit	20	20	20	20	20	17,94	19,78	21,73	23,90	26,07	109,42	0,00	0,00	0,00	109,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
155	**Pengelolaan Kendaraan Transportasi Darat**								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,25	0,00	0,00	317,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	**Jumlah Sabil Jalan uji elektronik disetab**								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,25	0,00	0,00	317,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah Jalan Jalan uji elektronik disetab	unit	253.694	2.000.000	3.000.000	2.750.000	3.875.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,25	0,00	0,00	317,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KEM	Kemenhub Tahun Transportasi Darat								4,91	4,91	4,91	4,91	5,11	24,94	0,00	0,00	0,00	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	**Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat**								4,91	4,91	4,91	4,91	5,11	24,94	0,00	0,00	0,00	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKU	**Terbentuknya Lembaga Keselamatan Transportasi**	Jogjakarta	1	1	1	1	1	0,92	4,92	4,92	4,92	5,11	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
137	**Kelembagaan Keselamatan Transportasi**								0,92	4,91	4,91	4,91	5,11	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	**Pembentukan Kelembagaan Keselamatan Transportasi**								4,91	4,91	4,91	4,91	5,11	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah kelembagaan keselamatan transportasi yang dibentuk	lokasi	20	20	20	20	20	4,91	4,91	4,91	4,91	5,11	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
307	**Nasa Rajadun Keselakaan Transportasi 2019 per 10.000 Penduduk**	nasa	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	102,00	102,10	100,00	102,00	107,00	1.373,10	0,00	0,00	0,00	1.373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KEM	Kemenhub dan Kemenhub Transportasi Darat								106,90	111,10	104,91	106,91	107,11	1.373,10	0,00	0,00	0,00	1.373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	**Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat**								106,90	111,10	104,91	106,91	107,11	1.373,10	0,00	0,00	0,00	1.373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKU	**Jumlah alur pelayaran sungai yang ditetapkan**	lokasi	13	18	22	28	28	112,94	112,75	110,82	202,95	219,00	1.386,14	0,00	0,00	0,00	1.386,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
307	**Pengembangan Infrastruktur Kendaraan Transportasi Darat**								87,94	92,00	62,00	92,00	72,00	323,94	0,00	0,00	0,00	323,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	**Pembangunan Kawasan Basis Bengkel Pelayaran (KBB)**								87,94	90,00	62,00	92,00	72,00	323,94	0,00	0,00	0,00	323,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah armada kapal mengejar pelayaran yang dibangun	unit	0	0	0	0	0	0,00	10,00	0,00	20,00	20,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah pengelolaan rambu sungai dan danau	unit	0	0	0	0	0	0,00	10,00	20,00	10,00	7,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah balai sungai yang dibangun	unit	0	0	0	0	0	87,94	72,00	42,00	62,00	45,00	323,94	0,00	0,00	0,00	323,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
305	**Pengelolaan Kawasanan Transportasi Darat**								19,00	210,00	200,00	100,00	100,00	602,00	0,00	0,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	**Sistem Pengaturan Lalu Lintas Kapal Sungai, Danau, dan Penyeberangan**								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah sistem pemantauan lalu lintas kapal SLP (VTS) dibangun	lokasi	1	2	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah pelabuhan terlatih telah penyidik pelayaran SAT	lokasi	20	20	20	20	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator / Non-Indikator / Deskripsi	Lokasi	Satker	Satuan	Target					Kinerja 2020-2024										Rencana Kinerja 2020-2024						Ket
					2020	2021	2022	2023	2024	Rencana Kinerja (RK)						Pagu/ DIPA	Kinerja	Fisik	Total Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Kinerja	Rata-rata	
										2020	2021	2022	2023	2024	Rata											
Rek Ind	**Strategi Sasaran Pelayanan Bangsa, Dasar dan Pengembangan**				70,00	210,00	280,00	140,00	140,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah alat pelayanan warga, dasar, dan pengembangan diversifikasi	Unit	1	3	4	2	2	70,00	210,00	280,00	140,00	140,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKU	**Jumlah biaya pengeluaran KDP yang terlaksana pengawasan kapal patroli navigasi pos**	**Satu**	**3**	**19**	**33**	**48**	**83**	**69,28**	**77,68**	**14,20**	**30,10**	**28,10**	**197,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**197,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
IKU	**Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Transportasi Darat**				**34,28**	**17,40**	**19,20**	**30,10**	**28,10**	**127,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Rek Ind	**Jumlah kapal patroli KDP yang dibangun**				**28,18**	**17,40**	**19,20**	**30,10**	**28,10**	**127,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
IK	Jumlah kapal patroli navigasi pos yang dibangun	unit	3	3	3	4	4	28,18	17,40	19,20	30,10	28,10	127,08	0,00	0,00	0,00	127,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKU	**Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pengelolaan Pelabuhan Transportasi Darat**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
IKU	**Tingkat Pemenuhan SPM Transportasi Darat**	%	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
IKU	**Terpenuhinya Tarif Transportasi Darat**																						
IKU	**Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pengelolaan Pelabuhan Transportasi Darat**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
IKU	**Terpenuhinya SPPB Transportasi Darat**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RKA	**Layanan Perkantoran**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Rek Ind	**Perawatan dan Rehabilitasi Transportasi Darat**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
IK	Jumlah fasilitas kajian kelaikan/sarana/prasarana lokasi kolong transportasi darat	Lapangan	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKU	**Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Transportasi Darat**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
IKU	**Tingkat Pengawasan dan Pengendalian Transportasi Darat**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RKA	**Pengawasan Teknis Transportasi Darat**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
KP	**Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Transportasi Darat**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
IKU	**Jumlah Pengawasan dan Pendamalian Transportasi Darat**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RKA	**Layanan Monitoring dan Evaluasi**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Rek Ind	**Pengawasan dan Pengendalian Transportasi Darat**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
IK	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian transportasi darat																						
KP	**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**				**174,42**	**111,28**	**127,44**	**112,70**	**192,09**	**677,12**	**164,42**	**0,00**	**0,00**	**841,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
IKU	**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Unit Eselon I Transportasi Darat**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**164,42**	**111,28**	**127,44**	**112,70**	**192,09**	**677,12**	**164,42**	**0,00**	**0,00**	**841,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RKA	**Pengelolaan Transportasi Darat**				**174,42**	**111,28**	**127,44**	**112,70**	**192,09**	**677,12**	**164,42**	**0,00**	**0,00**	**841,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
KP	**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Belanja Teknis Transportasi Darat**				**164,42**	**111,28**	**127,44**	**112,70**	**192,09**	**677,12**	**164,42**	**0,00**	**0,00**	**841,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
IKU	**Realisasi Pengelolaan Belanja Teknis Transportasi Darat**	**nihil**	**87**	**86**	**87**	**88**	**89**	**164,42**	**111,28**	**127,44**	**112,70**	**192,09**	**677,12**	**164,42**	**0,00**	**0,00**	**841,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
RKA	**Layanan Umum dan Pemerintahan Internal**				**30,00**	**12,00**	**13,00**	**18,00**	**19,00**	**92,00**	**164,00**	**0,00**	**0,00**	**256,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Rek Ind	**Rendahnya Belanja**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
IK	Jumlah pengadaan kendaraan dinasan	Kegiatan	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rek Ind	**Terwujud Pengelola Data dan Komunikasi**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,14**	**0,00**	**13,84**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**19,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
IK	Jumlah pengadaan perangkat pengelola data dan komunikasi	Kegiatan	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	13,84	1,00	0,00	0,00	19,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rek Ind	**Fasilitas Perkantoran**				**7,34**	**7,70**	**8,09**	**8,49**	**8,92**	**40,54**	**22,20**	**0,00**	**0,00**	**62,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
IK	Jumlah pengadaan fasilitas perkantoran	Kegiatan	1	1	1	1	1	7,34	7,70	8,09	8,49	8,92	40,54	22,20	0,00	0,00	62,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rek Ind	**Pembinaan / Koordinasi Bidang dan Anggaran**				**28,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,11**	**138,21**	**0,00**	**0,00**	**177,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
IK	Jumlah pembinaan / koordinasi bidang dan anggaran	Kegiatan	1	1	1	1	1	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28,11	138,21	0,00	0,00	177,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RKA	**Layanan Dukungan Manajemen Internal**				**154,74**	**132,19**	**119,44**	**111,88**	**127,83**	**775,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**775,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Rek Ind	**Pemeliharaan, Perawatan dan Pelaksanaan Anggaran Belanja**				**66,87**	**69,76**	**73,00**	**76,84**	**80,70**	**367,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**367,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
IK	Jumlah layanan pemeliharaan, perawatan dan pelaksanaan anggaran belanja	Layanan	0	0	0	0	0	66,87	69,76	73,00	76,84	80,70	367,18	0,00	0,00	0,00	367,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rek Ind	**Pengelolaan Anggaran Belanja**				**5,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
IK	Jumlah layanan pengelolaan anggaran belanja	Layanan	0	0	0	0	0	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	21,58	0,00	0,00	0,00	21,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rek Ind	**Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Belanja**				**2,14**	**2,24**	**2,35**	**2,47**	**2,60**	**11,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

No	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / AKTIVITI / SUB-AKTIVITI / INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024										REALISASI 2020-2024					PENG
				2020	2021	2022	2023	2024	RINCIAN ANGGARAN						TOTAL									
									2020	2021	2022	2023	2024	DAK										
01	Jumlah laporan keuangan dan pertanggungjawaban auditor		laporan	0	0	0	0	0	2,24	2,35	2,52	2,67	2,80	12,60	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	**Layanan Rakan**								**1,18**	**1,20**	**1,26**	**1,37**	**1,45**	**6,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
01	Jumlah laporan pengaduan rakyat		laporan	0	0	0	0	0	1,18	1,20	1,26	1,37	1,45	6,52	0,00	0,00	0,00	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	**Layanan Hiniages Menyeniat dan Informasi Daiker**								**1,81**	**1,89**	**1,46**	**1,70**	**1,84**	**8,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
01	Jumlah laporan pengaduan, hukum dan informasi		laporan	1	1	1	1	1	1,81	1,89	1,46	1,70	1,84	8,84	0,00	0,00	0,00	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	**Layanan Vavan dan Rosak Tenga Daiker**								**28,84**	**28,87**	**28,21**	**28,82**	**31,10**	**141,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
01	Jumlah laporan pengaduan layanan vavan dan rosak tenga auditor		laporan	1	1	1	1	1	28,84	28,87	28,21	28,82	31,10	141,84	0,00	0,00	0,00	141,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	**Pengelolaan Data dan Informasi Daiker**								**2,94**	**2,99**	**2,88**	**2,71**	**2,84**	**13,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
01	Jumlah laporan pengelolaan data dan informasi auditor		laporan	0	0	0	0	0	2,94	2,99	2,88	2,71	2,84	13,93	0,00	0,00	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	[illegible]								[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
02	Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Lasit								828,84	1.743,10	2.198,76	2.142,17	2.778,76	9.743,23	471,20	494,72	3.884,71	13.593,94	4.066,20	122.873,00	0,00	0,00	126.941,20	
021	Rata Kesediaan Transportasi Lasi	roda		0,68	0,69	0,68	0,6	0,61	828,84	1.743,10	2.198,76	2.142,17	2.778,76	9.743,23	471,20	494,72	3.884,71	13.593,94	4.066,20	122.873,00	0,00	0,00	126.941,20	
[illegible]	[illegible]								[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
									828,84	1.743,10	2.198,76	2.142,17	2.778,76	9.743,23	471,20	494,72	3.884,71	13.593,94	4.066,20	122.873,00	0,00	0,00	126.941,20	
022	Persentase Pencapaian Target Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan	%		0	20,22	39,97	70,92	100	828,84	1.677,10	1.972,02	2.004,64	1.948,28	8.328,32	494,17	494,72	3.882,71	16.047,92	4.066,20	122.873,00	0,00	0,00	126.941,20	
021	Pembangunan Infrastruktur Konektivitas (Prioritas Nasional)								0,00	12,14	84,00	191,44	90,00	391,59	10,00	0,00	4.852,21	5.139,01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Sub Out	**Pembangunan Pelabuhan**								**0,00**	**12,14**	**84,00**	**191,44**	**90,00**	**391,59**	**10,00**	**0,00**	**4.852,21**	**5.139,01**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	
01	Jumlah pelabuhan laut yang dibangun		lokasi	0	0	1	02	0	0,00	12,14	84,00	191,44	90,00	391,59	10,00	0,00	4.852,21	5.139,01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
101	Pengadaan Infrastruktur Konektivitas (Prioritas Nasional)								378,77	195,09	978,24	752,78	915,83	3.180,68	12,00	185,72	0,00	3.191,84	1.951,04	120.275,00	0,00	0,00	122.226,04	
Sub Out	**Pengadaan Pelabuhan**								**378,77**	**195,09**	**978,24**	**752,78**	**915,83**	**3.180,68**	**12,00**	**185,72**	**0,00**	**3.191,84**	**1.951,04**	**120.275,00**	**0,00**	**0,00**	**122.226,04**	
01	Jumlah pelabuhan yang dikembangkan		lokasi	04	04	08	02	04	378,77	195,09	978,24	752,78	915,83	3.180,68	12,00	185,72	0,00	3.191,84	1.951,04	120.275,00	0,00	0,00	122.226,04	
102	Rehabilitasi Infrastruktur Konektivitas (Prioritas Nasional)								**80,74**	**0,00**	**88,00**	**0,00**	**0,00**	**168,74**	**97,20**	**0,00**	**1.044,00**	**1.309,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Sub Out	**Rehabilitasi Pelabuhan**								**80,74**	**0,00**	**88,00**	**0,00**	**0,00**	**168,74**	**97,20**	**0,00**	**1.044,00**	**1.309,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
01	Jumlah pelabuhan yang direhabilitasi		lokasi	1	0	1	0	0	80,74	0,00	88,00	0,00	0,00	168,74	97,20	0,00	1.044,00	1.309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	Dukungan dan Pengadaan Infrastruktur Hub (Prioritas Nasional)								**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.875,00**	
Sub Out	**Pembangunan Infrastruktur Transportasi Lasi di IKN**								**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.875,00**	
01	Jumlah pembangunan infrastruktur transportasi lasi di IKN		lokasi	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	
201	Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Lasi								**353,84**	**970,70**	**972,00**	**747,20**	**869,00**	**3.921,08**	**84,10**	**308,00**	**0,00**	**4.961,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Sub Out	**Pembangunan / Rehabilitasi Pelabuhan Lasi**								**322,00**	**970,70**	**972,00**	**747,20**	**899,00**	**3.910,90**	**84,10**	**308,00**	**0,00**	**4.301,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
01	Jumlah pelabuhan yang dibangun		lokasi	02	04	07	04	04	322,00	970,70	972,00	747,20	899,00	3.910,90	84,10	308,00	0,00	4.301,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	Pengadaan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Lasi								**77,84**	**955,00**	**955,00**	**955,00**	**894,00**	**3.896,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.896,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Sub Out	**Pengadaan Pelabuhan Lasi**								**77,84**	**955,00**	**955,00**	**955,00**	**894,00**	**3.896,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.896,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
01	Jumlah pelabuhan lasi yang dikembangkan		lokasi	01	04	01	01	01	77,84	955,00	955,00	955,00	894,00	3.896,84	0,00	0,00	0,00	3.896,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Rehabilitasi Infrastruktur Konektivitas								**177,84**	**802,84**	**849,76**	**222,84**	**265,00**	**2.318,28**	**948,10**	**0,00**	**0,00**	**3.266,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Sub Out	**Rehabilitasi Pelabuhan Lasi**								**177,84**	**802,84**	**849,76**	**222,84**	**265,00**	**2.318,28**	**948,10**	**0,00**	**0,00**	**3.266,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
01	Jumlah pelabuhan yang direhabilitasi		lokasi	03	03	03	0	0	177,84	802,84	849,76	222,84	265,00	2.318,28	948,10	0,00	0,00	3.266,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
302	Persentase Pencapaian Target Kegiatan Pengerukan	%		0	87,2	87,2	91,87	83,72	0,00	194,10	200,47	220,10	197,80	807,54	0,00	0,00	0,00	614,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas (Prioritas Nasional)								0,00	90,00	197,87	220,10	268,97	976,94	0,00	0,00	0,00	976,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	**Pengerukan Alur Pelayaran**								**0,00**	**90,00**	**197,87**	**220,10**	**268,97**	**976,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**976,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
01	Jumlah alur pelayaran yang dikeruk	lokasi		0	1	1	1	1	0,00	90,00	197,87	220,10	268,97	976,94	0,00	0,00	0,00	976,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Transportasi Lasi								**0,00**	**0,10**	**0,60**	**0,00**	**0,00**	**0,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

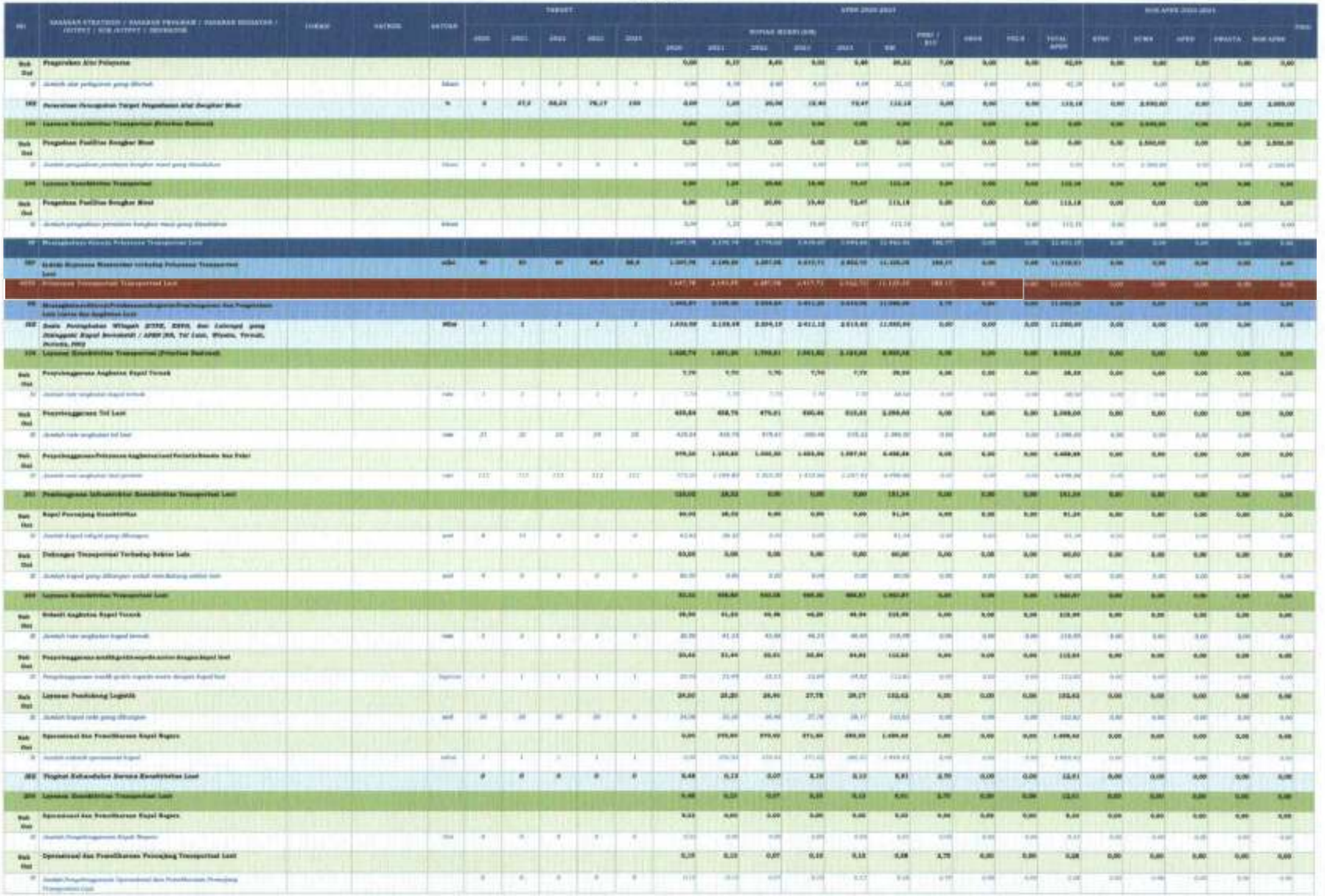

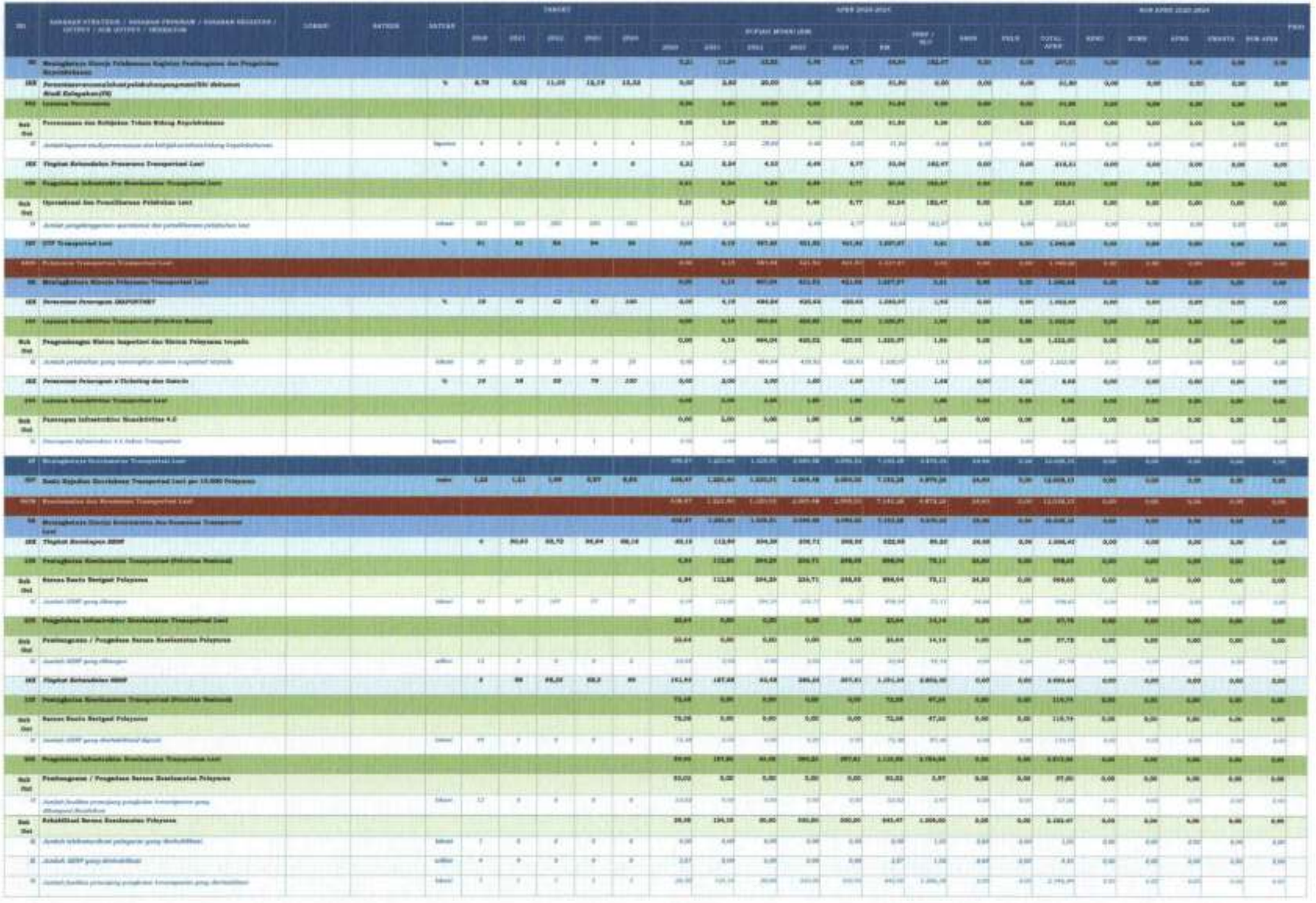

No	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Output / Key Output / Indikator	Satuan	Definisi	Definisi	Target					Capaian 2020-2024										Capaian 2020-2024						Ket
										Realisasi Kegiatan						Rasio / %	Biaya									
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	dst												
Sub Out	**Operasionalisasi Pengembangan Kawasan Prasarana Sosialisasi Pelayanan**									7,16	61,78	22,48	30,22	67,81	222,46	1.441,07	0,00	0,00	1.684,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah operasional dan pemeliharaan bidang kesungaian		Akses	20	20	20	20	20																		
IKK	**Tingkat Kesiapan FTA**			0	44	57	54,64	69	0,00	243,00	44,22	46,42	44,12	452,58	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Pelaksanaan Pembangunan Transportasi (Proyek Nasional)									0,00	243,00	44,22	46,42	44,12	452,58	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Barang Bantu Berigasi Pelayanan									0,00	243,00	44,22	46,42	44,12	452,58	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IK	Jumlah FTA yang terintegrasi		Akses	0	11	14	7	7	0,00	243,00	44,22	46,42	44,12	452,58	0,00	0,00	0,00	452,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IKK	**Tingkat Ketersediaan FTA**			0	57	57,2	58	59	11,20	177,84	111,28	118,14	142,74	555,00	80,72	0,00	0,00	626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
225	**Pengelolaan Infrastruktur Sosialisasi Transportasi Laut**									11,20	177,84	111,28	118,14	142,74	555,00	80,72	0,00	0,00	626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub Out	**Pembangunan / Pengadaan Barang Sosialisasi Pelayaran**									11,20	177,84	111,28	118,14	142,74	555,00	80,72	0,00	0,00	626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IK	Jumlah rambu-rambu pelayaran yang dibangun		Akses	53	53	53	53	53	11,20	177,84	111,28	118,14	142,74	555,00	80,72	0,00	0,00	626,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IKK	**Tingkat Kesiapan Sigal Mpore Kesetiapaian**			0	69,43	72,43	77,43	81,43	34,27	20,01	98,04	204,94	474,82	1.414,10	0,00	0,00	0,00	1.414,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
226	**Pengelolaan Sosialisasi Transportasi (Proyek Nasional)**									23,17	20,01	98,04	204,94	474,82	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub Out	**Pengadaan Sapel Kesetiapaian**									10,17	20,01	84,04	204,94	474,82	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IK	Jumlah kapal negara kesetiapaian yang dibangun		Unit	3	4	5	13	14	10,17	20,01	84,04	204,94	474,82	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
227	**Pengelolaan Infrastruktur Keselamatan Transportasi Laut**									13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub Out	**Sebelilihat Barang Keselamatan Pelayaran**									14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IK	Jumlah kapal negara keselamatan yang diselenggarakan pelayaran		Akses	0	0	0	0	0	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IKK	**Tingkat Kesiapan Sigal Patroli**			0	49,07	48,04	51,13	53,07	120,13	200,03	482,03	831,03	482,03	2.555,13	82,03	0,00	0,00	2.775,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
228	**Pengelolaan Infrastruktur Keamanaan Transportasi Laut**									120,13	200,03	482,03	831,03	482,03	2.555,13	82,03	0,00	0,00	2.775,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub Out	**Pembangunan Sapel Patroli**									120,13	240,03	482,03	831,03	482,03	2.307,13	82,03	0,00	0,00	2.481,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IK	Jumlah kapal patroli yang dibangun		unit	0	0	0	0	0	120,13	240,03	482,03	831,03	482,03	2.307,13	82,03	0,00	0,00	2.481,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub Out	**Pembangunan Sapel Pengawasi Sungai**									0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IK	Jumlah kapal pengawasan/operasional yang dibangun		unit	0	0	0	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IKK	**Tingkat Ketersediaan Sapel Patroli yang Terpadu**			0	88,07	88,03	89,03	89,07	84,03	240,03	0,03,77	172,03	220,03	720,03	1.880,09	0,00	0,00	0.010,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
229	**Pengelolaan Infrastruktur Keamanaan Transportasi Laut**									84,03	240,03	00,77	172,03	220,03	720,03	1.880,09	0,00	0,00	0.010,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub Out	**Pembangunan / Pengadaan Barang Sosialisasi Pelayaran**									20,21	22,21	24,01	58,00	94,01	245,01	240,41	0,00	0,00	493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IK	Jumlah fasilitas pengelolaan/pengawasan keselamatan/pengawasan/operasional		Akses	7	1	1	1	1	20,21	22,21	24,01	58,00	94,01	245,01	240,41	0,00	0,00	493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub Out	**Kelaikilihan Barang Keselamatan Pelayaran**									22,00	20,00	41,00	48,74	22,00	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IK	Jumlah fasilitas pengelolaan/pengawasan keselamatan/pengawasan/operasional		Akses	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IK	Jumlah kapal negara/operasional yang dibangun/pengadaan/sewa		Akses	20	1	1	1	1	22,00	20,00	41,00	48,74	22,00	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub Out	**Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keselamatan Pelayaran**									21,04	12,12	28,20	37,28	37,74	288,77	1.600,07	0,00	0,00	1.968,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IK	Jumlah operasional dan pemeliharaan bidang pengelolaan dan dan pantai		Akses	210	210	210	210	210	21,04	12,12	28,20	37,28	37,74	288,77	1.600,07	0,00	0,00	1.968,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IKK	***Persentase Penerbitan Sertifikat Kualifikasi dan Kompetensi Serta Dokumen Pendukung Lainnya***			0	88	88	88	88	0,00	70,00	60,00	40,00	40,00	210,07	0,72	0,00	0,00	222,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
230	**Layanan Kesektifitas Transportasi Darat**									0,00	70,00	60,00	40,00	40,00	210,07	0,00	0,00	0,00	210,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub Out	**Pengujian Infrastruktur Kesektifitas 1.2**									0,00	70,00	60,00	40,00	40,00	210,07	0,00	0,00	0,00	210,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IK	Jumlah kendaraan/armada/operasional yang diperiksa/pengujian		Akses	0	0	0	0	0	0,00	70,00	60,00	40,00	40,00	210,07	0,00	0,00	0,00	210,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
231	**Pengelolaan Infrastruktur Keselamatan Transportasi Laut**									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub Out	**Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keselamatan Pelayaran**									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IK	Jumlah operasional dan pemeliharaan bidang perlengkapan dan keselamatan		Akses	23	23	23	23	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keselamatan, Keamanan dan Lingkungan Transportasi Laut									34,20	190,04	22,00	60,74	277,72	1.467,07	187,47	0,00	0,00	2.165,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IKU	**Tingkat Pemenuhan SMKP Transportasi Laut**	%		0	0	0	0	0	34,20	190,04	22,00	60,74	277,72	1.467,07	187,47	0,00	0,00	2.165,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	Pelayaran, Sarana Transportasi Laut									34,20	190,04	22,00	60,74	277,72	1.467,07	187,47	0,00	0,00	2.165,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

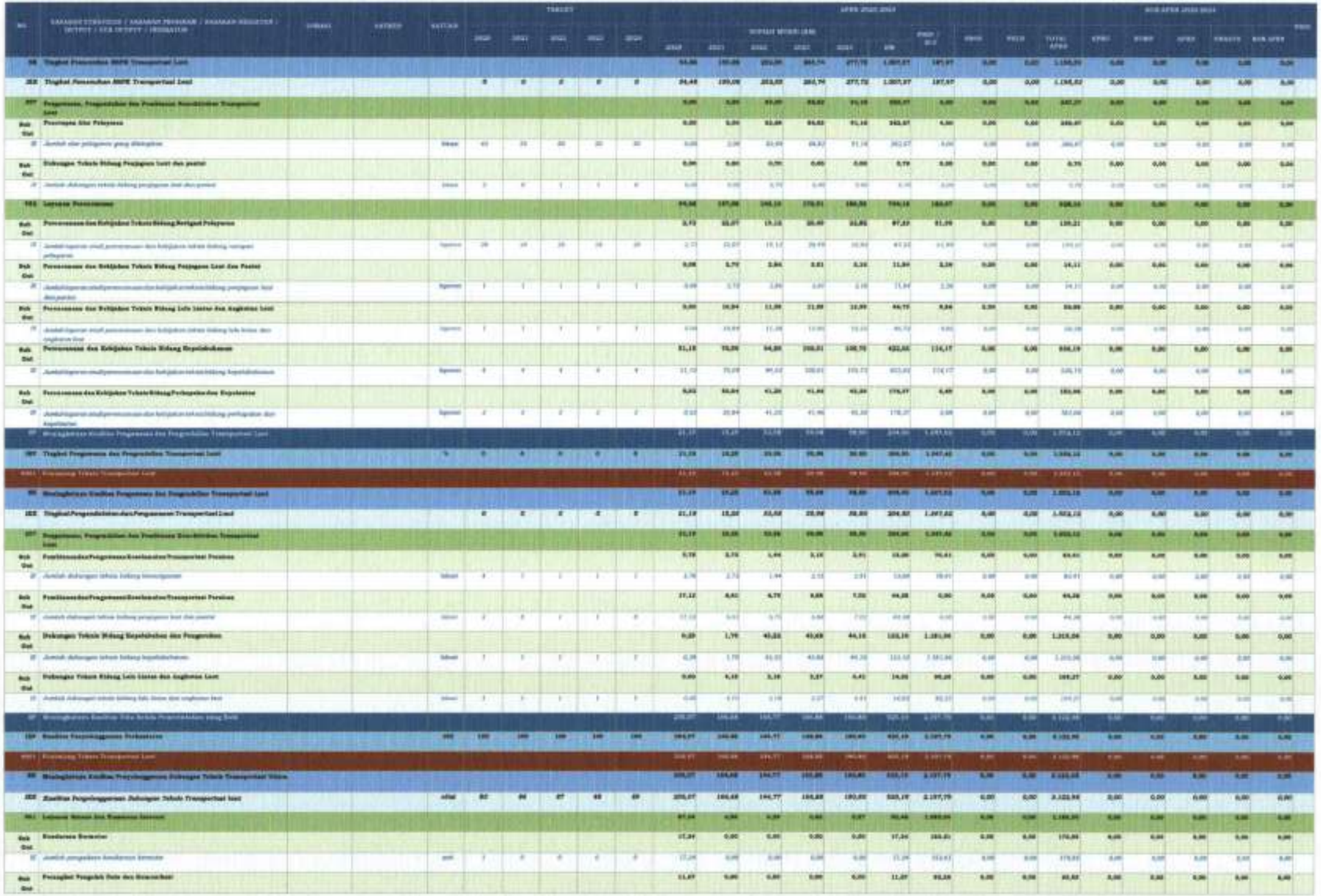

No	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / KRO OUTPUT / RO/SUBOUTPUT	SATUAN	TARGET					CAPAIAN 2020-2024																	
			2020	2021	2022	2023	2024	REVISI REVISI (RR)						PAGU / RKA	REALISASI	PERSEN	TOTAL CAPAIAN	REVISI	REVISI	CAPAIAN	PERSENTASE	NILAI CAPAIAN	TREN
								2020	2021	2022	2023	2024	RR												
01	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	Lokasi	7	7	7	7	7	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	11.67	22.26	0.00	0.00	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sub Out	**Pelatihan Perkantoran**							22.72	0.24	0.28	0.42	0.37	35.03	557.21	0.00	0.00	582.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
01	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan perkantoran	Lokasi	7	7	7	7	7	22.72	0.24	0.28	0.42	0.37	35.03	557.21	0.00	0.00	582.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sub Out	**Pembangunan / Rehabilitasi Gedung dan Bangunan**							34.80	0.42	0.00	0.00	0.00	38.32	322.94	0.00	0.00	397.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
01	Jumlah pembangunan / rehabilitasi gedung dan bangunan	Lokasi	8	8	8	8	8	34.80	0.42	0.00	0.00	0.00	38.32	322.94	0.00	0.00	397.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
970	**Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal**							138.83	132.77	144.84	158.84	150.23	933.73	1,109.75	0.00	0.00	1,937.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sub Out	**Perencanaan, Pelaporan dan Pelaksanaan Anggaran Setkor**		68.20	58.61	68.84	84.84	68.84	418.14	484.99	0.00	0.00	911.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
01	Jumlah laporan perencanaan, pemrograman dan pelaksanaan anggaran setkor	Laporan	2	2	2	2	2	68.20	58.61	68.84	84.84	68.84	418.14	484.99	0.00	0.00	911.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sub Out	**Pengelolaan Keuangan Setkor**		10.50	37.37	10.50	30.11	98.74	120.51	107.18	0.00	0.00	282.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
01	Jumlah laporan pengelolaan keuangannya setkor	Laporan	2	2	2	2	2	10.50	37.37	10.50	30.11	98.74	120.51	107.18	0.00	0.00	282.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sub Out	**Pengelolaan Barang dan Perlengkapan Setkor**		58.84	10.00	0.27	13.84	16.84	100.48	118.78	0.00	0.00	418.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
01	Jumlah laporan barang dan perlengkapannya setkor	Laporan	2	2	2	2	2	58.84	10.00	0.27	13.84	16.84	100.48	118.78	0.00	0.00	418.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sub Out	**Layanan Hukum**		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.24	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
01	Jumlah layanan pengaduan setkor	Laporan	2	2	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.24	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sub Out	**Layanan Umum dan Rumah Tangga Setkor**		10.22	53.29	53.19	40.22	80.08	274.09	36.22	0.00	0.00	511.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
01	Jumlah laporan pengelolaan layanan umum dan rumah tangga setkor	Laporan	2	2	2	2	2	10.22	53.29	53.19	40.22	80.08	274.09	36.22	0.00	0.00	511.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sub Out	**Pengelolaan Data dan Informasi Setkor**		0.00	0.71	1.22	1.84	1.84	0.37	0.37	0.00	0.00	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
01	Jumlah laporan pengelolaan data dan informasi setkor	Laporan	2	2	2	2	2	0.00	0.71	1.22	1.84	1.84	0.37	0.37	0.00	0.00	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
00	Ditjen Perhubungan Darat		2,287.78	2,442.77	2,412.28	2,350.00	2,404.00	11,916.49	2,328.44	2,121.22	80.00	31,324.83	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00							
02	Terlaksananya Koordinasi Transportasi Darat		787.00	1,388.64	1,992.00	2,172.00	1,748.92	12,670.00	0.00	1,828.72	0.00	23,716.00	1,000.00	0.00	0.00	800.00	1,000.00							
187	Nama Koordinasi Transportasi Darat	nama	0.79	0.77	0.79	0.79	0.8	787.00	1,388.64	1,992.00	2,172.00	1,748.92	12,670.00	0.00	1,828.72	0.00	23,716.00	1,000.00	0.00	0.00	800.00	1,000.00		
2000	Prasarana Transportasi Transportasi Darat		987.78	1,054.13	420.28	177.16	655.08	2,271.49	0.00	0.00	0.00	5,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
00	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat		987.78	1,054.13	420.28	177.16	655.08	2,271.49	0.00	0.00	0.00	5,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
202	Tingkat Pelayanan Keselamatan Transportasi Darat	%	79	80	81	82	83	987.78	1,054.13	420.28	177.16	655.08	2,271.49	0.00	0.00	0.00	5,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
994	Layanan Keselamatan Transportasi (Prioritas Nasional)		812.00	840.00	880.00	920.00	972.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	7,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Sub Out	**Pelayanan dan Pengoperasian Angkutan Penyeberangan Dikelola Pemerintah**		215.84	227.20	242.99	261.58	333.28	1,320.30	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
01	Jumlah rute angkutan penyeberangan subsidi pemerintah	rute	114	114	114	114	114	215.84	227.20	242.99	261.58	333.28	1,320.30	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sub Out	**Pelayanan dan Pengoperasian Angkutan Barang Dikelola Pemerintah**		26.78	27.47	30.48	30.77	37.44	150.81	0.00	0.00	0.00	303.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
01	Jumlah rute angkutan barang subsidi pemerintah	rute	7	7	7	7	7	26.78	27.47	30.48	30.77	37.44	150.81	0.00	0.00	0.00	303.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sub Out	**Pelayanan dan Pengoperasian Angkutan Ternak**		46.61	51.68	57.33	63.33	70.44	289.34	0.00	0.00	0.00	589.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
01	Jumlah rute angkutan ternak subsidi	rute	34	34	34	34	34	46.61	51.68	57.33	63.33	70.44	289.34	0.00	0.00	0.00	589.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sub Out	**Pelayanan dan Pengoperasian Angkutan BBM Penyeberang Dikelola Pemerintah**		33.41	37.06	33.00	33.00	39.06	151.81	0.00	0.00	0.00	151.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
01	Jumlah driek angkutan BBM penyeberang subsidi pemerintah	driek	2,472	2,472	2,472	2,472	2,472	33.41	37.06	33.00	33.00	39.06	151.81	0.00	0.00	0.00	151.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sub Out	**Pelayanan dan Pengoperasian Angkutan BBM Barge Dikelola Pemerintah**		3.99	3.94	3.17	3.01	3.89	14.81	0.00	0.00	0.00	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
01	Jumlah driek angkutan BBM barge subsidi pemerintah	driek	467	467	467	467	467	3.99	3.94	3.17	3.01	3.89	14.81	0.00	0.00	0.00	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
995	Layanan Keselamatan Transportasi Darat		192.78	203.00	210.01	218.31	228.00	1,051.28	0.00	0.00	0.00	1,451.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Sub Out	**Pelayanan dan Pengoperasian Angkutan Penyeberang Dikelola Pemerintah**		105.84	127.00	170.77	201.75	294.41	1,205.04	0.00	0.00	0.00	1,205.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
01	Jumlah rute angkutan penyeberang subsidi pemerintah	rute	33	33	33	33	33	105.84	127.00	170.77	201.75	294.41	1,205.04	0.00	0.00	0.00	1,205.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sub Out	**Pelayanan dan Pengoperasian Angkutan Barge Dikelola Pemerintah**		14.29	15.99	21.27	23.99	34.14	150.99	0.00	0.00	0.00	150.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
01	Jumlah rute angkutan barge pemda	rute	3	3	3	3	3	14.29	15.99	21.27	23.99	34.14	150.99	0.00	0.00	0.00	150.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Sub Out	**Pelayanan dan Pengoperasian Angkutan BBM Penyeberang Dikelola Pemerintah**		12.29	13.88	15.79	16.82	17.24	73.24	0.00	0.00	0.00	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
01	Jumlah driek angkutan BBM penyeberang subsidi pemerintah	driek	1,418	1,418	1,418	1,418	1,418	12.29	13.88	15.79	16.82	17.24	73.24	0.00	0.00	0.00	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

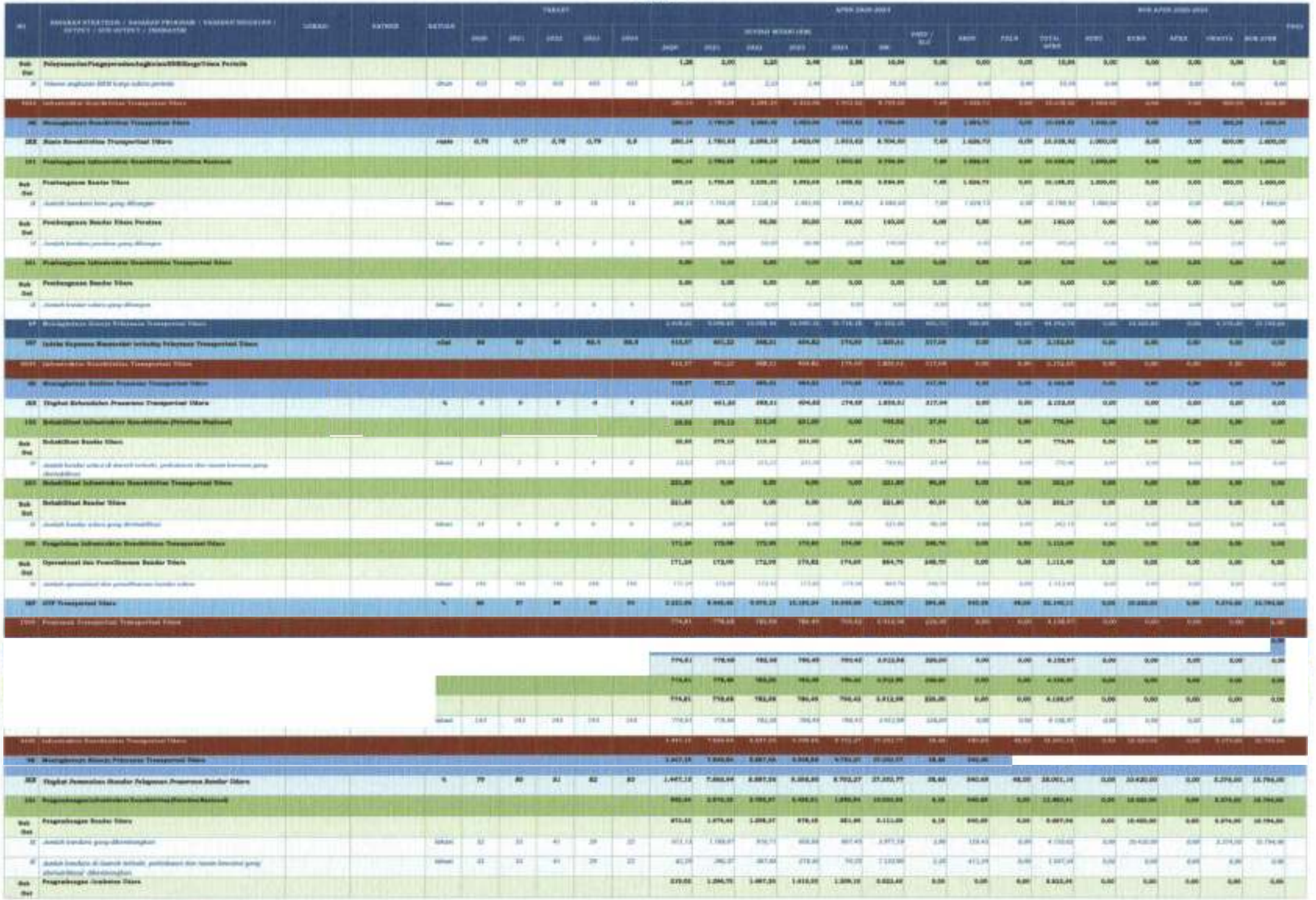

No	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024										APBN 2020-2024					
			2020	2021	2022	2023	2024	Alokasi Waktu (WB)					PDRD / BLU	DBHR	PDLN	Total APBN	APBN	DCRM	APBD	SWASTA	BUK LAIN	PDLN
								2020	2021	2022	2023	2024											
	Jumlah jembatan udara yang dibembangkan	Unit	10	11	11	11	10	370,63	1.394,70	1.407,28	1.420,16	1.359,14	5.921,40	0,00	0,00	0,00	5.921,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	Pengembangan Infrastruktur Kondisi dan Transportasi Udara							804,71	4.990,70	8.151,99	8.911,99	7.960,40	30.820,23	93,00	0,00	90,00	30.820,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Pengembangan Bandar Udara							804,71	4.990,70	8.151,99	8.911,99	7.960,40	30.820,23	93,00	0,00	90,00	30.820,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah bandar udara yang dikembangkan	bandar	46	164	163	163	163	804,71	4.990,70	8.151,99	8.911,99	7.960,40	30.820,23	93,00	0,00	90,00	30.820,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Udara							387,00	2.387,41	2.394,07	2.018,60	887,00	4.687,79	197,13	0,00	0,00	5.184,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1003	Nilai Kepatuhan Keselamatan Transportasi Udara pada Penerbangan (Aspatuan)	nasio	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	387,00	2.387,41	2.394,07	2.018,60	887,00	4.687,79	197,13	0,00	0,00	5.184,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1004	Meningkatnya Jasa Kebandaraan Transportasi Udara							387,00	2.387,41	2.394,07	2.018,60	887,00	4.687,79	197,13	0,00	0,00	5.184,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005	Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan Transportasi Udara							387,00	2.387,41	2.394,07	2.018,60	887,00	4.687,79	197,13	0,00	0,00	5.184,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005	Tingkat Kemudahan Bandar Kesehatan dan Kemampuan Bandar Udara		0	0	0	0	0	387,00	2.387,41	2.394,07	2.018,60	887,00	4.687,79	197,13	0,00	0,00	5.184,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006	Peningkatan Kesehatan Transportasi (Prioritas Nasional)							0,00	924,00	950,00	990,00	970,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Pengadaan Peswat Kalibrasi							0,00	440,00	220,00	220,00	220,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah pengadaan pesawat kalibrasi	unit	4	4	4	4	4	0,00	440,00	220,00	220,00	220,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan dan Pengawasan Bidang Perhubungan							0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana sarapan (JPKU-KTM)	unit	0	1	1	1	1	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
009	Pengelolaan Infrastruktur Keselamatan Transportasi Udara							387,00	862,41	904,28	718,60	693,00	3.513,90	197,13	0,00	0,00	3.709,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan dan Pengawasan Bidang Perhubungan							122,84	304,10	720,52	455,06	275,00	2.188,58	120,79	0,00	0,00	2.310,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pengembangan dan pengawasan sarapan penerbangan yang dievaluasi	laporan	1	1	1	1	1	60,00	90,30	90,00	90,00	91,07	360,00	80,47	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah pembinaan penyelenggaraan kebandarudaraan yang dievaluasi	laporan	1	1	1	1	1	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah pengadaan fasilitas udara kesehatan penerbangan	bidang	20	109	20	20	20	20,10	203,77	90,28	90,79	90,00	493,10	40,11	0,00	0,00	533,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah sarana, prasarana dan peralatan pelayanan darurat	Unit	15	15	15	20	20	90,00	110,00	120,00	130,00	110,00	1.460,40	0,00	0,00	0,00	1.460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Pengelolaan dan Pengembangan Bandar Udara							265,76	264,00	184,00	163,00	180,00	1.001,77	97,04	0,00	0,00	1.098,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah bandara yang terkelola dengan kesehatan	bandar	27	27	27	27	27	257,76	200,00	180,52	162,60	262,80	1.001,77	97,04	0,00	0,00	1.097,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah pengelenggaraan operasional dan pemeliharaan prasarana pengelola pengembangan kebandarudaraan	bandar	1	1	1	1	1	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	40,00	22,87	0,00	0,00	62,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Pelatihan Penanggulangan Darurat		5,00	5,00	7,07	8,00	7,00	20,11	0,00	0,00	0,00	0,00	20,11	0,00	0,00	0,00	20,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah pelatihan penanggulangan darurat	Unit	10	10	107	10	10	5,00	0,00	7,07	8,00	7,00	20,11	0,00	0,00	0,00	20,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Meningkatnya Kualitas Fasilitas Keselamatan, Keamanan dan Kelancaran Transportasi Udara							72,11	72,97	73,83	73,29	73,29	365,49	28,49	0,00	0,00	393,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1007	Tingkat Pemenuhan SPPK Transportasi Udara	%	0	0	0	0	0	70,11	70,97	72,83	72,29	72,29	364,49	28,49	0,00	0,00	392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1007	Pemenuhan Fasilitas Transportasi Udara							72,11	72,97	73,83	73,29	73,29	364,49	28,49	0,00	0,00	392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
011	Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Kebijakan, Regulasi dan Sistem Transportasi Udara							72,11	72,97	73,83	73,29	73,29	365,49	28,49	0,00	0,00	393,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1012	Tingkat Pemenuhan SDPE Bidang Kebandarudaraan		0	0	0	0	0	20,71	20,91	40,11	40,31	40,51	200,59	0,00	0,00	0,00	200,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1011	Layanan Pemenuhan							20,71	20,91	40,11	40,31	40,51	200,59	0,00	0,00	0,00	200,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Pemenuhan dan Kelajaran Teknis Kebandarudaraan							20,71	20,91	40,11	40,31	40,51	200,59	0,00	0,00	0,00	200,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah laporan pemenuhan dan kelajaran teknis bidang kebandarudaraan	laporan	27	27	27	27	27	20,71	20,91	40,11	40,31	40,51	200,59	0,00	0,00	0,00	200,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1012	Tingkat Pemenuhan SDPE Bidang Angkutan Udara		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1013	Pengawasan, Pengendalian dan Kelajaran Keselamatan Transportasi Udara							0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Kelajaran / Standar / Pedoman Teknis Bidang kegiatan Udara		0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah laporan kelajaran / standar / pedoman teknis bidang angkutan udara	laporan	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1014	Tingkat Pemenuhan SDPE Bidang Keselamatan Penerbangan		0	0	0	0	0	20,70	20,84	40,08	20,00	20,00	120,40	58,49	0,00	0,00	178,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1015	Pengawasan, Pengendalian dan Kelajaran Keselamatan Transportasi Udara							20,70	20,84	40,08	20,00	20,00	120,40	58,49	0,00	0,00	178,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Kelajaran / Standar / Pedoman Teknis Bidang Kelaikudaraan		20,70	20,84	40,08	20,00	20,00	20,70	20,84	40,08	20,00	20,00	120,40	58,49	0,00	0,00	178,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah laporan kelajaran / standar / pedoman teknis bidang kelaikudaraan	laporan	1	1	1	1	1	20,70	20,84	40,08	20,00	20,00	120,40	58,49	0,00	0,00	178,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah laporan kelajaran / standar / pedoman pemenuhan teknis bidang kebandarudaraan	laporan	4	4	4	4	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

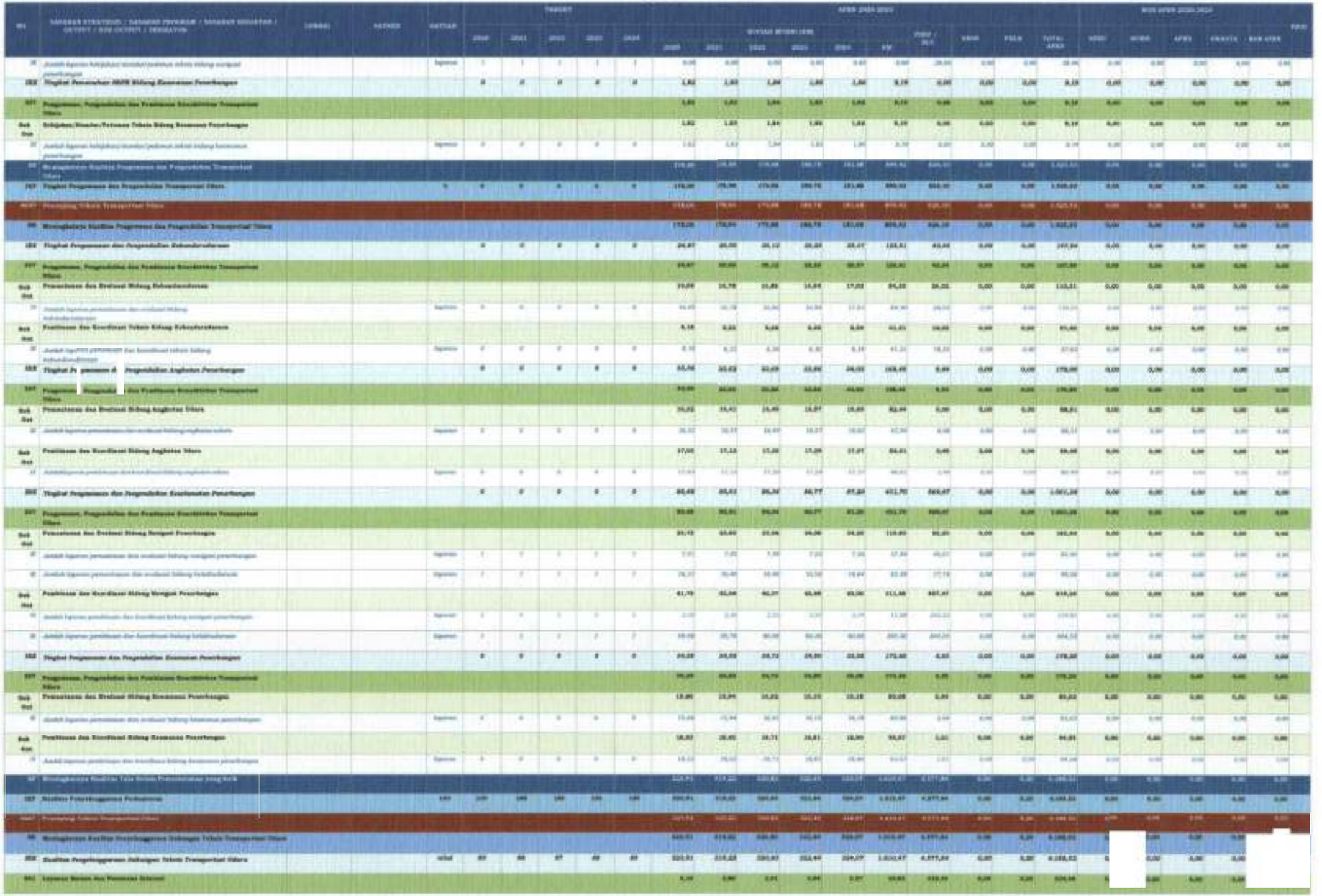

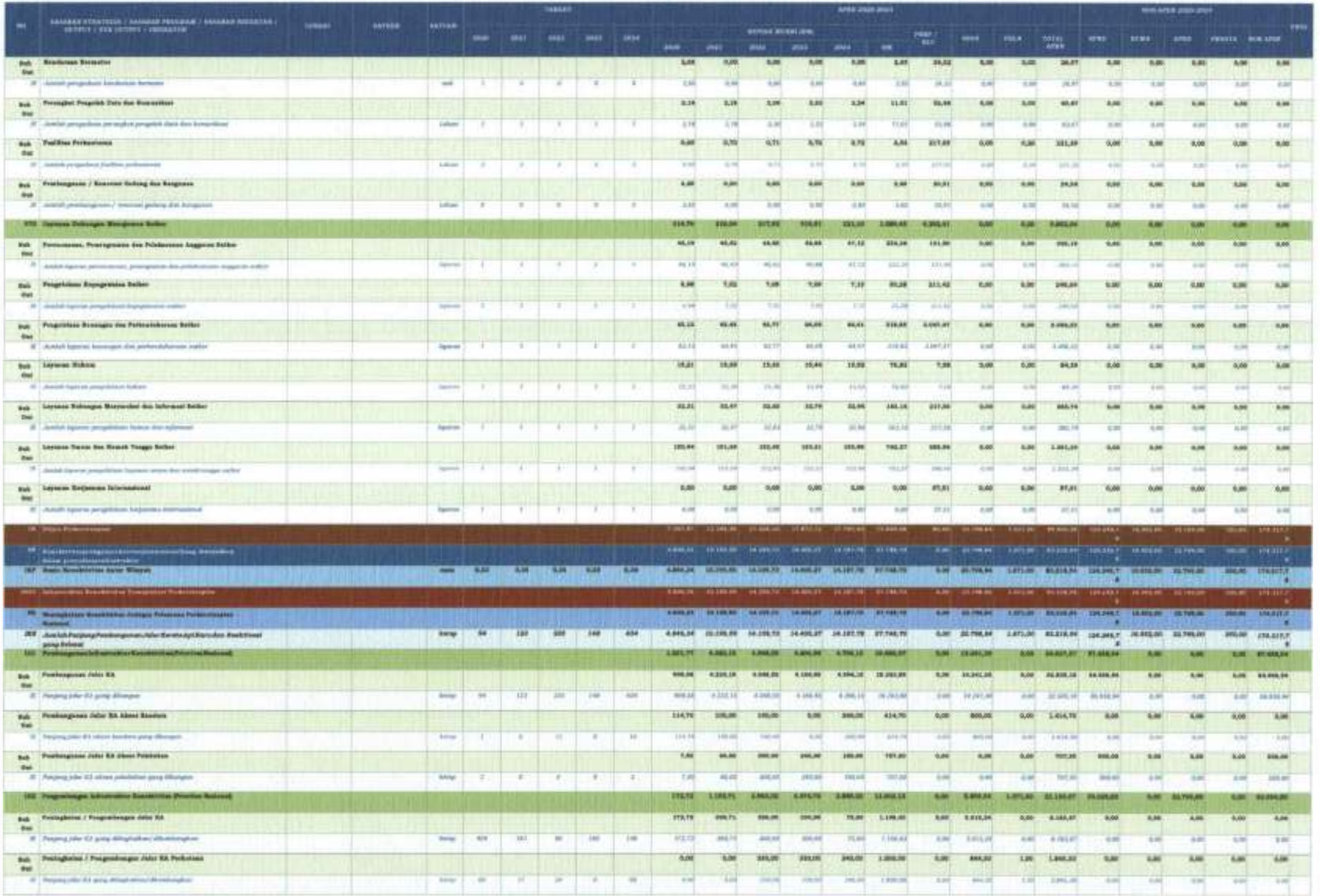

KODE	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / SUBTITLE / KEG SUBTITLE / INDIKATOR	LOKASI	KATEGORI	SATUAN	TARGET					APBD 2020-2024									RPD APBD 2020-2024					PAGU
					2020	2021	2022	2023	2024	BIAYA LANGSUNG (BL)					PDDT / KLU	KBOT	FISIK	TOTAL APBD	APBD	BCWH	APBD	HIBAH/DS	BLUD/BOS	
										2020	2021	2022	2023	2024											
Sub Del	**Pengembangan Angkutan Umum Massal Berbasis Bel**									0,00	880,00	2.200,00	3.344,70	5.832,00	11.454,70	0,00	0,00	1.670,00	13.124,70	30.000,00	0,00	22.764,00	0,00	52.764,00
	Survey angkutan umum massal berbasis bel/unit			perfektur-a	1	1	1	1	1	0,00	880,00	2.200,00	3.344,70	5.832,00	11.454,70	0,00	0,00	1.670,00	13.124,70	30.000,00	0,00	22.764,00	0,00	52.764,00
3.03	**Rehabilitasi Infrastruktur Kendaraan Prioritas Nasional**									0,00	971,97	971,97	1.343,97	450,00	3.686,90	0,00	0,00	0,00	3.686,90	0,00	1.415,00	0,00	0,00	1.415,00
Sub Del	**Rehabitasi Jalur Kir**									0,00	971,97	971,97	1.343,97	450,00	3.686,90	0,00	0,00	0,00	3.686,90	0,00	1.415,00	0,00	0,00	1.415,00
	Perjalan jalur Kir yang direhabilitasi			kereta	0	0	10	17	10	0,00	471,97	471,97	1.343,97	450,00	2.686,90	0,00	0,00	0,00	2.686,90	0,00	1.415,00	0,00	0,00	1.415,00
3.04	**Pembangunan Laboratorium Konstruksi Transportasi Perkeretapian**									2.842,80	2.743,14	3.243,61	4.343,97	4.832,40	16.886,90	0,00	2.686,90	0,00	19.573,80	6.442,84	10.942,95	0,00	350,00	22.735,84
Sub Del	**Pembangunan Jalur Kir**				148,00	956,17	421,01	394,97	469,97	1.986,90	0,00	2.686,90	0,00	4.843,80	6.442,84	10.942,95	0,00	350,00	22.735,84					
	Perjalan jalur Kir yang dibangun			kereta	0	0	0	0	0	148,10	956,17	421,01	394,97	469,97	1.986,90	0,00	2.686,90	0,00	4.843,80	6.442,84	10.942,95	0,00	350,00	22.735,84
Sub Del	**Peningkatan / Pengembangan Jalur Kir**				2.842,74	2.195,18	2.822,60	3.949,97	4.362,43	16.816,90	0,00	0,00	0,00	16.816,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Perjalan jalur Kir yang ditingkatkan/dikembangkan			kereta	0	0	0	0	0	2.842,74	2.195,18	2.822,60	3.949,97	4.362,43	16.816,90	0,00	0,00	0,00	16.816,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Del	**Rehabitasi Jalur Kir**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,80	472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Perjalan jalur Kir yang direhabilitasi			kereta	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Del	**Fasilitas Pendukung Prasarana Perkeretapian**				197,08	0,00	0,00	0,00	0,00	197,08	0,00	0,00	0,00	197,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Jumlah kerapian khusus yang dibangun			lokasi	1	0	0	0	0	197,08	0,00	0,00	0,00	0,00	197,08	0,00	0,00	0,00	197,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Del	**Pengadaan / Penertiban Lahan**				202,10	809,71	222,47	220,10	288,33	1.819,71	0,00	0,00	0,00	1.819,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Jumlah lahan yang disediakan/ditertibkan			lokasi	4	3	0	0	0	202,10	809,71	222,47	220,10	288,33	1.819,71	0,00	0,00	0,00	1.819,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05	Biaya pelayanan Transportasi perkeretaapian yang terjangkau dan aman terkendali				336,80	734,61	987,51	991,28	1.356,11	4.407,31	0,00	0,00	0,00	4.407,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.05.1	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Transportasi Kir**				80	81	82	83,5	84,8	410,31	803,69	978,13	981,99	995,00	3.969,11	0,00	0,00	0,00	3.969,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.1.1	Terwujudnya Keandalan Transportasi Perkeretapian									410,31	803,69	978,13	981,99	995,00	3.969,11	0,00	0,00	0,00	3.969,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Meningkatnya Aksesibilitas Prasarana Perkeretapian				336,80	803,69	978,13	981,99	995,00	3.969,11	0,00	0,00	0,00	3.969,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.05	**Tingkat Keterisian Prasarana Perkeretapian**	%	0	0	0	0	0	410,31	803,69	978,13	981,99	995,00	3.969,11	0,00	0,00	0,00	3.969,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.06	**Layanan Keselamatan Transportasi Perkeretapian**				55,01	59,06	106,09	117,00	118,77	455,93	0,00	0,00	0,00	455,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Sub Del	**Pemeliharaan, Perawatan dan Pengoperasian Jaringan Prasarana Kereta Api**				1,01	1,03	1,08	1,01	1,77	7,07	0,00	0,00	0,00	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Jumlah pengelolaan JPC perkeretapian			lokasi	1	1	1	1	1	1,01	1,03	1,08	1,01	1,77	7,07	0,00	0,00	0,00	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Del	**Pengadaan Peralatan Penunjang Prasarana Perkeretapian**				55,00	58,03	105,01	116,00	117,01	448,05	0,00	0,00	0,00	448,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Jumlah peralatan penunjang prasarana perkeretapian yang dikelola/ditertibkan			lokasi	2	2	2	2	2	55,00	58,03	105,01	116,00	117,01	448,05	0,00	0,00	0,00	448,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.07	**Kegiatan Administrasi Kesekretariatan Transportasi Perkeretapian**				219,80	845,04	972,04	974,00	974,00	3.834,84	0,00	0,00	0,00	3.834,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Sub Del	**Pengoperasian dan Perawatan Prasarana Perkeretapian**				110,90	284,02	271,04	274,06	276,04	1.216,46	0,00	0,00	0,00	1.216,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Jumlah operasional dan pemeliharaan prasarana perkeretapian			lokasi	2	2	2	2	2	110,90	284,02	271,04	274,06	276,04	1.216,46	0,00	0,00	0,00	1.216,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.07	**UPT Transportasi Kir**	%	79	79	79	80	83	208,00	560,00	620,00	600,00	600,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.07.1	Terwujudnya Transportasi Perkeretapian				208,00	560,00	620,00	600,00	600,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Perkeretapian				208,00	560,00	620,00	600,00	600,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3.07	**Persentase Angkutan Penumpang Kereta Api**	%	10	20	30	70	100	204,40	553,40	284,70	600,00	600,00	2.242,40	0,00	0,00	0,00	2.242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.08	**Layanan Keselamatan Transportasi Prioritas Nasional**				204,00	542,00	577,10	660,00	607,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Sub Del	**Sebuah Perlatin Kir**				204,00	542,00	577,10	660,00	607,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Jumlah lokasi sebuah Kir			lokasi	1	1	1	1	1	204,00	542,00	577,10	660,00	607,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.09	**Layanan Keselamatan Transportasi Perkeretapian**				0,00	10,00	12,01	12,77		34,78	0,00	0,00	0,00	34,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Sub Del	**Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru**				0,00	10,00	12,01	12,77		34,78	0,00	0,00	0,00	34,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Jumlah penyelenggaraan angkutan lebaran, natal dan tahun baru			lokasi	1	1	1	1	1	0,00	10,00	12,01	12,77		34,78	0,00	0,00	0,00	34,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	**Persentase Angkutan Barang Kereta Api**	%	0	20	47	70	100	22,63	26,04	40,60	44,72		133,13	0,00	0,00	0,00	133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.11	**Layanan Keselamatan Transportasi Perkeretapian**				22,00	26,04	40,60	44,72		133,13	0,00	0,00	0,00	133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Sub Del	**Sebuah Angkutan Motor sebuah Kereta Api**				22,00	26,04	40,60	44,72		133,13	0,00	0,00	0,00	133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

No	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	SATUAN	BATASAN	SATUAN	TARGET					APBD tahun 2021										RAB APBD 2020-2024					
					2020	2021	2022	2023	2024	RINCIAN BIAYA (Rp)					PROP/ KLC	ABPD	PUSAT	TOTAL APBD		APBD	EXTRA	APBD	PRIVATE	NON APBD	TOTAL
										2020	2021	2022	2023	2024											
dst	dst																								
1.01	Jumlah penyelenggaraan administrasi kantor			Bulan	1	1	1	1	1	33.00	38.00	40.00	44.00	48.00	203.00	0.00	0.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.02	Pengadaan perlengkapan administrasi perkantoran									1.408,00	1.427,00	1.441,00	1.462,00	1.488,00	7.218,00	0.00	0.00	0.00	7.218,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.03	Pengadaan Perlengkapan Pendukung Administrasi per 1 Unit OR kantor			Unit	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	2.408,00	2.427,00	2.441,00	2.462,00	2.488,00	7.218,00	0.00	0.00	0.00	7.218,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.04	Pengadaan dan Pemasangan Transportasi Perkantoran									2.408,00	2.427,00	2.441,00	2.462,00	2.488,00	7.218,00	0.00	0.00	0.00	7.218,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.05	Peningkatan Kerjasama dan Komunikasi Transportasi Perkantoran									1.448,00	1.427,00	1.441,00	1.462,00	1.488,00	7.218,00	0.00	0.00	0.00	7.218,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.06	Persentase Terpenuhinya Jalur ZA yang Sesuai dengan TOR / dan K	%			80,00	80,00	80,00	81,00	84	2.408,00	2.427,00	2.441,00	2.462,00	2.488,00	7.218,00	0.00	0.00	0.00	7.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Peningkatan Kerjasama Transportasi (Pasokan Bahan)									1.448,00	1.462,00	1.462,00	1.462,00	1.462,00	6.998,00	0.00	0.00	0.00	6.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08 Out	Pengoperasian dan Pemantau Prasarana Perkantoran (SIP)									1.808,00	1.808,00	1.808,00	1.808,00	1.808,00	7.808,00	0.00	0.00	0.00	7.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dst	Operasional dan pemeliharaan prasarana perkantoran (SIP)			Unit	1	1	1	1	1	1.448,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00	7.448,00	0.00	0.00	0.00	7.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09 Out	Pelatihan Kemitraan Perkantoran									48,00	382,00	382,00	382,00	382,00	1.898,00	0.00	0.00	0.00	1.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dst	Jumlah Peningkatan perkantoran sebelang ZA dengan jalur, Mengatasi dan pengadaan kualitas kesalamatan perkantoran			Kawan	2	10	10	10	10	48,00	382,00	382,00	382,00	382,00	1.898,00	0.00	0.00	0.00	1.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Pengadaan Administrasi Kesalamatan Transportasi Perkantoran									188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	938,00	0.00	0.00	0.00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11 Out	Pengadaan/pemilihan pelatihan/asuransi asuran perkantoran									8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	41,00	0.00	0.00	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dst	Jumlah peralatan/pelatihan/pemilihan asuransi/pelatihan yang disediakan/ digunakan			Unit	0	0	0	0	0	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	41,00	0.00	0.00	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12 Out	Operasional dan Perawatan Pelatihan/Perakitan Asuran Perkantoran Milik Negara									28,70	28,07	32,02	30,00	32,22	182,00	0.00	0.00	0.00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dst	Jumlah operasional dan perawatan pelatihan/perakitan asuran perkantoran milik negara			Kawan	2	2	2	2	2	28,70	28,07	32,02	30,00	32,22	182,00	0.00	0.00	0.00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13 Out	Pengadaan/modifikasi/pelatihan asuran penumpang kursi ojol									104,00	110,00	120,00	130,00	136,14	641,00	0.00	0.00	0.00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dst	Jumlah pengadaan/ modifikasi/pelatihan asuran penumpang kursi ojol			Kawan	1	1	1	1	1	104,00	110,00	120,00	130,00	136,14	641,00	0.00	0.00	0.00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14 Out	Pemeliharaan Pelatihan Penunjang Prasarana Perkantoran									15,00	16,77	16,00	17,00	18,00	82,00	0.00	0.00	0.00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dst	Jumlah pemeliharaan pelatihan penunjang prasarana perkantoran			Kawan	1	1	1	1	1	15,00	16,77	16,00	17,00	18,00	82,00	0.00	0.00	0.00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Anggaran Sektor Transportasi Perkantoran									153,00	170,79	190,00	200,00	220,00	913,00	34,27	0,00	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.16	Tingkat Pemenuhan SOP/K Transportasi Perkantoran	%			0	0	0	0	0	153,00	170,79	190,00	200,00	220,00	913,00	34,27	0,00	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.17	Pemenuhan Sektor Transportasi Perkantoran									153,00	170,79	190,00	200,00	220,00	913,00	34,27	0,00	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan Regulasi dan Sistem Sistem Transportasi Ke									153,00	170,79	190,00	200,00	220,00	913,00	34,27	0,00	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.19	Tingkat Pemenuhan SOP/K Transportasi Perkantoran	%			0	0	0	0	0	153,00	170,79	190,00	200,00	220,00	913,00	34,27	0,00	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20	Pengawasan, Pengendalian dan Pemeliharaan Kendaraan Transportasi Perkantoran									4,01	4,00	5,00	5,00	6,14	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.21 Out	Kebijakan/Standar/Pelayanan Teknis Sistem Sosialisasi Perkantoran									4,01	4,43	5,00	5,00	6,14	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dst	Jumlah laporan kebijakan/ standar/pelayanan teknis sistem sosialisasian perkantoran			Laporan	1	1	1	1	1	4,01	4,43	5,00	5,00	6,14	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22	Layanan Pemerintah									153,10	170,11	160,00	200,00	220,00	907,00	34,27	0,00	0,00	971,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.23 Out	Pemerintah dan Kebijakan Teknis Perkantoran									153,10	170,11	160,00	200,00	220,00	907,00	34,27	0,00	0,00	971,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dst	Jumlah laporan kajian kebijakan/standar/pelayanan teknis sistem perkantoran			Laporan	0	0	0	0	0	153,00	170,11	160,00	200,00	220,00	907,00	34,27	0,00	0,00	971,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.24	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengendalian Transportasi Perkantoran									153,00	170,79	190,00	200,00	220,00	913,00	34,27	0,00	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.25	Tingkat Pengelolaan dan Pengendalian Transportasi Perkantoran	%			0	0	0	0	0	153,00	170,79	190,00	200,00	220,00	913,00	34,27	0,00	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.26	Pemenuhan Sektor Transportasi Perkantoran									153,00	170,79	190,00	200,00	220,00	913,00	34,27	0,00	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.27	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengendalian Transportasi Perkantoran									153,00	170,79	190,00	200,00	220,00	913,00	34,27	0,00	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.28	Tingkat Pengelolaan dan Pengendalian Transportasi Perkantoran	%			0	0	0	0	0	153,00	170,79	190,00	200,00	220,00	913,00	34,27	0,00	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.29	Pengawasan, Pengendalian dan Pemeliharaan Kendaraan Transportasi Perkantoran									153,00	170,00	190,00	200,00	220,00	913,00	34,27	0,00	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.30 Out	Pemeliharaan dan Kesehatan/Teknis/Bengkel									1,40	1,60	1,70	1,80	2,10	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dst	Jumlah laporan pemeliharaan dan kesehatan/ teknis/ bengkel asuran perkantoran			Laporan	1	1	1	1	1	1,40	1,60	1,70	1,80	2,10	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.31 Out	Pemeliharaan dan Kesehatan Teknis Lain Lainnya dan Bagiannya Secara Apl									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

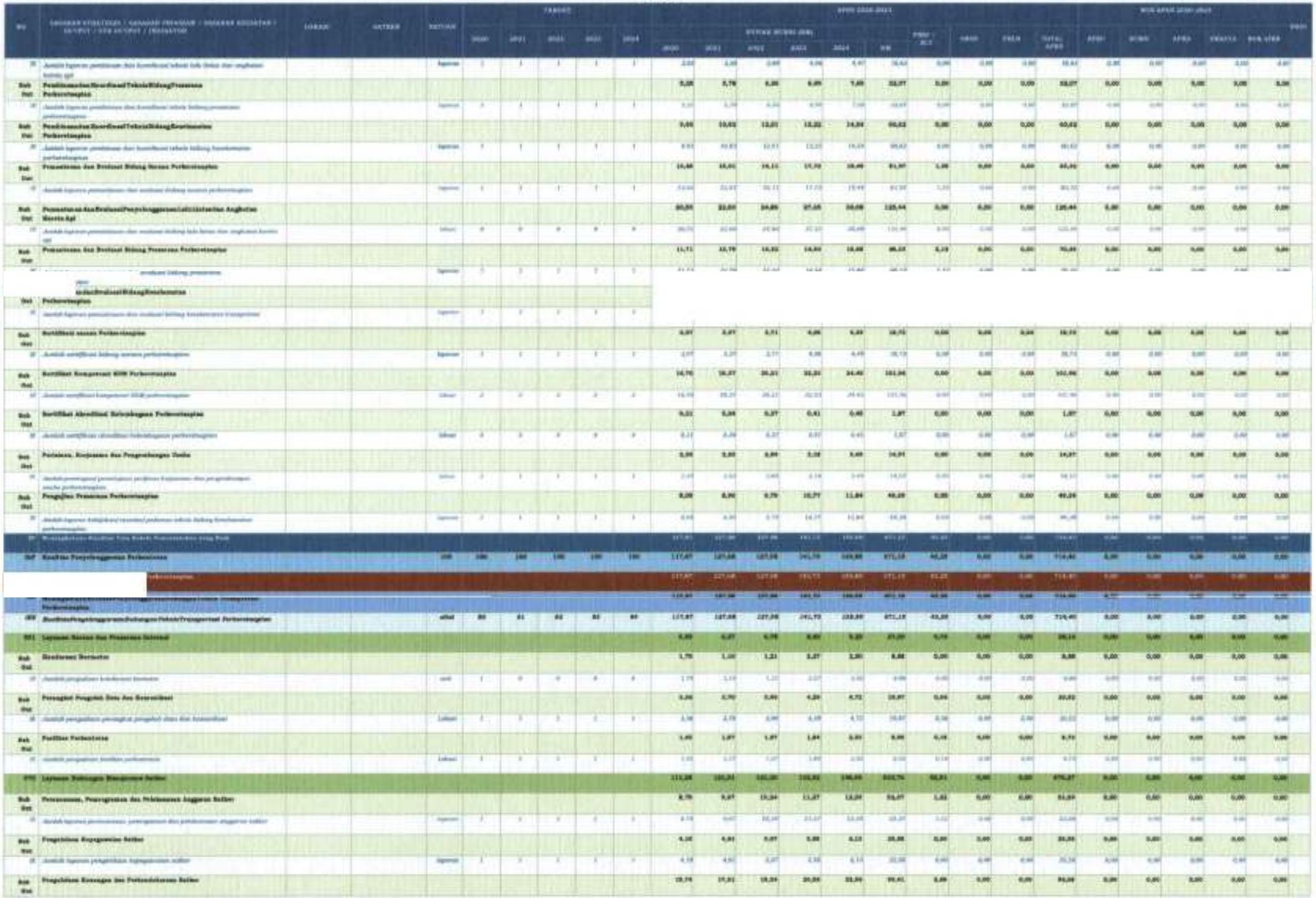

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / KOE OUTPUT / INDIKATIF	SATUAN	BOBOT	SATUAN	TARGET					RENSTRA 2020-2024											RENJA TAHUN 2020-2024					PAGU
					2020	2021	2022	2023	2024	KONDISI AWAL (2019)						PAGU / BLU	2020	PAGU	TOTAL 2020-2024							
										2020	2021	2022	2023	2024	KOE											
	Jumlah layanan keluargan dan perkembangan sektor	layanan			3	3	3	3	3	15,74	17,31	18,24	19,00	20,00	90,47	2,62	0,00	0,00	0,00	90,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Out	**Layanan Sektor**									**0,60**	**0,66**	**0,60**	**0,67**	**0,70**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Jumlah layanan pengelolaan hutan	layanan			3	3	3	3	3	0,60	0,66	0,60	0,67	0,70	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Out	**Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Sektor**									**0,84**	**0,89**	**1,40**	**1,96**	**1,70**	**30,80**	**7,10**	**0,00**	**0,00**	**38,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Jumlah layanan pengelolaan hutan dan informasi	layanan			3	3	3	3	3	2,30	2,20	2,40	2,40	2,70	30,80	7,10	0,00	0,00	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Out	**Layanan Data dan Rasio Tinggi Sektor**				**78,47**	**80,22**	**84,82**	**90,04**	**102,87**	**444,89**	**11,46**	**0,00**	**0,00**	**477,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Jumlah layanan pengelolaan layanan sistem dan rasio tinggi sektor	layanan			3	3	3	3	3	78,47	80,22	84,82	90,04	102,87	444,89	11,46	0,00	0,00	477,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Out	**Pengelolaan Data dan Informasi Sektor**				**0,62**	**0,69**	**0,75**	**0,84**	**0,91**	**3,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Jumlah layanan pengelolaan data dan informasi sektor	layanan			3	3	3	3	3	0,62	0,69	0,75	0,84	0,91	3,80	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Kajian Pengelola Transportasi Jalan Kabupaten									106,42	111,83	118,02	123,92	130,17	590,37	9,62	0,00	0,00	0,00	600,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	26.880,00
02	Terwujudnya Koordinasi Transportasi Jalan Kabupaten				31,82	33,41	35,26	37,03	39,08	176,61	0,00	0,00	0,00	176,61	0,00	0,00	0,00	0,00	176,61	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	26.880,00
1507	**Rasio Keselamatan Transportasi Perairan**	Nilai			**0,573**	**0,630**	**0,693**	**0,727**	**1**	**31,82**	**33,41**	**35,26**	**37,03**	**39,08**	**176,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176,61**	**13.440,00**	**0,00**	**13.440,00**	**0,00**	**0,00**	**26.880,00**
1508	Terwujudnya Koordinasi Transportasi Jalan Kabupaten									31,82	33,41	35,26	37,03	39,08	176,61	9,62	0,00	0,00	0,00	176,61	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	26.880,00
03	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkotaan yang Terpadu				31,82	33,41	35,26	37,03	39,08	176,61	0,00	0,00	0,00	176,61	0,00	0,00	0,00	0,00	176,61	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	26.880,00
1510	**Modal Share Angkutan Umum Perkotaan Jalan**				**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32,82**	**46,62**	**46,62**	**46,62**	**46,77**	**219,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219,31**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**
1511	**Pembangunan dan Pengembangan Prasarana Logistik Perkotaan Jalan Kabupaten (Prioritas Nasional)**									**0,00**	**30,20**	**44,20**	**30,20**	**30,20**	**144,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144,80**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00**
Sub Out	**Jalan Mataram Utbang Bukit Lani (PB)**									**0,00**	**11,64**	**17,64**	**17,64**	**17,64**	**70,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,56**	**1.404,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.404,00**
	Jumlah Kasus yang diberitangkan pada Jalan Angkutan	Unit			0	0	0	0	0	0,00	11,64	17,64	17,64	17,64	70,56	0,00	0,00	0,00	70,56	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00
Sub Out	**Sistem Logistik Perkotaan di Jakabotabek (PB)**									**0,00**	**18,75**	**18,75**	**18,75**	**18,75**	**75,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Jumlah Terminal Barang Terintegrasi Angkutan Logistik di Area Jalan Nasional yang diberitangkan di Kawasan Pkt - pasi Jakabotabek	Unit			0	0	0	0	0	0,00	18,75	18,75	18,75	18,75	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512	**Pembangunan Fasilitas Transportasi Rawan Lingkungan Wilayah Jakabotabek**									**0,00**	**4,20**	**4,20**	**4,20**	**4,20**	**17,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sub Out	**Pembangunan Fasilitas Pejalan Kaki / Sepeda di Wilayah Jakabotabek**									**0,00**	**4,20**	**4,20**	**4,20**	**4,20**	**17,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Jumlah Pembangunan Fasilitas Pejalan Kaki / Sepeda	Titik			0	0	0	0	0	0,00	4,20	4,20	4,20	4,20	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513	**Pemerosoon Transportasi Jakabotabek**									**11,20**	**4,50**	**4,50**	**4,50**	**4,50**	**33,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sub Out	**Sekonsolidasi Prasarana Transportasi di Jakabotabek**									**11,20**	**4,50**	**4,50**	**4,50**	**4,50**	**33,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Jumlah pengembangan dan peningkatan prasarana transportasi darat di wilayah Jakabotabek	Ribuan dan/Titik pekerja			10	12	7	8	9	11,20	4,50	4,50	4,50	4,50	33,17	0,00	0,00	0,00	33,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1514	**Kelelaguan Teknis Bidang Transportasi**									**0,00**	**0,10**	**0,10**	**0,17**	**0,19**	**0,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sub Out	**Kelelaguan Teknis Prasarana Transportasi Jakabotabek**									**0,00**	**0,10**	**0,10**	**0,17**	**0,19**	**0,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Bidang Prasarana Transportasi	Orang			0	12	12	20	12	0,00	0,10	0,10	0,17	0,19	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1515	**Monitoring dan Evaluasi Transportasi Jakabotabek**									**1,00**	**1,00**	**1,01**	**1,00**	**1,77**	**7,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sub Out	**Laporan Monitoring Prasarana Transportasi di Jakabotabek**									**1,00**	**1,00**	**1,01**	**1,00**	**1,77**	**7,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Prasarana Transportasi Terintegrasi antar dan Terpadu	Laporan			4	4	4	4	4	1,00	1,00	1,01	1,00	1,77	7,01	0,00	0,00	0,00	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1516	**Modal Share Angkutan Umum Berbasis Rel**	%			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,61**	**0,68**	**15,40**	**10,68**	**0,68**	**48,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1517	**Pembangunan Prasarana Perkeretapian Perkotaan Jakabotabek (Prioritas Nasional)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sub Out	**Prasarana Perkeretapian Perkotaan Jakabotabek (PB)**									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	JUMLAH JUMP Jumlah yang diberangkat	Unit			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1518	**Pembangunan Fasilitas Transportasi Rawan Lingkungan di Wilayah Jakabotabek**									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sub Out	**Fasilitas Lengkap Hidup di Jakabotabek**									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Jumlah Pembangunan Prasarana Kereta Api Perkotaan	unit			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519	**Pemerosoon Transportasi Jakabotabek**									**0,61**	**0,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sub Out	**Sekonsolidasi Prasarana Transportasi di Jakabotabek**									**0,61**	**0,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RH	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / KEGIATAN / KEGIATAN PRIORITAS / INDIKATOR	SATUAN	TARGET					KONDISI AWAL (2019)						PERKIRAAN REALISASI 2020-2024					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH
20	Jumlah Dokumen Perencanaan Prasarana Transportasi Berbasis Gol	Rekomendasi hasil kaji gabung	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	**Biaya Tahun Dasar Transportasi**							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Out	**Rekolasi Tahun Prasarana Transportasi Jabodetabek**							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Bidang Prasarana Transportasi	orang	0	20	20	20	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	**Monitoring dan Evaluasi Transportasi Jabodetabek**							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Out	**Laporan Monitoring Prasarana Transportasi di Jabodetabek**							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jumlah Angkutan Monitoring dan Evaluasi Prasarana Transportasi Berbasis Gol	laporan	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	**Persentase [illegible] ses Pejalan Kaki ke Angkutan Umum dengan Jarak Maksimal 500 M**		80	38	40	80	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
101	**Pembangunan Fasilitas Transportasi Perkotaan/Angkutan di Wilayah Jabodetabek**							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
Sub Out	**Fasilitas Integrasi Moda di Jabodetabek**							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
20	Jumlah Pengadaan Akses Pejalan Kaki ke Angkutan Umum dengan Jarak Maksimal 500 M	Unit	0	0	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
202	***Persentase Simpul Transportasi Perkotaan dengan Fasilitas Pejalan Kaki dan Fasilitas Parkir/Pindah Moda (Park and Ride) dengan Jarak Berjalan Kaki Moda Tidak Lebih dari 400M***		80	70	80	90	100	0,00	110,10	122,41	119,48	117,96	469,28	0,00	0,00	0,00	469,28	0,000,00	0,000,00
101	**Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Integrasi Simpul Transportasi Jabodetabek (Fasilitas Bersama)**							0,00	20,00	20,00	10,00	10,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
Sub Out	**Fasilitas Integrasi Moda di Jabodetabek (FS)**							0,00	14,00	20,00	14,00	13,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
20	Jumlah Fasilitas Integrasi Simpul Transportasi Berbasis Angkutan Massal yang Terbangun	unit	0	1	1	1	1	0,00	14,00	20,00	14,00	13,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
107	**Rekomendasi Pengembangan Kawasan Anggun/Fasilitasnya Transit Oriented Development (TOD) Jabodetabek/Fasilitas Bersama**							0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,000,00	0,000,00
Sub Out	**Rekomendasi Pembangunan Transit Oriented Development (TOD) Jabodetabek (FS)**							0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,000,00	0,000,00
10	Jumlah Kawasan TOD yang Direkomendasikan (Provinsi, Nasional)	Rekomendasi hasil kaji gabung	0	0	0	0	0	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,000,00	0,000,00
000	**Prasarana Transportasi Jabodetabek**							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00
Sub Out	**Rekomendasi Prasarana Transportasi di Jabodetabek**							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00
10	Jumlah Dokumen Perencanaan Angkutan Prasarana Transportasi	Rekomendasi hasil kaji gabung	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00
Sub Out	**Rekomendasi/Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) Jabodetabek (Rev Prioritas/Revisi)**							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Jumlah Kawasan TOD yang Dikembangkan	Rekomendasi hasil kaji gabung	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	**Biaya Tahun Bidang Transportasi**							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Out	**Rekolasi Tahun Prasarana Transportasi Jabodetabek**							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Bidang Prasarana Transportasi	orang	0	20	20	20	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	**Monitoring dan Evaluasi Transportasi Jabodetabek**							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Out	**Laporan Monitoring Prasarana Transportasi di Jabodetabek**							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jumlah Angkutan Monitoring dan Evaluasi Prasarana Transportasi	laporan	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	**Meningkatnya Kinerja Prasarana Transportasi Jabodetabek**							00,00	000,00	000,00	000,00	000,00	0.000,00	0,00	0,00	0,00	0.000,00	0,00	0.000,00
000	**OTP Transportasi Perkotaan**	%	00	00	00	00	00	00,00	000,00	000,00	000,00	000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0.000,00
0000	**Prasarana Transportasi/Transportasi Jabodetabek**							00,00	000,00	000,00	000,00	000,00	0.000,00	0,00	0,00	0,00	0.000,00	0,00	0.000,00
00	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Angkutan di Wilayah Jabodetabek**							00,00	00,00	000,00	000,00	000,00	000,00	0,00	0,00	0,00	000,00	0,00	0,00
000	**Kinerja Sistem Transportasi Jabodetabek/Angkutan Massal**							0,00	00,00	00,00	00,00	00,00	000,00	0,00	0,00	0,00	000,00	0,00	0,00
Sub Out	**Kinerja Pengendalian Lalu Lintas Moda atau SDP Jabodetabek (FS)**							0,00	00,00	00,00	00,00	00,00	000,00	0,00	0,00	0,00	000,00	0,00	0,00
20	Jumlah Angkutan Penumpang Jalan Perlintasan di Wilayah Jabodetabek	laporan	0	0	0	0	0	0,00	00,00	00,00	00,00	00,00	000,00	0,00	0,00	0,00	000,00	0,00	0,00
000	**Layanan Transportasi Jabodetabek**							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PENGAWAS / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	TARGET					RPJMD 2020-2024										RENCANA AKSI 2020-2024						PIC
			2020	2021	2022	2023	2024	RUPIAH MURNI (RM)					PBH / BLU	HIBAH	PNBP	TOTAL RPJMD	2020	2021	2022	2023	2024	
								2020	2021	2022	2023	2024												
Sub Out	**Layanan Lalu Lintas Jalan di Jakabotabek**							4,04	4,65	4,62	4,90	4,55	22,74	0,00	0,00	0,00	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IK	Jumlah Kegiatan Pengawasan Rutin Lalu Lintas Transportasi Jalan di Wilayah Jakabotabek	Kegiatan	4	4	4	4	4	4,04	4,65	4,62	4,90	4,55	22,74	0,00	0,00	0,00	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub Out	**Layanan Lalu Lintas Perairan di Jakabotabek**							0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IK	Jumlah Kegiatan Pengawasan Rutin Lalu Lintas Transportasi Perairan di Wilayah Jakabotabek	Kegiatan	0	0	1	1	1	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2XX	**Pelayanan Transportasi Jakabotabek**							0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub Out	**Terbentuknya Area Lalu Lintas Transportasi di Jakabotabek**							0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IK	Jumlah Dokumen Perencanaan Lalu Lintas Transportasi Jalan dan Perairan	Dokumen Hasil Riset Jalinan	0	1	1	1	1	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3XX	**Meningkatnya Teknis Bidang Transportasi**							0,00	0,19	0,18	0,17	0,10	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub Out	**Terlaksana Teknis Bidang Lalu Lintas**							0,00	0,19	0,18	0,17	0,10	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IK	Jumlah Fasilitas yang Mengikuti Meningkatkan Teknis Bidang Lalu Lintas	Orang	0	31	32	30	30	0,00	0,19	0,18	0,17	0,10	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4XX	**Monitoring dan Evaluasi Transportasi Jakabotabek**							0,97	1,02	1,02	1,07	1,04	5,12	0,00	0,00	0,00	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub Out	**Laporan Monitoring Area Lalu Lintas di Jakabotabek**							0,97	1,02	1,02	1,07	1,04	5,12	0,00	0,00	0,00	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IK	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rutinitas Lalu Lintas Berbasis Jalan	Kegiatan	4	4	4	4	4	0,97	1,02	1,02	1,07	1,04	5,12	0,00	0,00	0,00	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2XX	**Persentase Penurunan Gangguan Perjalanan Berdampak Perhatian**	%	70	70	80	80	80	1,82	2,00	4,02	4,04	0,16	15,14	0,00	0,00	0,00	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3XX	**Layanan Transportasi Jakabotabek**							0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub Out	**Layanan Lalu Lintas Perkotaanjalan di Jakabotabek**							0,00	1,00	2,00	2,04	2,32	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IK	Jumlah Kegiatan Pengawasan Gangguan Perjalanan Berdampak Perhatian	Kegiatan	0	4	4	4	4	0,00	1,00	2,00	2,04	2,32	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3XX	**Pelayanan Transportasi Jakabotabek**							0,84	0,00	0,00	1,00	1,17	3,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub Out	**Terbentuknya Area Lalu Lintas Transportasi di Jakabotabek**							0,84	0,00	0,00	1,00	1,17	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IK	Jumlah Dokumen Perencanaan Lalu Lintas Transportasi Air	Dokumen Hasil Riset Jalinan	1	1	1	1	1	0,84	0,00	0,00	1,00	1,17	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3XX	**Meningkatnya Teknis Bidang Transportasi**							0,00	0,13	0,13	0,17	0,10	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub Out	**Terlaksana Teknis Bidang Lalu Lintas**							0,00	0,13	0,13	0,17	0,10	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IK	Jumlah Fasilitas yang Mengikuti Meningkatkan Teknis Bidang Lalu Lintas	Orang	0	31	30	30	30	0,00	0,13	0,13	0,17	0,10	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4XX	**Monitoring dan Evaluasi Transportasi Jakabotabek**							0,97	1,02	1,02	1,07	1,04	5,12	0,00	0,00	0,00	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub Out	**Laporan Monitoring Area Lalu Lintas di Jakabotabek**							0,97	1,02	1,02	1,07	1,04	5,12	0,00	0,00	0,00	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IK	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rutinitas Lalu Lintas Berbasis Jalan	Kegiatan	4	4	4	4	4	0,97	1,02	1,02	1,07	1,04	5,12	0,00	0,00	0,00	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2XX	**Terselenggaranya Intelligent Transport System (ITS) di Wilayah Jakabotabek**	%	40	60	67	68	80	10,00	30,01	80,01	80,03	80,79	309,83	0,00	0,00	0,00	309,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3XX	**Layanan Transportasi Jakabotabek Lainnya (Fiskhas Nasional)**							0,00	47,68	95,34	58,04	88,04	289,80	0,00	0,00	0,00	289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub Out	**Pembangunan dan Pengembangan ATCS di Jalan Nasional**							0,00	47,68	95,34	58,04	88,04	289,80	0,00	0,00	0,00	289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IK	Pembangunan dan Pengembangan ATCS di Jalan Nasional	Unit	0	1	2	2	2	0,00	47,68	95,34	58,04	88,04	289,80	0,00	0,00	0,00	289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3XX	**Layanan Transportasi Jakabotabek**							0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20,14	0,00	0,00	0,00	20,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub Out	**Intelligent Transport System (ITS) di Jakabotabek**							0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20,14	0,00	0,00	0,00	20,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IK	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Layanan Sistem Informasi Transportasi	Kegiatan	0	0	1	1	1	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20,14	0,00	0,00	0,00	20,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3XX	**Pemasangan Transportasi Jakabotabek**							0,70	0,70	0,80	0,80	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub Out	**Terbentuknya Sistem Informasi Lalu Lintas di Wilayah Jakabotabek**							0,70	0,70	0,80	0,80	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IK	Jumlah Dokumen Pemasangan Sistem Informasi Lalu Lintas	Dokumen Hasil Riset Jalinan	1	1	1	1	1	0,70	0,70	0,80	0,80	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3XX	**Meningkatnya Teknis Bidang Transportasi**							0,00	0,13	0,13	0,17	0,10	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sub Out	**Terlaksana Teknis Bidang Lalu Lintas**							0,00	0,13	0,13	0,17	0,10	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IK	Jumlah Fasilitas yang Mengikuti Meningkatkan Teknis Bidang Lalu Lintas	Orang	0	30	31	30	30	0,00	0,13	0,13	0,17	0,10	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4XX	**Monitoring dan Evaluasi Transportasi Jakabotabek**							0,97	1,02	1,02	1,07	1,04	5,12	0,00	0,00	0,00	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / KRO / ACTIVITY / KEGIATAN | SATUAN | TARGET | | | | | APBN 2020-2024 | | | | |

No	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / KOMPONEN / INDIKATOR	LOKASI	SATKER	SATUAN	TARGET					APBN 2021-2024											REVISI APBN 2020-2024					PAGU
					2020	2021	2022	2023	2024	VOLUME BIAYA (RM)						PROP / PLUT	2020	2021	TOTAL APBN	APBN	REVISI	APBN	PERGESER	SISA APBN	
										2020	2021	2022	2023	2024	SUM											
Sub Out	**Subsidi Angkutan Penyeberangan(Buy the service)@ Jabodetabek**																									
11	Jumlah Lintasan Angkutan Umum Perintis antar pulau Kendaraan Jabodi			Lintasan	1	1	1	1	1																	
111	**Pemasaran Transportasi Jabodetabek**																									
Sub Out	**Rekomendasi Pemasaran Perikanan Angkutan Laut di Wilayah Jabodetabek**																									
37	Jumlah Lokasi Pemasaran Perikanan Angkutan Umum			Kabupaten dan Kota Jabodi	0	0	0	0	0																	
112	**Kantor Tidak Biasa Transportasi**																									
Sub Out	**Kendaraan Tidak Biasa Angkutan Laut**																									
37	Jumlah Muatan yang Mengikuti Kendaraan Tidak Biasa Angkutan Umum			orang	0	20	11	11	20																	
107	**Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jabodetabek**																									
Sub Out	**Laporan Monitoring Barang Transportasi di Jabodetabek**																									
37	Jumlah Angkutan Penyelenggara Operasi Angkutan Umum			Agensi	4	4	4	4	4																	
37	Meningkatnya Pemeliharaan Transportasi Jabodetabek																									
107	**Rute Angkutan Kendaraan Transportasi Jalan per 10.000 orang/a**			Unit	0,02	0,018	0,018	0,016	0,011																	
4000	Kendaraan dan Angkutan Transportasi Jabodetabek																									
	Akumul																									
100	**Penyeberangan Fasilitas serta Rute Kendaraan dan Angkutan Transportasi Jabodetabek (Fasilitas Rute)**			%	80	82	84	86	87																	
100	**Pengadaan Fasilitas serta Rute Kendaraan dan Angkutan Transportasi Jabodetabek (Fasilitas Rute)**																									
Sub Out	**Fasilitas dan Perlengkapan Jalan di Jalan Nasional Jabodetabek**																									
37	Jumlah Lokasi Pemasangan Fasilitas dan Perlengkapan Jalan			unit	2	2	0	0	0																	
102	**Pemasangan/Pemasangan Angkutan Penyeberangan/Meningkatkan SME di Jabodetabek**			%	60	67	84	77	77																	
100	**RPPK Angkutan Pasca Pelatihan**																									
Sub Out	**RPPK Angkutan Penumpang di Jabodetabek**																									
37	Jumlah Angkutan Penyelenggaraan Angkutan Jalanan, Rebut, dan Tidak Aman			paket	1	1	1	1	1																	
37	Jumlah Angkutan Penyelenggara Kendaraan Transportasi Angkutan Umum			paket	1	1	1	1	1																	
102	**Lokasi Penegakan Perlindungan di Jabodetabek**			Lokasi	0	1	1	1	1																	
100	**Pemasangan Transportasi Jabodetabek**																									
Sub Out	**Jumlah Sekolah Pemasangan Penegakan Perlindungan di Jabodetabek**																									
37	Jumlah Sekolah Pemasangan Penegakan Perlindungan di Jabodetabek			Kabupaten dan Kota Jabodi	1	1	1	1	1																	
37	Program Kerja dan Inovasi Dan Pengelolaan dan Tabeling																									
11	Kabar Perubahan dan Pengembangan Perkebangan																									
107	Optimalisasi Kerjasama Dalam Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perkebangan																									
107	Tingkat Kepuasan/Kerja Dalam Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perkebangan pada K-K			%	60	68	67	66	69																	
1071	Kerjasama Pelaksanaan Kebijakan Transportasi																									
96	Optimalisasi Kerjasama Dalam Pelaksanaan Kebijakan Transportasi																									
	Pelaksanaan Kebijakan Transportasi Jalan dan Air pada K-Q			%	68	68	67	68	69																	
100	**Pemasangan dan Pengelolaan Infrastruktur SME**																									

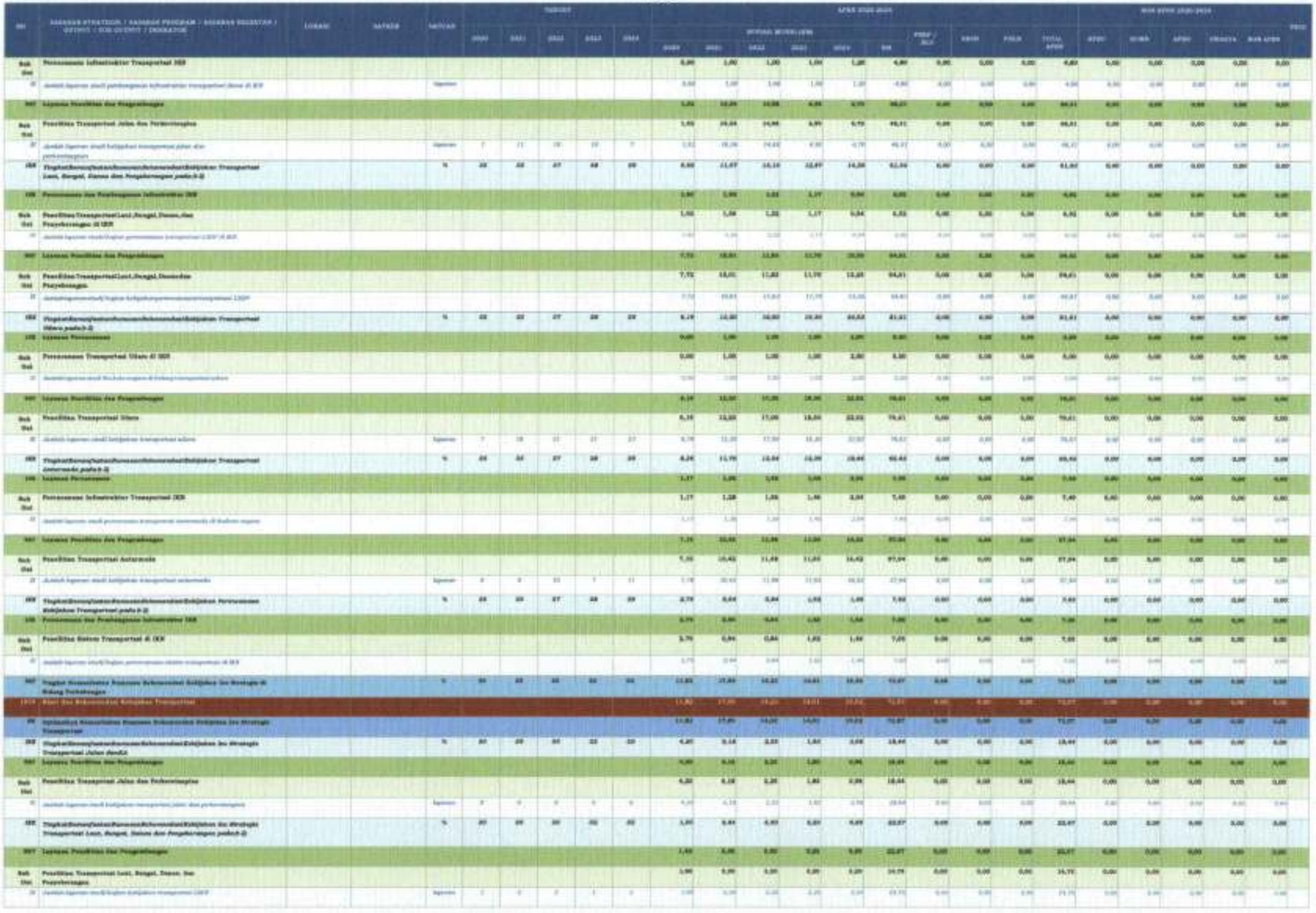

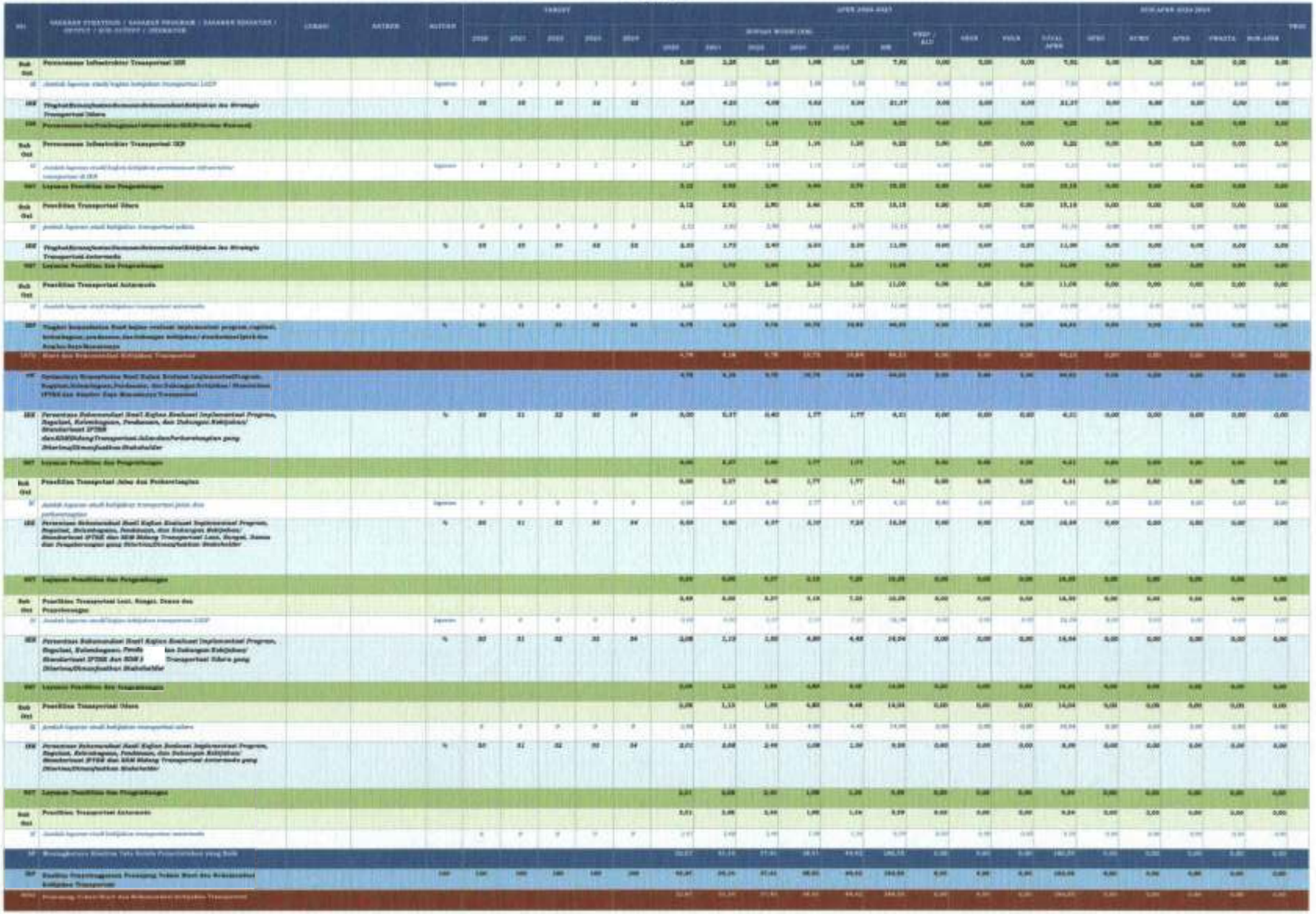

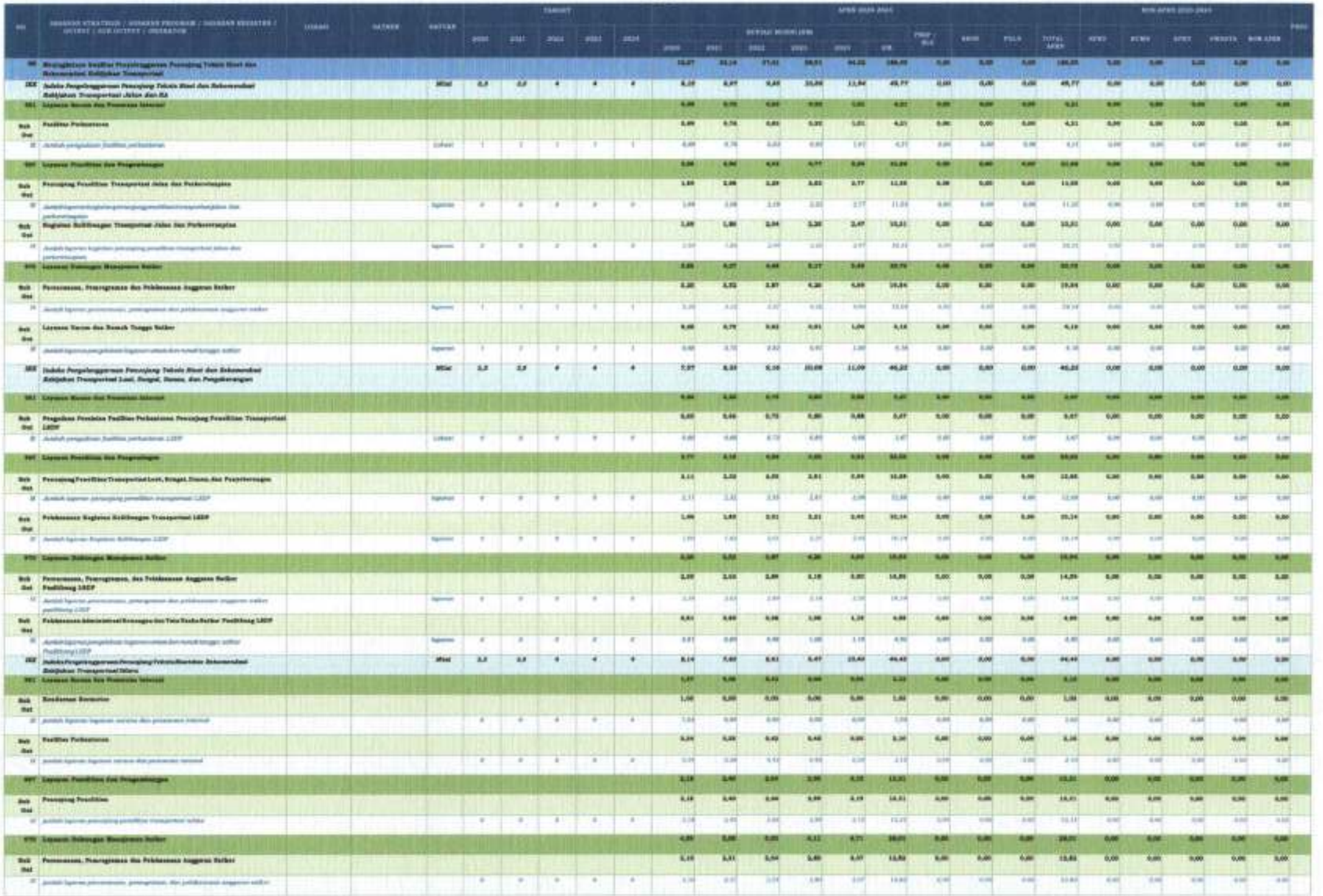

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Perhubungan 2020-2024

Lanjut...

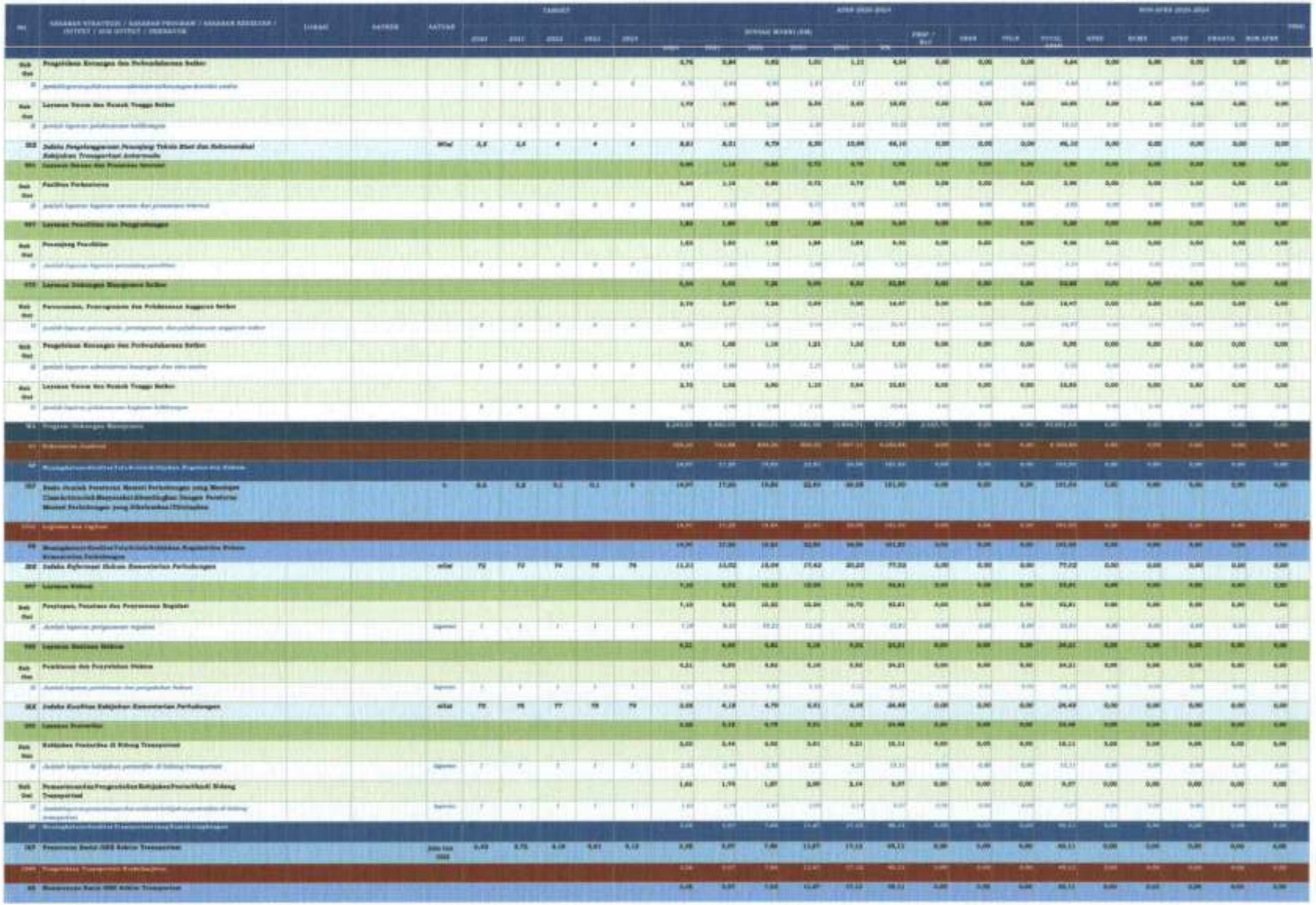

No	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	TARGET	TARGET					APBN 2020-2024												RPJMN 2020-2024					Ket
				2020	2021	2022	2023	2024	Alokasi Anggaran (Rp)						PAGU / BLU	APBD	PNBP	Total APBN							
									2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH											

No	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	SATUAN	TARGET					APBD 2020-2024										BOR APBD 2020-2024					PAGU
					2020	2021	2022	2023	2024	RINCIAN BIAYA (RB)						PAGU / RLT	SBSN	PLN-B	TOTAL APBD	APBD	BOR	APBD	PRIVATE	BOR APBN	
										2020	2021	2022	2023	2024	RB										
Sub Out	**Rekrutmen dan Pengangkatan Pegawai**									3,87	3,44	4,11	4,96	5,03	21,41	0,00	0,00	0,00	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah ASN yang diterima		orang		0	0	0	0	0	3,87	3,44	4,11	4,96	5,03	21,41	0,00	0,00	0,00	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKU	**Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Kebiroktod Jenderal**		nilai		0,8	0,9	0,92	0,93	1	19,78	23,17	13,84	14,38	17,21	88,88	0,00	0,00	0,00	86,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KPO	**Layanan Unbrugga Manajemen Keller**									19,78	23,17	13,84	14,38	17,21	88,88	0,00	0,00	0,00	86,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kab Out.	**Pengelolaan Kepegawaian Keller**									19,78	23,17	13,84	14,38	17,21	88,88	0,00	0,00	0,00	86,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah layanan pengelolaan kepegawaian keller		layanan		5	5	5	5	5	19,78	23,17	13,84	14,38	17,21	88,88	0,00	0,00	0,00	86,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	[illegible]									19,78	23,17	13,84	14,38	17,21	88,88	0,00	0,00	0,00	86,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKU	**Indeks Manajemen Keselamatan Kerja Transportasi**									19,78	23,17	13,84	14,38	17,21	88,88	0,00	0,00	0,00	86,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PO	**Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemeliharaan Transportasi**				13,78	12,17	13,84	15,41	17,21	89,88	0,00	0,00	0,00	86,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IKK	**Jumlah Kendaraan yang Dioperasikan dan Dipelihara**		unit		0	0	0	0	0	19,78	23,17	13,84	14,38	17,21	88,88	0,00	0,00	0,00	86,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KPO	**Layanan Pemeliharaan**									19,78	23,17	13,84	14,38	17,21	88,88	0,00	0,00	0,00	86,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	**Terselenggaranya pemeliharaan**									19,78	23,17	13,84	14,38	17,21	88,88	0,00	0,00	0,00	86,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah layanan pemeliharaan		layanan		5	5	5	5	5	19,78	23,17	13,84	14,38	17,21	88,88	0,00	0,00	0,00	86,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	**Monitoring dan evaluasi hasil investigasi**									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi hasil investigasi		laporan		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	**Berjasama Udang investigasi kecelakaan transportasi**				0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah kerjasama kecelakaan/tindak investigasi kecelakaan transportasi		kegiatan		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	**Sosialisasi review hasil investigasi kecelakaan transportasi**				0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah laporan sosialisasi review /kaji ulang hasil investigasi kecelakaan transportasi		kegiatan		0	0	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	**Pendataan pendukung investigasi kecelakaan transportasi**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah pendataan pendukung investigasi kecelakaan transportasi		paket		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	[illegible]									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKU	**Meningkatnya Kualitas Manajemen Keselamatan Transportasi**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKK	**Tingkat Penanganan Rekomendasi Hasil Putusan Sidang Mahkamah Pelayaran**		%		80	80	80	71	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KPO	**Putusan Putusan Sidang Mahkamah Pelayaran**									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	**Terlibat dan prosiding informasi dan awal kecelakaan kapal**									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah laporan verifikasi dan penelitian informasi dokumen kecelakaan kapal		laporan		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	**Sidang majelis pemeriksa lajutan kecelakaan kapal Mahkamah Pelayaran**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah laporan sidang majelis pemeriksa lajutan kecelakaan kapal Mahkamah Pelayaran		laporan		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	**Putusan Mahkamah Pelayaran**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah putusan sidang mahkamah pelayaran		putusan		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
[illegible]	[illegible]									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKU	**Meningkatnya Kapasitas Aparatur Informasi dan Teknologi Komunikasi Perhubungan**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKK	**Indeks SPBE Kementerian Perhubungan**		nilai		2,8	2,9	2,97	3,36	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KPO	**Layanan Informasi Keldiran**									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	**Pengawas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah layanan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi		layanan		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KPO	**Layanan Data dan Informasi**				38,07	48,00	56,00	53,61	70,00	265,68	0,00	0,00	0,00	265,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Sub Out	**Dukungan Pemrosesan dan Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IK	Jumlah layanan pemrosesan dan kebijakan TIK Perhubungan		layanan		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	**Pengembangan Aplikasi, Basis Data dan Infrastruktur Teknologi Informasi Perhubungan**				0,00	0,78	13,84	8,68	18,41	41,68	0,00	0,00	0,00	41,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IK	Jumlah layanan pengembangan aplikasi, basis data dan infrastruktur TIK		layanan		0	0	1	1	1	0,00	0,78	13,84	8,68	18,41	41,68	0,00	0,00	0,00	41,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	**Pengelolaan Perangkat Sirkuit dan Jaringan serta Sistem Aplikasi dan Basis Data**				31,68	38,84	41,16	44,44	50,84	201,34	0,00	0,00	0,00	201,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

No	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR / KODE INDIKATOR / DESKRIPSI	SUMBER	SATUAN	SATUAN	TARGET					ALOKASI 2020-2024									REALISASI 2020-2024					
					2020	2021	2022	2023	2024	BIAYA MANDATORI					TOTAL ALOKASI									
										2020	2021	2022	2023	2024										
(1)	Jumlah Layanan pengaduan data dan informasi			Agensi	1	1	1	1	1	27,22	28,02	41,48	48,64	20,08	265,44	0,00	0,00	0,00	265,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Ord	**Pengelolaan Data dan Layanan Operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan**									**3,20**	**3,07**	**3,20**	**3,80**	**4,01**	**14,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(2)	Jumlah Layanan pengelolaan data dan layanan operasional TIK			Agensi	1	1	1	1	1	3,20	3,07	3,20	3,80	4,01	14,24	0,00	0,00	0,00	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	**Layanan Dokumen Manajemen Sektor**									**4,01**	**4,02**	**3,10**	**3,02**	**3,01**	**20,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sub Ord	**Pengelolaan Data dan Informasi Sektor**									**4,01**	**4,02**	**3,10**	**3,02**	**3,01**	**20,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(3)	Jumlah layanan pengelolaan data dan informasi sektor			Agensi	1	1	1	1	1	4,01	4,02	3,10	3,02	3,01	20,01	0,00	0,00	0,00	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Program Dukungan Perhubungan									0,00	0,00	0,00	7,97	3,00	10,97	0,00	0,00	0,00	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan**				0,00	0,00	0,00	7,97	3,00	10,97	0,00	0,00	0,00	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(IKU)	**Indeks Pelayanan Publik Kementerian Perhubungan**			nilai	4,20	4,2	4,22	4,4	4,42	0,00	0,00	0,00	7,97	3,00	10,97	0,00	0,00	0,00	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	**Penyusunan pengelolaan kelembagaan/ketatalaksanaan dan sarana pelayanan prasarana/anggaran**									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,97**	**3,00**	**10,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sub Ord	**Fasilitasi dan Pengelolaan Kelajuan Prasyaratan Waktu dan Layanan Pelayanan Sektor Transportasi**				0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1)	Jumlah layanan pelaksana dan pengelolaan kelajuan pelayanan prasarana (kendaraan/angkutan sektor transportasi)			Agensi	0	0	0	0	0	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Ord	**Fasilitasi dan Pengelolaan Kelajuan Pelayanan Prasarana Pengoperasian Kendaraan Angkutan Transportasi**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2)	Jumlah layanan pelaksana dan pengelolaan kelajuan pelayanan prasarana (kendaraan/angkutan sektor transportasi)			Agensi	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	Program Keterpaduan Pelayanan Publik				19,00	20,11	21,11	22,11	23,11	105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	105,44	0,00	0,00	0,00	105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kementerian Perhubungan**				19,00	20,11	21,11	22,11	23,11	105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	105,44	0,00	0,00	0,00	105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(IKU)	**Indeks Kepuasan Pengguna Kementerian Perhubungan**			nilai	87	88	89	90	91	105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	105,44	0,00	0,00	0,00	105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	**Layanan Dukungan Manajemen dan Informasi**				19,00	20,11	21,11	22,11	23,11	105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	105,44	0,00	0,00	0,00	105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Ord	**Pengelolaan Informasi Publik**				11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3)	Jumlah layanan pengelolaan informasi publik			Agensi	1	1	1	1	1	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Ord	**Pengelolaan Komunikasi Perhubungan pada Media**				8,00	9,11	10,11	11,11	12,11	50,44	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44	0,00	0,00	0,00	50,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4)	Jumlah layanan pemberitaan kementerian perhubungan pada media			Agensi	1	1	1	1	1	8,00	9,11	10,11	11,11	12,11	50,44	0,00	0,00	0,00	50,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	**Layanan Dukungan Manajemen Sektor**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Ord	**Layanan Dukungan Manajemen dan Informasi Sektor**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5)	Jumlah layanan pengelolaan humas dan informasi			Agensi	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	**Meningkatnya Kualitas Kepemimpinan Aparat Kementerian Perhubungan**				30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(IKU)	**Indeks Kepemimpinan Perubahan Kementerian Perhubungan**			nilai	20,00	24,00	28,00	34,00	40,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	**Layanan Keprotokolan**				19,00	20,11	21,11	22,11	23,11	105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	105,44	0,00	0,00	0,00	105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Ord	**Layanan Keprotokolan dan Pimpinan**				19,00	20,11	21,11	22,11	23,11	105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	105,44	0,00	0,00	0,00	105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(6)	Jumlah layanan layanan keprotokolan dan pimpinan			Agensi	1	1	1	1	1	19,00	20,11	21,11	22,11	23,11	105,44	0,00	0,00	0,00	105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	**Layanan Informasi Strategis**				0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Ord	**Manajemen Perubahan**				0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(7)	Jumlah layanan data kritis manajemen pimpinan			Agensi	0	1	1	1	1	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	Program Pengelolaan Kerjasama, SDM dan Hukum				107,00	107,78	114,44	118,00	115,78	2.564,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,44	0,00	0,00	0,00	2.564,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	**Meningkatnya Kualitas Kerjasama Perhubungan, Kualitas Aparatur dan Akuntabilitas**				107,00	111,78	115,00	118,00	119,78	2.564,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,44	0,00	0,00	0,00	2.564,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(IKU)	**Nilai SAKIP Kementerian Perhubungan**			nilai	77	78	77	78	80	2,77	1,00	1,00	1,00	1,00	6,02	0,00	0,00	0,00	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	**Layanan Keterpaduan Kinerjanet**				2,77	1,00	1,00	1,00	1,00	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02	0,00	0,00	0,00	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Ord	**Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perhubungan**				2,77	1,00	1,00	1,00	1,00	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02	0,00	0,00	0,00	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(8)	Jumlah layanan kinerja kementerian perhubungan			Agensi	1	1	1	1	1	2,77	1,00	1,00	1,00	1,00	6,02	0,00	0,00	0,00	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(IKU)	**Indeks Pengawasan Kinerjanet Kementerian Perhubungan**			nilai	81,3	91,7	91,9	92	98,2	93,03	68,02	72,04	86,44	103,73	372,27	0,00	0,00	0,00	372,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	**Layanan Hukum**				86,00	86,00	72,00	86,00	103,00	372,27	0,00	0,00	0,00	0,00	372,27	0,00	0,00	0,00	372,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Kinerja Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Output / Sub Output / Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Rpm 2020-2024									Rkb Apbn 2020-2024					Pagu
				2020	2021	2022	2023	2024	Output Biaya (Rm)					Pdgt / Alt	Tahun	Tolak	Total Rpm	Rpm	Rtmn	Apbd	Swasta	Rkb Apbn	
									2020	2021	2022	2023	2024	Rm									
Sub Out	**Pemerataan, kesetaraan dan pelayanan**								8,20	9,30	7,64	9,16	10,00	38,40	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Al	Jumlah layanan pemerataan, kesetaraan dan pelayanan		layanan	1	1	1	1	1	1,00	6,30	1,64	3,16	19,20	38,40	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	**Layanan Kemasyarakatan**								42,36	50,83	50,71	73,93	97,92	315,74	0,00	0,00	0,00	315,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Al	Jumlah layanan layanan kemasyarakatan		layanan	1	1	1	1	1	42,36	50,83	50,71	73,93	97,92	315,74	0,00	0,00	0,00	315,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	**Monitoring Kebijakan Dnd Aldi dan Ntef Khusus Obstetri Perkotaan**								3,90	3,98	3,99	4,40	0,21	19,07	0,00	0,00	0,00	19,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Al	Jumlah layanan monitoring kebijakan Dnd Aldi dan Ntef Khusus Obstetri Perkotaan		layanan	1	1	1	1	1	3,90	3,98	3,99	4,40	0,21	19,07	0,00	0,00	0,00	19,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKU	**Indeks Distribusi IKU Kewenangan Perkotaan**		nilai	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	**Layanan Kebijakan Khususnya**								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	**Status Pengelolaan Lahan Pemerintah**								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Al	Jumlah layanan IKU		layanan	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKU	**Indeks Pemerataan Kewenangan Perkotaan**		nilai	70	80	82	84	80	11,00	15,92	20,64	25,10	40,61	113,80	0,00	0,00	0,00	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	**Layanan Pemerataan**								0,00	12,00	17,00	20,07	32,00	97,08	0,00	0,00	0,00	97,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	**Pemerataan dan Kebijakan Perkotaan Jangka Pendek**								0,97	4,00	6,00	6,40	7,71	37,09	0,00	0,00	0,00	37,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Al	Jumlah indikasi pemerataan dan kebijakan perkotaan jangka pendek		dokumen	0	0	0	0	0	0,97	4,00	6,00	6,40	7,71	37,09	0,00	0,00	0,00	37,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	**Pemerataan dan Kebijakan Perkotaan Jangka Menengah**								1,00	2,70	4,00	10,00	14,13	31,77	0,00	0,00	0,00	31,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Al	Jumlah dokumen pemerataan dan kebijakan perkotaan jangka menengah		dokumen	0	0	0	0	0	1,00	2,70	4,00	10,00	14,13	31,77	0,00	0,00	0,00	31,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	**Pemerataan dan Kebijakan Perkotaan Jangka Panjang**								0,04	0,01	1,00	0,01	19,00	39,04	0,00	0,00	0,00	39,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Al	Jumlah indikasi pemerataan dan kebijakan perkotaan jangka panjang		dokumen	0	0	0	0	0	0,04	0,01	1,00	0,01	19,00	39,04	0,00	0,00	0,00	39,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	**Layanan Pemerataan dan Distribusi**								0,20	0,02	0,00	0,70	0,00	15,27	0,00	0,00	0,00	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	**Pemerataan dan Distribusi Dikeng Perkotaan**								0,19	0,02	0,00	0,70	0,00	15,27	0,00	0,00	0,00	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Al	Jumlah layanan pemerataan dan distribusi dikeng perkotaan		layanan	1	1	1	1	1	0,19	0,02	0,00	0,70	0,00	15,27	0,00	0,00	0,00	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKU	**Indeks Tata Kelola Pengelolaan Keung Dan Jasa Kewenangan Perkotaan**		nilai	60	62	70	78	80	16,70	17,84	21,17	28,42	80,48	159,61	0,00	0,00	0,00	159,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004	**Layanan Pengelolaan Keung Dan Jasa**								16,70	17,84	21,17	28,42	80,48	159,61	0,00	0,00	0,00	159,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	**Pengelola Keung Dan Jasa**								16,70	17,84	21,17	28,42	80,48	159,61	0,00	0,00	0,00	159,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Al	Jumlah layanan pengelola keung dan jasa		layanan	1	1	1	1	1	16,70	17,84	21,17	28,42	80,48	159,61	0,00	0,00	0,00	159,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKU	**Indeks Pengelolaan Kewenangan Kewenangan Perkotaan**		nilai	80,2	84,4	86,2	88,2	90,2	27,27	28,61	31,77	34,00	27,60	110,99	0,00	0,00	0,00	110,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005	**Layanan Manajemen Kewenangan**								6,41	7,00	9,00	12,00	23,00	57,51	0,00	0,00	0,00	57,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	**Pratikasa Pelaksanaan Anggaran**								1,00	2,00	2,00	2,00	8,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Al	Jumlah layanan pendidikan anggaran		layanan	1	1	1	1	1	1,00	2,00	2,00	2,00	8,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	**Perencanaan, Implementasi, Pengelolaan, Pratikasa Akuntansi dan Layanan Keuangan**								1,00	2,20	3,70	4,20	3,00	13,90	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Al	Jumlah layanan perencanaan, implementasi, pengelolaan, pratikasa akuntansi dan layanan keuangan		layanan	1	1	1	1	1	1,00	2,20	3,70	4,20	3,00	13,90	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	**Pratikasa Perkreditasian**								1,24	1,43	1,71	2,00	2,46	8,84	0,00	0,00	0,00	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Al	Jumlah layanan pendidikan perkreditasian		layanan	1	1	1	1	1	1,24	1,43	1,71	2,00	2,46	8,84	0,00	0,00	0,00	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	**Pratikasa PMDP**								1,66	1,99	2,29	2,68	3,46	12,08	0,00	0,00	0,00	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Al	Jumlah layanan pratikasa PMDP		layanan	1	1	1	1	1	1,66	1,99	2,29	2,68	3,46	12,08	0,00	0,00	0,00	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006	**Layanan Kebijakan Khususnya**								10,00	11,72	13,64	15,96	14,26	63,59	0,00	0,00	0,00	63,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	**Pratikasa Administrasi dan Pengelolaan Keuangan**								10,00	11,72	13,64	15,96	14,26	63,59	0,00	0,00	0,00	63,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Al	Jumlah layanan pratikasa administrasi dan pengelolaan keuangan		layanan	1	1	1	1	1	10,00	11,72	13,64	15,96	14,26	63,59	0,00	0,00	0,00	63,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IKU	**Indeks Pengelolaan dan Kewenangan Perkotaan**		nilai	60	60	60	70	70	8,01	8,01	7,02	8,00	25,00	57,04	0,00	0,00	0,00	57,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	**Layanan Manajemen Keung Milik Negara**								8,01	8,01	7,02	8,00	25,00	57,04	0,00	0,00	0,00	57,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	**Pengelolaan Keung Milik Negara**								8,01	8,01	7,02	8,00	25,00	57,04	0,00	0,00	0,00	57,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Al	Jumlah layanan pengelolaan keung milik negara		layanan	1	1	1	1	1	8,01	8,01	7,02	8,00	25,00	57,04	0,00	0,00	0,00	57,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Output / Sub Output / Indikator	Lokasi	Satker	Satuan	Target					Alokasi 2020-2024										Realisasi 2020-2024					Ket
					2020	2021	2022	2023	2024	Alokasi Biaya (Rp. Miliar)						Prop / Kab	Tahun	Pusat	Total Alokasi	Output	Biaya	Lokasi	Tahapan	Realisasi	
										2020	2021	2022	2023	2024	Jml										
(XX)	**Misi dalam Sekretariat Jenderal**			**nilai**	**77**	**78**	**79**	**80**	**81**	**0,64**	**0,72**	**0,78**	**0,80**	**1,00**	**3,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
(XX)	**Layanan Kehormatan Menteri**									**0,64**	**0,72**	**0,78**	**0,80**	**1,00**	**3,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Sub Out	**Pengelolaan Jamuan/Hidran Sekretariat Jenderal**									**0,64**	**0,72**	**0,78**	**0,64**	**1,00**	**3,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
IK	Jumlah Agenda Jamuan Kenegaraan Terlaksana	Agenda			1	1	1	1	1	0,64	0,72	0,78	0,80	1,00	3,94	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(XX)	**Indeks Pengawasan Kearsipan Sekretariat Jenderal**			**nilai**	**81,5**	**81,7**	**81,9**	**82**	**82,3**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
(XX)	**Layanan Dukungan Manajemen Satker**									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Sub Out	**Layanan Sarana dan Prasarana Tenaga Satker**									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
IK	Jumlah layanan pengelolaan layanan sarana dan prasarana tenaga satker	Layanan			1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(XX)	**Indeks Perencanaan Sekretariat Jenderal**			**nilai**	**76**	**80**	**82**	**84**	**85**	**28,00**	**27,44**	**30,07**	**28,47**	**46,87**	**161,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
(XX)	**Layanan Dukungan Manajemen Satker I**									**5,86**	**7,09**	**9,16**	**11,49**	**40,00**	**93,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Sub Out	**Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Anggaran Satker I**									**5,86**	**7,09**	**9,16**	**11,49**	**40,00**	**93,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
IK	Jumlah layanan perencanaan	Layanan			1	1	1	1	1	5,86	7,09	9,16	11,49	40,00	93,59	0,00	0,00	0,00	93,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(XX)	**Layanan Dukungan Manajemen Satker**									**18,79**	**20,11**	**21,51**	**23,01**	**24,64**	**108,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Sub Out	**Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Anggaran Satker**									**18,79**	**20,11**	**21,51**	**23,01**	**24,64**	**108,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
IK	Jumlah layanan perencanaan, penganggaran dan pelaporan anggaran satker	Layanan			1	1	1	1	1	18,79	20,11	21,51	23,01	24,64	108,07	0,00	0,00	0,00	108,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(XX)	**Indeks Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal**			**nilai**	**72**	**70**	**77**	**78**	**80**	**16,00**	**17,81**	**18,88**	**20,09**	**21,84**	**94,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
(XX)	**Layanan Dukungan Manajemen Satker**									**16,00**	**17,81**	**18,88**	**20,09**	**21,84**	**94,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Sub Out	**Layanan Sarana dan Prasarana Tenaga Satker**									**16,00**	**17,81**	**18,88**	**20,09**	**21,84**	**94,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
IK	Jumlah layanan pengelolaan layanan sarana dan prasarana tenaga satker	Layanan			1	1	1	1	1	16,00	17,81	18,88	20,09	21,84	94,79	0,00	0,00	0,00	94,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(XX)	**Tingkat Pengelenggaraan Kehumasan**			**nilai**	**70**	**72**	**73**	**75**	**74**	**392,20**	**394,52**	**376,87**	**402,60**	**655,41**	**1.947,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.947,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
(XX)	**Layanan Humas dan Pemberaan Internal**									**154,96**	**56,77**	**58,80**	**61,19**	**98,59**	**970,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**970,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Sub Out	**Brosharan Bersama**									**22,12**	**4,61**	**1,47**	**0,00**	**0,00**	**28,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
IK	Jumlah pengadaan brosharan terbaru	Eksemplar			1	1	1	1	1	22,12	4,61	1,47	0,00	0,00	28,20	0,00	0,00	0,00	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	**Pengadaan Pengisian Foto dan Kamerabuk**									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**20,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
IK	Jumlah pengadaan perangkat pengisian foto dan kamerabuk	Eksemplar			1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	20,27	0,00	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	**Fasilitas Perkantoran**									**20,01**	**20,87**	**42,00**	**47,32**	**50,80**	**210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
IK	Jumlah pengadaan fasilitas perkantoran	Eksemplar			1	1	1	1	1	20,01	20,87	42,00	47,32	50,80	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	**Pemeliharaan / Renovasi Gedung dan Bangunan**									**84,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
IK	Jumlah pemeliharaan / renovasi gedung dan bangunan	Gedung/unit			1	1	1	1	1	84,04	0,00	0,00	0,00	0,00	112,82	0,00	0,00	0,00	112,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(XX)	**Layanan Perkantoran**									**397,00**	**398,18**	**415,02**	**441,00**	**448,08**	**2.099,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.099,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Sub Out	**Gaji dan Tunjangan**									**226,01**	**230,89**	**240,20**	**250,20**	**260,20**	**1.207,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.207,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
IK	Jumlah layanan gaji dan tunjangan	Orang			1	1	1	1	1	226,01	230,89	240,20	250,20	260,20	1.207,50	0,00	0,00	0,00	1.207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	**Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran**									**121,14**	**140,07**	**155,00**	**169,71**	**171,98**	**764,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**764,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
IK	Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Layanan			1	1	1	1	1	121,14	140,07	155,00	169,71	171,98	764,48	0,00	0,00	0,00	764,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	**Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Kantor**									**0,00**	**22,00**	**24,00**	**20,20**	**16,00**	**101,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
IK	Jumlah dukungan operasional dan pemeliharaan kantor	Layanan			1	1	1	1	1	0,00	22,00	24,00	20,20	16,00	101,81	0,00	0,00	0,00	101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(XX)	**Pengelolaan Arsip dan Dokumen**									**12,00**	**10,18**	**13,71**	**14,00**	**14,20**	**63,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
(XX)	**Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Kementerian Perhubungan**			**nilai**	**89**	**92**	**94**	**95**	**97**	**12,48**	**10,18**	**15,71**	**20,02**	**20,20**	**102,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
(XX)	**Kegiatan Kreativitas/Inovasi/Solusi Bagi Siswa Transportasi Angkutan/Transportasi/Pariwisata, serta Pilak Peserta Kecil/Mandiri**									**0,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,00**	**22,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Sub Out	**Penyelenggaraan KPAU di Lingkungan Kementerian Perhubungan**									**0,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,00**	**22,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

No	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Activity / Sub Output / Indikator	Lokasi	Kaitan	Satuan	Target					Kondisi Awal 2020-2024										Arah Kebijakan 2025-2029					
					2025	2026	2027	2028	2029	Kondisi Awal						Target / RLH	2025	2026	Total 2025-2029	2025	2026	2027	2028	2029	Total
										2020	2021	2022	2023	2024	RK										
dst	Jumlah Laporan pengelenggaraan SPBU di lingkungan Kementrian Perhubungan			Laporan	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	**Layanan Kelaiklautan Internasional**									22,00	22,00	14,00	18,10	22,22	77,32	0,00	0,00	0,00	77,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Out	**Biaya Internasional**									10,00	12,00	14,00	18,10	22,22	77,32	0,00	0,00	0,00	77,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dst	Jumlah Laporan Biaya Internasional			Laporan	4	4	4	4	4	10,00	12,00	14,00	18,10	22,22	77,32	0,00	0,00	0,00	77,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dst	Sasaran Strategis Berikutnya									124,61	122,20	130,83	144,11	144,19	726,94	0,00	0,00	0,00	726,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dst	Persentase Kepatuhan Pengawasan Dan Penegakan Hukum Yang Memberikan Efek Tangkal									9,00	9,81	11,07	11,55	14,84	56,27	0,00	0,00	0,00	56,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067	Hasil IKU "Wajar Tanpa Pengecualian"			%	100	100	100	100	100	0,00	0,00	11,07	11,55	14,84	56,24	0,00	0,00	0,00	56,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0121	Prioritasnya Pengawasan Internal									8,17	8,01	8,84	11,21	12,09	50,13	0,00	0,00	0,00	50,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	Implementasi Pengawasan Yang Berkualitas									8,17	8,01	8,84	11,21	12,09	50,13	0,00	0,00	0,00	50,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068	Persentase Laporan Kecelakan Unit Kerja yang telah menerapkan Manajemen Risiko dengan Baik			%	87	88	88	88	88	0,00	0,01	0,01	0,10	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	Layanan Pengawasan Internal									0,00	0,01	0,01	0,10	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Out	Audit									0,00	0,01	0,01	0,10	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dst	Jumlah Unit Kerja Lingkup Kementrian Perhubungan			Laporan	20	20	20	20	20	0,00	0,01	0,01	0,10	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069	Persentase penyelesaian BMN atas hasil Audit BPKP			%	70	72	74	76	78	1,00	1,00	2,01	2,00	2,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	Layanan Pengawasan Internal									1,00	1,00	2,01	2,00	2,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Out	Audit									1,00	1,00	2,01	2,00	2,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dst	Laporan Audit BPKP			Laporan	20	20	20	20	20	1,00	1,00	2,01	2,00	2,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	Persentase (%) Japaran Terkredit dalam rate AKA			%	85	86	86	87	88	0,00	0,00	0,01	0,10	0,01	14,02	0,00	0,00	0,00	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047	Layanan Pengawasan Internal									0,00	0,00	0,01	0,10	0,01	14,02	0,00	0,00	0,00	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Out	Audit									0,00	0,00	0,01	0,10	0,01	14,02	0,00	0,00	0,00	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dst	Laporan Audit AKA			Laporan	20	20	20	20	20	0,00	0,00	0,01	0,10	0,01	14,02	0,00	0,00	0,00	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0121	Prioritasnya Pengawasan Internal									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	Implementasi Pengawasan Yang Berkualitas									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Persentase rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti			%	80	80	80	80	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Out	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dst	Jumlah Laporan Tindak Lanjut LHP BPK			Laporan	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0121	Meningkatnya Layanan Pengawasan Internal									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067	Tingkat Kepatuhan Pengawasan oleh Auditi			%	80	80	80	80	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0121	Prioritasnya Pengawasan Internal									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	Implementasi Pengawasan Yang Berkualitas									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067	Tingkat Kepatuhan Pengawasan oleh Auditi			%	80	80	80	80	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	Layanan Pengawasan Internal									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Out	Survey Pengawasan									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dst	Jumlah Laporan Survey Kepatuhan Pengawasan			Laporan	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067	Intensitas Tindak Lanjut Pengaduan di lingkungan Kementrian Perhubungan			%	80	80	80	80	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0121	Prioritasnya Pengawasan Internal									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	Implementasi Pengawasan Yang Berkualitas									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
067	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan di Lingkungan Kementrian Perhubungan			%	80	80	80	80	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	Layanan Pengawasan Internal									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Out	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dst	Jumlah Laporan Lingkup Unit Kerja Lingkup di Lingkungan Kementrian Perhubungan			Laporan	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / KRO OUTPUT / CEKLAPKIN	SATUAN	TARGET					REALISASI																	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2025	PAGU / RUP	REALISASI	SISA	TOTAL REALISASI								
1	**Persentase Tindak Lanjut Penyempurnaan Kesesuaian Pengawasan Tugas Waktu**	%	70	80	85	90	95	0,51	0,49	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1	**Pelaksanaan Pengawasan Internal**							0,51	0,49	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.1	**Implementasi Pengawasan Yang Berkualitas**							0,51	0,49	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.1.1	**Persentase Tindak Lanjut Penyempurnaan Kesesuaian Pengawasan Tugas Waktu**	%	10	80	85	90	95	0,51	0,49	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.2	**Layanan Pengawasan Internal**							0,51	0,49	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.2.1	**Pengelolaan Kesesuaian Pengawasan**							0,51	0,49	0,70	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Kesesuaian Pengawasan	Laporan	1	1	1	1	1	0,51	0,49	0,70	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.2.2	**Pengawasan dan Pengendalian Pravalensi CFPD**							0,51	0,49	0,78	1,04	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian CFPD	Laporan	1	1	1	1	1	0,51	0,49	0,78	1,04	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2	**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**							111,87	111,79	111,58	109,69	110,48	877,50	0,00	0,00	0,00	877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1	**Indeks RB Kementerian Perhubungan**	Nilai	79	79	79,5	80	80,5	111,87	111,79	111,58	109,69	110,48	877,50	0,00	0,00	0,00	877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1	**Pelaksanaan Pengawasan Internal**							0,51	0,49	0,78	1,04	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.1.1.1	**Proses Bisnis Pengawasan Yang Efektif**							0,08	0,07	0,09	0,40	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.2	**Persentase Hasil Aver Review (Telaahan Rujukan) Internal di Lingkungan Inspektorat Jenderal**	%	70	70	80	85	90	0,08	0,07	0,09	0,40	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	**Layanan Pengawasan Internal**							0,08	0,07	0,09	0,40	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2.1	**Telaahan Rujukan Internal**							0,08	0,07	0,09	0,40	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Jumlah Laporan Telaahan Rujukan Internal Inspektorat Jenderal	Dokumen	1	1	1	1	1	0,08	0,07	0,09	0,40	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	**Meningkatnya Kinerja Yang Berkualitas**							19,09	19,82	92,86	89,84	93,76	315,37	0,00	0,00	0,00	315,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1	**Persentase Rekomendasi LHA Hijau Yang Ditindaklanjuti**	%	82	85	88	87	90	20,11	20,27	20,08	46,10	87,47	194,22	0,00	0,00	0,00	194,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.1	**Layanan Pengawasan Internal**							20,11	20,27	20,08	46,10	87,47	194,22	0,00	0,00	0,00	194,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.1.1	**Audit Kinerja**							16,09	16,66	16,84	35,84	95,10	180,48	0,00	0,00	0,00	180,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Jumlah Laporan Audit Kinerja	Laporan	1	1	1	1	1	16,09	16,66	16,84	35,84	95,10	180,48	0,00	0,00	0,00	180,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.1.2	**Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)**							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Jumlah Laporan Audit Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.1.3	**Pemantauan, Pengawasan dan Supervisi**							1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Jumlah Laporan Pemantauan, Supervisi dan Pengawasan	Laporan	1	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.1.1.4	**Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit (TLHA)**							2,02	2,01	2,76	3,00	8,30	13,47	0,00	0,00	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Jumlah Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit (LHA) Biro	Laporan	1	1	1	1	1	2,02	2,01	2,76	3,00	8,30	13,47	0,00	0,00	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.2	**Persentase Aktif Berkasil Meraihkan AKIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan**	%	75	80	85	90	100	0,00	1,00	1,00	1,00	1,27	5,21	0,00	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.2.1	**Layanan Pengawasan Internal**							0,00	1,00	1,00	1,00	1,27	5,21	0,00	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.2.1.1	**Evaluasi**							0,00	1,00	1,00	1,00	1,27	5,21	0,00	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Jumlah Evaluasi Akuntan AKIP	Laporan	1	1	1	1	1	0,00	1,00	1,00	1,00	1,27	5,21	0,00	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3	**Persentase dukungan pengawalan/pendampingan BAKP kementerian/lembaga**	%	70,3	77,5	79,3	80,8	82,3	0,42	0,42	2,02	2,00	5,04	11,49	0,00	0,00	0,00	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1	**Layanan Pengawasan Internal**							0,42	0,42	2,02	2,00	5,04	11,49	0,00	0,00	0,00	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.1	**Evaluasi**							0,42	0,42	2,02	2,00	5,04	11,49	0,00	0,00	0,00	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Jumlah Evaluasi BAKP Berikut I di Lingkungan Kementerian	Laporan	1	1	1	1	1	0,42	0,42	2,02	2,00	5,04	11,49	0,00	0,00	0,00	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	**Organisasi Fit For Purpose**							17,13	6,00	0,00	11,87	17,14	98,15	0,00	0,00	0,00	28,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	**Jumlah Unit Kerja Kementerian Perhubungan Yang mendapatkan predikat WBK/WBBM**	Unit	2	2	4	7	8	0,57	0,94	1,62	2,62	4,02	9,44	0,00	0,00	0,00	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	**Layanan Pengawasan Internal**							0,57	0,94	1,62	2,62	4,02	9,44	0,00	0,00	0,00	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1.1	**Pengelolaan Predikat Zona Integritas**							0,57	0,94	1,62	2,62	4,02	9,44	0,00	0,00	0,00	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Jumlah Laporan Pengelolaan / Evaluasi Zona Integritas	Laporan	1	1	1	1	1	0,57	0,94	1,62	2,62	4,02	9,44	0,00	0,00	0,00	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
202	**Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal**	Nilai	81	83	84	86	87	16,66	6,04	0,14	4,20	8,86	35,86	0,00	0,00	0,00	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

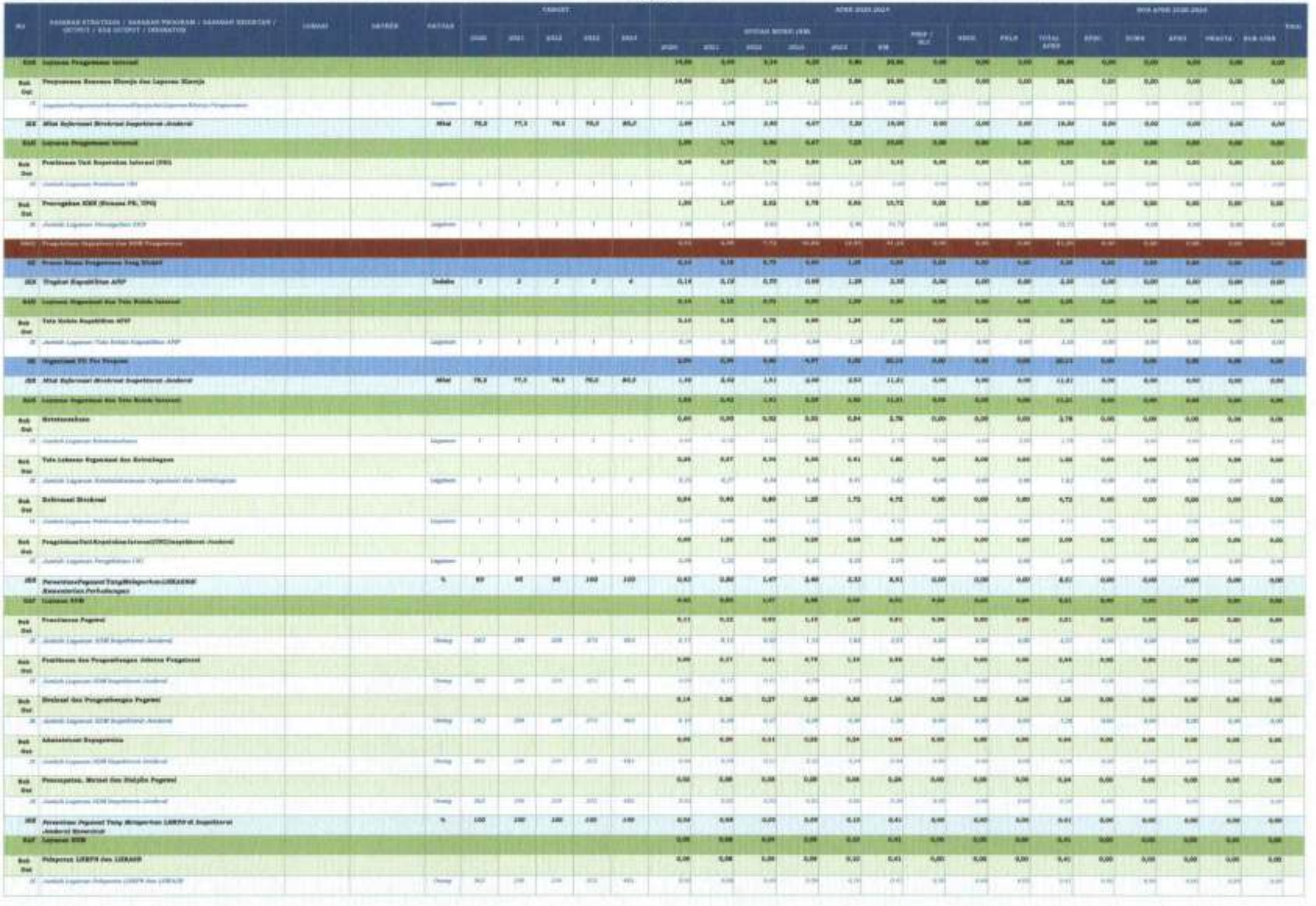

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / KRO OUTPUT / INDIKATOR	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024										REALISASI APBN 2020-2022					
			2020	2021	2022	2023	2024	RINCIAN BIAYA (RIB)						PERS / RIS	2020	2021	TOTAL APBN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	PERSENTASE	SISA APBN	PERS
								2020	2021	2022	2023	2024	JML											
XX	XXX Pengelolaan Yang Kompetitif							2,20	3,00	3,01	4,11	4,80	17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XXX	Persentase Auditor Yang Memenuhi Kompetensi	%	60	70	75	80	80	2,20	3,00	3,01	4,11	4,80	17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XXX	Layanan Perkantoran dan Pelatihan Internal							2,20	3,00	3,01	4,11	4,80	17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi SDM Itjen		0,00	0,00	0,01	0,11	4,80	21,77	0,00	0,00	0,00	0,00	17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Layanan Perkantoran dan Pelatihan Internal	Orang	110	120	130	140	150	2,20	3,00	3,01	4,11	4,80	17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XXXX	Kinerja dan Pertanggungjawaban Anggaran dan Barang Kementerian Terwujud		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XX	Prima Vista Pengawasan Yang Efektif		0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XXX	Tingkat Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal	Indeks	3	3	3	3	4	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XXX	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal		0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Terselenggaranya APIP		0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Layanan Pengelenggaraan APIP Inspektorat Jenderal	Layanan	3	3	3	3	3	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XX	Tingkat Kapabilitas APIP	Indeks	3	3	3	3	4	0,00	0,10	0,10	0,20	0,40	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XXX	Layanan Perencanaan dan Pengelolaan Internal		0,00	0,10	0,10	0,20	0,40	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)		0,00	0,10	0,10	0,20	0,40	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Layanan Program Kerja Pengawasan Tahunan	Layanan	1	1	1	1	1	0,00	0,10	0,10	0,20	0,40	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XX	Organisasi Fit For Purpose		0,02	0,10	0,01	0,72	12,50	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XXX	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	Nilai	81	83	84	86	87	4,01	0,03	4,44	0,08	4,27	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XXX	Layanan Perencanaan dan Pengelolaan Internal		0,74	0,04	0,04	1,00	1,00	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Perencanaan Pengawasan Inspektorat Jenderal		0,02	0,01	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Layanan Perencanaan dan Pengelolaan Internal	Layanan	3	3	3	3	3	0,02	0,01	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Pemantauan Kinerja Inspektorat Jenderal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Layanan Pemantauan Kinerja Inspektorat Jenderal	Layanan	3	3	3	3	3	0,02	0,01	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XXX	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal		0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal		0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Layanan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal	Layanan	3	3	3	3	3	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XXX	Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	Nilai	75,5	77,5	79,5	79,5	83,5	2,00	2,47	2,97	3,04	3,71	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XXX	Layanan Review Internal		0,00	2,47	2,97	3,04	3,71	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Penelaan Pelitbin Perkantoran		0,00	2,47	2,97	3,04	3,71	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Layanan Review Internal	Kali	180	170	80	80	200	0,00	2,47	2,97	3,04	3,71	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XX	Pelaksanaan Anggaran Yang Berkualitas		47,11	49,00	51,04	51,04	53,07	252,44	0,00	0,00	0,00	0,00	252,44	0,00	0,00	0,00	0,00	252,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XXX	Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	Nilai	80	82	84	86	88	47,11	49,00	51,04	51,04	53,07	252,44	0,00	0,00	0,00	0,00	252,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XXX	Layanan Perkantoran		44,00	46,61	48,46	49,04	48,80	236,91	0,00	0,00	0,00	0,00	236,91	0,00	0,00	0,00	0,00	236,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Gaji dan Tunjangan		39,82	41,49	43,21	43,74	43,17	209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Layanan Operasional Perkantoran	Layanan	3	3	3	3	3	39,82	41,49	43,21	43,74	43,17	209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran		4,04	5,03	4,13	4,00	4,47	20,33	0,00	0,00	0,00	0,00	20,33	0,00	0,00	0,00	0,00	20,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Layanan Operasional Perkantoran	Layanan	3	3	3	3	3	4,04	5,03	4,13	4,00	4,47	20,33	0,00	0,00	0,00	0,00	20,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XXX	Layanan Teknis		2,14	4,02	2,99	3,59	0,40	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Pengelolaan Perlengkapan dan Rumah		0,00	0,11	1,06	1,07	1,08	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Layanan Rumah Kediaman dan Perlengkapan	Layanan	3	3	3	3	3	0,00	0,11	1,06	1,07	1,08	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Layanan Keuangan dan Pengawasan Anggaran		1,04	1,11	1,22	1,28	1,30	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Layanan Utama Keuangan	Layanan	3	3	3	3	3	1,04	1,11	1,22	1,28	1,30	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XXX	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Terpercaya		2,10	2,00	2,10	2,10	2,10	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / ACTIVITY / SUB ACTIVITY / INDIKATOR	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2021									RENCANA 2020-2024					
			2020	2021	2022	2023	2024	BIAYA RUPIAH (RM)					PNBP / BLU	HIBAH	PHLN	TOTAL APBN	APBD I	APBD II	APBN	PRIVATE	BUMN/BUMD
								2020	2021	2022	2023	2024										
00	Nama Informasi Kinerjanya Yang Harus Ada (Kirim)							1,19	2,99	4,22	5,16	6,51	20,28	0,00	0,00	0,00	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	*Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan*	%	70	80	85	90	95	1,19	2,99	4,22	5,16	6,51	20,28	0,00	0,00	0,00	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0x0	Layanan Data dan Informasi							1,19	2,99	4,22	5,16	6,51	20,28	0,00	0,00	0,00	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0x0 0x1	Data dan Informasi Pengawasan							0,44	0,60	0,73	0,88	1,06	3,89	0,00	0,00	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Layanan Data dan Informasi Pengawasan	Layanan	2	2	2	2	2	0,44	0,60	0,73	0,88	1,06	3,89	0,00	0,00	0,00	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0x0 0x2	Aplikasi dan Sistem Informasi Pengawasan							0,70	1,84	2,00	2,50	2,09	9,09	0,00	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Layanan Data dan Aplikasi Pengawasan	Layanan	3	3	3	3	3	0,70	1,84	2,00	2,50	2,09	9,09	0,00	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0x0 0x3	Pendidan Sistem Informasi Pengawasan							0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Layanan Data dan Aplikasi Pengawasan	Layanan	2	2	2	2	2	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0x00	Pengelolaan Kebijakan dan Administrasi Pengawasan							0,00	1,00	1,07	2,16	7,27	11,49	0,00	0,00	0,00	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	Organisasi Tki Dan Pengawas							0,00	1,00	1,07	2,16	7,27	11,49	0,00	0,00	0,00	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	*Persentase Informasi Kelembagaan Kinerja Yang Dimanfaatkan*	%	100	100	100	100	100	0,00	1,00	1,07	2,16	7,27	11,49	0,00	0,00	0,00	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	Kelembaga							0,00	0,00	1,04	0,99	0,90	3,04	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0x0 0x0	Kelembaga Bidang Pengawasan							0,00	0,00	1,04	0,99	0,90	3,04	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Kelembagaan Pengawasan Pelaksa Pengawasan	Kelompok Ahli	7	7	7	7	7	0,00	0,00	1,04	0,99	0,90	3,04	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	1,03	0,97	0,82	0,81	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	1,03	0,97	0,82	0,81	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kelompok Ahli	7	7	7	7	7	0,00	0,00	1,03	0,97	0,82	0,81	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	Pengelolaan Kelembagaan dan Informasi SUMDA Pengawasan							0,00	1,00	1,00	2,77	6,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	Organisasi Tki Dan Pengawas							0,00	1,00	1,00	2,77	6,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	*Jumlah Laporan Kelembagaan dan Informasi Pengawasan*	Laporan	1	1	1	1	1	0,00	1,00	1,00	2,77	6,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0x0	Layanan Kelembagaan dan Pelaksana							0,00	1,00	1,00	2,77	6,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0x0 0x1	Pelaksana Pimpinan							1,02	0,44	0,01	0,00	0,07	1,15	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Laporan Kelembagaan dan Informasi Pengawasan	Laporan	4	4	4	4	4	1,02	0,44	0,01	0,00	0,07	1,15	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0x0 0x2	Hubungan Kemasyarakatan							0,04	0,16	0,27	0,18	0,19	1,04	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Laporan Kelembagaan dan Informasi Pengawasan	Laporan	4	4	4	4	4	0,04	0,16	0,27	0,18	0,19	1,04	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0x0 0x3	Majalah, Buletin, Media Informasi dan Dokumentasi							1,00	0,77	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Laporan Kelembagaan dan Informasi Pengawasan	Laporan	4	4	4	4	4	1,00	0,77	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0x0 0x4	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)							0,07	0,18	0,00	1,00	0,21	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Laporan Kelembagaan dan Informasi Pengawasan	Laporan	4	4	4	4	4	0,07	0,18	0,00	1,00	0,21	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0x00	Kegiatan dan Layanan Pengawasan							0,00	0,00	0,07	0,00	4,71	10,77	0,00	0,00	0,00	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	Organisasi Tki Dan Pengawas							0,79	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	*Persentase Peraturan Yang Ditetapkan*	%	100	200	100	100	100	0,79	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	Peraturan Lainnya							0,79	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0x0 0x0	Peraturan Bidang Pengawasan							0,79	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Peraturan Kepalaan Undang-Undang Ditetapkan	Dokumen	1	2	1	1	1	0,79	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	Pranata Kinerja Pengawasan Yang Efektif							0,00	1,73	1,07	0,04	0,04	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	*Tingkat Kapasitas APIP*	Indeks	2	3	3	3	4	0,00	1,73	1,07	0,04	0,04	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	Layanan Dalam							0,00	1,73	1,07	0,04	0,04	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0x0 0x1	Sistem Dalam							0,00	0,10	0,00	0,07	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Layanan Dalam	Layanan	1	1	1	1	1	0,00	0,10	0,00	0,07	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0x0 0x2	Konsin Audit							0,00	1,63	1,02	1,77	1,94	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / ORGANISASI	LOKASI	SATKER	SATUAN	TARGET					APBN 2024-2025										RKA APBN 2020-2024					Ket
										OUTPUT BIAYA (RM)					PAGU / ALK	ARKO	PDLN	TOTAL APBN						
					(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	RM										
	Jumlah Capaian Output			Kegiatan																					
	Biaya Pembangunan Darat																								
	Biaya Pembangunan Perkeretaapian Kegiatan Kilang																								
	Rasio Analisis Dampaknya Manfaat Perkeretapaan yang Berdasarkan Aktivitas Masyarakat di Kawasan Dengan Prasarana Manfaat Perkeretapaan yang Ditetapkan/Ditetapkan			%	0,0	0,0	0,1	0,1	0	21,81	21,81	24,65	24,19	24,81	116,62	0,00	0,00	0,00	116,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Capaian dan Capaian Transportasi Darat									21,81	21,81	24,65	24,19	24,81	116,62	0,00	0,00	0,00	116,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Angkutan, Keamanan dan Pelayanan Perkeretapian									21,81	21,81	24,65	24,19	24,81	116,62	0,00	0,00	0,00	116,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	Indeks Reformasi Jalan Dijen Perhubungan Darat			Nilai	72	72	74	73	75	21,81	21,81	24,65	24,19	24,81	116,62	0,00	0,00	0,00	116,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	Layanan Dukungan Manajemen Satker 1									21,81	21,81	24,65	24,19	24,81	116,62	0,00	0,00	0,00	116,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Layanan Umum									21,81	21,81	24,65	24,19	24,81	116,62	0,00	0,00	0,00	116,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Layanan Satker			Layanan	1	1	1	1	1	21,81	21,81	24,65	24,19	24,81	116,62	0,00	0,00	0,00	116,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik									1.302,11	1.174,96	1.201,18	1.240,39	1.301,41	6.222,04	79,60	0,00	0,00	6.301,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	Indeks RB Kementerian Perhubungan			Indeks	70	70	73,5	80	80,5	1.150,14	1.174,96	1.199,18	1.240,39	1.301,41	6.222,04	79,60	0,00	0,00	6.301,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Penguatan Pengembangan Sistem Teknologi Transportasi Darat									8,31	8,31	9,14	9,60	10,10	45,51	0,00	0,00	0,00	45,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Meningkatnya Kapabilitas Sistem Informasi dan Teknologi Dijen Perhubungan Darat									8,31	8,72	9,14	9,60	10,10	45,51	0,00	0,00	0,00	45,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	Indeks KPDE Kementerian Perhubungan			Nilai	2,9	3,0	2,95	3,90	4,10	8,31	8,72	9,14	9,60	10,10	45,51	0,00	0,00	0,00	45,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	Layanan Dukungan Manajemen Satker 1									8,31	8,72	9,14	9,60	10,10	45,91	0,00	0,00	0,00	45,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Layanan Tata Usaha Informasi									8,31	8,72	9,14	9,60	10,10	45,91	0,00	0,00	0,00	45,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Layanan data dan informasi			Layanan	1	1	1	1	1	8,31	8,72	9,14	9,60	10,10	45,91	0,00	0,00	0,00	45,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Penguatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara									3,00	3,00	3,00	15,00	22,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian Sekretariat Dijen Perhubungan Darat									3,00	3,00	3,00	15,00	22,00	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	Indeks Kelembagaan Dijen Perhubungan Darat			Nilai	78	78,5	79	79,5	80	3,12	3,36	3,66	3,94	4,24	28,37	0,00	0,00	0,00	28,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	Layanan Dukungan Manajemen Satker 1									3,12	3,36	3,66	3,94	4,24	28,37	0,00	0,00	0,00	28,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Layanan Manajemen Kepegawai									3,12	3,36	3,66	3,94	4,24	28,37	0,00	0,00	0,00	28,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah layanan manajemen kepegawai			Kegiatan	1	1	1	1	1	3,12	3,36	3,66	3,94	4,24	28,37	0,00	0,00	0,00	28,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	Indeks Tata Kelola Manajemen ARKO Dijen Perhubungan Darat			Nilai	0,9	0,9	0,92	0,94	1	3,90	4,19	4,50	4,82	4,94	21,33	0,00	0,00	0,00	21,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	Layanan Dukungan Manajemen Satker 1									3,90	4,19	4,50	4,82	4,94	21,33	0,00	0,00	0,00	21,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Layanan Manajemen Aset Dan Humas									3,90	4,19	4,50	4,82	4,94	21,33	0,00	0,00	0,00	21,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah layanan manajemen BMN			Layanan	1	1	1	1	1	3,90	4,19	4,50	4,82	4,94	21,33	0,00	0,00	0,00	21,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pengelolaan Pengembangan Prasarana dan Pengelolaan Darat									1.295,81	1.161,88	1.189,87	1.211,16	1.266,11	6.124,82	79,60	0,00	0,00	6.204,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Meningkatnya Kualitas Dijen Perhubungan Darat Berkelanjut									1.295,81	1.161,88	1.189,87	1.211,16	1.266,11	6.124,82	79,60	0,00	0,00	6.204,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	Nilai SAKIP Dijen Perhubungan Darat			Nilai	80	84	88	89	90	3,01	3,13	3,91	4,10	4,40	28,10	0,00	0,00	0,00	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	Layanan Dukungan Manajemen Satker 1									3,01	3,13	3,91	4,10	4,40	28,10	0,00	0,00	0,00	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Layanan Monitoring dan Evaluasi									3,01	3,13	3,91	4,10	4,40	28,10	0,00	0,00	0,00	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah layanan pemantauan dan evaluasi			Kegiatan	1	1	1	1	1	3,01	3,13	3,91	4,10	4,40	28,10	0,00	0,00	0,00	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	Indeks Pengelolaan Kawasan Dijen Perhubungan Darat			Nilai	91,2	91,7	91,9	92	92,3	2,56	2,65	2,70	2,88	4,06	15,84	0,00	0,00	0,00	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	Layanan Dukungan Manajemen Satker 1									3,56	3,82	3,70	3,88	4,06	18,84	0,00	0,00	0,00	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Layanan Kawa dan Rawah Tunggu									3,44	3,82	3,70	3,88	4,06	18,44	0,00	0,00	0,00	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah layanan kawa dan rawah tunggu			Layanan	1	1	1	1	1	3,44	3,82	3,70	3,88	4,06	18,44	0,00	0,00	0,00	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	Indeks Perawatan Dijen Perhubungan Darat			Nilai	78	80	82	84	85	22,65	22,65	24,69	24,89	25,74	71,59	0,00	0,00	0,00	71,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	Layanan Dukungan Manajemen Satker 1									22,65	22,65	24,69	24,89	25,74	71,59	0,00	0,00	0,00	71,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Out	Layanan Perawatan									22,65	22,65	24,69	24,89	25,74	71,59	0,00	0,00	0,00	71,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

KD	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KEGIATAN	LOKASI	KATEGORI	SATUAN	TARGET					APBD 2020-2024										REALISASI APBD 2020-2023					PROG
					2020	2021	2022	2023	2024	SUMBER PENDANAAN						PERSEN (%)	DANA	PUSAT	TOTAL APBD	APBD	DESA	LAIN	SWASTA	MASYARAKAT	
										2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH										

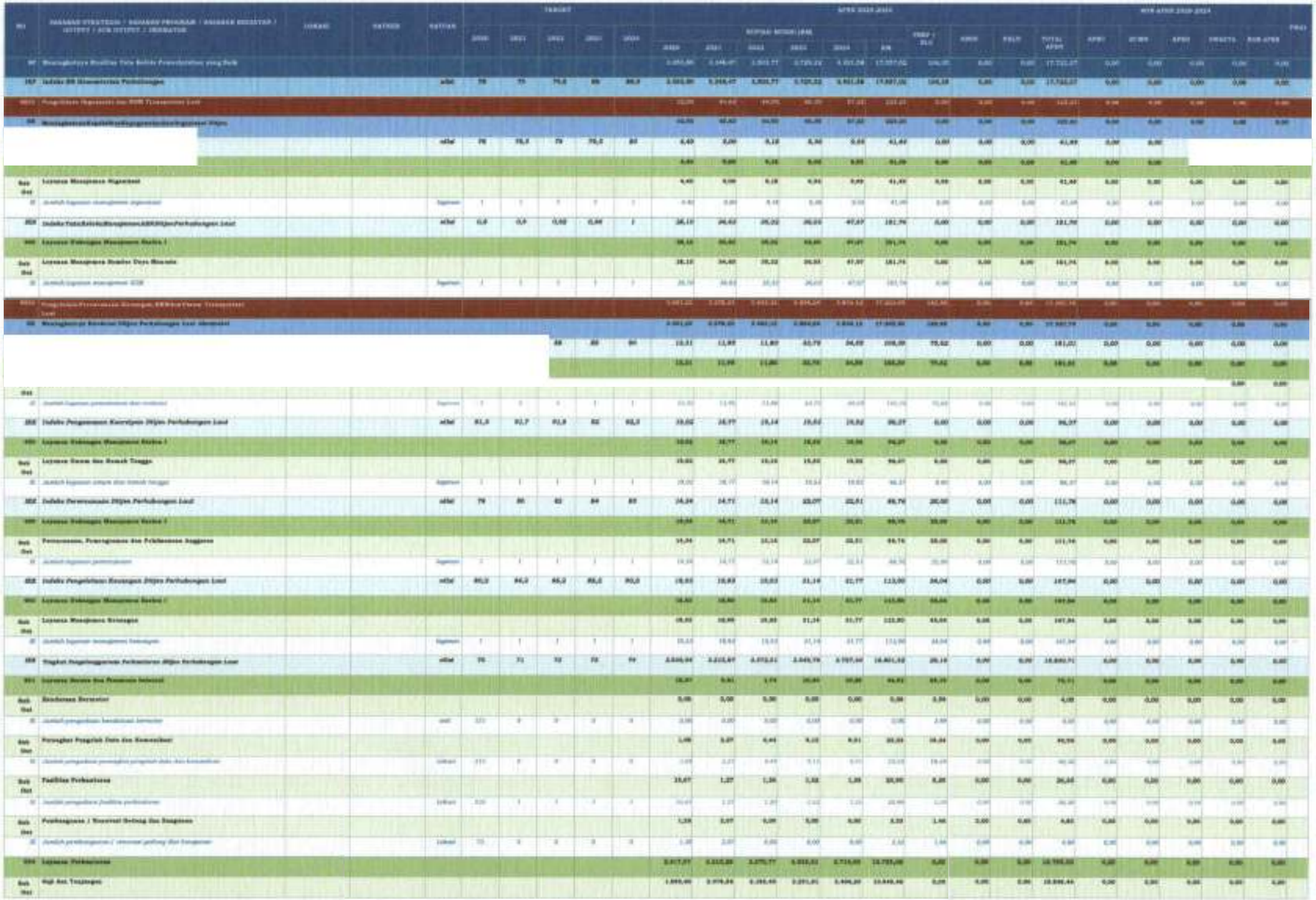

No	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / SUBSUB OUTPUT	LOKASI	SATUAN	SATUAN	TARGET					APBD TAHUN 2020-2024										RATA-RATA 2020-2024					
					2020	2021	2022	2023	2024	KEGIATAN BERSIH (NON)						PERS / BLJ	JASA	PAJAK	TOTAL APBD	TPYO					
										2020	2021	2022	2023	2024	JML					APBD	SUMBER	APBD	TARGETS	RATA-RATA
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

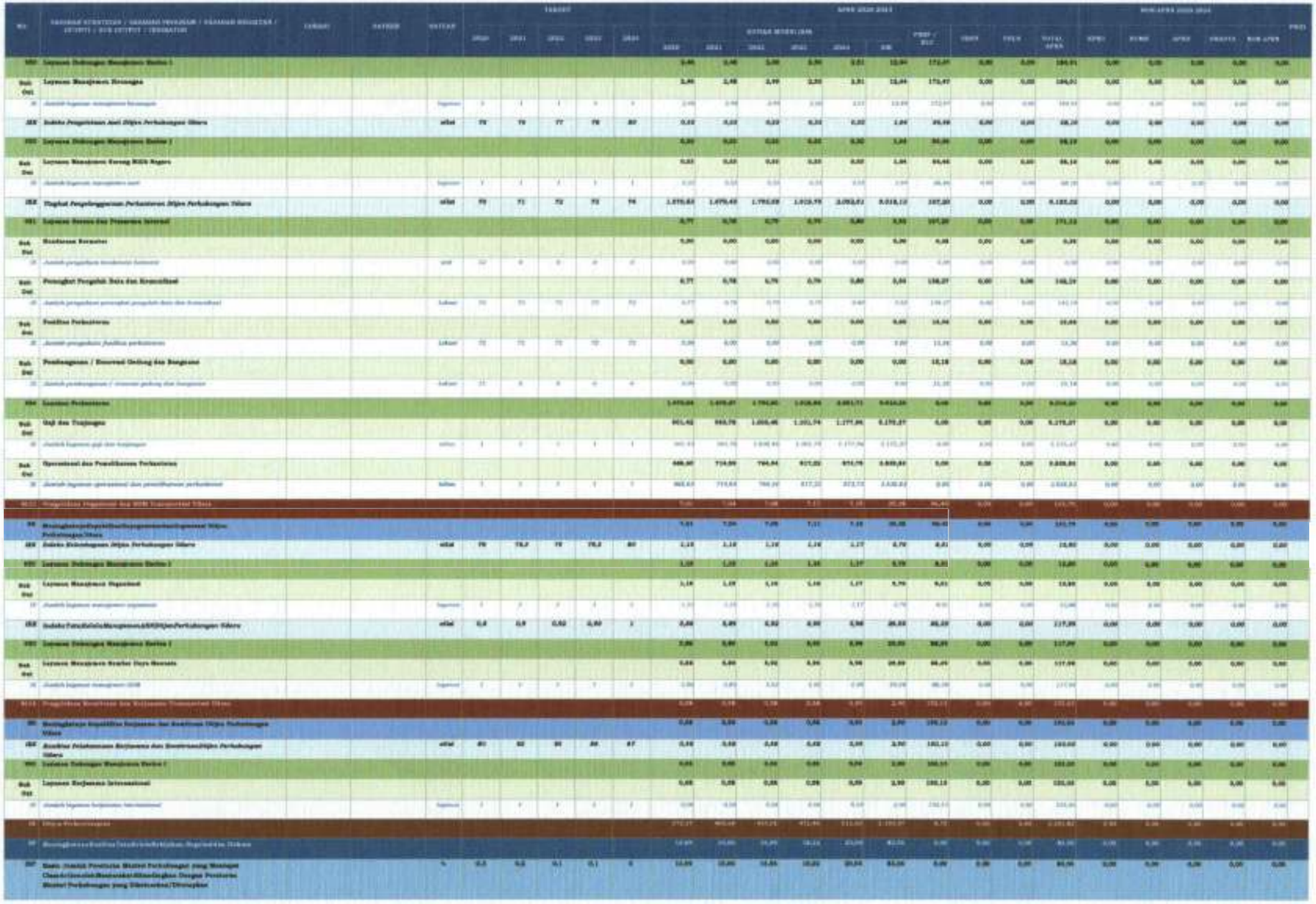

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET					APBD 2020-2024										NON APBD 2020-2024					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	SUMBER DANA (Rp)						PROT / KUI	KEMEN	PSDA	TOTAL APBD	APBD	DPMD	APBD	PROVINSI	KOTA APBD	
							2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH										
							13,09	13,09	14,50	18,62	20,00	81,50	0,00	0,00	0,00	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Bagi Aparatur Dalam Pelaksanaan Tugas						13,09	13,09	14,50	18,62	20,00	81,50	0,00	0,00	0,00	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	Indeks Kepuasan Aparatur Dalam Pelaksanaan Pelayanan	Nilai	72	73	74	75	76	4,50	5,13	4,83	5,49	5,93	28,48	0,00	0,00	0,00	28,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	Layanan Dukungan Manajemen Badan /						4,00	4,13	5,00	5,00	5,00	24,40	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Ord	Layanan Dukungan						4,00	4,13	5,00	5,00	5,00	24,41	0,00	0,00	0,00	24,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Jumlah Layanan Natural	Dokumen	2	2	2	2	2	4,00	4,13	5,00	5,00	5,00	24,41	0,00	0,00	0,00	24,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	Indeks Budaya Aktivitas Aparatur Pelayanan	Nilai	72	74	77	78	79	9,00	8,00	13,83	13,62	13,62	68,10	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	Layanan Perencanaan						9,09	8,00	13,83	13,62	13,62	68,10	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Ord	Perencanaan dan Aktivitas Teknis Pelayanan						9,00	8,00	13,83	13,62	13,62	68,10	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Jumlah Layanan Laporan Kegiatan/Laporan Perencanaan Kinerja Tahunan	Dokumen	11	11	11	11	11	9,00	8,00	13,83	13,62	13,62	68,10	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik						208,00	180,00	818,00	804,18	882,00	2.792,18	0,00	0,00	0,00	2.792,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
017	Indeks SS Kemantapan Pemerintah	Nilai	73	77	77,5	80	80,5	208,00	180,00	818,00	804,18	882,00	2.792,18	0,00	0,00	0,00	2.792,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000	Pengelolaan Pelayanan dan Administrasi Pemerintah						180,00	170,84	187,00	804,71	268,00	947,47	0,00	0,00	0,00	947,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00	Meningkatnya Kapabilitas Kelembagaan Organisasi Dalam Pelaksanaan						180,00	170,84	187,00	804,71	268,00	947,47	0,00	0,00	0,00	947,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
018	Indeks Kelembagaan Dalam Pelaksanaan Pemerintahan	Nilai	73	73,5	75	75,5	80	152,56	147,61	184,00	203,00	804,00	932,91	0,00	0,00	0,00	932,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	Layanan Dukungan Manajemen Badan /						152,56	147,61	184,00	203,00	222,00	940,91	0,00	0,00	0,00	940,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Ord	Layanan Manajemen Organisasi						152,56	147,61	184,00	203,00	222,00	940,91	0,00	0,00	0,00	940,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Jumlah Layanan manajemen organisasi	Dokumen	7	7	7	7	7	152,56	147,61	184,00	203,00	222,00	940,91	0,00	0,00	0,00	940,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Dalam Pelaksanaan Pemerintahan	Nilai	0,0	0,0	0,02	0,04	1	0,70	0,02	0,00	0,00	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	Layanan Dukungan Manajemen Badan /						0,70	0,02	0,00	0,00	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Ord	Layanan Manajemen Kinerja Dan Risiko						0,70	0,02	0,00	0,00	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Jumlah layanan manajemen SDM	Dokumen	1	1	1	1	1	0,70	0,02	0,00	0,00	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00	18,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000	Pengelolaan Pelayanan dan Administrasi Pemerintah						713,77	603,09	617,00	630,00	693,00	3.057,11	0,00	0,00	0,00	3.057,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Kecamatan						182,70	202,09	217,00	230,00	693,00	1.524,79	0,00	0,00	0,00	1.524,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	Nilai IKEPP Dalam Pelaksanaan Pemerintahan	Nilai	69	80	87	88	90	4,50	8,00	7,17	7,80	8,00	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	Layanan Dukungan Manajemen Badan /						4,50	8,00	7,17	7,80	8,00	35,19	0,00	0,00	0,00	35,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Ord	Layanan Monitoring dan Evaluasi						4,00	8,00	7,17	7,80	8,00	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Jumlah layanan pemantauan dan evaluasi	Dokumen	7	7	7	7	7	5,00	8,00	7,17	7,80	8,00	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	Indeks Pengawasan Kinerja dan Keuangan Dalam Pelaksanaan Pemerintahan	Nilai	81,3	81,7	81,9	82	82,3	2,02	2,78	2,96	2,96	2,70	13,42	0,00	0,00	0,00	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	Layanan Dukungan Manajemen Badan /						2,02	2,78	2,96	2,96	2,70	13,42	0,00	0,00	0,00	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Ord	Layanan Fasilitasi dan Bimbingan Teknis						2,02	2,78	2,96	2,96	2,70	13,42	0,00	0,00	0,00	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Jumlah layanan evaluasi dan monitoring	Dokumen	2	2	2	2	2	2,02	2,78	2,96	2,96	2,70	13,42	0,00	0,00	0,00	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	Indeks Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Pemerintahan	Nilai	79	80	82	84	88	2,00	2,00	2,42	2,57	2,57	12,57	0,00	0,00	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	Layanan Dukungan Manajemen Badan /						2,00	2,00	2,42	2,57	2,57	12,57	0,00	0,00	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Ord	Penyusunan, Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran						2,00	2,00	2,42	2,57	2,57	12,57	0,00	0,00	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Jumlah layanan pemerintahan	Dokumen	2	2	2	2	2	2,00	2,00	2,42	2,57	2,57	12,57	0,00	0,00	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	Indeks Pengelolaan Keuangan Dalam Pelaksanaan Pemerintahan	Nilai	82,3	84,2	86,2	88,2	90,3	2,57	2,83	3,11	3,42	3,77	15,71	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	Layanan Dukungan Manajemen Badan /						2,57	2,83	3,11	3,42	3,77	15,71	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub Ord	Layanan Manajemen Keuangan						2,57	2,83	3,11	3,42	3,77	15,71	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Jumlah layanan manajemen keuangan	Dokumen	2	2	2	2	2	2,57	2,83	3,11	3,42	3,77	15,71	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	Indeks Pengelolaan Aset Dalam Pelaksanaan Pemerintahan	Nilai	72	74	77	78	80	2,13	2,39	2,77	2,83	3,11	13,37	0,00	0,00	0,00	21,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000	Layanan Dukungan Manajemen Badan /						2,13	2,39	2,77	2,83	3,11	13,37	0,00	0,00	0,00	21,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

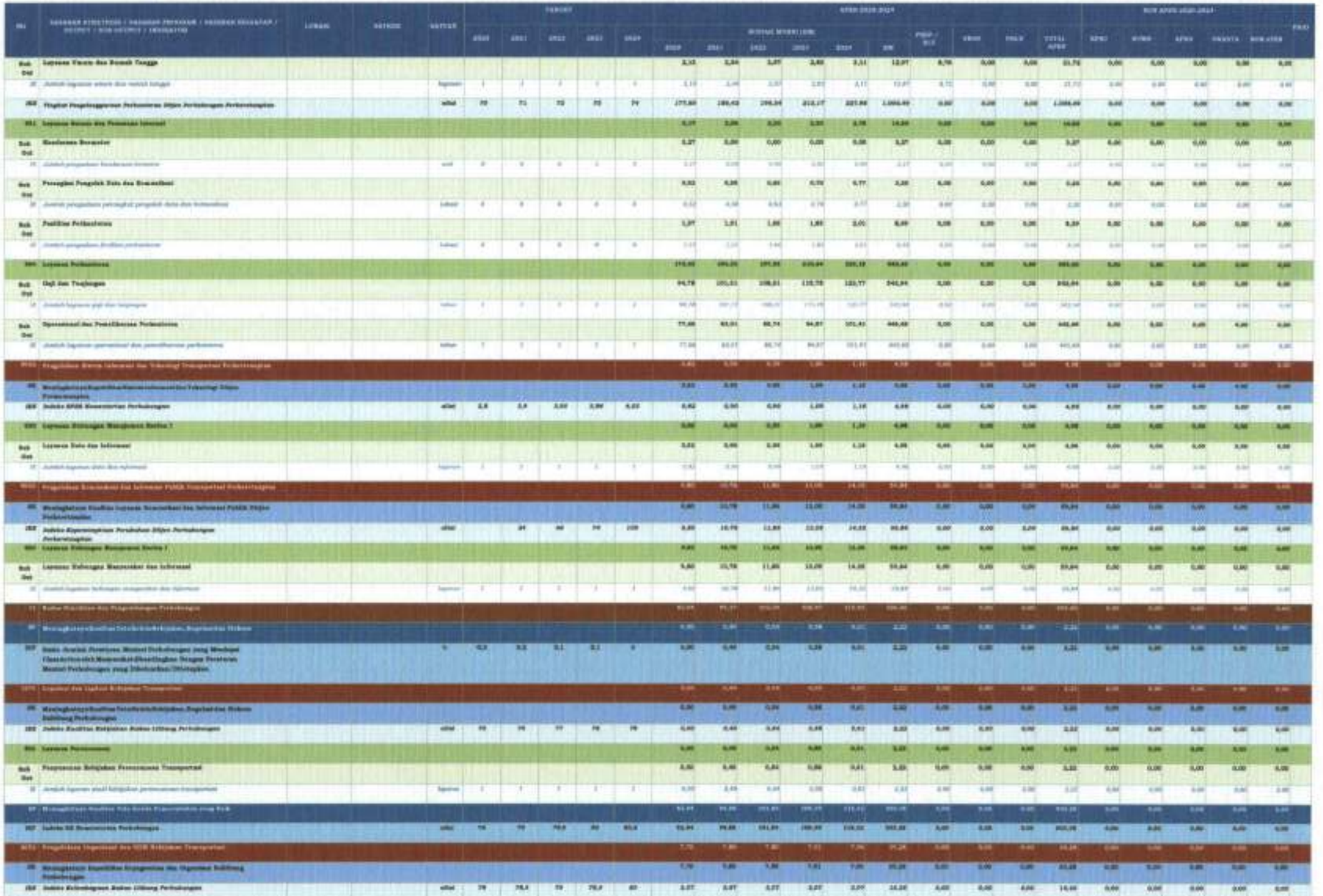

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	LOKASI	RATIO	SATUAN	TARGET					RPJMD 2020-2024										RKPD TAHUN 2020-2024					TAHUN
					2020	2021	2022	2023	2024	RPJMD															
										2020	2021	2022	2023	2024	RATA-RATA	PROP / KAB	KABUPATEN	PROVINSI	TOTAL RPJMD	2020	2021	2022	2023	2024	
1111	Layanan Perencanaan									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rab Dec	Perencanaan Penyelenggaraan Evaluasi Transportasi									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4)	Jumlah Layanan Perencanaan Kajian Lalang				0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	Indeks Profesionalisme ASN Badan Lalang Perhubungan			nilai	71	72	73	74	75	0,67	0,61	0,65	0,61	0,63	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	Layanan Dukungan Manajemen Badan I									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rab Dec	Pelaksanaan Administrasi dan Pengelolaan BMN (Barang Milik Negara)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4)	Jumlah Layanan administrasi dan pengelolaan BMN				0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Badan Lalang Perhubungan			nilai	0,8	0,9	0,92	0,96	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	Layanan Dukungan Manajemen Badan I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rab Dec	Layanan Manajemen Badan Dan Rumah Tangga				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4)	Jumlah layanan manajemen ASN	Kegiatan			1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	Program Pelayanan Penunjang Pemerintah Kabupaten Tanggamus				84,71	86,32	87,91	89,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Meningkatnya Standar Sarana Perkantoran Aparatur				86,77	88,01	91,01	93,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	Indeks Pemenuhan Sarana Lalang Perhubungan			nilai	78	80	82	84	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	Layanan Dukungan Manajemen Badan I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rab Dec	Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Anggaran				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4)	Jumlah layanan perencanaan	Kegiatan			1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Badan Lalang Perhubungan			nilai	84	85	90	95	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	Layanan Dukungan Manajemen Badan I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rab Dec	Layanan Tamu dan Rumah Tangga				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4)	Jumlah layanan tamu dan rumah tangga	Kegiatan			1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Lalang Perhubungan			nilai	80,3	84,3	86,3	88,3	90,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	Layanan Dukungan Manajemen Badan I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rab Dec	Layanan Mesaperan Keuangan				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4)	Jumlah layanan mesaperan keuangan	Kegiatan			1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Badan Lalang Perhubungan			nilai	70	71	72	73	74	68,61	68,61	62,11	68,00	70,97	335,70	0,00	0,00	0,00	0,00	335,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	Layanan Perkantoran				68,61	68,61	62,11	68,00	70,97	335,70	0,00	0,00	0,00	0,00	335,70	0,00	0,00	0,00	0,00	335,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rab Dec	Gaji dan Tunjangan				66,79	66,66	66,66	66,66	66,14	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4)	Jumlah layanan gaji dan tunjangan	Kegiatan			1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rab Dec	Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran				13,14	13,88	17,13	19,88	20,73	84,48	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4)	Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran	Kegiatan			1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	Program Pembinaan dan Pengawasan Angkutan Transportasi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Meningkatnya Kualitas Kajian dan Evaluasi Lalang Perhubungan				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	Kualitas Pelaksanaan Kajiana dan Evaluasi Lalang Perhubungan			nilai	80	82	85	86	87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	Layanan Dukungan Manajemen Badan I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rab Dec	Kerjasama dan Evaluasi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4)	Jumlah Kerjasama dan Evaluasi				0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	Program Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Transportasi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Keselamatan Lalang Perhubungan				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	Tingkat Pengelolaan Aplikasi dan Data	%			80	80	82	82	83	1,14	1,20	1,20	1,23	1,29	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	Layanan Dukungan Manajemen Badan I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rab Dec	Layanan Dukungan Manajemen dan Informasi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / KEGIATAN / INDIKATOR	SUMBER	SATUAN	KETERANGAN	TARGET					APBN 2020-2024										RENCANA APBN 2020-2024					
					2020	2021	2022	2023	2024	KEBUTUHAN BIAYA (RM)						PROP / RUU	KEMEN	POLRI	TOTAL APBN	PERSEN	RUPIAH	APBN	PINJAMAN	RAN APBN	PERSEN
										2020	2021	2022	2023	2024	JML										

No	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Output / Aktivitas / Indikator	Satuan	Kategori	Kategori	Target					Apbn 2020-2024										Nilai Apbn 2020-2024						Pagu
										Rincian Alokasi (RM)																
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Jml	Prog / Kgt	Output	Fisik	Total Apbn	Rpmu	Dekon	Apbn	Private	Non Apbn	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Agregasi	0	0	0	0	0	2,83	3,44	3,42	3,48	3,18	1,66	0,78	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	Pengelolaan Sistem Informasi Penanjung Jawab									1,79	1,98	2,13	2,40	2,82	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Out	Pengelolaan Sistem Informasi Penanjung Jawab									1,79	1,98	2,13	2,40	2,82	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Agregasi	0	0	0	0	0	1,79	1,98	2,13	2,40	2,82	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5545	Pengelolaan Organisasi dan SDM ESDM Transportasi									28,82	32,63	37,01	38,79	44,27	178,24	1,00	0,00	0,00	0,00	179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Meningkatnya Kapabilitas Kompetensi dan Organisasi Kementerian Perhubungan				28,82	32,63	37,01	38,79	44,27	178,24	1,00	0,00	0,00	179,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
503	Indeks Kelembagaan BPSDM Perhubungan	nilai	78	78,5	79	79,5	80	1,20	1,29	1,38	1,47	1,58	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5503	Layanan Sekretariat Manajemen Kantor I									1,20	1,29	1,38	1,47	1,58	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Out	Layanan Manajemen Organisasi				1,20	1,29	1,38	1,47	1,58	6,91	0,00	0,00	0,00	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Agregasi	1	1	1	1	1	1,20	1,29	1,38	1,47	1,58	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Indeks Profesionalisme ASN BPSDM Perhubungan	nilai	72	73	74	75	77	4,60	4,94	5,31	5,72	6,20	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5703	Layanan Sekretariat Manajemen Kantor				4,60	4,94	5,31	5,72	6,20	26,80	0,00	0,00	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Sub Out	Pengelolaan Kepegawaian Kantor				4,60	4,94	5,31	5,72	6,20	26,80	0,00	0,00	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Agregasi	1	1	1	1	1	4,60	4,94	5,31	5,72	6,20	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BPSDM Perhubungan	nilai	0,8	0,9	0,92	0,94	1	22,02	26,43	28,69	31,00	34,84	143,97	1,00	0,00	0,00	144,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5501	Layanan Sekretariat Manajemen Kantor I				14,02	16,42	17,71	21,00	22,03	97,19	1,00	0,00	0,00	98,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Sub Out	Layanan Manajemen Kantor Dan Umum				14,02	16,42	17,71	21,00	22,03	97,19	1,00	0,00	0,00	98,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Agregasi	1	1	1	1	1	14,02	16,42	17,71	21,00	22,03	97,19	1,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5701	Layanan Sekretariat Manajemen Kantor				8,00	7,01	9,14	10,01	10,14	44,19	0,00	0,00	0,00	44,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Sub Out	Pengelolaan Kepegawaian Kantor				8,00	7,01	9,14	10,01	10,14	44,19	0,00	0,00	0,00	44,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Agregasi	1	1	1	1	1	8,00	7,01	9,14	10,01	10,14	44,19	0,00	0,00	0,00	0,00	44,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5547	Pengelolaan Pendidikan, Kerjasama, BMKG dan Pusat SDM Transportasi				891,20	892,99	930,32	943,20	1.011,31	4.669,02	1.329,49	0,00	0,00	4.964,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
50	Meningkatnya Kualitas SDMTK Perhubungan Akuntabel				891,20	892,99	930,32	943,20	1.011,31	4.669,02	1.329,49	0,00	0,00	4.964,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
203	Nilai SAKIP BPSDM Perhubungan	nilai	80	80	84	90	90	2,42	2,55	2,82	2,72	2,82	13,07	0,00	0,00	0,00	13,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja				2,42	2,55	2,82	2,72	2,82	13,07	0,00	0,00	0,00	13,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Sub Out	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja				2,42	2,55	2,82	2,72	2,82	13,07	0,00	0,00	0,00	13,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Agregasi	0	0	0	0	0	2,42	2,55	2,82	2,72	2,82	13,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Indeks Pengawasan Akuntansi BPSDM Perhubungan	nilai	81,3	81,7	81,9	82	82,3	14,17	14,77	15,41	15,66	15,78	77,11	0,00	0,00	0,00	77,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Layanan Sekretariat Manajemen Kantor I				4,66	4,82	5,18	5,51	5,84	26,04	0,00	0,00	0,00	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Sub Out	Layanan Umum dan Rumah Tangga				4,66	4,82	5,18	5,51	5,84	26,04	0,00	0,00	0,00	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Agregasi	1	1	1	1	1	4,66	4,82	5,18	5,51	5,84	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5502	Layanan Sekretariat Manajemen Kantor				6,47	6,66	10,28	12,47	13,80	51,28	0,00	0,00	0,00	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Sub Out	Layanan Umum dan Rumah Tangga Kantor				6,47	6,66	10,28	12,47	13,80	51,28	0,00	0,00	0,00	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Agregasi	1	1	1	1	1	6,47	6,66	10,28	12,47	13,80	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Indeks Materiil SPIP BPSDM Perhubungan	nilai	2,2	2,3	2,4	2,5	2,5	3,08	3,29	3,51	3,77	4,20	17,87	0,00	0,00	0,00	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5504	Layanan Sekretariat Manajemen Kantor I				3,08	3,29	3,51	3,77	4,20	17,87	0,00	0,00	0,00	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Sub Out	Layanan Monitoring dan Evaluasi				3,08	3,29	3,51	3,77	4,20	17,87	0,00	0,00	0,00	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Agregasi	1	1	1	1	1	3,08	3,29	3,51	3,77	4,20	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Indeks Perencanaan BPSDM Perhubungan	nilai	78	80	82	84	85	23,01	24,64	26,64	27,84	28,78	130,92	0,00	0,00	0,00	130,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5501	Layanan Sekretariat Manajemen Kantor I				17,01	18,22	19,81	20,87	22,14	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Sub Out	Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Anggaran				17,01	18,22	19,81	20,87	22,14	97,04	0,00	0,00	0,00	97,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Agregasi	1	1	1	1	1	17,01	18,22	19,81	20,87	22,14	97,04	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / KEGIATAN / PROGRAM	LOKASI	SATKER	SATUAN	TARGET					APBK 2020-2024										REALISASI APBK 2020-2024					
					2020	2021	2022	2023	2024	HYPOTHETICAL BUDGET (RM)						PROP / BLN	ADMIN	FIELD	TOTAL APBK	APBD	BUMD	APBN	PRIVATE	SUM OTHER
										2020	2021	2022	2023	2024	SUM										
111	**Layanan Unbrugas Manajemen Kelas**									5,77	6,14	6,54	6,97	7,43	33,87	0,00	0,00	0,00	33,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Out	**Pemasaran, Pengrapan dan Pelaksanaan Anggaran Kelas**				5,77	6,14	6,54	6,97	7,43	33,87	0,00	0,00	0,00	33,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	Jumlah layanan pemasaran, pengrapan dan pelaksanaan anggaran kelas			layanan	1	1	1	1	1	5,77	6,14	6,54	6,97	7,43	33,87	0,00	0,00	0,00	33,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	**Indeks Pengelolaan Anggaran APBDM Perhubungan**			nilai	85,2	84,2	85,2	86,2	85,2	10,94	11,59	12,14	12,77	13,60	61,14	0,00	0,00	0,00	61,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**Layanan Unbrugas Manajemen Kelas I**									9,98	10,58	10,85	11,04	12,50	55,03	0,00	0,00	0,00	55,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Out	**Layanan Manajemen Kinerjan**				9,98	10,58	10,85	11,04	12,50	55,03	0,00	0,00	0,00	55,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	Jumlah layanan manajemen kinerjan			layanan	1	1	1	1	1	9,98	10,58	10,85	11,04	12,50	55,03	0,00	0,00	0,00	55,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	**Layanan Unbrugas Manajemen Kelas**				1,00	1,17	1,20	1,24	1,32	6,01	0,00	0,00	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Sub Out	**Pengelolaan Kinerjan dan Perkembahanan Kelas**				1,00	1,17	1,20	1,24	1,32	6,01	0,00	0,00	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	Jumlah layanan kinerjan dan perkembahanan kelas			layanan	1	1	1	1	1	1,00	1,17	1,20	1,24	1,32	6,01	0,00	0,00	0,00	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	**Indeks Pengelolaan Aset APBDM Perhubungan**			nilai	72	73	77	78	83	8,53	9,42	10,07	10,79	11,88	50,70	0,00	0,00	0,00	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	**Layanan Unbrugas Manajemen Kelas**				8,53	9,42	10,07	10,79	11,88	50,70	0,00	0,00	0,00	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Sub Out	**Layanan Kinrun dan Rawat Tunggu Kelas**				8,53	9,42	10,07	10,79	11,88	50,70	0,00	0,00	0,00	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	Jumlah layanan pengelolaan fasilitas aset kelas dan rawat tunggu kelas			layanan	1	1	1	1	1	8,53	9,42	10,07	10,79	11,88	50,70	0,00	0,00	0,00	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	**Tingkat Pengelenggaraan/Perkonservasi APBDM Perhubungan**			nilai	70	71	72	73	74	615,16	616,77	650,82	680,94	852,31	4.272,02	2.435,49	0,00	0,00	6.711,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	**Layanan Kanan dan Prasarana Umumnya**				90,69	47,77	91,20	69,80	113,21	835,73	0,17	0,00	0,00	835,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Sub Out	**Kinrunan Rutinitas**				3,96	4,00	5,01	4,01	4,01	21,79	0,00	0,00	0,00	21,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	Jumlah pengadaan kinrunan kantor			unit	4	4	4	4	4	3,96	4,00	5,01	4,01	4,01	21,79	0,00	0,00	0,00	21,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Out	**Perangkat Pengelah Data dan Komunikasi**				5,78	7,40	5,27	5,77	5,11	28,84	0,00	0,00	0,00	28,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	Jumlah pengadaan perangkat pengelah data dan komunikasi			Lokasi	1	1	1	1	1	5,78	7,40	5,27	5,77	5,11	28,84	0,00	0,00	0,00	28,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Out	**Fasilitas Perkantoran**				25,44	26,92	33,20	30,94	36,01	152,19	0,17	0,00	0,00	152,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	Jumlah pengadaan fasilitas perkantoran			Lokasi	4	5	5	5	6	25,44	26,92	33,20	30,94	36,01	152,19	0,17	0,00	0,00	152,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Out	**Pembangunan / Rawatan Gedung dan Bangunan**				15,00	5,00	15,00	10,00	71,00	151,01	0,00	0,00	0,00	151,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	Jumlah pembangunan / rawatan gedung dan bangunan			Lokasi	1	1	1	1	1	15,00	5,00	15,00	10,00	71,00	151,01	0,00	0,00	0,00	151,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	**Layanan Perkantoran**				706,51	705,01	705,29	800,00	914,11	3.930,91	1.435,32	0,00	0,00	5.377,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Sub Out	**Gaji dan Tunjangan**				346,44	341,85	351,02	350,59	368,12	1.776,22	0,00	0,00	0,00	1.776,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	Jumlah layanan gaji dan tunjangan			bulan	12	12	12	12	12	346,44	341,85	351,02	350,59	368,12	1.776,22	0,00	0,00	0,00	1.776,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Out	**Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran**				422,02	422,13	444,07	419,16	447,98	2.162,47	1.435,32	0,00	0,00	3.601,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran			bulan	12	12	12	12	12	422,02	422,13	444,07	444,16	447,98	2.162,47	1.435,32	0,00	0,00	3.601,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119	Pengelolaan Kinerjan dan Kinerjan Pelaksanaan Transportasi				3,41	4,18	4,97	4,79	5,11	22,47	0,00	0,00	0,00	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	**Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Pelaksanaan Pelaksanaan APBDM Perhubungan**				2,01	2,01	2,11	2,19	2,31	10,63	0,00	0,00	0,00	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
121	**Indeks Kepuasan Pelaksanaan APBDM Perhubungan**			nilai		69	69	74	199	2,01	2,01	2,11	2,19	2,31	10,19	0,00	0,00	0,00	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	**Layanan Unbrugas Manajemen Kantor I**				2,01	2,01	2,11	2,19	2,31	10,19	0,00	0,00	0,00	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Sub Out	**Layanan Kinrugas Manajemen dan Informasi**				2,01	2,01	2,11	2,19	2,31	10,19	0,00	0,00	0,00	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	Jumlah layanan kinrugas manajemen dan informasi			layanan	1	1	1	1	1	2,01	2,01	2,11	2,19	2,31	10,19	0,00	0,00	0,00	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	**Indeks SPBE Kementerian Perhubungan**			nilai	2,8	2,9	2,92	2,94	4,03	1,09	1,17	1,20	1,23	1,42	6,20	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	**Pengelolaan Kinrun Informasi Pemerintah Digital**				1,09	1,17	1,20	1,23	1,42	6,20	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Sub Out	**Pengelolaan Kinrun Informasi Pemerintah Digital**				1,09	1,17	1,20	1,23	1,42	6,20	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	Jumlah layanan pengelolaan kinrun informasi pemerintah digital			layanan	1	1	1	1	1	1,09	1,17	1,20	1,23	1,42	6,20	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	Pengelolaan Kinrunan dan Kinrunan Pelaksanaan Transportasi				3,41	4,18	4,97	4,79	5,11	22,47	0,00	0,00	0,00	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13	**Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Pelaksanaan Pelaksanaan APBDM Perhubungan**				2,01	2,01	2,11	2,19	2,31	10,63	0,00	0,00	0,00	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
131	**Indeks APBDM Perhubungan**			nilai	85	88	89	90	97	2,11	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

No	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR / KEGIATAN / INDIKATOR	SATUAN	TARGET					KINERJA 2020-2024															
			2020	2021	2022	2023	2024	KINERJA KEUANGAN (RP)					PAGU / REA	REALISASI	SISA	TOTAL REALISASI	KINERJA					
								2020	2021	2022	2023	2024											
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik							88,90	94,80	98,60	102,50	106,60	491,40	0,00	0,00	0,00	491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Indeks RB Kementerian Perhubungan	nilai	73	74	74,5	80	82,5	88,90	94,80	98,60	102,50	106,60	491,40	0,00	0,00	0,00	491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Meningkatnya Kapabilitas Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek							2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Indeks Pengawasan Internal Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	nilai	69	68	70	73	75	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Layanan Sekretaris Manajemen Kantor I							2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01	Layanan Tertib dan Rumah Tangga		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Layanan Umum dan Rumah Tangga	Kegiatan	1	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN DTC	nilai	0,9	0,9	0,92	0,96	1	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Layanan Sekretaris Manajemen Kantor I							1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.01	Layanan Manajemen Kantor Dalam Manusia		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Layanan Manajemen Kantor Dalam Manusia	Kegiatan	1	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Pengelolaan Pengawasan Keuangan BMN dan Barang Transportasi Jabodetabek							19,11	21,00	21,00	21,00	21,00	103,11	0,00	0,00	0,00	103,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Meningkatnya Pembangunan Budaya Kerja Transportasi Jabodetabek							4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Nilai SAKIP Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Nilai	80	81	82	84	85	3,10	3,80	3,80	3,80	3,80	18,30	0,00	0,00	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Layanan Sekretaris Manajemen Kantor I							3,10	3,80	3,80	3,80	3,80	18,30	0,00	0,00	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01	Rencana Strategis dan Program Anggaran		3,10	3,80	3,80	3,80	3,80	3,10	3,80	3,80	3,80	3,80	18,30	0,00	0,00	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Layanan Perencanaan		3	3	3	3	3	3,10	3,80	3,80	3,80	3,80	18,30	0,00	0,00	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Indeks Kinerja UPTP Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Nilai	0,7	0,75	0,8	0,85	0,9	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Layanan Sekretaris Manajemen Kantor I							2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10.01	Layanan Data Pimpinan, Monitoring, dan Evaluasi serta SPIP		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Informasi Terdistri	Kegiatan	1	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Meningkatnya Kapabilitas Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek							2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Indeks Pengelolaan Anggaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	nilai	80	87	89	91	92	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Layanan Sekretaris Manajemen Kantor I							2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13.01	Layanan SDM		0,80	0,84	0,84	0,84	0,84	0,80	0,84	0,84	0,84	0,84	3,76	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Layanan SDM	Kegiatan	1	1	1	1	1	0,80	0,84	0,84	0,84	0,84	3,76	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13.02	Layanan PKBP		0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	3,80	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Layanan PKBP	Kegiatan	1	1	1	1	1	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	3,80	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13.03	Layanan Manajemen Keuangan		1,00	1,70	1,70	1,70	1,70	1,00	1,70	1,70	1,70	1,70	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1,00	1,70	1,70	1,70	1,70	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek							71,77	74,11	80,10	84,82	89,20	401,01	0,00	0,00	0,00	401,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Tingkat Pelaporanan Keuangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	nilai	70	71	72	73	74	71,77	74,11	80,10	84,82	89,20	401,01	0,00	0,00	0,00	401,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Sekretaris Manajemen Kantor I							8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	40,50	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16.01	Layanan Umum dan Rumah Tangga		8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	40,50	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Layanan Umum dan Rumah Tangga	Kegiatan	1	1	1	1	1	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	40,50	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Layanan Humas dan Protokoler Internal		9,00	13,07	13,07	13,19	13,19	9,00	13,07	13,07	13,19	13,19	66,77	0,00	0,00	0,00	66,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17.01	Fasilitas Perkantoran		9,00	13,07	13,07	13,19	13,19	9,00	13,07	13,07	13,19	13,19	66,77	0,00	0,00	0,00	66,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET					KINERJA 2020-2024										REALISASI 2020-2021					
									TARGET					REALISASI										
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	RATA - RATA	KINERJA	PERSEN	TOTAL KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PERSEN
[illegible]	Jumlah Pengadaan Fasilitas Perkeretaapian			Organisasi	1	1	1	1	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	**Layanan Perkeretaapian**								**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**							
Sub Out	**Layanan Uji dan Tarjanagn**								**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**							
[illegible]	Jumlah Layanan Uji dan Tarjanagn			Organisasi	1	1	1	1	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Sub Out	**Layanan Operasional dan Pemeliharaan Perkeretaa**								**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**							
[illegible]	Jumlah Layanan Operasional dan Pemeliharaan Perkeretaa			Organisasi	1	1	1	1	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]								[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
[illegible]	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pengelola Transportasi Jalan/Jalur**								**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**							
[illegible]	**Indeks/PelayananPublikBidangPengelolaTransportasi /Jalan/Jalur**		**nilai**	**3,5**	**3,7**	**4**	**4,3**	**4,5**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**							
[illegible]	**Layanan Dukungan Manajemen Kerja I**								**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**							
Sub Out	**Layanan Rutinpapa Manyarakat**								**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**							
[illegible]	Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat			Organisasi	1	1	1	1	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Sub Out	**Layanan Informasi Media**								**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**							
[illegible]	Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat			Organisasi	1	1	1	1	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Layanan Uji Laik/Jalur Transportasi Jalan/Jalur								[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]							
[illegible]	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pengelola Transportasi Jalan/Jalur**								**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**							
[illegible]	**Indeks/Informasi Publik Bidang Pengelola Transportasi Jalan/Jalur**		**nilai**	**72**	**72**	**74**	**75**	**76**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**							
[illegible]	**Layanan Dukungan Manajemen Kerja I**								**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**							
Sub Out	**Layanan Rutinan**								**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**							
[illegible]	Jumlah Layanan Rutinan			Organisasi	1	1	1	1	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Sub Out	**Layanan Rutinan Rutinan**								**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**							
[illegible]	Jumlah Layanan Rutinan			Organisasi	1	1	1	1	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2020-2024

INDIKASI TARGET DAN PENDANAAN KEGIATAN STRATEGIS

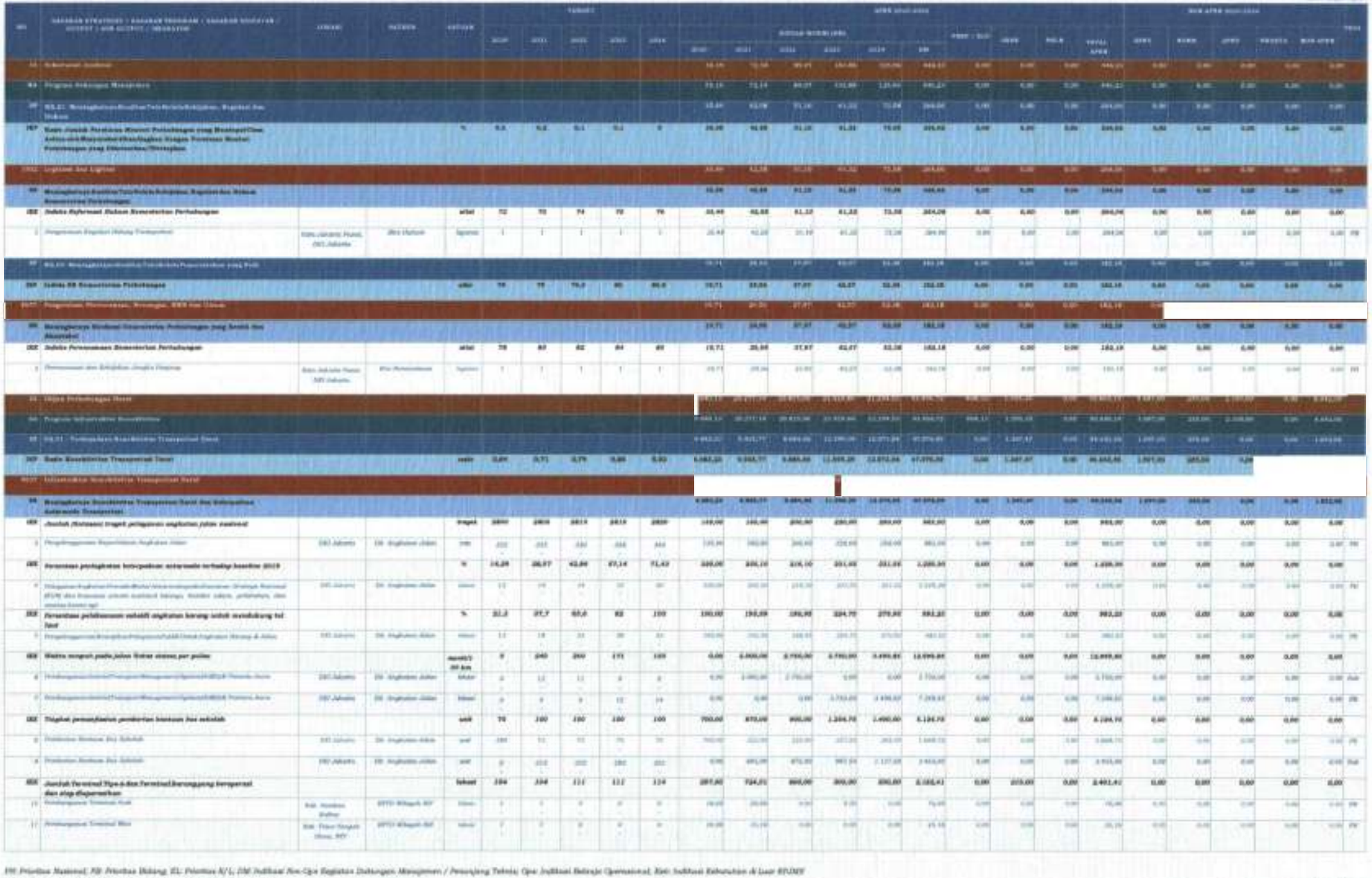

PN: Prioritas Nasional; PB: Prioritas Bidang; KL: Prioritas K/L; INI: Indikasi Non-Opa Kegiatan Dukungan Manajemen / Penunjang Teknis; Opa: Indikasi Belanja Operasional; Ket: Indikasi Kebutuhan di Luar RPJMN

No	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Aktivitas / Sub Aktivitas / Indikator	Lokasi	Satuan	Kondisi Awal					Kondisi Akhir 2020-2024										Alokasi Akhir 2020-2024						
				2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir (KA)						Target / Nilai	Indeks	Fokus	Total Kondisi	Alokasi						Fokus
									2020	2021	2022	2023	2024	KA											
12	Pembangunan Terminal Jagabaking	Kab. Pangkajene, Kalbar	UPTD Wilayah VII	Nihil	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Pembangunan Terminal Tipe A Kode 30	Gantino	UPTD Wilayah III		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Pembangunan Terminal Tipe A Tanjung Mas	Kalbara	UPTD Wilayah XVII		0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Pembangunan Terminal Tanjung Duriat	Kec. Engrem Hulu, Kalbar	UPTD Wilayah VII		0	0	0	0	0	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	13,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Pembangunan Terminal Mahuan	Kab. Bela, NTT	UPTD Wilayah IX		0	0	0	0	0	10,00	7,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Pembangunan Terminal Tipe A Aimasing Mimpidatar	Jatim	UPTD Wilayah XXII		0	0	0	0	0	27,00	100,00	0,00	0,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Pembangunan Terminal Tanjung Utara	Sultra	UPTD Wilayah XII		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Pembangunan Terminal Tipe A Tahuna	Sulsel	UPTD Wilayah XIII		0	0	0	0	0	30,00	168,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Pembangunan Terminal Tipe A Serui	Jateng	UPTD Wilayah X		0	0	0	0	0	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Pembangunan Terminal Merauke	Kab. Jayapura, Papua	UPTD Wilayah XXV		0	0	0	0	0	22,00	22,72	0,00	0,00	0,00	22,72	0,00	0,00	0,00	22,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Pembangunan Terminal Tipe A Lamomoko	Sulteng	UPTD Wilayah XVI		0	0	0	0	0	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Pembangunan Terminal Mokokomo	Kab. Mimika, Papua	UPTD Wilayah XIII		0	0	0	0	0	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Pembangunan Terminal Tanggul	Kab. Jember, Kalbar	UPTD Wilayah XIV		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Pembangunan Terminal Tipe A Bajawa	NTT	UPTD Wilayah XIII		0	0	0	0	0	10,00	132,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Pembangunan Terminal Tipe A Ile Ape	Kalbar	UPTD Wilayah XIV		0	0	0	0	0	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III	**Jumlah pengadaan/pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengembangan sarana**			**Nihil**	**0**	**11**	**10**	**20**	**20**	**230,31**	**680,00**	**240,00**	**400,00**	**400,00**	**1.440,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.440,31**	**1.097,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.097,00**	
27	Pembangunan Fasilitas Pendaratan/pelabuhan/integrasi Moda/UKOP Alimuna	Melolo, Flores	UPTD Wilayah XXIV		0	1	1	0	0	0,00	22,00	99,00	0,00	0,00	80,72	0,00	0,00	0,00	80,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Pembangunan Fasilitas Pendaratan/pelabuhan/integrasi Moda/UKOP Tanjungbalomo	Jabar	UPTD Wilayah IX	Nihil	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Pembangunan Fasilitas Pendaratan/pelabuhan/integrasi Moda/UKOP Lapo Asmat	Papua	UPTD Wilayah X	Nihil	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Pembangunan Fasilitas Pendaratan/pelabuhan/integrasi Moda/UKOP Lakuang (kondisi eksisting rusak berat)	Sulut	UPTD Wilayah XVII		0	1	1	0	0	0,00	22,00	99,00	99,00	99,00	319,72	0,00	0,00	0,00	319,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Pembangunan Fasilitas Pendaratan/pelabuhan/integrasi Moda/Pembangunan Dermaga Mimpi	Kalbara	UPTD Wilayah VII		0	0	1	0	0	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Pembangunan Fasilitas Pendaratan/pelabuhan/integrasi Moda/UKOP Lakuan Dapi	NTT	UPTD Wilayah VII	Nihil	0	1	0	0	0	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Pembangunan Fasilitas Pendaratan/pelabuhan/integrasi Moda/UKOP Kalimanga (Angkutan)	Kalbara	UPTD Wilayah XII		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Pembangunan Fasilitas Pendaratan/pelabuhan/integrasi Moda/UKOP Wakatobi	Sultra	UPTD Wilayah XVII		0	1	1	0	0	0,00	22,00	99,00	0,00	0,00	99,72	0,00	0,00	0,00	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Pelabuhan Laut di KSN Labuan Bajo - BPTD	Kab. Manggarai Barat, Flores	PP - Angkutan Laut	Nihil	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	
36	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pendaratan/pelabuhan/integrasi Moda/UKOP Pelabuhan Bongkang (SLC Bongkangsingi)	Lantai	UPTD Wilayah XI		0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pendaratan/pelabuhan/integrasi Moda/UKOP Tanjung	Sulsel	UPTD Wilayah XIII		0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pendaratan/pelabuhan/integrasi Moda/UKOP Pelabuhan Ahe (Kabupaten Kepulauan Tanimbar)	Jateng	UPTD Wilayah X		0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pendaratan/pelabuhan/integrasi Moda/UKOP Pelabuhan Ahe (Kabupaten Kepulauan Tanimbar)	Jateng	UPTD Wilayah X		0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pendaratan/pelabuhan/integrasi Moda/UKOP Tanjung Lesung	Banten	UPTD Wilayah X		0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pendaratan/pelabuhan/integrasi Moda/UKOP Pelabuhan Penyeberangan Pantai Timur Sibolga	Jateng	UPTD Wilayah X		0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pendaratan/pelabuhan/integrasi Moda/UKOP Pelabuhan Penyeberangan Pantai Timur Sibolga	Sulsel	UPTD Wilayah X		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pendaratan/pelabuhan/integrasi Moda/UKOP Pelabuhan Penyeberangan Pantai Timur Sibolga	Jateng	UPTD Wilayah X		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV	**Jumlah fasilitas pelayanan angkutan penyeberangan**			**Nihil**	**0**	**1**	**1**	**3**	**3**	**0,00**	**22,00**	**99,00**	**240,00**	**240,00**	**601,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**601,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
44	Pembangunan Fasilitas Pendaratan/pelabuhan/integrasi Moda/UKOP Pelabuhan Penyeberangan Pantai Timur Sibolga	Kab. Sumatera Utara, Sumut	UPTD Wilayah X		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pendaratan/pelabuhan/integrasi Moda/UKOP Pelabuhan Penyeberangan Pantai Timur Sibolga	Kab. Sumatera Utara, Sumut	UPTD Wilayah X		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V	**Jumlah lokasi pengadaan/pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengembangan sarana penyeberangan yang terdapat dan siap dioperasionalkan**			**Nihil**	**0**	**12**	**11**	**23**	**23**	**230,31**	**702,00**	**339,00**	**640,00**	**640,00**	**2.041,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.041,31**	**1.097,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.097,00**	
46	Pembangunan Fasilitas Pendaratan/pelabuhan/integrasi Moda/UKOP Pelabuhan Penyeberangan Pantai Timur Sibolga	Kab. Sumatera Utara, Sumut	UPTD Wilayah X		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	Pembangunan Fasilitas Pendaratan/pelabuhan/integrasi Moda/UKOP Pelabuhan Penyeberangan Pantai Timur Sibolga	Kab. Sumatera Utara, Sumut	UPTD Wilayah X		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	Pembangunan Fasilitas Pendaratan/pelabuhan/integrasi Moda/UKOP Pelabuhan Penyeberangan Pantai Timur Sibolga	Kab. Sumatera Utara, Sumut	UPTD Wilayah X		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Pembangunan Fasilitas Pendaratan/pelabuhan/integrasi Moda/UKOP Pelabuhan Penyeberangan Pantai Timur Sibolga	Kab. Sumatera Utara, Sumut	UPTD Wilayah X		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	Pembangunan Fasilitas Pendaratan/pelabuhan/integrasi Moda/UKOP Pelabuhan Penyeberangan Pantai Timur Sibolga	Kab. Sumatera Utara, Sumut	UPTD Wilayah X		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	Pembangunan Fasilitas Pendaratan/pelabuhan/integrasi Moda/UKOP Pelabuhan Penyeberangan Pantai Timur Sibolga	Kab. Sumatera Utara, Sumut	UPTD Wilayah X		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	Pembangunan Fasilitas Pendaratan/pelabuhan/integrasi Moda/UKOP Pelabuhan Penyeberangan Pantai Timur Sibolga	Kab. Sumatera Utara, Sumut	UPTD Wilayah X		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53	Pembangunan Fasilitas Pendaratan/pelabuhan/integrasi Moda/UKOP Pelabuhan Penyeberangan Pantai Timur Sibolga	Kab. Sumatera Utara, Sumut	UPTD Wilayah X		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI	**Jumlah lokasi pengadaan/pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengembangan sarana penyeberangan yang terdapat dan siap dioperasionalkan**			**Nihil**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

PN: Prioritas Nasional; PB: Prioritas Bidang; KL: Prioritas K/L; DK: Indikasi Non-Ops Kegiatan Dukungan Manajemen / Penunjang Teknis; Ops: Indikasi Belanja Operasional; Kah: Indikasi Kebutuhan di Luar BP/SBY

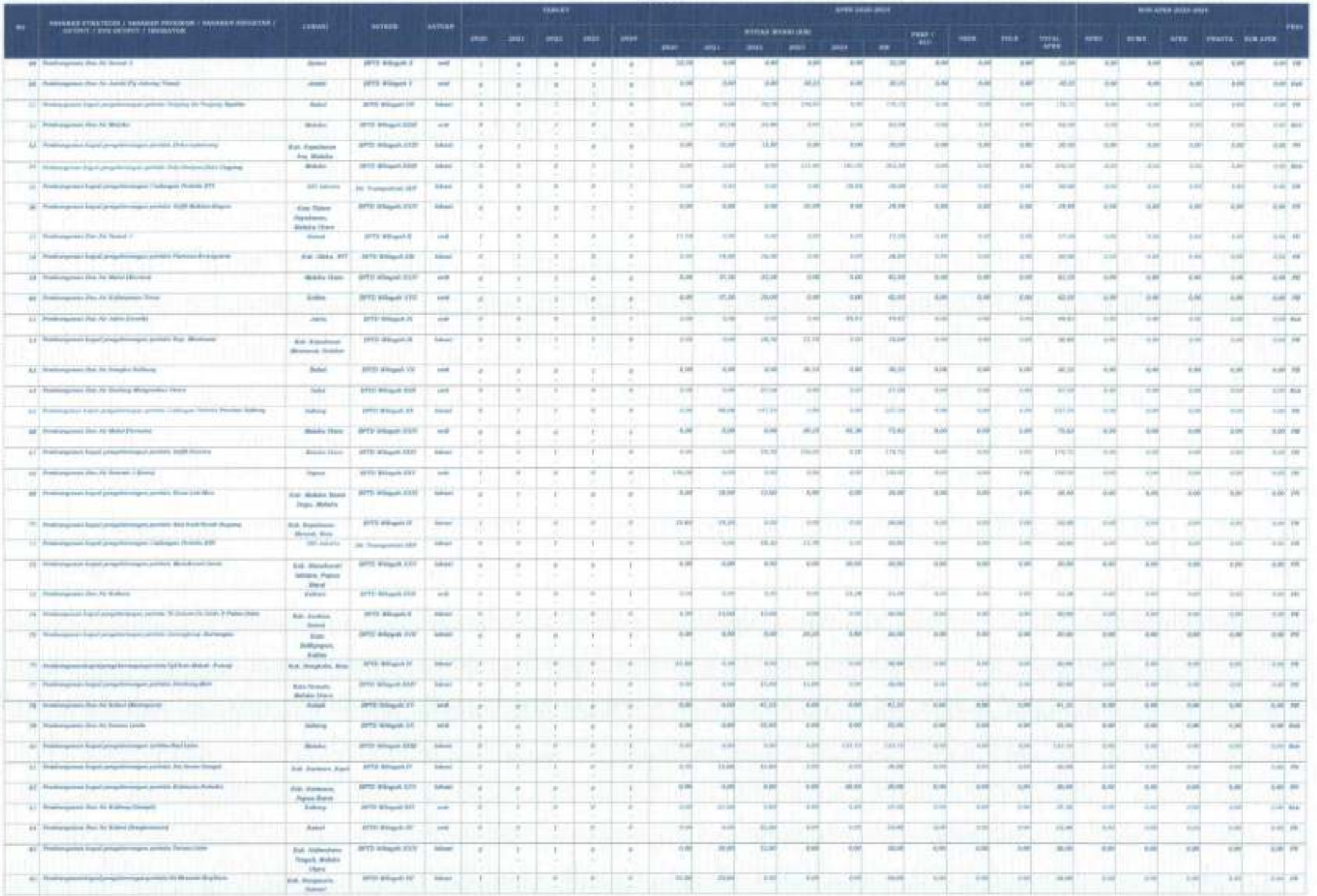

Fil: Prioritas Nasional; Pil: Prioritas Bidang; KL: Prioritas K/L; DK: Indikasi Non-Cpx Kegiatan Dukungan Manajemen / Penunjang Teknis; Cpx: Indikasi Belanja Operasional; Keb: Indikasi Kebutuhan di Luar RPJMN

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Perhubungan 2020-2024

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTCOME / KRO OUTPUT / DEKONSENTRASI	LOKASI	SATKER	KATEGORI	TARGET					SUMBER PENDANAAN															PRIO
					2020	2021	2022	2023	2024	APBN					RM	PNBP / BLU	LAINNYA	PHLN	TOTAL APBN						
87	Pembangunan Gor Air Cenderah	Cenderah	BPPTD Wilayah XXV	unit	0	0	1	1	0	0,00	0,00	27,50	41,25	0,00	68,75	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pnsl
88	Pembangunan kapal pengelit/mengejar penjahat Tipe Kecil	Prov. Jawa Tengah, Tipe Tidak Ditentu	BPPTD Wilayah XXIII	lokasi	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
89	Pembangunan kapal pengelit/mengejar penjahat Kelas Ringan (Major Project - BPPTD)	Kota Tidak Ditentu	BPPTD Wilayah XVIII	lokasi	1	1	0	0	0	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	39,98	0,00	0,00	0,00	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
90	Pembangunan kapal pengelit/mengejar penjahat Kecepatan di Perairan Sangatta	Prov. Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Timur	BPPTD Wilayah XIII	lokasi	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
91	Pembangunan kapal pengelit/mengejar penjahat Tipe Kecil	Prov. Sumatera Selatan	BPPTD Wilayah XIII	lokasi	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
92	Pembangunan kapal pengelit/mengejar penjahat Kecepatan Di Perairan	Prov. Kepulauan Riau	BPPTD Wilayah XVIII	lokasi	1	1	0	0	0	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	39,98	0,00	0,00	0,00	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
93	Pembangunan Gor Air Sentani Baru	Kab.	BPPTD Wilayah XX	unit	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
94	Pembangunan kapal pengelit/mengejar penjahat Kecepatan di wilayah	Prov. Sulawesi Selatan	BPPTD Wilayah XI	lokasi	0	0	1	1	0	0,00	0,00	19,99	19,99	0,00	39,98	0,00	0,00	0,00	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
95	Pembangunan kapal pengelit/mengejar penjahat Kecepatan di wilayah	Prov. Riau, Kepulauan Anambas	BPPTD Wilayah XXII	lokasi	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
96	Pembangunan Gor Air Lampung	Lampung	BPPTD Wilayah VI	unit	0	0	1	0	0	0,00	27,50	20,00	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
97	Pembangunan kapal pengelit/mengejar penjahat 25 - 30 ton Di Jayapura	Kab. Keerom, Papua	BPPTD Wilayah XI	lokasi	0	0	1	0	0	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
98	Pembangunan Gor Air Kupang	Kupang	BPPTD Wilayah XVI	unit	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	47,50	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
99	Pembangunan Gor Air Batuampar Tanjungpinang	Batam	BPPTD Wilayah XVIII	unit	0	0	1	0	0	0,00	0,00	27,50	41,25	0,00	68,75	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
100	Pembangunan Gor Air Mimika Dermaga Nusantara	Mimika	BPPTD Wilayah XXIII	unit	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	41,25	0,00	41,25	0,00	0,00	0,00	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
101	Pembangunan Gor Air Bengkalis	Bengkalis	BPPTD Wilayah IX	unit	0	1	0	0	0	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
102	Pembangunan kapal pengelit/mengejar penjahat Kelas Ringan (Major Project - BPPTD)	Kab. Indramayu, Cirebon, Majalengka, Ciamis	BPPTD Wilayah XXIV	lokasi	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
103	**Jumlah pelabuhan/KSP yang beroperasi dan siap dioperasikan**			**lokasi**	**722**	**724**	**747**	**769**	**782**	**1.471,00**	**2.012,64**	**2.441,31**	**2.795,00**	**2.900,00**	**12.000,97**	**0,00**	**1.748,97**	**0,00**	**13.849,14**	**0,00**	**265,00**	**0,00**	**0,00**	**265,00**	
104	Pembangunan Pelabuhan Pengembangan Baklumni	Kab. Bulungan, Pulau Derawan	BPPTD Wilayah XXV	lokasi	0	1	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
105	Pembangunan Pelabuhan Dengan Kapasi Kolo	Kolaka	BPPTD Wilayah XVI	lokasi	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BL
106	Pembangunan Pelabuhan Pengembangan Baloi di Indonesia	Batam	BPPTD Wilayah XVIII	lokasi	1	1	1	0	0	20,00	70,00	70,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
107	Pembangunan Pelabuhan pengelit/mengejar 3), Kelompang (3), Dapat (Major Project - BPPTD)	Prov. Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Timur	BPPTD Wilayah XIII	lokasi	1	1	0	0	0	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
108	Pembangunan Pelabuhan pengelit/mengejar Sangatta (Major Project - BPPTD)	Prov. Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Timur	BPPTD Wilayah XIII	lokasi	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
109	Pembangunan Pelabuhan Dengan Pasut Lima	Kolaka	BPPTD Wilayah XVI	lokasi	1	1	1	0	0	27,50	70,00	70,00	0,00	0,00	167,50	0,00	0,00	0,00	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BL
110	Pembangunan Pelabuhan Pengembangan Merauke	Prov. Merauke, Papua	BPPTD Wilayah XXV	lokasi	0	0	1	1	0	0,00	0,00	22,50	40,00	20,00	82,50	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
111	Pembangunan Pelabuhan Pengembangan P. Seruang	Prov. Kepulauan Riau, Kabupaten Lingga	BPPTD Wilayah IV	lokasi	0	0	1	1	0	0,00	0,00	22,50	40,00	20,00	82,50	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
112	Pembangunan Pelabuhan Dengan Pendukung Baru	Kolaka	BPPTD Wilayah XVI	lokasi	0	1	1	1	0	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BL
113	Pembangunan Pelabuhan Dengan Misi	Papua	BPPTD Wilayah XXV	lokasi	1	1	0	0	0	20,00	70,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BL
114	Pembangunan Pelabuhan Dengan Bandar	Sorong	BPPTD Wilayah XVI	lokasi	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
115	Pembangunan Pelabuhan Dengan Anchor (1)	Jayapura	BPPTD Wilayah X	lokasi	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
116	Pembangunan Pelabuhan Dengan Dermaga	Papua	BPPTD Wilayah XXV	lokasi	0	0	1	1	1	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
117	Pembangunan Pelabuhan Dermaga Pulau Pulau Perintis	Sorong	BPPTD Wilayah XVI	lokasi	0	1	1	1	0	0,00	69,72	70,00	70,00	0,00	209,72	0,00	0,00	0,00	209,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
118	Pembangunan Pelabuhan Dengan di Kabupaten Timur	Kolaka	BPPTD Wilayah XVI	lokasi	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
119	Pembangunan Pelabuhan Pengelit/mengejar Bakhalgin	Jayapura	BPPTD Wilayah XXV	lokasi	1	0	0	0	0	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
120	Pembangunan Pelabuhan Dengan Bindad Utama	Jakarta	BPPTD Wilayah IX	lokasi	1	0	0	0	0	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
121	Pembangunan Pelabuhan Pengelit/mengejar Dapat Dapat Lebih	Batam	BPPTD Wilayah IV	lokasi	1	1	0	0	0	20,00	140,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
122	Pembangunan Pelabuhan Dengan Bindad Antisi Utama	Lampung	BPPTD Wilayah IX	lokasi	0	0	1	1	0	0,00	0,00	20,00	70,00	70,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
123	Pembangunan/Pelabuhan/Kapal/Kapal/Pelabuhan Dalam Negeri	Lampung	BPPTD Wilayah XI	lokasi	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
124	Pembangunan Pelabuhan Dengan Bindad	Jakarta	BPPTD Wilayah V	lokasi	0	1	1	1	0	0,00	41,72	70,00	70,00	0,00	181,72	0,00	0,00	0,00	181,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN

PN: Prioritas Nasional; PB: Prioritas Bidang; KL: Prioritas K/L; DM: Indikasi Non Ops Kegiatan Dukungan Manajemen / Penunjang Teknis; Ops: Indikasi Belanja Operasional; Eks: Indikasi Eskalation di Luar RPJMN

| No | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / KEGIATAN / INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | | REALISASI | | | | |

No	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Output / Non Output / Indikator	Satuan	Satker	Nasional	Target					Alokasi Anggaran										Rencana Anggaran 2020-2024					
					2020	2021	2022	2023	2024	Dukungan Manajemen						Rupiah (Murni) / BLU	Pinjaman	Hibah	Total Alokasi	Alokasi					
										2020	2021	2022	2023	2024	dst										
149	Pembangunan/Pelebaran Pengaspalan Aspalan	Kab. Aga Anjuk Agas Barat	BPTD Wilayah.III.F	Nasional	0	1	1	0	0	0,00	13,04	0,00	0,00	0,00	13,04	0,00	41,96	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
150	Pembangunan/Pelebaran Pengaspalan Bidang	BIT	BPTD Wilayah.III	Nasional	0	0	0	0	0	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
151	Pembangunan/Pelebaran Pengaspalan Bidang	Kab. Aru. BIT	BPTD Wilayah.III	Nasional	0	0	1	1	1	0,00	0,00	31,00	30,00	30,00	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
167	Pembangunan/Pelebaran Gorong-Tol Gerbar	Gubel	BPTD Wilayah.XI	Nasional	0	1	1	1	0	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
168	Pembangunan/Pelebaran Pengaspalan Jalang	Kab. Tipe Utara Utara Jalang	BPTD Wilayah.XI	Nasional	0	0	1	1	1	0,00	0,00	25,00	30,00	30,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
181	Pembangunan/Pelebaran Jalan Mutiel	Kabang	BPTD Wilayah.XVI	Nasional	1	1	1	0	0	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
182	Pembangunan/Pelebaran pengaspalan BPTD Sumut Hulu (Mayor Project : BPTD)	Kab. Samosir, Dairi	BPTD Wilayah.II	Nasional	0	0	0	0	0	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
217	Pembangunan/Pelebaran Pengaspalan Bidi	Unit. Angsi Raptor	BPTD Wilayah.XVI	Nasional	0	1	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
222	Pembangunan/Pelebaran Pengaspalan Anderson	Aspal	BPTD Wilayah.IV	Nasional	1	1	0	0	0	90,00	144,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
223	Pembangunan/Pelebaran Pengaspalan Bekolang	BIT	BPTD Wilayah.XIII	Nasional	0	0	0	0	0	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
179	Pembangunan/Pelebaran Jangan Gerbar 3	Gerbel	BPTD Wilayah.X	Nasional	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
170	Pembangunan Alinasan 3 Pelebaran Pelangkan	Kab. Cenegaeren, Bali	BPTD Wilayah.XII	Nasional	0	1	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	PN
210	Pembangunan/Pelebaran Jangan Gerpak	Kabang	BPTD Wilayah.XVI	Nasional	0	1	1	1	0	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
177	Pembangunan/Pelebaran Pengaspalan Pelan	Kota Palu, Gabang	BPTD Wilayah.XIII	Nasional	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
178	Pembangunan/Pelebaran Pengaspalan Lintang	Kab. Asembas, Aspal	BPTD Wilayah.IV	Nasional	0	0	1	1	1	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
170	Pembangunan/Pelebaran Jangan Gerbar Gerpa dan Gerbi	Gerpak	BPTD Wilayah.XII	Nasional	0	0	0	1	0	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
181	Pembangunan/Pelebaran Pengaspalan Tidak Zadran	Gerpak	BPTD Wilayah.X	Nasional	1	0	0	0	0	75,00	144,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
221	Pembangunan/Pelebaran Pengaspalan Sin Gantung	Kab. Indragiri Utara, Pelo	BPTD Wilayah.X	Nasional	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
201	Pembangunan/Pelebaran Pengaspalan Bias Wisata	Kot. Singkawang, Kab	BPTD Wilayah.XII	Nasional	1	0	0	0	0	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
191	Pembangunan/Pelebaran Jangan Jangan Jaharang	Kabang	BPTD Wilayah.XVI	Nasional	0	1	1	1	0	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
263	Pembangunan/Pelebaran Pengaspalan Bidang Pelan Pelan	Lampung	BPTD Wilayah.V	Nasional	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
262	Pembangunan/Pelebaran Jangan Angelan	Kabang	BPTD Wilayah.XVI	Nasional	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
265	Pembangunan/Pelebaran Jangan Sin Bun	Kabang	BPTD Wilayah.XVI	Nasional	1	1	1	0	0	81,00	70,00	70,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
197	Pembangunan/Pelebaran Pengaspalan Kosong (Mayor Project : BPTD)	Kab. Mahakam Hilir	BPTD Wilayah.XVIII	Nasional	1	0	1	0	0	0,00	26,79	0,00	0,00	0,00	26,79	0,00	94,21	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
280	Pembangunan/Pelebaran Pengaspalan Bridi	Unit. Sidoarjoku Tinggal, Bidda Utara	BPTD Wilayah.XVII	Nasional	0	1	1	0	0	0,00	8,47	0,00	0,00	0,00	8,47	0,00	34,53	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
201	Pembangunan/Pelebaran Pengaspalan Bidang Pelan	Kot. Singkawang, Bidd	BPTD Wilayah.IV	Nasional	0	0	1	1	1	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
147	Pembangunan/Pelebaran/Pengaspalan/Pengembangan/Tahun Apalagan/Bidang	Gerpak	BPTD Wilayah.X	Nasional	0	1	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
251	Pembangunan/Pelebaran Pengaspalan Gerpak	Kab. Asembas, Aspal	BPTD Wilayah.IV	Nasional	0	0	1	1	1	0,00	0,00	25,00	30,00	30,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
122	Pembangunan/Pelebaran Jangan Mentigia Kerenk	Kabang	BPTD Wilayah.XVI	Nasional	1	1	1	0	0	81,00	70,00	70,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
110	Pembangunan/Pelebaran Jangan Mast / Tol	Gerpak	BPTD Wilayah.IX	Nasional	0	1	1	1	0	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
256	Pembangunan/Pelebaran Pengaspalan Pandrat	Kab. Tipe Utara Utara, Zadang	BPTD Wilayah.XII	Nasional	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
268	Pembangunan/Pelebaran Bangan Pelan	Gerbang	BPTD Wilayah.XII	Nasional	0	1	1	1	0	0,00	43,73	70,00	70,00	0,00	183,73	0,00	0,00	0,00	183,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
110	Pembangunan/Pelebaran Gorong Gerbang Bidang	Papua	BPTD Wilayah.XVI	Nasional	1	1	1	0	0	81,00	70,00	70,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
217	Pembangunan/Pelebaran Gerpak Bidang Pelebaran	Kab	BPTD Wilayah.XII	Nasional	1	0	0	0	0	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
208	Pembangunan/Pelebaran Jangan Gerbang Gerbi Ope	Gerbel	BPTD Wilayah.XII	Nasional	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
110	Pembangunan/Pelebaran Jangan Gajang Gerbi	Gerbel	BPTD Wilayah.XV	Nasional	0	0	0	0	0	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
211	Pembangunan/Pelebaran Jangan di Antara Bidang	Kab. Gangk, Gerb	BPTD Wilayah.XII	Nasional	1	1	1	0	0	11,00	40,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
201	Pembangunan/Pelebaran Pengaspalan Bridi	Gerbang	BPTD Wilayah.XI	Nasional	0	0	0	0	0	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
202	Pembangunan/Pelebaran Pengaspalan Bridi	Kab. Melalo Barat, Aspa, Melalo	BPTD Wilayah.XVII	Nasional	0	1	1	1	0	0,00	22,00	40,00	40,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN

PN: Prioritas Nasional; PB: Prioritas Bidang; PL: Prioritas (L1); DM: Indikasi Non-Opa Kegiatan Dukungan Manajemen / Anunjang Teknis; Opa: Indikasi Belanja Operasional; Bdk: Indikasi Kebutuhan di Luar RPJMN

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / KRO OUTPUT / DEKOSENTRI	LOKASI	SATKER	SATUAN	TARGET					KINERJA 2020-2024										KINERJA 2020-2024					
										CAPAIAN KINERJA (CK)						TARGET / PAGU	KINERJA	EFISIEN	TOTAL CAPAIAN						
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	RATA					REALISASI	REVISI	ALOKASI	EFISIENSI	REALISASI		
2.6.7	Pembangunan/Pelebaran Pengaman Jembatan	Maluku	BPTD Wilayah XXIII	Lokasi	1	1	0	0	0	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.6.8	Pembangunan Pelabuhan Khusus Darat	Jateng	BPTD Wilayah XX	Lokasi	0	1	1	1	0	0,00	42,72	72,84	72,84	0,00	192,72	0,00	0,00	0,00	192,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.6.9	Pembangunan Pelabuhan Khusus Sistem Pulau	Papua	BPTD Wilayah XXV	Lokasi	0	1	1	1	0	0,00	42,72	72,84	72,84	0,00	192,72	0,00	0,00	0,00	192,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.6.10	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Rakyat (Major Project - BPTD)	Kab. Kep. Anambas, Natuna, Kepri	BPTD Wilayah XXV	Lokasi	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
IX.X	**Penyediaan fasilitas pengendalian pencemaran lingkungan di Terminal**			**Unit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2.6.11	Pembangunan/Pengadaan Fasilitas Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Terminal	Jateng	BPTD Wilayah XX	Lokasi	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.6.12	Pembangunan/Pengadaan Fasilitas Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Terminal	Kab. Bulungan, Kaltara	BPTD Wilayah XXII	Lokasi	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.6.13	Pembangunan/Pengadaan Fasilitas Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Terminal	Kota Semarang, Jateng	BPTD Wilayah X	Lokasi	0	0	1	1	1	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.6.14	Pembangunan/Pengadaan Fasilitas Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Terminal	Sultra	UPT Kelas III Angkasa Pura Kendari	Lokasi	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.6.15	Pembangunan/Pengadaan Fasilitas Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Terminal	Kota Bandung, Jabar	BPTD Wilayah IX	Lokasi	0	1	1	1	1	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.6.16	Pembangunan/Pengadaan Fasilitas Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Terminal	Kota Sorong, Papua Barat	BPTD Wilayah XXV	Lokasi	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.6.17	Pembangunan/Pengadaan Fasilitas Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Terminal	Kota Tanjungselor, Jatim	BPTD Wilayah XI	Lokasi	0	1	1	1	1	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.6.18	Pembangunan/Pengadaan Fasilitas Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Terminal	Jateng	UPT Kelas III Angkasa Pura Ahmad Yani Semarang	Lokasi	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.6.19	Pembangunan/Pengadaan Fasilitas Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Terminal	Kalteng	BPTD Wilayah XVIII	Lokasi	0	0	1	1	1	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.6.20	Pembangunan/Pengadaan Fasilitas Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Terminal	Kota Palangkaraya, Kalteng	BPTD Wilayah XVIII	Lokasi	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.6.21	Pembangunan/Pengadaan Fasilitas Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Terminal	Kota Bukittinggi, Sumbar	BPTD Wilayah V	Lokasi	0	0	1	1	1	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.6.22	Pembangunan/Pengadaan Fasilitas Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Terminal	Kota Pangkalpinang, Babel	BPTD Wilayah XIII	Lokasi	0	1	1	1	1	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.6.23	Pembangunan/Pengadaan Fasilitas Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Terminal	Kota Tanjungpinang, Kepri	BPTD Wilayah XII	Lokasi	0	0	1	1	1	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.6.24	Pembangunan/Pengadaan Fasilitas Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Terminal	Kota Bengkulu, Bengkulu	BPTD Wilayah XVII	Lokasi	0	0	1	1	1	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.6.25	Pembangunan/Pengadaan Fasilitas Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Terminal	Kota Jambi, Jambi	BPTD Wilayah VI	Lokasi	0	0	1	1	1	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.6.26	Pembangunan/Pengadaan Fasilitas Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Terminal	Kota Palembang, Sumsel	BPTD Wilayah VII	Lokasi	0	0	1	1	1	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.6.27	Pembangunan/Pengadaan Fasilitas Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Terminal	Kota Bandar Lampung, Lampung	BPTD Wilayah VIII	Lokasi	0	0	1	1	1	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.6.28	Pembangunan/Pengadaan Fasilitas Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Terminal	Kota Ambon, Maluku	BPTD Wilayah XXIII	Lokasi	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.6.29	Pembangunan/Pengadaan Fasilitas Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Terminal	Kota Ternate, Malut	BPTD Wilayah XXIV	Lokasi	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.6.30	Pembangunan/Pengadaan Fasilitas Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Terminal	Kota Jayapura, Papua	BPTD Wilayah XXVI	Lokasi	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.6.31	Pembangunan/Pengadaan Fasilitas Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Terminal	Kota Manokwari, Papua Barat	BPTD Wilayah XXVII	Lokasi	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.6.32	Pembangunan/Pengadaan Fasilitas Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Terminal	Kota Merauke, Papua	BPTD Wilayah XXVIII	Lokasi	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
XI	**Pengembangan Sistem Informasi Transportasi Darat**									**2.748,41**	**4.406,24**	**3.662,84**	**3.427,74**	**2.668,24**	**21.443,42**	**0,00**	**227,84**	**0,00**	**21.671,26**	**1.800,00**	**0,00**	**4.200,84**	**0,00**	**1.800,00**	
XI.1	**Sub-bidang Layanan Manajemen Informasi Transportasi Darat**			**KEGI**	**80**	**84**	**88**	**94,4**	**98,2**	**2.721,41**	**4.321,84**	**3.640,00**	**3.343,00**	**2.668,24**	**20.139,41**	**0,00**	**227,84**	**0,00**	**20.444,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2.6.33	Pelayanan Transportasi Transportasi Darat									2.721,41	4.321,84	3.640,00	3.343,00	2.668,24	20.139,41	0,00	227,84	0,00	20.444,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XI	**Mewujudkan Sistem Pelayanan Transportasi Darat**									**2.721,41**	**4.321,84**	**3.640,00**	**3.343,00**	**2.668,24**	**20.139,41**	**0,00**	**227,84**	**0,00**	**20.444,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
XXX	**Penerbitan pelaksanaan standar pelayanan minimum (SPM) di Terminal Tipe A**			**%**	**83,57**	**83,8**	**83,89**	**92,7**	**8,78**	**1.612,50**	**2.027,00**	**2.030,00**	**1.300,00**	**1.000,00**	**11.320,50**	**0,00**	**227,84**	**0,00**	**11.648,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2.6.34	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Sabir Asri	Jateng	BPTD Wilayah X	Lokasi	0	0	1	0	0	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.6.35	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Banjarmasin	Kalteng	BPTD Wilayah XVIII	Lokasi	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.6.36	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Sebagai Baru	Riau	BPTD Wilayah IV	Lokasi	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.6.37	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Purwokerto	Jateng	BPTD Wilayah X	Lokasi	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.6.38	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Tirtonadi	Jateng	BPTD Wilayah X	Lokasi	1	0	0	0	0	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.6.39	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Cipaku	Jateng	BPTD Wilayah X	Lokasi	0	1	0	0	0	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.6.40	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Samarinda Seberang	Kaltim	BPTD Wilayah XVII	Lokasi	1	0	0	0	0	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2.6.41	Rehabilitasi/Peningkatan Terminal Batu	Jateng	BPTD Wilayah X	Lokasi	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

PN: Prioritas Nasional; PB: Prioritas Bidang; KL: Prioritas K/L; DK: Indikasi Non-Ops Kegiatan Dukungan Manajemen / Penunjang Teknis; Ops: Indikasi Belanja Operasional; Bels: Indikasi Kelanjutan di Luar RPJMN
Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Perhubungan 2020-2024

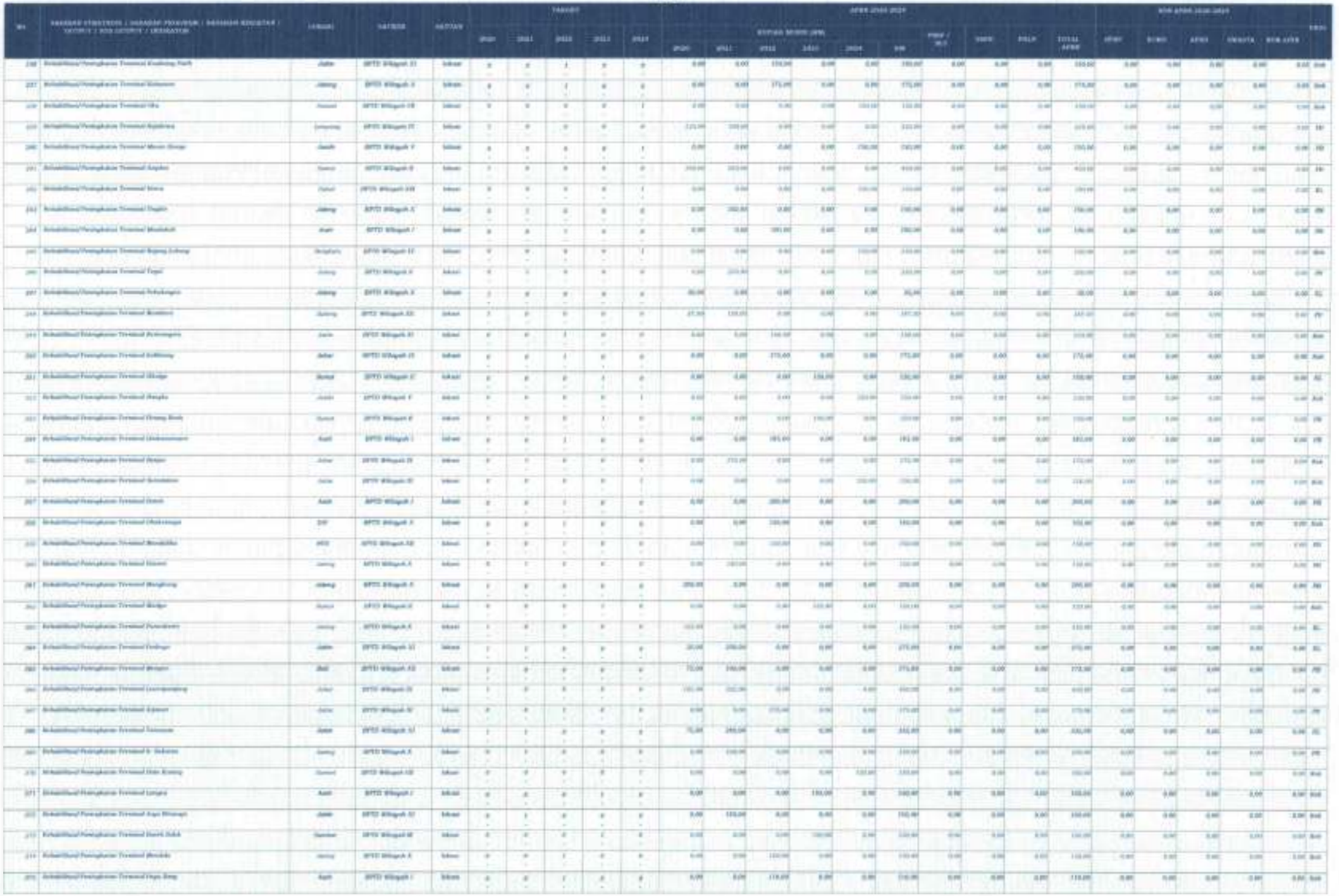

FP: Prioritas Nasional; PB: Prioritas Bidang; KL: Prioritas K/L; Dk: Indikasi Non-Ops Kegiatan Dukungan Manajemen / Penunjang Teknis; Ops: Indikasi Belanja Operasional; Kab: Indikasi Kebutuhan di Luar BP3MN

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Perhubungan 2020-2024

No	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / DESKRIPSI	SATUAN	SATKER	SATKER	TARGET					REVISI DIPA 2024										REALISASI 2024					
					2020	2021	2022	2023	2024	BIAYA PEGAWAI (GBJ)						PNBP / BLU	BADAN	PHLN	TOTAL APBN	BIAYA	BIAYA PEGAWAI	GAJI	BARANG	BARANG MODAL	
216	Kebudayaan/Pemajukan Tinggi Alam Kampo	Jumlah	BPPTD Wilayah X	Sekolah	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
217	Kebudayaan/Pemajukan Tinggi Manajaya	Unit	BPPTD Wilayah X	Sekolah	0	0	1	0	0	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
218	Kebudayaan/Pemajukan Tinggi Pusaka	Satu	BPPTD Wilayah XVII		1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
219	Kebudayaan/Pemajukan Tinggi Pusaka	Satu	BPPTD Wilayah XI	Sekolah	0	0	1	0	0	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PNP
220	Kebudayaan/Pemajukan Tinggi Pusaka Tinggi	STS	BPPTD Wilayah XII	Sekolah	0	0	1	0	0	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PNP
221	Kebudayaan/Pemajukan Tinggi Pusaka	Satu	BPPTD Wilayah IX	Sekolah	1	0	0	0	0	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
222	Kebudayaan/Pemajukan Tinggi Sekolah Lanjutan	Tunggal	BPPTD Wilayah XIV	Sekolah	1	1	0	0	0	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
223	Kebudayaan/Pemajukan Tinggi Jati	Kendaraan	BPPTD Wilayah IX	Sekolah	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PNP
224	Kebudayaan/Pemajukan Tinggi Tradisi Hingga	Sekali	BPPTD Wilayah X	Sekolah	0	1	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
225	Kebudayaan/Pemajukan Tinggi Seni Ag	Jurang	BPPTD Wilayah V	Sekolah	0	0	1	0	0	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab
226	Kebudayaan/Pemajukan Tinggi Lomba Mutan	Jalur	BPPTD Wilayah IX	Sekolah	1	0	0	0	0	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
227	Kebudayaan/Pemajukan Tinggi Tanamgallan	Jalan	BPPTD Wilayah XI	Sekolah	0	0	1	0	0	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab
228	Kebudayaan/Pemajukan Tinggi Kabel Sinaukang	Jurang	BPPTD Wilayah X	Sekolah	0	1	0	0	0	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
229	Kebudayaan/Pemajukan Tinggi Pelayaran	Bentuk	BPPTD Wilayah VIII	Sekolah	0	1	0	0	0	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
230	Kebudayaan/Pemajukan Tinggi Tradisi	Bidang	BPPTD Wilayah XII	Sekolah	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab
231	**Persentase pelaksanaan standar pelayanan minimum (SPM) di pelabuhan SOF**			%	71	73	74	75	75	1.520,00	1.400,00	1.800,00	1.700,00	1.400,00	7.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
232	Kebudayaan/Pelabuhan Jangan Lemahabang (Baru)	Kios	BPPTD Wilayah IV	Sekolah	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab
233	Kebudayaan/Pelabuhan Pengelolaanan Mahasiswa (Kuat)	Sekali	BPPTD Wilayah XVII	Sekolah	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
234	Kebudayaan/Pelabuhan Jangan Ian Kuasa (Kuliah)	Dalam	BPPTD Wilayah XIV	Sekolah	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
235	Kebudayaan/Pelabuhan Jangan Kebudayaan (Hanya)	Jurang	BPPTD Wilayah X	Sekolah	0	0	1	0	0	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab
236	Kebudayaan/Pelabuhan Pengelolaanan Pemasaran (Sulut)	Satu	UPTD Wilayah XVII	Sekolah	0	0	1	1	0	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
237	Kebudayaan/Pelabuhan Jangan Mari Ini Ini (Pelabuhan)	Bentuk	BPPTD Wilayah VII	Sekolah	1	1	0	0	0	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
238	Kebudayaan/Pelabuhan Jangan Jangang Ini (Kuasa)	Bentuk	BPPTD Wilayah VII	Sekolah	0	1	0	0	0	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
239	Kebudayaan/Pelabuhan Pengelolaanan Tinjung Ayi Ayi (Kuasa)	Bentuk	BPTD Wilayah XII	Sekolah	1	1	0	0	0	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
240	Kebudayaan/Pelabuhan Pengelolaanan Kalimpah (Jurang	Jalur	UPTD Wilayah XI	Sekolah	0	1	0	0	0	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KL
241	Kebudayaan/Pelabuhan Pengelolaanan Tanggalan (PTT)	PTT	BPPTD Wilayah VIII	Sekolah	0	1	0	0	0	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KL
242	Kebudayaan/Pelabuhan Jangan Mempura Mata Mata (Sentral	Tunggal	UPTD Wilayah IX	Sekolah	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab
243	Kebudayaan/Pelabuhan Pengelolaanan Full Hot (Kuliah)	Sekolah	BPPTD Wilayah XI	Sekolah	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab
244	Kebudayaan/Pelabuhan Pengelolaanan Anggan (Kuliah)	Bidang	BPPTD Wilayah XII	Sekolah	0	0	1	0	0	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab
245	Kebudayaan/Pelabuhan Pengelolaanan Mandap (Sentral)	Sekolah	BPPTD Wilayah XI	Sekolah	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KL
246	Kebudayaan/Pelabuhan Jangan Dinding Pelabuhan (Jalur)	Jalur	UPTD Wilayah IX	Sekolah	0	0	1	0	0	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab
247	Kebudayaan/Pelabuhan Pengelolaanan Mahasi (Sulut)	Sekali	BPPTD Wilayah XVII	Sekolah	0	0	1	0	0	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
248	Kebudayaan/Pelabuhan Jangan Jamaluh Bidang	Bidang	BPPTD Wilayah XI	Sekolah	0	1	0	0	0	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
249	Kebudayaan/Pelabuhan Pengelolaanan Kamangan (Kuliah)	Kuliah	BPPTD Wilayah XVII	Sekolah	0	1	0	0	0	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
250	Kebudayaan/Pelabuhan Pengelolaanan Jamaluh (Jurang	Jalur	UPTD Wilayah I	Sekolah	1	0	0	0	0	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KL
251	Kebudayaan/Pelabuhan Pengelolaanan Kuat Kunjuk (Kapal	Kapal	BPPTD Wilayah IV	Sekolah	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KL
252	Kebudayaan/Pelabuhan Pengelolaanan Kangan (Jalur)	Jalur	UPTD Wilayah XI	Sekolah	0	0	1	0	0	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KL
253	Kebudayaan/Pelabuhan Jangan Nelan (Pajuk)	Pajuk	UPTD Wilayah XVII	Sekolah	0	1	0	0	0	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
254	Kebudayaan/Pelabuhan Jangan Kuat (Pajuk)	Pajuk	UPTD Wilayah XVII	Sekolah	0	1	0	0	0	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab
255	Kebudayaan/Pelabuhan Jangan Kuatan - Kuatan (Kuliah)	Dalam	BPPTD Wilayah XII	Sekolah	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP

PP: Prioritas Nasional; PB: Prioritas Bidang; KL: Prioritas K/L; DK: Indikasi Non-Ops Kegiatan Dukungan Manajemen / Penunjang Teknis Ops Indikasi Belanja Operasional; Keb: Indikasi Kebutuhan di Luar RPJMN
Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Perhubungan 2020-2024

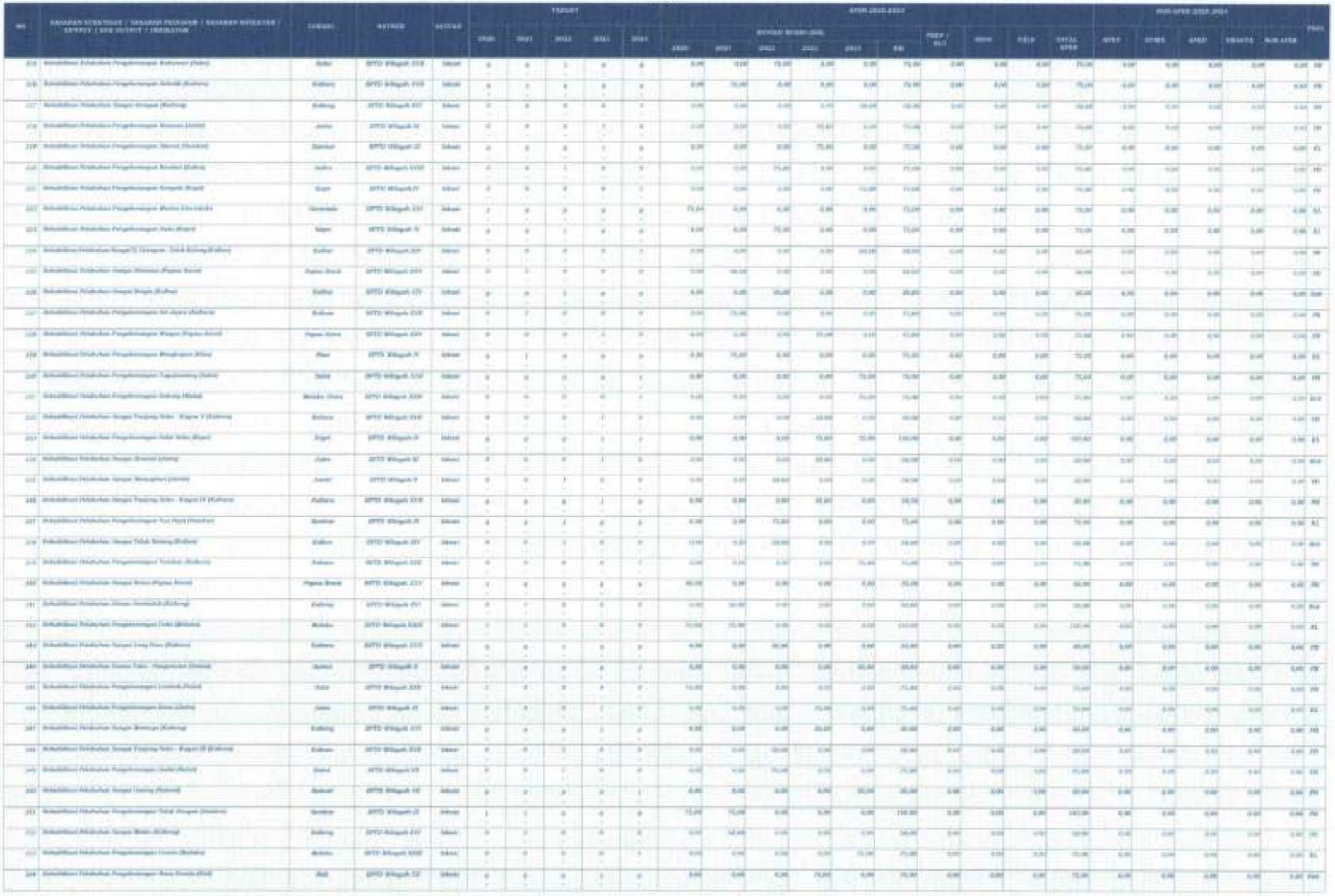

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / KRO OUTPUT / DEPARTEMEN	LOKASI	SATUAN	SATUAN	TARGET					KINERJA TAHUN 2024										RATA-RATA TAHUN 2020-2024					
					2020	2021	2022	2023	2024	RENCANA REVISI (JIKA)					KIN	CAPAIAN / (%)	KINERJA	PERLIN	TOTAL KINERJA	CAPAIAN	REVISI	CAPAIAN	PERLIN	RATA-RATA	TREND
										2020	2021	2022	2023	2024											
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR / SUB INDIKATOR / INDIKATIF	LOKASI	SATKER	SATUAN	TARGET					KINERJA 2020-2024										KINERJA 2020-2024					
					2020	2021	2022	2023	2024	INVESTASI MODAL (IKM)						PMDP / BLUD	ABMN	PSLN	TOTAL APBN	APBN	KEMEN	APBN	PRIVATE	SUM APBN	PRIO
										2020	2021	2022	2023	2024	SUM										
202	Rehabilitasi Infrastruktur Pengelolaanpan Alur Utama	Aceh	BPTD Wilayah XXX	Lokasi	0	0	1	0	0	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206	Rehabilitasi Infrastruktur Pengelolaanpan Tanah (Multiple Years)	Sulawesi Utara	BPTD Wilayah XXX	Lokasi	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Multi
207	Rehabilitasi Infrastruktur Dermaga Bongkar Tradisional (Kawasan Pelabuhan)	Sumatera	BPTD Wilayah XX	Lokasi	0	0	1	0	0	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Multi
208	Rehabilitasi Infrastruktur Pengelolaanpan Bulang Dan (Multiple)	Sulawesi Utara	BPTD Wilayah XXX	Lokasi	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RE
209	Rehabilitasi Infrastruktur Pengelolaanpan Dermaga (Multiple)	Sulawesi	BPTD Wilayah XXX	Lokasi	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RE
210	**Penerimaan penerapan WAJIB Terminal Tipe A**			**%**	**76,00**	**92,7**	**77,50**	**80,4**	**82,70**	**48,12**	**480,00**	**824,00**	**490,00**	**112,00**	**1.954,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.954,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
211	Digitalisasi Terminal Gedung Meter	Jakarta	BPTD Wilayah IX	Lokasi	0	1	0	0	0	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
801	Digitalisasi Terminal Jepara	Jawa	BPTD Wilayah XI	Lokasi	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
802	Digitalisasi Terminal Kamal	Jawa	BPTD Wilayah XI	Lokasi	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
803	Digitalisasi Terminal Sebrayat Kota	Riau	BPTD Wilayah XI	Lokasi	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
804	Digitalisasi Terminal Merakurak	Aceh	BPTD Wilayah I	Lokasi	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00					0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
805	Digitalisasi Terminal Pekalongan	Jateng	BPTD Wilayah X	Lokasi	1	0	0	0	0	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	14,72	0,00	0,00	0,00	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
806	Digitalisasi Terminal Purwosari	Jateng	BPTD Wilayah X	Lokasi	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
807	Digitalisasi Terminal Semarang	Jateng	BPTD Wilayah X	Lokasi	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
808	Digitalisasi Terminal Banyuwangi	Jatim	BPTD Wilayah XII	Lokasi	0	1	0	0	0	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
809	Digitalisasi Terminal Kota Mimosa	Jatim	BPTD Wilayah XI	Lokasi	0	0	1	0	0	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
810	Digitalisasi Terminal Tanjung Priuk	Jakarta	BPTD Wilayah X	Lokasi	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
811	Digitalisasi Terminal Gedebang	Jateng	BPTD Wilayah IX	Lokasi	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
812	Digitalisasi Terminal Kepulauan	Jakarta	BPTD Wilayah IX	Lokasi	1	0	0	0	0	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	14,72	0,00	0,00	0,00	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
813	Digitalisasi Terminal Kabuh Pandeglang	Jateng	BPTD Wilayah X	Lokasi	0	0	1	0	0	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
814	Digitalisasi Terminal Kalimalang	Jakarta	BPTD Wilayah IX	Lokasi	0	1	0	0	0	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
815	Digitalisasi Terminal Lompat	Aceh	BPTD Wilayah I	Lokasi	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
816	Digitalisasi Terminal Madiga	Sumut	BPTD Wilayah II	Lokasi	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
817	Digitalisasi Terminal Danau Laut	Sumatera	BPTD Wilayah XX	Lokasi	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
818	Digitalisasi Terminal Mandalam	Sulteng	BPTD Wilayah XX	Lokasi	0	0	1	0	0	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
819	Digitalisasi Terminal Bakul Jaya	Jateng	BPTD Wilayah X	Lokasi	0	0	1	0	0	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
820	Digitalisasi Terminal A. Kalkuria	Jateng	BPTD Wilayah X	Lokasi	0	0	1	0	0	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
821	Digitalisasi Terminal Tegaly	Jateng	BPTD Wilayah X	Lokasi	0	0	1	0	0	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
822	Digitalisasi Terminal Pemalang	Jateng	BPTD Wilayah X	Lokasi	0	1	0	0	0	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
823	Digitalisasi Terminal Rawang	Jateng	BPTD Wilayah X	Lokasi	0	0	1	0	0	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
824	Digitalisasi Terminal Sudut Lampar	Sulsel	BPTD Wilayah XXI	Lokasi	0	1	0	0	0	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
825	Digitalisasi Terminal Gilang	Jateng	BPTD Wilayah X	Lokasi	1	0	0	0	0	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	14,72	0,00	0,00	0,00	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
826	Digitalisasi Terminal Mamo	Jateng	BPTD Wilayah X	Lokasi	1	0	0	0	0	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	14,72	0,00	0,00	0,00	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
827	Digitalisasi Terminal Kejaksan	Sulawesi	BPTD Wilayah XX	Lokasi	0	1	0	0	0	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
828	Digitalisasi Terminal Sdk. Ijo	Jakarta	BPTD Wilayah IX	Lokasi	0	0	1	0	0	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
829	Digitalisasi Terminal Gilingan	Sulsel	BPTD Wilayah XX	Lokasi	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
830	Digitalisasi Terminal Aceh	Aceh	BPTD Wilayah I	Lokasi	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
831	Digitalisasi Terminal Hat	Sumut	BPTD Wilayah XX	Lokasi	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
832	Digitalisasi Terminal Pekagulan	Sumut	BPTD Wilayah XX	Lokasi	0	0	1	0	0	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN
833	Digitalisasi Terminal Sibakkongan	Jatim	BPTD Wilayah X	Lokasi	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PN

PN: Prioritas Nasional; PB: Prioritas Bidang; PL: Prioritas K/L; IKK: Indikasi Non-Opa Kegiatan Dukungan Manajemen / Penunjang Teknis; Opa: Indikasi Belanja Operasional; Beh: Indikasi Bahaluhan di luar RPJMN

Rencana Strategis dan Pendanaan Kementerian Perhubungan 2020-2024

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / SUBSUBATPK	LOKASI	SATKER	SATUAN	TARGET					RPD 2020-2024										RPD 2020 JKPJ					
					2020	2021	2022	2023	2024	SUMBER PENDANAAN						PDDN / PLN	DBHCHT	PNBP	TOTAL RPD	APBN	BPBUD	APBD	PINJAMAN	SUM APBN	
										2020	2021	2022	2023	2024	RM											
416	Digitalisasi Terminal Merak	Jateng	DPTD Wilayah V	Jalur	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	42,84	0,00	18,84	0,00	0,00	0,00	42,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
417	Digitalisasi Terminal Tanjung	Jateng	DPTD Wilayah III	Jalur	0	1	0	0	0	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
418	Digitalisasi Terminal Ciwandi	Jateng	DPTD Wilayah V	Jalur	1	0	0	0	0	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	14,72	0,00	0,00	0,00	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
419	Digitalisasi Terminal Simpang Gelang	Bekasi	DPTD Wilayah XVII	Jalur	0	1	0	0	0	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
420	Digitalisasi Terminal Terminal Lama	Jateng	DPTD Wilayah III	Jalur	0	0	1	0	0	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Digitalisasi Terminal Pedurungan	Jateng	DPTD Wilayah III	Jalur	0	1	0	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Digitalisasi Terminal Alas Roban	Jateng	DPTD Wilayah V	Jalur	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Digitalisasi Terminal Kebumen	Jateng	DPTD Wilayah X	Jalur	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424	Digitalisasi Terminal Induk Tegalluar	Jabar	DPTD Wilayah XIII	Jalur	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
425	Digitalisasi Terminal Muaratebu	Jabar	DPTD Wilayah XII	Jalur	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426	Digitalisasi Terminal Bekasi	Jabar	DPTD Wilayah XI	Jalur	0	0	1	0	0	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
427	Digitalisasi Terminal Cilegon	Jateng	DPTD Wilayah X	Jalur	0	0	1	0	0	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
428	Digitalisasi Terminal Bandung Timur	Jabar	DPTD Wilayah III	Jalur	0	0	1	0	0	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
429	Digitalisasi Terminal Bintan	Jabar	DPTD Wilayah XVII	Jalur	0	1	0	0	0	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
430	Digitalisasi Terminal Angkola	Sumut	DPTD Wilayah II	Jalur	0	1	0	0	0	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
431	Digitalisasi Terminal Tegal	Jateng	DPTD Wilayah X	Jalur	0	0	1	0	0	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
432	Digitalisasi Terminal Kertosuguro	Jatim	DPTD Wilayah VI	Jalur	0	0	1	0	0	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
433	Digitalisasi Terminal Puga Mas	Jatim	DPTD Wilayah I	Jalur	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
434	Digitalisasi Terminal Wirosari	Jateng	DPTD Wilayah X	Jalur	1	0	0	0	0	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	14,72	0,00	0,00	0,00	14,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SKP	**UPT Transportasi Jalan**			**%**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**82,72**	**402,00**	**327,00**	**397,72**	**204,00**	**1.447,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.447,00**	**1.860,00**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**	**3.960,00**	
4000	Indonesia Transportasi Transportasi Darat									82,72	402,00	327,00	397,72	204,00	1.447,00	0,00	0,00	0,00	1.447,00	1.860,00	0,00	2.100,00	0,00	3.960,00	
10	**Meningkatnya Pembinaan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Berbasis Jalan**									**82,72**	**402,00**	**327,00**	**397,72**	**204,00**	**1.447,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.447,00**	**1.860,00**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**	**3.960,00**	
IKK	**Rata-rata perjalanan ekspansi penumpang angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan yang diterapkan (up the series)**			**%**	**50**	**60**	**70**	**80**	**90**	**82,72**	**402,00**	**327,00**	**397,72**	**204,00**	**1.447,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.447,00**	**1.860,00**	**0,00**	**2.100,00**	**0,00**	**3.960,00**	
411	Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan yang Terintegrasi	Kota Banda Aceh	DPTD Wilayah XIII	Jalur	0	0	1	0	0	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
412	Pengembangan Integrated Land Transport System di Bitung	Jatim	DPTD Wilayah VI	Jalur	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
413	Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Kawasan Perkotaan Jalur (**Major Project - MP19**)	Kota Tasikmalaya, Kabupaten	DPTD Wilayah VII	Jalur/	1	0	1	0	1	0,00	0,00	42,84	0,00	0,00	42,84	0,00	0,00	0,00	42,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414	Pengembangan Integrated Land Transport System di Palembang	Sulsel	DPTD Wilayah XIII	Jalur/	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415	Pengembangan Integrated Land Transport System di Mataram - KSPN Tanjung Kelayang	Sulsel	DPTD Wilayah VII	Jalur/	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	0,00	0,00	42,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
416	Pengembangan Integrated Land Transport System di Padang	Sumbar	DPTD Wilayah VI	Jalur/	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
417	Pengembangan Integrated Land Transport System di Kupang Kota - KSPN Kupang	Jatim	DPTD Wilayah X	Jalur/	0	1	0	0	0	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
418	Pengembangan Integrated Land Transport System di Manado	Jateng	DPTD Wilayah III	Jalur/	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
419	Pengembangan Integrated Land Transport System di Kupang Kota - KSPN Kupang	Jateng	DPTD Wilayah III	Jalur/	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
420	Pengembangan Integrated Land Transport System di Kupang Kota - KSPN Kupang	Jateng	DPTD Wilayah III	Jalur/	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	Pengembangan Integrated Land Transport System di Kupang Kota - KSPN Kupang	Jateng	DPTD Wilayah III	Jalur/	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Pengembangan Integrated Land Transport System di Kupang Kota - KSPN Kupang	Jateng	DPTD Wilayah III	Jalur/	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Pengembangan Integrated Land Transport System di Kupang Kota - KSPN Kupang	Jateng	DPTD Wilayah III	Jalur/	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424	Pengembangan Integrated Land Transport System di Kupang Kota - KSPN Kupang	Jateng	DPTD Wilayah III	Jalur/	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
425	Pengembangan Integrated Land Transport System di Kupang Kota - KSPN Kupang	Jateng	DPTD Wilayah III	Jalur/	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426	Pengembangan Integrated Land Transport System di Kupang Kota - KSPN Kupang	Jateng	DPTD Wilayah III	Jalur/	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
427	Pengembangan Integrated Land Transport System di Kupang Kota - KSPN Kupang	Jateng	DPTD Wilayah III	Jalur/	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
428	Pengembangan Integrated Land Transport System di Kupang Kota - KSPN Kupang	Jateng	DPTD Wilayah III	Jalur/	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
429	Pengembangan Integrated Land Transport System di Kupang Kota - KSPN Kupang	Jateng	DPTD Wilayah III	Jalur/	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
430	Pengembangan Integrated Land Transport System di Kupang Kota - KSPN Kupang	Jateng	DPTD Wilayah III	Jalur/	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
431	Pengembangan Integrated Land Transport System di Kupang Kota - KSPN Kupang	Jateng	DPTD Wilayah III	Jalur/	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
432	Pengembangan Integrated Land Transport System di Kupang Kota - KSPN Kupang	Jateng	DPTD Wilayah III	Jalur/	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
433	Pengembangan Integrated Land Transport System di Kupang Kota - KSPN Kupang	Jateng	DPTD Wilayah III	Jalur/	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
434	Pengembangan Integrated Land Transport System di Kupang Kota - KSPN Kupang	Jateng	DPTD Wilayah III	Jalur/	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
435	Pengembangan Integrated Land Transport System di Kupang Kota - KSPN Kupang	Jateng	DPTD Wilayah III	Jalur/	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
436	Pengembangan Integrated Land Transport System di Kupang Kota - KSPN Kupang	Jateng	DPTD Wilayah III	Jalur/	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
437	Pengembangan Integrated Land Transport System di Kupang Kota - KSPN Kupang	Jateng	DPTD Wilayah III	Jalur/	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
438	Pengembangan Integrated Land Transport System di Kupang Kota - KSPN Kupang	Jateng	DPTD Wilayah III	Jalur/	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
439	Pengembangan Integrated Land Transport System di Kupang Kota - KSPN Kupang	Jateng	DPTD Wilayah III	Jalur/	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440	Pengembangan Integrated Land Transport System di Kupang Kota - KSPN Kupang	Jateng	DPTD Wilayah III	Jalur/	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PN: Prioritas Nasional; PB: Prioritas Bidang; KL: Prioritas K/L; OM: Indikasi Non-Ops Kegiatan Dukungan Manajemen / Penunjang Teknis; Ops: Indikasi Belanja Operasional; Beb: Indikasi Kebutuhan di Luar RKAKL

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / KOMPONEN / INDIKATOR	LOKASI	SATKER	SATUAN	TARGET					REALISASI																			PERS
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	RPHP / RAP		KMDN	DEKON	TOTAL KPDN										
415	Pengembangan/Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan/Rehabilitasi/Penyelenggaraan/Pengoperasian/Pengusahaan/Pengawasan/Pengendalian/Pengelolaan/

NO	KEGIATAN STRATEGIS / SASARAN PENGAWAS / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / KEGIATAN / INDIKATOR	LOKASI	SATKER	KATEGORI	TARGET					APBN 2020-2024										RKAK APBN 2023-2024						PENG
										BIAYA OPERASIONAL (BO)						PEGAWAI (GAJI)										
244		Kalbar	BPTD Wilayah XIV	Sekunder	1	1	1	0	0	10,63	17,50	17,50	0,00	0,00	80,63	0,00	0,00	0,00	80,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
245		NTT	BPTD Wilayah XIII	Sekunder	0	1	0	0	0	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
246		Kalsel	BPTD Wilayah XI	Sekunder	1	0	1	0	0	15,63	17,50	17,50	0,00	0,00	80,63	0,00	0,00	0,00	80,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
247		Lokasi	BPTD Wilayah XVII	Sekunder	0	0	1	1	1	0,00	0,00	190,00	60,00	60,00	290,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
248		Balikpapan	BPTD Wilayah XVII	Sekunder	0	0	1	1	1	0,00	0,00	190,00	60,00	60,00	290,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
249		Kaltara	BPTD Wilayah XVII	Sekunder	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	170,00	60,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
250		Lokasi	BPTD Wilayah IX	Sekunder	1	0	0	0	0	15,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15,63	0,00	0,00	0,00	15,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
251		Maluku	BPTD Wilayah XV	Sekunder	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
252		Kalbar	BPTD Wilayah XIV	Sekunder	0	0	1	1	1	0,00	0,00	190,00	60,00	60,00	290,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
253		Kaltim	BPTD Wilayah XVI	Sekunder	0	1	1	1	0	0,00	17,50	17,50	17,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
254		Kaltim	BPTD Wilayah XVI	Sekunder	1	1	1	0	0	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	142,50	0,00	0,00	0,00	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
255		Riau	BPTD Wilayah IV	Sekunder	0	1	1	1	1	0,00	17,50	17,50	17,50	17,50	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
256		Kaltim	BPTD Wilayah XVI	Sekunder	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
257		Kaltim	BPTD Wilayah XVI	Sekunder	0	1	1	1	0	0,00	17,50	17,50	17,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
258		Aceh	BPTD Wilayah XVIII	Sekunder	1	0	0	0	0	15,63	0,00	0,00	0,00	17,50	33,13	0,00	0,00	0,00	33,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
259		Kaltara	BPTD Wilayah XIII	Sekunder	0	1	0	0	0	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
260		Kaltara	BPTD Wilayah XIII	Sekunder	0	0	1	1	0	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
261		Jatim	BPTD Wilayah XI	Sekunder	0	0	1	0	0	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
262		Jatim	BPTD Wilayah XI	Sekunder	0	0	1	0	0	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
263		Jatim	BPTD Wilayah XI	Sekunder	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
264		Bali	BPTD Wilayah XII	Sekunder	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
265		Jatim	BPTD Wilayah XI	Sekunder	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
266		Jatim	BPTD Wilayah XI	Sekunder	0	1	0	0	0	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
267		Papua	BPTD Wilayah XVIII	Sekunder	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	190,00	60,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
268		Lampung	BPTD Wilayah X	Sekunder	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
269		Jatim	BPTD Wilayah XI	Sekunder	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
270		Jatim	BPTD Wilayah XI	Sekunder	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
271		Jatim	BPTD Wilayah XI	Sekunder	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
272		Jatim	BPTD Wilayah XI	Sekunder	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
273		Jatim	BPTD Wilayah XI	Sekunder	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
274		Jatim	BPTD Wilayah XI	Sekunder	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
275		Jatim	BPTD Wilayah XI	Sekunder	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
276		Jatim	BPTD Wilayah XI	Sekunder	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
277		Jatim	BPTD Wilayah XI	Sekunder	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
278		Jatim	BPTD Wilayah XI	Sekunder	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
279		Jatim	BPTD Wilayah XI	Sekunder	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
280		Jatim	BPTD Wilayah XI	Sekunder	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
281		Jatim	BPTD Wilayah XI	Sekunder	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
282		Jatim	BPTD Wilayah XI	Sekunder	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
283		Jatim	BPTD Wilayah XI	Sekunder	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
284		Jatim	BPTD Wilayah XI	Sekunder	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB

PB: Prioritas Nasional; PB: Prioritas Bidang; KL: Prioritas K/L; DU: Indikasi Non-Ops Kegiatan Dukungan Manajemen / Penunjang Teknis; Ops: Indikasi Belanja Operasional; Kab: Indikasi Kebutuhan di Luar BPJMN

Matrika Biaya dan Pendanaan Kementerian Perhubungan 2020-2024

Lamp. I - -

No	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Output / Sub Output / Komponen	Lokasi	Satuan	Katgori	Target					Aktual 2020-2024										Rasio Aktual 2020-2024					Ket
					2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Belanja (Rp)						Sisa / Kurang	Output	Fisik	Total Aktual	Rasio	Rasio	Rasio	Rasio	Rasio	
										2020	2021	2022	2023	2024	RPK										
240	Pembangunan SPAM Pipa 1	Pipa	BPTD Wilayah XXV	Akhir	0	0	0	1	1	0,00	0,00	100,00	30,00	60,00	390,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab
241	Infrastruktur UMKM	Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	Dir. Prasarana Transportasi Jalan	Akhir	0	22	30	20	28	0,00	215,10	187,00	187,10	217,50	782,80	0,00	0,00	0,00	782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab
242	Infrastruktur UMKM Irigasi (Kolam)	Kolam	BPTD Wilayah XIV	Akhir	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pel
243	Infrastruktur UMKM Parking (Tak Terdiri) Bangkalan	Bangkalan	BPTD Wilayah III	Akhir	0	0	1	1	0	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pel
244	Infrastruktur UMKM Kolo Una (Kolam)	Kolam	BPTD Wilayah XIV	Akhir	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pel
245	Infrastruktur UMKM Kolam (Kolam)	Kolam	BPTD Wilayah III	Akhir	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pel
246	Infrastruktur UMKM Pipa 1	Pipa	BPTD Wilayah XIV	Akhir	0	0	1	1	0	0,00	0,00	100,00	30,00	60,00	390,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab
247	Infrastruktur UMKM Pipa 2	Pipa	BPTD Wilayah XIV	Akhir	0	0	1	1	0	0,00	0,00	100,00	30,00	60,00	390,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab
248	Infrastruktur UMKM Pelabuhan Laut	Laut	BPTD Wilayah XI	Akhir	0	1	0	0	0	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pel
249	Infrastruktur UMKM Cakrawala (Station)	Station	BPTD Wilayah VIII	Akhir	0	1	1	1	0	0,00	17,50	17,50	17,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pel
250	Infrastruktur UMKM Kendangan (Gedung)	Gedung	BPTD Wilayah X	Akhir	0	1	1	1	0	0,00	17,50	17,50	17,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pel
251	Infrastruktur UMKM Pipa Pasar (Gedung)	Gedung	BPTD Wilayah XVI	Akhir	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pel
252	Infrastruktur UMKM Irigasi (Kolam)	Kolam	BPTD Wilayah XI	Akhir	0	0	1	0	0	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pel
253	Infrastruktur UMKM Pelabuhan (Station)	Station	BPTD Wilayah XIII	Akhir	0	0	1	0	0	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pel
254	Infrastruktur UMKM Pelabuhan (Station)	Station	BPTD Wilayah XIII	Akhir	0	0	1	0	0	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pel
255	Infrastruktur UMKM Pelabuhan (Station)	Station	BPTD Wilayah XIII	Akhir	0	0	1	0	0	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pel
256	Infrastruktur UMKM Pelabuhan (Station)	Station	BPTD Wilayah XIII	Akhir	0	0	1	0	0	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pel
257	Infrastruktur UMKM Pelabuhan (Station)	Station	BPTD Wilayah XIII	Akhir	0	0	1	0	0	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pel
258	Infrastruktur UMKM Pelabuhan (Station)	Station	BPTD Wilayah XIII	Akhir	0	0	1	0	0	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pel
259	Infrastruktur UMKM Pelabuhan (Station)	Station	BPTD Wilayah XIII	Akhir	0	0	1	0	0	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pel
260	Infrastruktur UMKM Pelabuhan (Station)	Station	BPTD Wilayah XIII	Akhir	0	0	1	0	0	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pel
261	Infrastruktur UMKM Pelabuhan (Station)	Station	BPTD Wilayah XIII	Akhir	0	0	1	0	0	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pel
262	Infrastruktur UMKM Pelabuhan (Station)	Station	BPTD Wilayah XIII	Akhir	0	0	1	0	0	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pel
263	Infrastruktur UMKM Pelabuhan (Station)	Station	BPTD Wilayah XIII	Akhir	0	0	1	0	0	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pel
264	Infrastruktur UMKM Pelabuhan (Station)	Station	BPTD Wilayah XIII	Akhir	0	0	1	0	0	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pel
265	Infrastruktur UMKM Pelabuhan (Station)	Station	BPTD Wilayah XIII	Akhir	0	0	1	0	0	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pel
266	Infrastruktur UMKM Pelabuhan (Station)	Station	BPTD Wilayah XIII	Akhir	0	0	1	0	0	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pel
267	Infrastruktur UMKM Pelabuhan (Station)	Station	BPTD Wilayah XIII	Akhir	0	0	1	0	0	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pel
268	Infrastruktur UMKM Pelabuhan (Station)	Station	BPTD Wilayah XIII	Akhir	0	0	1	0	0	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pel
269	Infrastruktur UMKM Pelabuhan (Station)	Station	BPTD Wilayah XIII	Akhir	0	0	1	0	0	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pel
270	Infrastruktur UMKM Pelabuhan (Station)	Station	BPTD Wilayah XIII	Akhir	0	0	1	0	0	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pel
271	Infrastruktur UMKM Pelabuhan (Station)	Station	BPTD Wilayah XIII	Akhir	0	0	1	0	0	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pel
272	Infrastruktur UMKM Pelabuhan (Station)	Station	BPTD Wilayah XIII	Akhir	0	0	1	0	0	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pel
273	Infrastruktur UMKM Pelabuhan (Station)	Station	BPTD Wilayah XIII	Akhir	0	0	1	0	0	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pel
274	Infrastruktur UMKM Pelabuhan (Station)	Station	BPTD Wilayah XIII	Akhir	0	0	1	0	0	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pel
275	Infrastruktur UMKM Pelabuhan (Station)	Station	BPTD Wilayah XIII	Akhir	0	0	1	0	0	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pel
276	Infrastruktur UMKM Pelabuhan (Station)	Station	BPTD Wilayah XIII	Akhir	0	0	1	0	0	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pel
277	Infrastruktur UMKM Pelabuhan (Station)	Station	BPTD Wilayah XIII	Akhir	0	0	1	0	0	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pel
278	Infrastruktur UMKM Pelabuhan (Station)	Station	BPTD Wilayah XIII	Akhir	0	0	1	0	0	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pel
279	Infrastruktur UMKM Pelabuhan (Station)	Station	BPTD Wilayah XIII	Akhir	0	0	1	0	0	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pel
280	Infrastruktur UMKM Pelabuhan (Station)	Station	BPTD Wilayah XIII	Akhir	0	0	1	0	0	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pel
281	Infrastruktur UMKM Pelabuhan (Station)	Station	BPTD Wilayah XIII	Akhir	0	0	1	0	0	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pel

PP: Prioritas Nasional; PB: Prioritas Bidang; KL: Prioritas K/L; OM: Indikasi Non-Ops Kegiatan Dukungan Manajemen / Penunjang Teknis; Ops: Indikasi Belanja Operasional; Keb: Indikasi Kebutuhan di Luar RPJMN

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / KRO/RO / INDIKATOR	LEMBAGA	SATUAN	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024										RENCANA 2022-2024					
										SUMBER KEGIATAN						PAGU / ALOKASI									
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	DAK		BMN	HIBAH	TOTAL APBN	APBN	BMN	HIBAH	PNBP/BLU	DAK	TOTAL
240	[illegible]	Jayapura	[illegible]	Jalan	0	0	1	0	0	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	[illegible]	Kupang	[illegible]	Jalan	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	100,00	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	[illegible]	Sidoarjo	[illegible]	Jalan	0	0	0	0	0	0,00	17,50	17,50	17,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	[illegible]	Jayapura	[illegible]	Jalan	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	[illegible]	Kupang	[illegible]	Jalan	1	0	0	0	0	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	[illegible]	JAY	[illegible]	Jalan	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	[illegible]	Biak	[illegible]	Jalan	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	[illegible]	MTP	[illegible]	Jalan	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	[illegible]	Sentani	[illegible]	Jalan	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	[illegible]	JAY	[illegible]	Jalan	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	[illegible]	Bandung	[illegible]	Jalan	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	[illegible]	Makassar	[illegible]	Jalan	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	[illegible]	Jayapura	[illegible]	Jalan	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	[illegible]	Bandung	[illegible]	Jalan	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	[illegible]	Jayapura	[illegible]	Jalan	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	[illegible]	Jakarta	[illegible]	Jalan	0	1	1	1	0	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	[illegible]	Jakarta	[illegible]	Jalan	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	[illegible]	Jakarta	[illegible]	Jalan	0	1	0	0	0	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	[illegible]	Aceh	[illegible]	Jalan	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	[illegible]	Biak	[illegible]	Jalan	0	1	1	1	0	0,00	17,50	17,50	17,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	[illegible]	Jakarta	[illegible]	Jalan	0	1	0	0	0	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	**Jumlah keluaran/hasil kegiatan pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Satuan Kerjanya di Jalan Nasional**			**Jalan**	**53**	**51**	**123**	**159**	**109**	**187,50**	**533,00**	**395,00**	**115,00**	**650,00**	**1.997,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.997,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
262	[illegible]	Jakarta	[illegible]	Jalan	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	[illegible]	Jakarta	[illegible]	Jalan	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	[illegible]	Jakarta	[illegible]	Jalan	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	[illegible]	Jakarta	[illegible]	Jalan	1	0	0	0	0	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	[illegible]	Jakarta	[illegible]	Jalan	0	1	0	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	[illegible]	Jakarta	[illegible]	Jalan	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	[illegible]	Jakarta	[illegible]	Jalan	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	[illegible]	Jakarta	[illegible]	Jalan	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	[illegible]	Jakarta	[illegible]	Jalan	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	[illegible]	Jakarta	[illegible]	Jalan	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	[illegible]	Jakarta	[illegible]	Jalan	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	[illegible]	Jakarta	[illegible]	Jalan	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PP: Prioritas Nasional; PP: Prioritas Bidang; KL: Prioritas K/L; DK: Indikasi Arah Opsi Kegiatan Dukungan Manajemen / Penunjang Teknis; Opsi: Indikasi Belanja Operasional; Keb: Indikasi Kebutuhan di Luar RPJMN

No	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Output / Sub Output / Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Kinerja 2020-2024										Rencana Kinerja 2020-2024					
				2020	2021	2022	2023	2024	Realisasi Rencana (Rp)						Pagu / DLP	Sisa	Capaian	Total Kinerja	Kinerja	Rencana	Kinerja	Capaian	Total Kinerja	
									2020	2021	2022	2023	2024	RM										
421		Kalbar	BPTD Wilayah XIV	Unit	0	1	0	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
422		Sumut	BPTD Wilayah I	Unit	0	0	1	0	0	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
423		Riau	BPTD Wilayah IV	Unit	1	0	1	0	0	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
424		Jatim	BPTD Wilayah XI	Unit	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
425		Sulsel	BPTD Wilayah XV	Unit	0	1	0	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
426		Lampung	BPTD Wilayah VI	Unit	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
427		Sulsel	BPTD Wilayah XIII	Unit	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
428		Maluku Utara	BPTD Wilayah XVII	Unit	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
429		Lampung	BPTD Wilayah VI	Unit	1	0	0	0	0	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
430		Papua	BPTD Wilayah XVI	Unit	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
431		Maluku	BPTD Wilayah XVIII	Unit	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
432		Aceh	BPTD Wilayah I	Unit	0	0	1	0	0	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
433		Jambi	BPTD Wilayah X	Unit	0	0	1	0	0	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
434		Sulsel	BPTD Wilayah XIII	Unit	1	0	0	0	0	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
435		Riau	BPTD Wilayah IV	Unit	0	0	1	0	0	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
436		Lampung	BPTD Wilayah VI	Unit	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
437		Jateng	BPTD Wilayah X	Unit	0	0	1	0	0	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
III	**Jumlah keterediaan taman nilai**		**Unit**	**2**	**4**	**3**	**7**	**8**	**0,00**	**40,00**	**80,00**	**40,00**	**80,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
441		Jatim	BPTD Wilayah XI	Unit	0	1	0	0	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
442		Jatim	BPTD Wilayah XI	Unit	0	0	1	0	0	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
443		Sulsel	BPTD Wilayah XIII	Unit	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
444		Riau	BPTD Wilayah IV	Unit	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
445		Lampung	BPTD Wilayah VI	Unit	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
446		Jateng	BPTD Wilayah X	Unit	0	1	0	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
IV	**Jumlah awapenkat yang terrestrikasi sesuai kesiapan transportasi jalan**		**orang**	**10000**	**10000**	**10000**	**10000**	**10000**	**70,00**	**114,00**	**114,00**	**114,00**	**114,00**	**511,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**511,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
447	Pengembangan Pelan Kendaraan	DKI Jakarta	UK Sarana Transportasi Jalan	Tahun	11	11	11	11	11	11,00	114,00	114,00	114,00	114,00	511,00	0,00	0,00	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
V	**Jumlah/kelitkapelgi/kelindaruanberenterging sesui dengan standar internasional(ISM/ISI)**		**unit**	**2**	**8**	**10**	**14**	**17**	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**290,00**	**0,00**	**290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**	
448	Pembangunan Kolo Pengujian Laik Jalan dan Inspeksi Keselamatan Operasi APIL/ISOS Jalan	DKI, Jakarta, Jabar	BPK,ISOS Jalan	Jalan	1	1	1	1	0	0,00	20,00	20,00	250,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	PK
VI	**Jumlah/kelitkapelgi/kelindaruanberenterging sesui dengan standar internasional(ISM/ISI)**		**%**	**40**	**42**	**46**	**48**	**50**	**80,00**	**90,00**	**92,00**	**71,00**	**76,00**	**409,00**	**808,10**	**0,00**	**0,00**	**1.272,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
449	Pemeliharaan Rutin Jalan Uji Berbasis Elektronik	DKI Jakarta	UK Sarana Transportasi Jalan	unit/thn	68.000	68.000	170.000	170.000	68.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,10	0,00	0,00	808,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
451	Pengadaan Alat Kalibrasi Uji Berbasis Kendaraan Bermotor	DKI Jakarta	UK Sarana Transportasi Jalan	paket	20	20	20	20	20	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
4.00	Program Sarana Transportasi Jalan								4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat								4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III	**Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Transportasi**		**Lembaga**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
452	Pembentukan Pusat Safety Center/Sertifikasi Kendaraan Jalan	DKI Jakarta	Sekdijen Adbalat	Jalan	20	20	20	20	20	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
4.00	Kasi Kajian Keselakan Transportasi Jalan								4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat								4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat								4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																0,00								

PP: Prioritas Nasional; PD: Prioritas Bidang; KL: Prioritas K/L; DK: Indikasi Non-Opa Kegiatan Dukungan Manajemen / Penunjang Teknis; Opr: Indikasi Belanja Operasional; Keh: Indikasi Kebutuhan di Luar RPJMN

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Perhubungan 2020-2024

No	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Aktivitas / Sub Aktivitas / Indikator	Jabatan	Satuan	Target					Alokasi 2020-2024										Realisasi 2020-2024						Ket
				2020	2021	2022	2023	2024	Alokasi Biaya (Rp)						PNBP / BLU	Hibah	Pihak Ke-3	Total Alokasi	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi Biaya	Sisa Anggaran	
									2020	2021	2022	2023	2024	Jml											
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / KOK OUTPUT / INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024										RAB APBN 2020-2024						PERIODE
				2020	2021	2022	2023	2024	Rincian Sesuai DIPA						PHLN / BLU	RMPN	PHLN	TOTAL APBN	RPTO	RCMK	KPDN	PHLN/BLU	RAB APBN	
									2020	2021	2022	2023	2024	RM											
002	Pembangunan Jalan Tanpa di Jawa	Jawa	UPTD Wilayah I	Jalan	0	1	0	1	1	50,00	20,00	0,00	30,72	20,20	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01
003	Pengadaan Lahan Jembatan Bangkai Sungai di Nusa Tenggara Timur	NTT	UPTD Wilayah VIII	Jalan	1	1	0	1	0	10,72	7,20	0,00	10,00	0,00	27,92	0,00	0,00	0,00	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03
004	Pembangunan Jalan Jangan di Kalimantan Selatan	Kalsel	UPTD Wilayah VII	Jalan	0	1	0	0	1	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04
005	Pengadaan Bendu Sungai Kanan di Jawa Timur	Jatim	UPTD Wilayah VI	Jalan	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05
007	Pengadaan Bendu Sungai Kanan di Kalimantan Timur	Kaltim	UPTD Wilayah XVII	Jalan	0	0	1	1	0	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	07
008	Pembangunan Gedung Pemerintahan Lalu Lintas Kapal SDM di Jawa Barat	Kemen	UPTD Wilayah VII	Jalan	0	1	0	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08
009	Pengadaan Bendu Sungai Kanan di Jawa Barat	Jabar	UPTD Wilayah IX	Jalan	0	0	1	0	0	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09
010	Pengadaan Jembatan Darat Sungai Antarpulau di Jawa Timur	Jatim	UPTD Wilayah XI	Jalan	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10
011	Pengadaan Jembatan Darat Sungai Antarpulau di Maluku Utara	Maluku Utara	UPTD Wilayah XXIV	Jalan	1	0	0	0	1	10,72	0,00	0,00	0,00	20,00	20,72	0,00	0,00	0,00	20,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11
012	Pengadaan Jembatan Darat Sungai Antarpulau di Sumatera Utara	Sumut	UPTD Wilayah II	Jalan	0	1	0	0	0	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12
003	**Jumlah Sarana perlayanan ASDP yang terintegrasi pengoperasian kapal pabrik multifungsi**		**Rintas**	**2**	**10**	**22**	**40**	**40**	**110,72**	**87,00**	**90,00**	**100,00**	**140,00**	**220,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
013	Pembangunan Kapal Pabrik Multipurpose di Wilayah I Aceh	Aceh	UPTD Wilayah IX	Jalan	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	013
014	Pembangunan Kapal Pabrik Multipurpose di Kalimantan	Kaltim	UPTD Wilayah XVII	Jalan	1	0	0	0	0	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	014
015	Pembangunan Kapal Pabrik Multipurpose di Wilayah Maluku Utara	Maluku Utara	UPTD Wilayah XXIV	Jalan	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	015
016	Pembangunan Kapal Pabrik Multipurpose di Wilayah Kepulauan Riau	Kepri	UPTD Wilayah XXII	Jalan	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	016
017	Pembangunan Kapal Pabrik Multipurpose di Wilayah Jawa Timur	Jatim	UPTD Wilayah XI	Jalan	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	47,50	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	017
018	Pembangunan Kapal Pabrik Multipurpose di Wilayah Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Barat	UPTD Wilayah XIII	Jalan	1	0	0	0	0	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	018
019	Pembangunan Kapal Pabrik Multipurpose di Wilayah Sulawesi Selatan	Sulsel	UPTD Wilayah VI	Jalan	1	0	0	0	0	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	019
020	Pembangunan Kapal Pabrik Multipurpose di Wilayah Kalimantan Barat	Kalbar	UPTD Wilayah XVI	Jalan	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	020
[illegible]	**[illegible]**																								
[illegible]	**[illegible]**																								
[illegible]	**[illegible]**																								
[illegible]	**[illegible]**		**Unit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,01**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	**[illegible]**	
[illegible]	**[illegible]**																								
[illegible]	**[illegible]**																								
[illegible]	**Persentase Pencapaian Target Kegiatan Pendukungan Pelayanan Pelabuhan**		**%**	**0**	**20,22**	**20,27**	**70,02**	**100**	**2.007,79**	**7.210,12**	**6.441,77**	**6.400,02**	**8.704,41**	**30.996,80**	**900,02**	**1.714,72**	**3.898,71**	**30.996,80**	**[illegible]**	**0,00**	**0,00**	**[illegible]**		
114	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Pelaut	Sub. Jawa, Sulsel	UPP Pelaut		0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114
115	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Pelaut (DAK)	Sub. Jawa, Sulsel	UPP Pelaut	Sulsel	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115
116	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan	Sub. Wilayah Jawa	UPTD Wilayah XIII		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116
117	Pembangunan Baru Pelabuhan Penyeberangan	Sub. Jawa-Barat, Sulsel	UPP Jawa-Barat	Sulsel	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117
118	Pengembangan Pelabuhan Darat	Sub. Sumatera, Papua, Papua	UPP Darat	Sulsel	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118
119	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Lainnya Kapal (DAK/BH)	Sub. Kepulauan Maluku, Sumbar	UPP Muara Dikmal	Sulsel	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119

PB: Prioritas Nasional; PB: Prioritas Bidang; KL: Prioritas K/L; DIK Indikasi Non-Cipta Kegiatan Dukungan Manajemen / Penunjang Teknis; Ops: Indikasi Belanja Operasional; Keh: Indikasi Kebutuhan di Luar RPJMN

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / DESKRIPSI	LOKASI	KATEGORI	KATEGORI	TARGET					REALISASI KINERJA (RK)						PERF. / REAL	ANGGARAN				REALISASI ANGGARAN					PERIH
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	RK		2020	2021	2022	TOTAL	2020	2021	2022	2023	REALISASI	
724	Sosialisasi dan Pengelolaan Pelabuhan Sukolilo	Kab. Donggoni, Galileng	UPP Lasindi	Sukolilo	0 -	0 -	0 -	1 sukolilo	0 -	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PB
725	Lanjutan dan Pengelolaan Pelabuhan Sukolilopan	Kab. Bonsaglo, Sulilut	UPP Monsagli	Sukolilo	0	0	1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PB
726	Pengelolaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan dan Area Satu	Kota. Kupang, NTT	KSOP Kupang	Sukolilo	0	0	1	0	0	0.00	0.00	25.72	0.00	0.00	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PB
727	Pembangunan Area Pelabuhan Wonga (RP/DAK)	Kab. Bonsagoni, Sulilimut	UPP Pulau Bungin	Sukolilo	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PB
728	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Aeng	Kota Jagogoro, Pagasa	UPP Jaroa	Sukolilo	1	0	0	0	0	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PB
729	Pengelolaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Pelanna Diamondap (RP/DAK)	Kota Jamsomoto, Kalimo	KSOP Gamsomoto	Sukolilo	0	0	1	1	1	0.00	0.00	45.00	55.00	55.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PB
730	Rehabilitasi dan Replacement Fasilitas Pelabuhan Lasolo	Kab. Bisino, Sulilut	UPP Sino - Sino		0	1	0	0	0	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PB
731	Pembangunan Area Pelabuhan Teluk Saumi	Kab. Bisano, Sigeri	KSOP Kijang	Sukolilo	0	0	1	0	0	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PB
732	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Pangan (RP/DAK)	Kab. Bonsagoi Lasi, Galileng	UPP Mangoli	Sukolilo	0	0	1	1	1	0.00	0.00	85.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PB
733	Lanjutan dan Pengelolaan Pelabuhan Tuwaikat	Kab. Jongoloro, Galeol	UPP Jongoloro	Sukolilo	0	0	1	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PB
734	Pembangunan Pelabuhan Laut Mentawai (DR)	Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	Dit. Kepelabuhanan	Sukolilo	0	0	0	1	0	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PL
735	Rehabilitasi dan Replacement Fasilitas Pelabuhan Jaya (RP/DAK)	Kab. Jagogoro, Pagasa	UPP Sumsi	Sukolilo	0	0	1	0	0	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PB
736	Pembangunan Area Pelabuhan Sukolilo	Kab. Donggoni, Galileng	UPP Lasindi	Sukolilo	0 -	0 -	0 -	1 sukolilo	0 -	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PB
737	Pengelolaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Bisalo Sombuja	Kab. Bonsi Bonsangana, Bisalo	UPP Bisalo Sombuja	Sukolilo	0	0	1	1	0	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PB
738	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Pasir (RP/DAK)	Kab. Maluku Tenggara, Maluku	UPP Ibaal	Sukolilo	0	0	1	1	1	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PB
739	Rehabilitasi dan Replacement Fasilitas Pelabuhan Nusa Tenggara	Kab. Donggoni, Galileng	UPP Nusa Tenggara		0	1	0	0	0	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PB
740	Rehabilitasi dan Replacement Fasilitas Pelabuhan Kuala (RP/DAK) (Major Project - MP10)	Kab. Maluku, Sulilut	Kantor UPP Ujung	Sukolilo	1	0	0	0	0	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PB
741	Rehabilitasi dan Replacement Fasilitas Pelabuhan Wajo	Kota Pulau Ambalawan, Maluku Utara	UPP Sisa Sia		0	1	0	0	0	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PB
742	Pembangunan Area Pelabuhan Bulol	Kab. Maluku Tenggara, Maluku	UPP Kuil	Sukolilo	0	0	1	0	0	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PB
743	Lanjutan dan Pengelolaan Pelabuhan Kapsen (RP/APBN)	Kab. Jagogoro, Pagasi	KSOP Jagogoro	Sukolilo	1 bentangkat	0 bentangkat	0 sukolilo	0 -	0 -	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PB
744	Pembangunan Area Pelabuhan Dasar Sialeor	Kab. Galeworoni, Antaroni, Maluku Utara	Kantor UPP Jailolong	Sukolilo	0	0	1	0	0	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PB
745	Lanjutan dan Pengelolaan Pelabuhan Tanglitong	Kab. Donggoni, Galileng	UPP Donggoni	Sukolilo	0	0	0	1	0	0.00	0.00	0.00	196.11	0.00	196.11	0.00	0.00	0.00	0.00	196.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PB
746	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Rondol (RP/DAK)	Kabu Sinsoming, Galeng	KSOPTanjung Emas	Sukolilo	0	0	1	0	0	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PB
747	Rehabilitasi dan Replacement Fasilitas Pelabuhan Sinbang	Kab. Bonsalaoni, Sinbar, Sulilut	UPP Sinbang		0	0	0	1	0	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PB
748	Rehabilitasi dan Replacement Fasilitas Pelabuhan Pangumbo	Kab. Bonsalaoni, Sulilut	UPP Pangumbo		0	0	1	0	0	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PB
749	Lanjutan dan Pengelolaan/Rehabilitasi/Pelanna/Jaya Pelabuhan Aeng (RAB) (RP/DAK)	Kab. Galeng, Adoni	KSOP Pelabuhan	Sukolilo	1	1	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,922.21	3,922.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PB
750	Pelabuhan Sinbang	Kab. Donsoldi, Donsoldi	UPP Anggoli	Sukolilo	1	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PB
751	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Dan Pasir	Kab. Kepulauan Bernusuk, Sulilut	UPP Sialeor	Sukolilo	0	0	1	0	0	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PB
752	Pengembangan Pelabuhan Bulusan Pasar Segara (Major Project - MP10, MP12)	Kab. Bakalang, Bulusi	Dit. Kepelabuhanan	Sukolilo	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	PP
753	Pembangunan Area Pelabuhan Kiara	Kab. Kab. Pak, Pantai Barat	KSOP Pak-Pak	Sukolilo	0	1	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PB
754	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan	Kab. Jagoro, Jaleng	UPP Jagoro	Sukolilo	1	0	0	0	0	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PB
755	Pengembangan Pelabuhan Simsa (Major Project - MP10)	Kab. Galileng, Sulil	Dit. Kepelabuhanan	Sukolilo	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00	0.00	0.00	194.00	PB
756	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan	Kab. Maluku Tengah, Maluku	Kantor UPP Amahai		1	1	0	0	0	12.00	2.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PB
757	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Bisalo (RP/APBN) (Major Project - MP10)	Kab. Bisalo, Sulilut	Kantor UPP Bisalo	Sukolilo	0	0	1	1	0	0.00	0.00	22.72	22.72	0.00	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PB
758	Pengembangan Pelabuhan Pelabuhan Tanjung Batu Bunsilu (RP/DAK)	Kota Bolaoli, Kapel	KSOP Tanjung Batu Zaidman	Sukolilo	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PB
759	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Kalimalo/	Kab. Maluku Tengah, Maluku	Kantor UPP Bisalo	Sukolilo	0	0	0	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PB
760	Pembangunan Area Pelabuhan Hunimo	Kab. Bisino, Sulilut	UPP Sunia	Sukolilo	0	0	1	0	0	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PB

PB: Prioritas Nasional, PB: Prioritas Bidang; KL: Prioritas K/L; DK: Indikasi Non-Cipta Kegiatan Dukungan Manajemen / Penunjang Teknis; Opr: Indikasi Bidang Operasional; Kirb: Indikasi Kebutuhan di Luar RPJMN

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Perhubungan 2020-2024

NO	NAMA/JENIS FISIK/LOKASI / NAMA/JENIS PENGADAAN / NAMA/JENIS REHABILITASI / LOKASI / KODE LOKASI / KEWENANGAN	LOKASI	SATUAN	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2021										RPJMN APBN 2020-2024					PRIO
					2020	2021	2022	2023	2024	RINCIAN BIAYA (RB)						VOLP / OLP	VOLO	VOLS	TOTAL APBN	RPJMN	SUMBER	APBN	SWASTA	NON APBN	
										2020	2021	2022	2023	2024	RM										
761	Pengembangan Kualitas Pelabuhan Dad	Kab. Wakka Tenggara, Wakaka	UPP Pad		0	1	0	0	0	0,00	306,22	0,00	0,00	0,00	306,22	0,00	0,00	0,00	306,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DP
762	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut (KSTAR)	Kab. Aceh Besar Pulau Nias Wakaka	UPP Lhoel	Lhoel	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
763	Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Fasilitas Pelabuhan Pendam	Kab. Lampegan Jawa	UPP Bondong	Lhoel	0	0	1	1	0	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
764	Pembangunan Kolam Labuh dan Fasilitas Pelabuhan (Major Project : KSTAR)	Kab. Pangkal Pinang Utara, Wakaka	Dit. Kepelabuhanan	Lhoel	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,00	0,00	0,00	0,00	1.373,00	PK
765	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut (KSTAR)	Kab. Aceh Besar, NTT	UPP Bere	Lhoel	0	1	1	1	0	0,00	14,00	13,00	0,00	0,00	32,72	0,00	0,00	0,00	32,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
766	Lanjutan dan Pengembangan Pelabuhan Laut	Kota Kupang Lampung Lampung	KSOP Kelas Lhoel	Lhoel	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DK
767	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Ikan Angkut (KSTAR) (Major Project : KSTAR)	Kota Kupang, Kupang	Kantor Pelabuhan Wakaka	Lhoel	0	0	1	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	86,00	PK
768	Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan (Major Project : KSTAR)	Kab. Sangihe, Aceh	Dit. Kepelabuhanan	Lhoel	0	0	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
769	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Ikan (KSTAR)	Kota Kupang, NTT	UPP Kupang	Lhoel	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	90,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
770	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut (KSTAR)	Kab. Kupang, NTT	UPP Bolo	Lhoel	1	1	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
771	Lanjutan dan Pengembangan Pelabuhan Tanjung Laut (KSTAR)	Kab. Belitungan, Kalibore	UPP Pulau Dangar	Lhoel	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
772	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Wakaka (KSTAR)	Kab. Pulau Haru, Wakaka	UPP Wakaka	Lhoel	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
773	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Sabah	Kota Tidore Kepulauan, Wakaka Utara	UPP Soa Sio		0	1	0	1	0	0,00	61,00	153,00	12,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
774	Pengembangan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Wakaka (KSTAR)	Kab. Kendawa, Kalsel	KSOP Kendawa - Kendawa		1	0	0	0	0	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
775	Rehabilitasi dan Replacement Fasilitas Pelabuhan Bongga Sua	Kota Ternate, Wakaka Utara	KSOP Ternate		0	1	0	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DK
776	Rehabilitasi dan Replacement Fasilitas Pelabuhan Sesawia	Kab. Sumba Timur, NTT	UPP Waikabu		0	0	1	0	0	0,00	0,00	11,61	0,00	0,00	11,61	0,00	0,00	0,00	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DK
777	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan	Kab. Wawa Selatan,	UPP Pulau	Lhoel	1	0	0	0	0	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
778	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Sumenghang	Kab. Wawa, Sulsel	UPP Sumenghang		0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
779	Pengembangan Pelabuhan Tanjung Laut (Major Project : KSTAR)	Kota Kawasang, Jateng	Dit. Kepelabuhanan	Lhoel	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
780	Lanjutan dan Pengembangan Pelabuhan Pulau Mokor	Kab. Manggarai, NTT	UPP Ende	Lhoel	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
781	Rehabilitasi dan Replacement Fasilitas Pelabuhan Pawaka	Kab. Wawka, Papua	UPP Pomako (UPPomako 2)		1	1	0	0	0	111,00	111,72	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
782	Lanjutan dan Pengembangan Pelabuhan Bolonge	Kab. Mene, Selka	UPP Kolor	Lhoel	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
783	Pengembangan Pelabuhan Ikan di NTT	NTT	Dit. Kepelabuhanan	Lhoel	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	PK
784	Lanjutan dan Pengembangan Pelabuhan Kendo	Kab. Wakaka Barat Daya, Wakaka	UPP Kawali	Lhoel	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
785	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Tegal (KSTAR) (KSTAR)	Kab. Tegal, Jateng	KSOP Tegal	Lhoel	0	0	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	PK
786	Pengembangan Pelabuhan di Kabor (studi)	Kota Ambon, Maluku	Dit. Kepelabuhanan	Lhoel	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
787	Pengembangan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Tanah Ampo (KSTAR)	Kab. Karangasem, Bali	KSOP Padang Bai	Lhoel	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
788	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Kendawa	Kab. Kendawa, Jateng	UPP Kendawa	Lapangan	0	1	0	0	0	0,00	157,72	0,00	0,00	0,00	157,72	0,00	0,00	0,00	157,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
789	Lanjutan dan Pengembangan Pelabuhan Kendang	Kab. Kendang Timur, Kalsel	UPP Manggar	Lhoel	0	0	1	0	0	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
790	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan Jembatan Ampi (KSTAR)	Kab. Banggarai, NTT	UPP Labuhan Bajo	Lhoel	1	0	0	0	0	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
791	Rehabilitasi dan Replacement Fasilitas Pelabuhan Penamung	Kab. Lombok Barat, NTB	Kantor UPP Penamung		0	0	0	0	0	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KL
792	Rehabilitasi dan Replacement Fasilitas Pelabuhan Tawun	Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat	KSOP Perwira		0	1	0	0	0	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
793	Rehabilitasi dan Replacement Fasilitas Pelabuhan Pantai Indah (KSTAR) (Major Project : KSTAR)	Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	Dit. Kepelabuhanan	Lhoel	1	1	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,00	1.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
794	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Ambo (KSTAR)	Kab. Kepulauan Aru, Wakaka	UPP Ambo	Lhoel	0	0	1	1	1	0,00	0,00	45,00	45,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
795	Pengembangan Pelabuhan Dobay (Major Project : KSTAR)	Kota Dobay, Galela	Dit. Kepelabuhanan	Lhoel	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	PK
796	Pengembangan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Wakaka (KSTAR)	Kab. Bakala, Jateng	KSOP Tanjung Balai Karimun	Lhoel	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	38,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK
797	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan	Kab. Jayapura, Papua	UPP Sarmi	Lhoel	1	0	0	0	0	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PK

PK: Prioritas Nasional; PB: Prioritas Bidang; KL: Prioritas K/L; DK: Indikasi Non-Opx Kegiatan Dukungan Manajemen / Penunjang Teknis; Opx: Indikasi Belanja Operasional; Keb: Indikasi Kebutuhan di Luar RPJMN

Matriks Biaya dan Pendanaan Kementerian Perhubungan 2020-2024

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / KRO OUTPUT / INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	OUTPUT	TARGET					APBN 2020-2024										RON APBN 2020-2024						PRIO
					2020	2021	2022	2023	2024	RUPIAH MURNI (RM)						PNBP / BLU	BMN	PHLN	TOTAL APBN	APBN	BPMN	APBN	KRAKATA	RON APBN	
										2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH											
788	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Ambangambang (BY.1878)	Kab. Mamuju, Sulbar	UPP Belang-Belang	Sulbar	0	0	1	1	0	0,00	0,00	46,00	50,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3%
789	Pembangunan Baru Pelabuhan Cowa	Kab. Bulukumba, Sulbar	Kandar UPP Bira	Sulbar	0	0	0	1 (lanjutan)	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3%
810	Rehabilitasi dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Bisei (BY.1903)	Kot. Sorong (Kec. Jaya)	Dit. Kepelabuhanan		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3%
811	Lanjutan dan Pengembangan Pelabuhan Saonek, Soli	Kab. Raja Ampat (Kec. Waigeo Barat)	Dit. Kepelabuhan dan Pengerukan	Sulbar	0	1	1	0	0	0,00	441,50	450,00	0,00	0,00	1.891,50	0,00	0,00	0,00	1.891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3%
812	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Pasi	Kab. Kepulauan Tanimbar, Maluku	UPP Saumlaki		0	1	0	0	0	0,00	18,61	0,00	0,00	0,00	18,61	0,00	0,00	0,00	18,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3%
813	Pengelolaan Pendangkalan Fasilitas Pelabuhan Tg. Mumi (BY.1907)	Kota Tanjung Pinang, Kepri	BSDP Tanjung Pinang	Sulbar	0	0	1	1	1	0,00	0,00	35,00	36,00	40,00	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3%
814	Lanjutan dan Pengembangan Pelabuhan Bawai	Kab. Fak Fak, Papua Barat	BSDP Fak Fak	Sulbar	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3%
815	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan	Kab. Pulau Taliabu, Maluku	UPP Bobong	Sulbar	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3%
816	Pembangunan Baru Pelabuhan Liwa	Kota Bandar Lampung, Lampung	BSDP Bakauheni	Sulbar	0	0	1	0	0	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3%
817	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan	Kab. Fak Fak, Papua Barat	UPP Kokas	Sulbar	1	0	0	0	0	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3%
818	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Tilamuta	Kab. Boalemo, Gorontalo	UPP Tilamuta	Sulbar	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3%
819	Rehabilitasi dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Amahai	Kab. Maluku Tengah, Maluku	Cabang UPP Amahai		0	1	0	0	0	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3%
820	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Saumlaki	Kab. Kepulauan Tanimbar, Maluku	UPP Saumlaki		0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3%
821	Lanjutan dan Pengelolaan Pelabuhan Dobo Kolser	Kab. Kepulauan Aru, Maluku (Aru)	Kandar UPP Babang	Sulbar	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3%
822	Pembangunan Baru Pelabuhan Kaptiran	Kab. Mimika, Papua	UPP Timika (Cabang Pomako)	Sulbar	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3%
823	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan	Kab. Seram Bagian Barat, Maluku	UPP Piru		1	1	0	0	0	0,00	61,61	0,00	0,00	0,00	61,61	0,00	0,00	0,00	61,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3%
824	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Kaimana (BY.1909)	Kab. Fak Fak, Papua Barat	UPP Kaimana	Sulbar	1	1	0	0	0	0,00	74,28	0,00	0,00	0,00	74,28	0,00	88,00	0,00	78,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3%
825	Pengembangan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Fungaitambun	Kab. Cilacap, Jateng	UPP Fungaitambun	Sulbar	0	0	1	0	0	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3%
826	Pembangunan Baru Pelabuhan Wagog	Kota Jayapura, Papua	UPP Wonin	Sulbar	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3%
827	Pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak (Major Project - MP.03)	Kota Surabaya, Jatim	Dit. Kepelabuhanan	Sulbar	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3%
828	Pembangunan Baru Pelabuhan Wonor	Kab. Kaimana, Papua Barat	Kandar UPP Lagoda	Sulbar	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3%
829	Pembangunan Baru Pelabuhan Pasar Baru	Kab. Merauke, Papua	UPP Bupul	Sulbar	0	0	1	0	0	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3%
830	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Lobar	Kab. Halmahera Selatan, Maluku Utara	UPP Labuha	Sulbar	0	1	0	0	0	0,00	16,72	0,00	0,00	0,00	16,72	0,00	0,00	0,00	16,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3%
831	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Kolaka	Kab. Kolaka, Sultra	UPP Kolaka		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3%
832	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Ipuh	Kab. Kaur, Bengkulu	BSDP Enggano		0	1	0	0	0	0,00	18,13	0,00	0,00	0,00	18,13	0,00	0,00	0,00	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3%
833	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Jayapura (BY.1910)	Kab. Jayapura, Papua	KSOP Jayapura		0 (lanjutan)	0 (lanjutan)	0 (lanjutan)	1 (lanjutan)	0 (lanjutan)	0,00	0,00	0,00	46,23	0,00	46,23	0,00	0,00	0,00	46,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3%
834	Lanjutan dan Pengelolaan Pelabuhan Malra	Kab. Kaimana, Papua Barat	Kandar UPP Lagoda	Sulbar	0	0	1	0	0	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3%
835	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Merauke	Kab. Mus Mara, Sentul	UPP Merauke		0	0	1	0	0	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3%
836	Rehabilitasi dan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Bitung	Kab. Pandeglang, Jateng	UPP Merauke		0	1	1	0	0	0,00	211,00	100,00	0,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3%
837	Rehabilitasi dan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Makassar Anggrek	Kota Tangerang, Banten	UPP Belakang Anggrek		0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	346,74	346,74	0,00	0,00	0,00	346,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3%
838	Pembangunan Baru Pelabuhan Bitti (BY.1911)	Kab. Jayapura, Papua	UPP Sagu	Sulbar	0	0	1	0	0	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3%
839	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Sekotu (BY.1912)	Kab. Kaimana, Papua Barat	BSDP Amahusu Saleakano	Sulbar	0 (lanjutan)	0 (lanjutan)	1 (lanjutan)	0	0	0,00	0,00	24,14	0,00	0,00	24,14	0,00	0,00	0,00	24,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3%
840	Rehabilitasi/Revitalisasi/Fasilitas Pelabuhan Wasior (BY.1913)	Kab. Manokwari, Papua Barat	UPP Wasior	Sulbar	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3%
841	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan	Kab. Halmahera Timur, Maluku Utara	UPP Dobi		0	0	0	0	0	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3%
842	Pembangunan Baru Pelabuhan Bobtera	Kab. Sorong, Sulbar	UPP Sorong	Sulbar	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3%
843	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan	Kab. Kepulauan Sangihe, Sulbar	UPP Sangihe	Sulbar	1	0	0	0	0	11,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73	0,00	0,00	0,00	11,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3%
844	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Merauke (BY.1915)	Kab. Merauke, Papua	KSOP Merauke	Sulbar	0	0	1	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	45,00	3%

PN: Prioritas Nasional; PB: Prioritas Bidang; KL: Prioritas K/L; DAK Indikasi Non-Cipta Kegiatan Dukungan Manajemen / Penunjang Teknis; Cipta: Indikasi Belanja Operasional; Keh: Indikasi Kehutuhan di Luar BP/BR

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / KRO OUTPUT / OUTCOME	LOKASI	SATUAN	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024										RIH APBN 2020-2022						PRIO
					2020	2021	2022	2023	2024	BIAYA INTERVENSI (RM)						TOTAL / JUMLAH	RAHMAT	PHILIP	TOTAL APBN							
										2020	2021	2022	2023	2024	RM											
232	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Ambuli Ara (BP/MN)	Kab. Manggarai, NTT	UPP Ara	Jakarat	1	0	0	0	0	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PM
233	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Waijara	Kab. Sabang, NTT	UPP Waijara		0	1	0	0	0	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B1
237	Pembangunan Area Pelabuhan Nabiangan	Kab. Mahuja, Maluku	UPP Nabiangan	Jakarat	0	1	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B2
238	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Lamakera (BP/MN)	Kab. Flores Timur, NTT	UPP Lamakera	Jakarat	0	0	1	1	1	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PM
239	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Comodi Ombai	Kota Padang, Sumbar	KSOP Teluk Bayur		0	0	0	0	0	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B2
240	Rehabilitasi dan Replacement Fasilitas Pelabuhan Tanjung Kras	Kab. Sidrap, Sulsel	KSOP Tanjung Pandan		1	1	0	0	0	122,51	178,34	0,00	0,00	0,00	301,87	0,00	0,00	0,00	301,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B2
241	Pembangunan Area Tanjung Eka (BP/MN)	Kab. Jeneponto, Sulsel	KSOP Bitoneli	Jakarat	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PM
243	Rehabilitasi dan Replacement Fasilitas Pelabuhan Adonara	Kab. Kabupaten Tangerk, Maluku Utara	Adonara UPP Waiba		0	1	0	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PM
244	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Ciawa (BP/MN)	Kab. Garut, Kepulauan Riau, Maluku	UPP Ciawa	Jakarat	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	33,00	11,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PM
246	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan	Kab. Pak Pak, Papua Barat	UPP Kamaasan	Jakarat	0	1	0	0	0	0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PM
247	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Wonaji (BP/MN)	Kab. Tulang Bawang Lampung	UPP Wonaji	Jakarat	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PM
249	Pembangunan Area Pelabuhan Pulau Moa	Kab. Maspi, Papua	UPP Moa	Jakarat	0	0	1	0	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PM
247	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan	Kab. Kepulauan Aru, Maluku	UPP Dobo		1	0	0	0	0	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PM
248	Pembangunan Area Pelabuhan Bengin	Kab. Banggai Kepulauan, Sulteng	UPP Banggai	Jakarat	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PM
251	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Bobdo	Kab. Bobdo, Sulbar	UPP Bobdo	Jakarta	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PM
252	Rehabilitasi dan Replacement Fasilitas Pelabuhan Kalabahan	Kab. Talaud, Sulut	UPP Tahuna Baru		0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PM
253	Pembangunan Area Pelabuhan Namrunan	Kab. Merauke, Papua	UPP Bade	Jakarat	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PM
254	Rehabilitasi dan Replacement Fasilitas Pelabuhan Anggadi (BP/MN)	Kab. Karawang, Jabar	Cbl. Kepulauhseribu		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PM
255	Lanjutan dan Pengembalian Pelabuhan Pulau Moa	Kab. Maspi, Papua	UPP Bade	Jakarat	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PM
256	Pembangunan Area Pelabuhan Satu Ungang	Kab. Kepulauan Aru, Maluku	UPP Dobo	Jakarat	0	0	1	0	0	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PM
257	Pengembangan Pelabuhan Saleo (Major Project - BPYG)	Kota Tanjungpinang, Kepri	Cbl. Kepulauhseribu	Jakarat	0	1	1	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PM
258	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan	Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara	UPP Soa-Sio	Jakarat	1	0	0	0	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PM
257	Pengembangan Pelabuhan Kalog (Major Project - BPYG)	Kab. Mangarai, Sulbar	Cbl. Kepulauhseribu	Jakarat	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	PM
259	Pembangunan Area Pelabuhan Sampalomo	Kab. Buton Selatan, Sulteng	UPP Bau - Bau	Jakarat	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PM
260	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan	Kab. Maluku Tengah, Maluku	Ambon UPP Waiti		1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,12	0,00	0,00	22,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PM
265	Lanjutan dan Pengembalian Pelabuhan Dofial	Kab. Maluku Tenggara, Maluku	UPP Tual	Jakarat	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PM
267	Lanjutan dan Pengembalian Pelabuhan Baba Ungang	Kab. Kepulauan Aru, Maluku	UPP Dobo	Jakarat	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PM
261	Lanjutan dan Pengembalian Pelabuhan Bagan ungungan	Kab. Kuhan Hilir, Riau	KSOP Bagan Angin Apit	Jakarat	0	1	0	0	0	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PM
263	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan	Kab. Halmahera Selatan, Maluku Utara	UPP Labuha	Jakarat	1	0	0	0	0	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PM
264	Pembangunan Area Pelabuhan Bere	Kab. Manggarai, NTT	UPP Ende	Jakarat	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PM
262	Rehabilitasi dan Replacement Fasilitas Pelabuhan Tilas Pasir	Kab. Pulau Buton, Sulteng	Kantor UPP Tilas Pasir		0	1	1	0	0	0,00	177,00	100,00	0,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PM
265	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Saumlaki (BP/MN)	Kab. Kepulauan Tanimbar, Maluku	UPP Saumlaki	Jakarat	0	1	1	0	0	0,00	42,00	24,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PM
267	Lanjutan dan Pengembalian Pelabuhan Tidak Nambi	Kab. Bintan, Kepri	KSOP Batang	Jakarat	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	83,00	100,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PM
262	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Rambu	Kab. Pulau Buru, Maluku	UPP Namlea		0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	117,72	0,00	117,72	0,00	0,00	0,00	117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PM
263	Rehabilitasi dan Replacement Fasilitas Pelabuhan Wahruh	Kab. Seram Timur, NTT	UPP Wahruh		0	0	1	0	0	0,00	0,00	48,72	0,00	0,00	48,72	0,00	0,00	0,00	48,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PM
277	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Lingung (BP/MN) (Major Project - BPYG)	Kab. Manokwari, Papua Barat	UPP Lingung	Jakarat	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PM

PM: Prioritas Nasional; PB: Prioritas Bidang; RL: Prioritas R/L; DK: Indikasi Non-Ops Kegiatan Dukungan Manajemen / Penunjang Teknis; Ops: Indikasi Belanja Operasional; Bdk: Indikasi Bahasakan di Luar BP/MN

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / KOMPONEN / SUBKOMPONEN	LOKASI	SATUAN	KATEGORI	TARGET					APBN 2020-2024										RKAB 2020-2024					PRIORITAS
					2020	2021	2022	2023	2024	VOLUME MODEL (KM)						VOLUME / KLOT	HARGA	PAGU	TOTAL APBN						
										2020	2021	2022	2023	2024	dst.										
871	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Simpul	Kab. Bolaang Mongg.	UPP Bolmong	Regional	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	27,93	27,93	0,00	0,00	0,00	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
872	Rehabilitasi dan Replacement Fasilitas Pelabuhan Manninjau	Kab. Bone, Sultra	UPP Bau - Bau		0	1	0	0	0	0,00	71,22	0,00	0,00	0,00	71,22	0,00	0,00	0,00	71,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
873	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Fakfak	Kab. Maluku Tengah, Maluku	UPP Fakfak		0	1	0	0	0	0,00	88,72	0,00	0,00	0,00	88,72	0,00	0,00	0,00	88,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
874	Rehabilitasi dan Replacement Fasilitas Pelabuhan Sabu Rotegadi	Kab. Kab. Ngada, Kab.	UPP Ngada		0	1	0	1	0	0,00	44,18	0,00	0,00	0,00	44,18	0,00	0,00	0,00	44,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
875	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Simpul	Kab. Kepulauan Mentawai, Sumbar	UPP Maeru Sibolga	Regional	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	212,00	212,00	424,00	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
876	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Baik	Kab. Maluku Tengah, Maluku	Kantor UPP Saka		0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60	37,60	0,00	0,00	0,00	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
877	Lanjutan dan Pengembangan Pelabuhan Sasamanten	Kab. Aceh, Aceh	UPP Calang	Sabang	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
878	Pembangunan Baru Pelabuhan Wonosari	Kab. Merauke, Papua	ESDP Merauke	Sabang	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
879	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Antrokpos (Multi Purpose) - MYC	Kab. Mukawatir, Sultra	Dermaga UPP Wanci	Sabang	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
880	Rehabilitasi dan Replacement Fasilitas Pelabuhan Sabu	Kab. Pangkajene Kepulauan, Sulsel	Kantor UPP Mamuju (Ag)		0	0	1	0	0	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
881	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Nabire	Kab. Nabire, Papua	UPP Nabire	Regional	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67	82,67	0,00	0,00	0,00	82,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
882	Rehabilitasi dan Replacement Fasilitas Pelabuhan Lobaha	Kab. Konawe, NTB	UPP Labuhan		0	0	1	1	1	61,91	0,00	64,88	132,00	127,92	386,71	0,00	0,00	0,00	386,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
883	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Tidung Ilire	Kab. Pemalang, Jateng	UPP Tidung Ilire		0	1	0	0	0	0,00	0,00	78,52	0,00	0,00	78,52	0,00	0,00	0,00	78,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
884	Pembangunan Baru Pelabuhan Kuang	Kab. Bulukumba, Sulsel	UPP Bulu Kumba	Sabang	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	362,72	362,72	0,00	0,00	0,00	362,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
885	Lanjutan dan Pengembangan Pelabuhan Lasusua	Kab. Konawe Selatan	UPP Lasusua	Sabang	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
886	Pengembangan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Bakauheni	Kota Bitung, Sulut	ESDP Tanjung Batu Kalimantan	Regional	0	0	1	0	0	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
887	Pengembangan Pelabuhan Sagund (Major Project - MYC)	Kab. Gorontalo Utara, Gorontalo	Dit. Kepelabuhanan	Sabang	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,17	0,00	0,00	0,00	228,17	PB
888	Lanjutan dan Pengembangan Pelabuhan Wasior	Kota Jayapura, Papua	UPP Wasior	Sabang	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08	91,08	0,00	0,00	0,00	91,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
889	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Tanjung Intan (BYLWN)	Kab. Cilacap, Jateng	UPP Pulau Cilacap	Sabang	0	0	1	0	0	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
890	Rehabilitasi dan Replacement Fasilitas Pelabuhan Lewa Sungai	Kab. Bone, Sultra	UPP Bau - Bau		0	1	0	0	0	0,00	71,22	0,00	0,00	0,00	71,22	0,00	0,00	0,00	71,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
891	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan	Kab. Biak Selatan, Biakdis	Kantor UPP Biakmalo	Sabang	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
892	Pembangunan Baru Pelabuhan Sanur Bali	Kota Denpasar, Bali	Dit. Pelabuhan dan Kepelautan	Sabang	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
893	Pembangunan Baru Satu Atap (SATAP)	Kab. Halmahera Selatan, Maluku Utara	Kantor UPP Sidangoli	Sabang	0	0	1	1	0	0,00	0,00	26,00	30,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
894	Lanjutan dan Pengembangan Pelabuhan Sukun	Kab. Sikka, NTT	ESDP Laworaba Sag	Sabang	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
895	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Fungsi (MYC/PP)	Kab. Merauke, Papua	UPP Fungsi Difungsi II	Sabang	0	0	1	1	1	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
896	Lanjutan dan Pengembangan Pelabuhan Bili (BYLWN)	Kab. Jeneponto, NTB	UPP Bajo	Sabang	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
897	Pembangunan Baru Pelabuhan Lobar	Kab. Tgh Utara (Ntb), Sulteng	UPP Sagarra	Sabang	1	0	0	0	0	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
898	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan	Kab. Kepulauan Sangihe, Sulut	UPP Tahuna	Sabang	1 satuan	0 -	0 -	0 -	0	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11,34	0,00	0,00	0,00	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
899	Pengembangan Pelabuhan Sorong (Major Project - MYC) - MYC	Kota Sorong, Papua Barat	Dit. Kepelabuhanan	Sabang	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	PB
900	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan	Kab. Maluku Tenggara, Maluku	UPP Tual		1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
901	Pembangunan Baru Pelabuhan Kawasan	Kab. Sumba Timur, NTT	ESDP Waingapu	Sabang	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
902	Pengembangan Pelabuhan Ferry di Ambon	Kota Ambon, Maluku	Dit. Kepelabuhanan	Sabang	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	PB
903	Lanjutan dan Pengembangan Pelabuhan Bts	Kab. Kupang, NTT	UPP Bolo	Sabang	0	1	0	0	0	0,00	111,37	0,00	0,00	0,00	111,37	0,00	0,00	0,00	111,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
904	Rehabilitasi dan Replacement Fasilitas Pelabuhan Gisela	Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara	UPP Soa-Sio		1	0	0	0	0	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30	1,00	0,00	0,00	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
905	Lanjutan dan Pengembangan Pelabuhan Wasior	Kab. Merauke, Papua	ESDP Merauke	Sabang	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
906	Rehabilitasi dan Replacement Fasilitas Pelabuhan Tanjung Batu	Kab. Bengkalis, Riau	ESDP Tanjung Batu		0	1	0	0	0	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB
907	Lanjutan dan Pengembangan Pelabuhan Bumiharjo	Kab. Jeneponto, Sulsel	UPP Bajo	Sabang	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PB

PB: Prioritas Nasional; PB: Prioritas Bidang; PL: Prioritas (L); IM: Indikasi Non-Ops Kegiatan Dukungan Manajemen / Penunjang Teknis; Ops: Indikasi Belanja Operasional; Ket: Indikasi Kebutuhan di Luar RPJMN

No	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	INDIKATOR	SATUAN	BATTER	TARGET					KINERJA 2020-2024																	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH	RATA-RATA	MINIMUM	MAKSIMUM	TOTAL KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	RATA-RATA	

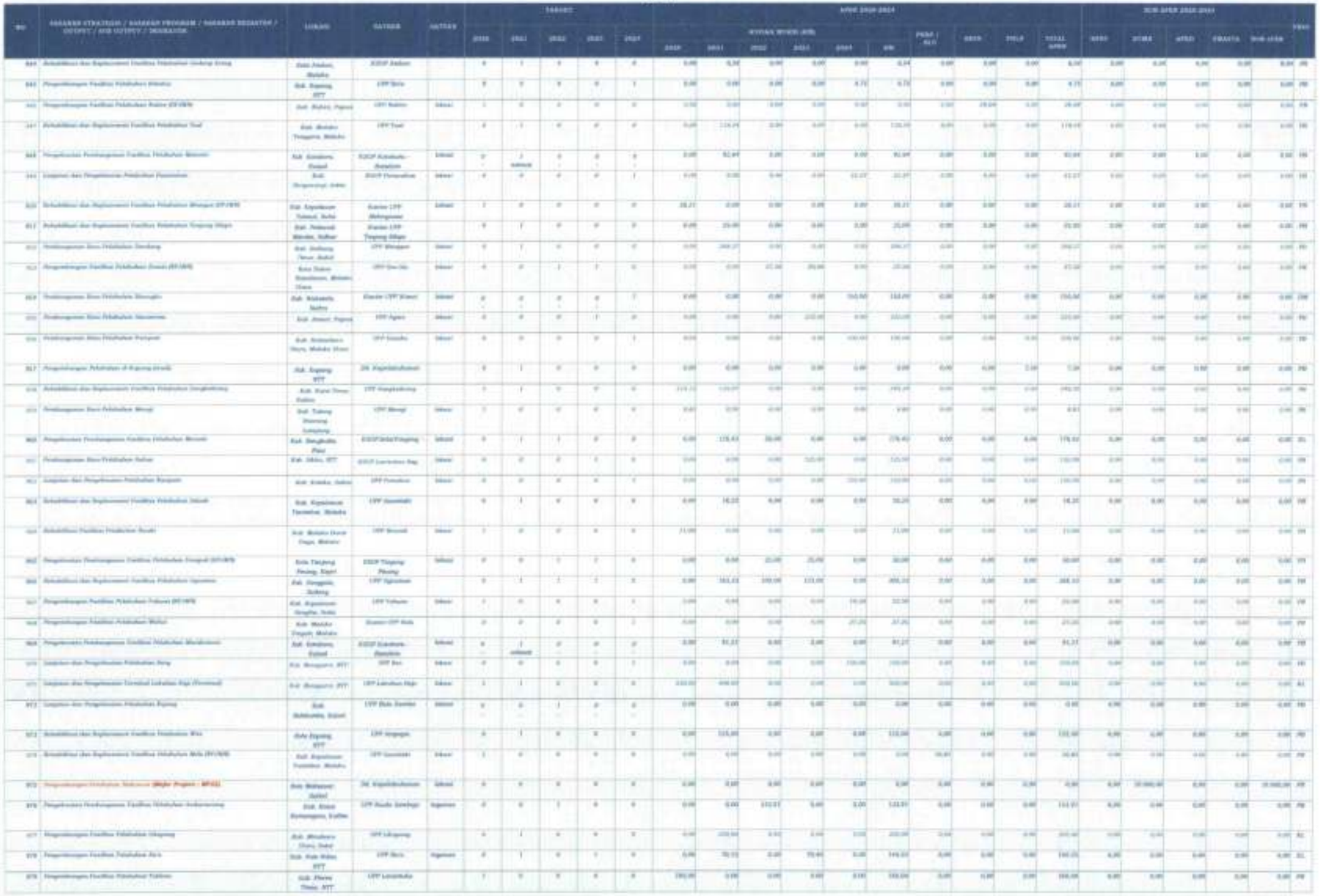

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / SUBJECT / KEY OUTPUT / INDICATOR	SUMBER	SATUAN	TARGET					APBN 2022-2024										REALISASI APBN 2020-2022						PRIO
				2020	2021	2022	2023	2024	RUPIAH MURNI (RM)						PNBP / BLU	RAHMI	PHLN	TOTAL APBN	APBN	RPHMI	APBN	PHLN/LTA	RUH APBN	
									2020	2021	2022	2023	2024	RM											
001	Pembangunan Fasilitas Kebahasaan	Kab. Manokwari, Papua Barat	UPP Distrik	lokasi	1	0	0	0	0	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	24,78	0,00	0,00	0,00	49,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PR
002	Pengembangan Fasilitas Kebahasaan Pelindungan Pengembaraan	Deli Serdang, Sumut	UPP Pengembaraan	lokasi	0	1	0	0	0	0,00	22,36	0,00	0,00	0,00	22,36	0,00	0,00	0,00	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PR
003	Pembangunan Area Kebahasaan Indah	Kab. Manokwari, Papua	UPP Ahuk	lokasi	0	0	1	0	0	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PR
004	Rehabilitasi dan Replacement Fasilitas Kebahasaan Rusak	Kab. Bone, Sulsel	UPP Eks - Eks		0	1	0	0	0	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PR
005	Pengembangan Fasilitas Kebahasaan Mentor	Kab. Kepulauan Anambas, Kepri	UPP Daerah		1	1	0	0	0	108,88	47,34	0,00	0,00	0,00	156,22	0,00	0,00	0,00	312,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PL
006	Pembangunan Area Kebahasaan Pulau Bintan	Kab. Bintangan, Kalteng	UPP Pulau Bintan	lokasi	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	22,44	0,00	22,44	0,00	0,00	0,00	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PR
007	Lanjutan dan Pengembangan Kebahasaan Bhinneka (BY/SBT)	Kab. Sangata Kepulauan, Sulteng	UPP Sangata	lokasi	1	0	0	0	0	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PR
008	Lanjutan dan Pengembangan Kebahasaan Indah	Kab. Manokwari, Papua	UPP Ahuk	lokasi	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PR
009	Pembangunan Area Kebahasaan Tegarsayan	Kab. Sumenep, Jatim	UPP Saptosari	lokasi	0	0	1	0	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PR
010	Pengembangan Fasilitas Kebahasaan Ekonomis (BY/SBT) (FLUSE)	Aceh Barat/Nagan Raya, Aceh	BSKP Meulaboh	lokasi	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	PR
011	Lanjutan dan Pengembangan Kebahasaan Mini (BY/SBT)	Kab. Magelang, Jateng	UPP Ahuk	lokasi	1	0	0	0	0	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PR
012	Lanjutan dan Pengembangan Fasilitas Mini (BY/APB)	Kab. Sangkar, Sulsel	BSKP Maumit	lokasi	0	1	1	0	0	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PR
013	Rehabilitasi dan Replacement Fasilitas Kebahasaan Mini	Kab. Mataka Asmat, Papua, Maluku	UPP Maumit		0	0	1	0	0	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PR
014	Pembangunan Area Kebahasaan Asmat	Kab. Mataka, Dalam Depot, Maluku	UPP Maumit	lokasi	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PR
015	Rehabilitasi Fasilitas Kebahasaan	Kab. Halmahera Tengah, Maluku Utara	Kantor UPP Weda		1	0	0	0	0	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PR
016	Rehabilitasi dan Replacement Fasilitas Kebahasaan Rusak Lainnya	Kab. Sidrap, Sulsel	UPP Rusak Lainnya		0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PL
017	Rehabilitasi dan Replacement Fasilitas Kebahasaan Gedung	Kab. Halmahera Tengah, Maluku Utara	UPP Jailolo		0	1	0	0	0	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PR
018	Pengembangan Fasilitas Kebahasaan Bidang (BY/SBT)	Kab. Kaimana, Papua Barat	UPP Pusat Kaimana	lokasi	0	0	1	1	0	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PR
019	Pengembangan Fasilitas Kebahasaan Indonesia (BY/SBT)	Kab. Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur	Pusat UPP Kupang	lokasi	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PR
020	Pengembangan Kebahasaan Tanjung Apiapi	Kab. Banyuasin, Sumsel	UPT Kepahlawanan	lokasi	0	0	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	PR
021	Rehabilitasi dan Replacement Fasilitas Kebahasaan Sagusu	Kab. Fak-Fak, Papua Barat	UPP Sagusu		0	1	0	0	0	0,00	72,16	0,00	0,00	0,00	72,16	0,00	0,00	0,00	72,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PR
022	Pengembangan Pendukung Fasilitas Kebahasaan Bersama (BY/APB)	Kab. Bengkulu, Bengkulu	BSKP Hulu Sungai	lokasi	1	0	0	0	0	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PR
023	Lanjutan dan Pengembangan Kebahasaan Sagusu	Deli Serdang, Sumut	UPP Bagelen	lokasi	0	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PR
024	Pembangunan Fasilitas Kebahasaan	Kab. Manokwari, Papua	UPP Pulau Biru	lokasi	1	0	0	0	0	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PR
025	Pembangunan Area Kebahasaan Tidak Sesuai (BY/SBT)	Kab. Jember, Jatim	BSKP Bulog	lokasi	0	0	1	1	0	0,00	0,00	22,00	27,48	0,00	49,48	0,00	0,00	0,00	49,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PR
026	Rehabilitasi dan Replacement Fasilitas Kebahasaan Ayam	Kab. Jember, Jatim	UPP Ayam		0	0	1	0	0	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PR
027	Pengembangan Fasilitas Kebahasaan Fak Sak	Kab. Sak Fak, Papua Barat	BSKP Fak-Fak		0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16	72,16	0,00	0,00	0,00	72,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KB
028	Pengembangan Fasilitas Kebahasaan Fokus (BY/SBT)	Kab. Halmahera Utara, Maluku Utara	UPP Fokus	lokasi	0	1	1	1	0	0,00	11,17	33,00	33,83	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PR
029	Pengembangan Kedikan Kebahasaan Kendaraan	Kab. Manokwari, Papua	UPP Bulago Biru		0	1	0	0	0	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PR
030	Rehabilitasi dan Replacement Fasilitas Kebahasaan Lainnya	Kab. Lainnya, NTT	Kantor UPP Lainnya		0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PR
031	Pengembangan Fasilitas Kebahasaan Lainnya Dan	Kab. Manggarai, NTT	UPP Lainnya Dan		0	1	0	0	0	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KL
JEX	**Persentase Pencapaian Target Kegiatan Pengerukan**			**%**	**0**	**87,5**	**87,5**	**81,67**	**83,75**	**0,00**	**88,88**	**197,97**	**130,13**	**148,47**	**972,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**972,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
032	Nilai pengerukan alur pelayaran (Lokasi BY/SBT)	Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	DK Kepelabuhanan	lokasi	0	0	0	0	0	0,00	86,88	197,97	130,13	148,47	572,45	0,00	0,00	0,00	572,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PR
IKK	**Persentase Pencapaian Target Pengadaan Alat Bongkar Muat**			**%**	**0**	**37,5**	**66,66**	**75,17**	**100**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**97,00**	**352,34**	**644,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**644,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	
033	Pengadaan pendukung bongkar muat	DKI Jakarta	DK Kepelabuhanan	lokasi	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	PR

PR: Prioritas Nasional; PB: Prioritas Bidang; KL: Prioritas K/L; DK: Indikasi Non-Ops Kegiatan Dukungan Manajemen / Penunjang Teknis; Ops: Indikasi Belanja Operasional; Keb: Indikasi Kebutuhan di Luar RKAKL

Rencana Kinerja dan Pendanaan Kementerian Perhubungan 2020-2024

Lanjut...

PN: Prioritas Nasional; PB: Prioritas Bidang; KL: Prioritas K/L; IKK: Indikasi Kin-Ops Kegiatan Dukungan Manajemen / Penunjang Teknis; Ops: Indikasi Belanja Operasional; Bth: Indikasi Kebutuhan di Luar BTUMN
Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Perhubungan 2020-2024

No	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Output / Sub Output / Indikator	Lokasi	Satker	Satuan	Target					Alokasi Tahun 2021										Realisasi Tahun 2021					Prio.
					2020	2021	2022	2023	2024	Rincian Biaya (RB)						Pinjaman / Hibah	Rahmat	Pusat	Total Alokasi						
										2021	2022	2023	2024	2025	Dst					2021	2022	2023	2024	2025	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

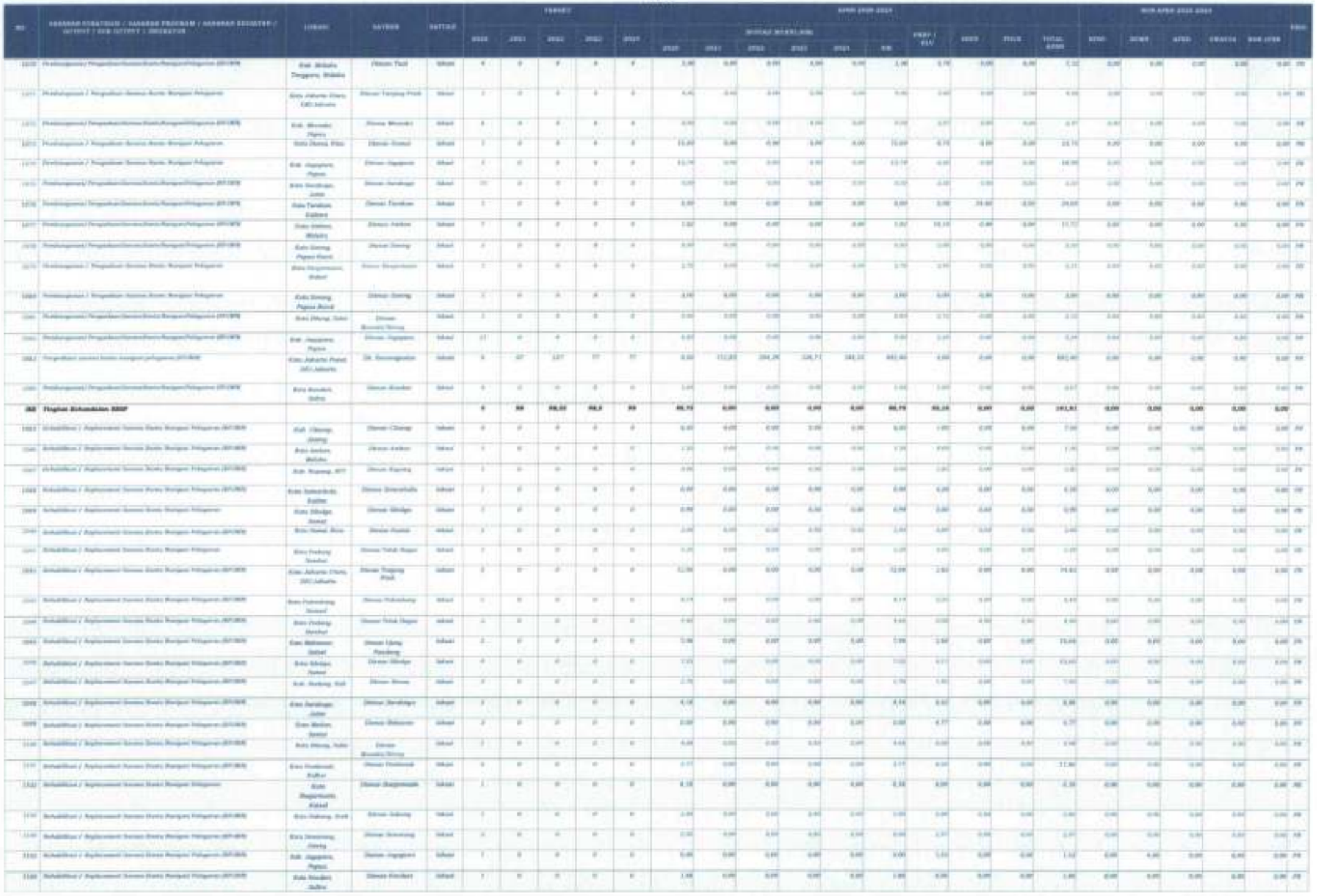

No	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / INDIKATOR	LOKASI	SATKER	SATKER	TARGET					REALISASI KINERJA (IKK)										REALISASI ANGGARAN					
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	RW	PAGU / BLUD	REVISI	PAGU R	TOTAL REVISI	REVISI	REVISI	APBN	PNBP/BLU	RKM APBN	
1107	Rehabilitasi / Replacement Sarana Radio Komposi Polisional (RSKNP)	Kota Bogor/Kantor Kabel	Dinas Bagiannya	Mikel	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1108	Rehabilitasi / Replacement Sarana Radio Komposi Polisional	Kota Pulomerang Kabel	Dinas Pulomerang	Mikel	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
XX	**Tingkat Keselesaian VTR**				**3**	**99**	**97**	**98,99**	**99**	**0,00**	**393,89**	**94,21**	**49,42**	**99,19**	**632,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**632,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1109	Pengadaan Kotak Traffic Sensors Terintegrasi (KOTAMS)	Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	DK Bawahgubernur	Mikel	1	11	12	7	7	0,00	393,89	94,21	49,42	99,19	632,50	0,00	0,00	0,00	632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
XX	**Tingkat Ketersediaan VTR**				**0**	**97**	**97,9**	**98**	**99**	**0,00**	**389,18**	**967,90**	**980,68**	**710,71**	**2.921,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.921,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1110	Pengembangan CCTV, SKRP, Traffic Light Area Kualitas Jaringan (KKR Bidang Bawahgubernur)	Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	DK Bawahgubernur		0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1111	Pembangunan CMEVK dan Pengembangan CMEVK	Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	DK Bawahgubernur	Mikel	0	99	99	99	99	0,00	477,42	967,90	980,68	982,77	3.408,78	0,00	0,00	0,00	3.408,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1112	Pengembangan CMEVK, CCTV dan SKRP/ATCS Polisional Bawahgubernur	Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	DK Bawahgubernur		0	1	0	0	0	0,00	277,77	0,00	0,00	0,00	277,77	0,00	0,00	0,00	277,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
XX	**Tingkat Ketelitian Kapal Negara Ketersediaan**				**0**	**99,42**	**72,33**	**77,28**	**82,33**	**15,17**	**10,11**	**98,34**	**390,94**	**474,63**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1113	Pengadaan Kapal Navigasi (KN Hal)	Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	DK Bawahgubernur	unit	2	4	7	11	15	10,17	10,11	98,34	390,94	474,63	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
XX	**Tingkat Ketelitian Kapal Patroli**				**0**	**99,97**	**99,94**	**91,19**	**99,97**	**999,79**	**1.894,20**	**3.492,83**	**3.290,83**	**2.982,29**	**13.110,72**	**899,99**	**0,00**	**0,00**	**13.100,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1114	Pembangunan Kapal Patroli Kelas I	Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	DK Kesekretaris Pengawas Laut dan Pantai	unit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	492,00	1.410,00	480,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1115	Pembangunan Kapal Patroli Kelas V Alumunium	Kab. Lawu, Sulsel	UPP Pelabu	unit	1	0	0	0	0	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	24,72	0,00	0,00	0,00	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1116	Pembangunan Kapal Patroli Kelas IV Alumunium	Kab. Pelabuhan Jaya	BSKP Pelabuhan	unit	1	0	0	0	0	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1117	Pembangunan Kapal Patroli Kelas V Alumunium	Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	DK Kesekretaris Pengawas Laut dan Pantai	unit	0	11	11	11	11	198,00	271,00	271,00	271,00	271,00	1.812,00	99,00	0,00	0,00	1.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1118	Pembangunan Kapal Patroli Kelas IV Alumunium	Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	DK Kesekretaris Pengawas Laut dan Pantai	unit	0	0	0	0	0	23,00	171,00	171,00	171,00	171,00	1.141,00	100,00	0,00	0,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1119	Pembangunan Kapal Pengangkut Personil/Kendaraan/Barang Kelas Pendapat Laut dan Pantai	Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	DK Kesekretaris Pengawas Laut dan Pantai		0	0	0	0	0	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1120	Pembangunan Kapal Patroli Kelas II	Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	DK Kesekretaris Pengawas Laut dan Pantai	unit	0	0	0	0	1	0,00	132,00	777,00	333,00	777,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1121	Pembangunan Kapal Patroli Kelas III	Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	DK Kesekretaris Pengawas Laut dan Pantai	unit	0	0	0	0	0	110,72	168,00	960,00	144,00	160,00	1.122,72	0,00	0,00	0,00	1.122,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1122	Pembangunan Kapal Patroli Kelas Utama	Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	DK Kesekretaris Pengawas Laut dan Pantai	unit	0	0	0	0	1	0,00	0,00	200,00	300,00	280,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1123	Pembangunan Kapal Patroli Kelas V Alumunium	Kab. Bunggu, Gelung	UPP Dumi	unit	0	0	0	0	0	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	24,72	0,00	0,00	0,00	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
XX	**Persentase Pemeliharaan Sertifikat Kualitas dan Keterampilan Serta Sekolah Kepelautan Lainnya**				**0**	**99**	**99**	**99**	**99**	**0,00**	**191,00**	**223,00**	**212,11**	**242,99**	**1.091,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.091,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1124	Pengadaan/Peningkatan/Pembangunan/Rehabilitasi/Lainnya/Kelas Polisi Air Laut	Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	DK Perlengkapan dan Kapalnya		0	11	0	0	11	0,00	111,00	80,47	80,30	72,07	343,41	0,00	0,00	0,00	343,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1125	Pengadaan/Peningkatan/Pembangunan/Rehabilitasi/Lainnya/Kelas Fire Boat	Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	DK Perlengkapan dan Kapalnya		0	44	10	10	10	0,00	80,00	60,00	12,00	70,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1126	Pengadaan Perlengkapan Pengembangan Sistem Informasi Geografis & Identitas Statistik	Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	DK Perlengkapan dan Kapalnya		0	0	0	0	0	0,00	110,47	67,83	52,30	99,10	327,70	0,00	0,00	0,00	327,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
XX	**Tingkat Pemenuhan MRPE Transportasi Laut**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20,00**	**412,94**	**414,12**	**419,81**	**1.016,88**	**20,00**										
1127	Pembangunan Sarana Pengembangan Pengembangan (SPCN) dan SKRP untuk Kecil Pengangkut Jalur dan Prasarana Laut/Lintas Angkut di Alumunium	Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	DK Bawahgubernur	Mikel	0	1	0	0	0	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00									
1128	Sarana Pengangkut Laut dan Prasarana Laut/Lintas Angkut di Alumunium (KKR Bidang Bawahgubernur)	Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	DK Bawahgubernur		0	1	0	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00									

PP: Prioritas Nasional; PB: Prioritas Bidang; KL: Prioritas K/L; OM: Indikasi Non-Ops Kegiatan Dukungan Manajemen / Penunjang Teknis; Ops: Indikasi Belanja Operasional; Ind: Indikasi Kelautan di Luar RPJMN

| NO | SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / KRO OUTPUT / INDIKATOR | LOKASI | SATKER | SATUAN | TARGET | | | | | KINERJA 2020-2024 | | | | |

No	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Output / Sub-Output / Aktivitas	Lokasi	Satuan	Target					Apbn Tahun 2021										Rencana Apbn 2021-2024					Pagu
				2020	2021	2022	2023	2024	Rincian Rencana Lelang						Efisiensi / Blt	Hibah	Pnbp	Total Apbn	Apbn	Dekon	Tugas	Hibah	Rab Apbn	
									2020	2021	2022	2023	2024	Rab										
1157	Pembangunan Bandara Anggrunung Kalbar	Kota Anggrunung, Kalbar	Unit	0	1	1	2 Berlanjut	2 selesai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0%
1158	Pembangunan Bandara Perairan Pulau Dawak	Kab. Kepulauan Riau	Unit	0	1 selesai	1	0	0	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1159	Pembangunan Bandara Perairan Pulau Rondo	Kab. Natuna, Kepri	Unit	0	0	0	2 Berlanjut	1 selesai	0,00	0,00	0,00	30,00	17,50	22,50	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1160	Pembangunan Bandara Perintis Pulau Tikus (Major Project - BPIW)	Kab. Tikus Kepulauan, Pagaruyung Barat	Unit	0	1	1	1 Berlangsung	1 selesai	0,00	30,00	150,00	300,00	300,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1161	Pembangunan Bandara Perintis Pulau Sibil	Kab. Kepulauan Anambas, Bintan, Maluku Utara	Unit	0	0	0	0	2 selesai	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1162	Pembangunan Bandara Sidoluhur	Kab. Tebalakan, Papua	Bandara UPBU Raja Lokot Lokot	1	1	1	1 Berlangsi	1 selesai	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1163	Pembangunan Bandara Sukadhana	Kab. Sukadhana, Jabar	Unit	0	0	1	1 Berlangsi	1 selesai	0,00	0,00	132,50	132,50	132,50	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1164	Pembangunan Bandara Sukit Jaya	Kab. Sukit, Jaya	Unit	0	0	0	1 Berlangsi	1 selesai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1165	Pembangunan Bandara Bandara Pantai Timur (Major Project - BPIW)	Kab. Minahasa, Papua	Unit	0 Berlangsi	1 selesai	1	0	0	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1166	Pembangunan Bandara Bukit Cluro	Kab. Bukaka, Sulbar	Bandar UPBU Jenggo M Bandara	0	0	0	1 Berlangsi	1 selesai	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1167	Pembangunan Bandara Bandung Pulau Bagung Pura (Major Project - BPIW)	Kab. Pagung Cluro, Sulbar	Unit	0	1	1	1 Berlangsi	1 selesai	0,00	62,50	62,50	62,50	62,50	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1168	Pembangunan Bandara Pembangunan Bandara (Major Project - BPIW)	Kab. Raja Ampat, Papua Barat	Unit	0 Berlangsi	1 selesai	1	0	0	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1169	Pembangunan Bandara Sub Base (Major Project - BPIW)	Kab. Bunaeng, Bali	Unit	0	1	1	1 Berlangsi	1 selesai	0,00	375,00	375,00	375,00	375,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1170	Pembangunan Bandara Utama	Kab. Simpe Pogaire/Teno Melalan	Unit	0	0	1	1 Berlangsi	1 selesai	0,00	0,00	83,50	182,50	182,50	448,50	0,00	0,00	0,00	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1171	Pembangunan Bandara Lokasi Site	Kab. Lokasimbar, Sulsel	Unit	0	1 Berlangsi	1 Berlangsi	1 Berlangsi	1 selesai	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1172	Pembangunan Bandara Pelkomdo	Kab. Pelkomdo, Gorontalo	Bandara Jakabaru	1 Berlangsi	1 Berlangsi	1 Berlangsi	1 Berlangsi	1 selesai	33,00	118,50	100,00	30,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1173	Pembangunan Bandara Sangat Cuti	Kab. Sangat Cuti, Jatteng	Bandara UPBU Tiga Dara Cluro	1 Berlangsi	1 Berlangsi	1 Berlangsi	1 Berlangsi	1 selesai	50,00	100,00	100,00	100,00	50,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1174	Pembangunan Bandara Pelabuhan Mahapombar	Kab. Pelabuhan Bonpombar, Bali	Bandara Nuha	1 Berlangsi	1 Berlangsi	1 Berlangsi	1 Berlangsi	1 selesai	30,00	90,00	120,00	150,00	120,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1175	Pembangunan Bandara Utara Kwak	Kab. Tasalenga, Sulsel	Bandara Pagilla	1 selesai	0	0	0	0	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	121,50	0,00	0,00	0,00	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1176	Pembangunan Bandara Bakti Mahaning	Kab. Mandalling Natuk, Kalsel	Unit	0	1 Berlangsi	1 Berlangsi	1 Berlangsi	1 selesai	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1D	1.D.02 - Meningkatkan Aksesibilitas Transportasi Udara								813,97	1.116,50	1.092,50	1.661,97	1.418,50	11.482,50	0,00	0,00	0,00	12.301,50	0,00	12.425,00	0,00	0,00	12.300,00	
1D7	Indeks Ekspose Masyarakat Indeksg Fasilitas Transportasi Udara		Unit	80	81	82	84,1	84,2	18,50	215,13	215,69	311,06	0,00	740,92	27,44	0,00	0,00	770,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1D.02	Meningkatkan Aksesibilitas Transportasi Udara								18,50	215,13	215,69	311,06	0,00	740,92	27,44	0,00	0,00	770,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1D	Meningkatkan Aksesibilitas Transportasi Udara								18,50	215,13	215,69	311,06	0,00	740,92	27,44	0,00	0,00	770,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1D	Tingkat Aksesibilitas Transportasi Udara		%	0	0	0	0	0	18,50	215,13	215,69	311,06	0,00	740,92	27,44	0,00	0,00	770,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1177	Rehabilitasi Bandara Bungi	Kab. Lasio Utara, Sulsel	Bandara Bungi	Unit	0 Berlangsi	1 selesai	0	0	0	0,00	44,40	33,30	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1178	Rehabilitasi Bandara Kalumenao	Kab. Sulang Sitaba, Papua Barat	Bandara Kalumenao	Unit	0	0	0	1 selesai	0	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1179	Rehabilitasi Bandara Lasondo	Kab. Wai Kalaka, Kalsel	Bandara Lasondo	Unit	0	1 selesai	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1180	Rehabilitasi Bandara Mahoganom	Kab. Kepulauan Tobasil, Sulsel	Bandara Mahoganom	Unit	0	1	0	0	0	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	32,50	8,40	0,00	0,00	40,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1181	Rehabilitasi Bandara Mandipana	Kab. Bunin Ujung, Papua	Bandara Mandipana	Unit	0	0	0	1 selesai	0	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1182	Rehabilitasi Bandara Mangan	Kab. Kepulauan Tobasil, Sulsel	Bandara Mahoganom	Unit	0 Berlangsi	1 selesai	0	0	0	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1183	Rehabilitasi Bandara H.U. Sinombik	Kab. Kon Kalus, BTT	Bandara Sr. Sinombik	Unit	0	0	0	1 selesai	0	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1184	Rehabilitasi Bandara Satu	Kab. Halmahera Tengah, Maluku Utara	Bandara Sukadhak	Unit	0	1	0	0	0	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1185	Rehabilitasi Bandara Wanbo	Kota Lhoseng Utara, Aceh	Bandara Utaraka	Unit	0 Berlangsi	1 selesai	0	0	0	0,00	40,00	20,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1186	Rehabilitasi Bandara Tambolo - Bolo	Kab. Bolo Kalus, BTT	Bandara Sukadhak	Unit	0	0 selesai	0	0	0	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
1187	Rehabilitasi Bandara Waworada	Kab. Bawaj, Papua	Bandar UPBU Waworada	Unit	0 Berlangsi	1 selesai	0	0	0	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

Ket: Prioritas Nasional, PN: Prioritas Bidang, KL: Prioritas K/L; DAK Indikasi Jenis-Opsi Kegiatan Dukungan Manajemen / Penunjang Teknis; Opsi Indikasi Belanja Operasional; Sub: Indikasi Kebutuhan di Luar RPJMD

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	LOKASI	SATUAN	TARGET					REALISASI 2020-2024										REALISASI 2025-2029					
				2020	2021	2022	2023	2024	REALISASI KEGIATAN (KEU)						PERSE / KLU	SARPR	FISIK	TOTAL REALISASI	2025	2026	2027	2028	2029	TARGET
									2020	2021	2022	2023	2024	RPJMD										

No	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Output / Suboutput / Komponen	Lokasi	Satuan	Bobot	Target					Capaian 2020-2021										Rencana Aksi 2020-2021						Ket
					2020	2021	2022	2023	2024	Volume Keluaran						Rasio / Ket	2020	2021	Total Capaian	2020	2021	2022	2023	2024	Total Rencana Aksi	
										2020	2021	2022	2023	2024	Satuan											
[illegible]	Pengembangan Bandara Satu Dasar	Kab. Satu Baru, Kota Satu	Bandara Satu Dasar	Bobot	1 berfungsi	1 selesai	0 -	0 -	0 -	0.15	30.00	0.00	0.00	0.00	30.15	0.00	0.00	0.00	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	Pengembangan/Pembangunan Bandara Kemakmuran (Major Project - RPJP)	Kab. Kemakmuran, Utama	Bandara Kemakmuran	Bobot	0 -	1 -	1 -	1 berfungsi	1 selesai	0.00	2.20	2.20	2.20	2.20	11.10	0.00	0.00	0.00	11.10	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	6.00	[illegible]
[illegible]	Pengembangan Bandara Internasional Jaya	Kota Pandan, Kabupaten	Bandara Pandan Indah	Bobot	0 -	1 -	1 -	1 berfungsi	1 selesai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	2.00	0.00	0.00	130.00	[illegible]
[illegible]	Pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah	Kab. Kepulauan Riau	Bandara Raja Haji Abdullah	Bobot	0 berfungsi	1 selesai	1 -	0 -	0 -	0.00	95.00	80.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	Pengembangan/Pembangunan Bandara Segamat (Major Project - RPJP, RPJM)	Kab. Segamat, Riau	Bandara Segamat	Bobot	1 berfungsi	1 berfungsi	1 berfungsi	1 selesai	0 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	[illegible]
[illegible]	Pengembangan Bandara Internasional Lengkap	Kab. Bahtera Tenggara, Wilayah	Bandara Internasional Lengkap	Bobot	0 -	1 -	1 -	1 berfungsi	1 selesai	0.00	12.00	12.20	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	Pengembangan Bandara Mawar	Kab. Teluk Mawar, Pulau Utara	Bandara Mawar	Bobot	0 -	1 -	0 -	0 -	0 -	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	Pengembangan Bandara Permata	Kota Indah, Wilayah	Bandara Bintang Gilang	Bobot	1 berfungsi	1 selesai	0 -	0 -	0 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	[illegible]
[illegible]	Pengembangan Bandara Mawar	Kab. Bersatu, Pulau	Bandara Mawar	Bobot	1 berfungsi	1 selesai	0 -	0 -	0 -	74.00	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	Pengembangan/Pembangunan Bandara Tiga (Major Project - RPJP)	Kab. Lintas Raya, Pulau	Bandara Tiga	Bobot	0 -	1 -	1 -	1 berfungsi	1 selesai	0.00	12.00	30.00	30.00	12.00	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	Pengembangan/Pembangunan Bandara Kemang Jaya (Major Project - RPJM)	Kab. Bumi Pajak, Pulau	Bandara Danau Mayat	Bobot	1 berfungsi	1 berfungsi	1 berfungsi	1 berfungsi	1 selesai	0.00	42.12	167.00	182.00	212.74	641.00	0.00	0.00	0.00	641.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	Pengembangan/Pembangunan Bandara Kemakmuran (Major Project - RPJP)	Kab. Kemakmuran, Utama	Bandara Utama	Bobot	1 berfungsi	1 selesai	0 -	0 -	0 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	[illegible]
[illegible]	Pengembangan Bandara Tanjung	Kab. Tanjung, Pulau	Bandara Tanjung	Bobot	1 berfungsi	1 selesai	1 -	0 -	0 -	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	Pengembangan/Pembangunan Bandara Mutiara (Major Project - RPJP)	Kota Pelita, Wilayah	Bandara Mutiara	Bobot	1 berfungsi	1 berfungsi	1 berfungsi	1 selesai	0 -	82.00	12.00	28.00	30.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	Pengembangan/Pembangunan Bandara Cendana Merah (Major Project - RPJP)	Kab. Bumi Pajak, Pulau	Bandara Cendana Merah	Bobot	1 berfungsi	1 berfungsi	1 berfungsi	1 berfungsi	1 selesai	47.00	112.00	250.77	800.00	800.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	Pengembangan Bandara Sentosa	Kab. Sejahtera, Pulau	Bandara Sentosa	Bobot	0 -	0 -	1 berfungsi	1 selesai	0 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	[illegible]
[illegible]	Pengembangan/Pembangunan Bandara Makmur Indah	Kab. Indah Utara, Indah	Bandara Makmur Indah	Bobot	0 -	1 berfungsi	1 berfungsi	1 berfungsi	1 selesai	0.00	30.00	50.00	30.00	30.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	Pengembangan Bandara Utama Timur	Kab. Utama, Indah	Bandara Utama	Bobot	0 -	0 selesai	1 -	0 -	0 -	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	Pengembangan Bandara Batu Baku	Kab. Batu, Batu, Pulau	Bandara Batu Baku	Bobot	1 berfungsi	1 berfungsi	1 berfungsi	1 berfungsi	1 selesai	0.00	10.00	12.00	14.00	12.00	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	Pengembangan Bandara Utama	Kab. Utama, Wilayah	Bandara Utama	Bobot	0 -	1 -	1 -	1 berfungsi	1 selesai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	Pengembangan Bandara Mutiara Indah	Kab. Indah, Wilayah	Bandara Mutiara Indah	Bobot	0 -	1 selesai	0 -	0 -	0 -	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	Pengembangan Bandara Sentosa	Kab. Sentosa, Pulau	Bandara Sentosa	Bobot	1 berfungsi	1 -	0 -	0 -	0 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	[illegible]
[illegible]	Pengembangan Bandara Cendana	Kab. Cendana, Wilayah	Bandara Cendana	Bobot	0 -	1 -	1 -	1 berfungsi	1 selesai	0.00	90.00	30.00	10.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	Pengembangan/Pembangunan Bandara Kemakmuran (Major Project - RPJP)	Kab. Kemakmuran, Utama	Bandara Kemakmuran	Bobot	0 berfungsi	1 selesai	1 -	1 -	0 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	Pengembangan Bandara Indah	Kab. Indah, Wilayah	Bandara Indah	Bobot	1 berfungsi	1 selesai	1 -	1 -	0 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	Pengembangan/Pembangunan Bandara Sejahtera (Major Project - RPJP)	Kab. Sejahtera, Pulau	Bandara Sejahtera	Bobot	0 berfungsi	1 selesai	1 -	0 -	0 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]
[illegible]	Pengembangan/Pembangunan Bandara Pelita (Major Project - RPJP)	Kab. Pelita, Wilayah	Bandara Pelita	Bobot	1 berfungsi	1 selesai	0 -	0 -	0 -	72.00	20.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]

PN: Prioritas Nasional; PB: Prioritas Bidang; KL: Prioritas K/L; DK: Indikasi Dan Cara Kegiatan Dukungan Manajemen / Penunjang Teknis; Ops: Indikasi Belanja Operasional; Kab: Indikasi Kebutuhan di Luar RPJMD

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI	SATKER	SATTAN	TARGET					APBN 2020-2024										RENCANA 2025-2029					
										KEBUTUHAN BIAYA (RB)						PRIOR / KLH									
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	RM											
1207	Pengembangan Bandara Dhoroo [Major Project : RPJMN]	Kab. Tigamodi (Distrik Dekai)	Dit. Bandar Udara	Unit	0 -	1 -	0 -	0 -	0 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	PP
1208	Pengembangan Bandara Tinggi Nasing	Kab. Mamuju, Sulbar	Bandara Tinggi Nasing	Lokasi	1 -	0 -	0 -	0 -	0 -	77.82	0.00	0.00	0.00	0.00	77.82	0.00	0.00	0.00	77.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PP
1209	Pengembangan Bandara Ilaa Gabmin [Major Project : RPJMN]	Kab. Yahukimo - Ogoko	Bandar UPBU Ilaa Gabmin Mbua	Lokasi	1 bentanjat	1 bentanjat	1 bentanjat	1 bentanjat	1 unit/set	0.00	194.12	116.01	117.01	97.38	523.84	0.00	0.00	0.00	523.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PP
1210	Pengembangan Bandara Ilaa - Nigeria	Kab. Nduga, PPT	Bandara Ilaa	Lokasi	0 -	1 -	1 -	1 bentanjat	1 unit/set	0.00	20.88	54.88	19.88	16.48	91.18	0.00	0.00	0.00	91.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PP
1211	Pengembangan Bandara Bilorom - Lokasi Sipi	Kab. Bhaggana Bilorom, PPT	Bandara Bilorom	Lokasi	1 bentanjat	1 bentanjat	1 bentanjat	1 bentanjat	1 unit/set	191.00	306.00	202.20	202.20	398.60	1.300.00	0.00	0.00	0.00	1.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PP
1212	Pengembangan Bandara KAGO	Kab. Kepahunan Mentawai, Sumbar	Bandara Enkol Sipora	Lokasi	0 -	0 -	1 bentanjat	1 unit/set	0 -	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	411.24	0.00	423.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PP
1213	Pengembangan Bandara Wamena	Kab. Kepahunan Nias, Mentawi Utara	Bandar UPBU Dekai	Lokasi	0 -	0 -	1 -	1 bentanjat	1 unit/set	0.00	20.48	50.80	19.88	2.70	93.86	0.00	0.00	0.00	93.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PP
1214	Pengembangan Bandara Mbua	Kab. Mukoko Utara, Utara, Mukoko Utara	Bandar UPBU Lubu Basikai	Lokasi	1 bentanjat	1 unit/set	1 -	0 -	0 -	9.00	81.72	9.27	0.00	0.00	99.99	0.00	0.00	0.00	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PP
1215	Pengembangan Bandara Dekai	Kab. Kepahunan Nias, Mukoko Utara	Bandara Dekai	Lokasi	1 unit/set	0 -	0 -	0 -	0 -	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PP
1216	Pengembangan Bandara Long Apung	Kab. Mahakam Ulu/Kutim	Bandara Long Apung	Lokasi	1 bentanjat	1 unit/set	0 -	0 -	0 -	14.27	82.99	0.00	0.00	0.00	96.27	0.00	0.00	0.00	96.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PP
1217	Pengembangan Bandara Mimi Mimiyah [Major Project : RPJMN]	Kab. Mimika, Papua	Bandara Mimi Mimiyah	Lokasi	1 bentanjat	1 bentanjat	1 bentanjat	1 bentanjat	1 unit/set	87.77	178.61	198.81	211.61	316.20	792.20	0.00	0.00	0.00	792.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PP
1218	Pengembangan Bandara Tanjung Harapan [Major Project: RPJMN, RPJ-L]	Kab. Halmahera Barat	Bandara Tanjung Harapan	Lokasi	0 bentanjat	0 -	1 unit/set	0 -	0 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PP
1219	Pengembangan Bandara Siri Hasanuddin Siri [Major Project : RPJMN]	Kab. Bagindah, Utibang	Dit. Bandar Udara	Lokasi	0 bentanjat	0 -	1 unit/set	0 -	0 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PP
1A	Unit A1 : Meningkatnya Keselamatan Transportasi Udara									0.00	924.00	352.00	352.00	317.00	1.945.00	0.00	0.00	0.00	1.945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1B1	Unit Kegiatan Keselamatan Transportasi Udara Pusat/Regional (Operator)			Paket	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.00	352.00	352.00	317.00	1.945.00	0.00	0.00	0.00	1.945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1B2	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara									0.00	924.00	352.00	352.00	317.00	1.945.00	0.00	0.00	0.00	1.945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1B	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi Udara									0.00	924.00	352.00	352.00	317.00	1.945.00	0.00	0.00	0.00	1.945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1BX	Tingkat Pemenuhan Standar Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara				0	0	0	0	0	0.00	924.00	352.00	352.00	317.00	1.945.00	0.00	0.00	0.00	1.945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1211	Pengadaan dan modernisasi sistem komputer / SIGTIM	Kab.Jakarta	Dit. Navigasi Penerbangan	Unit	0 -	1 -	1 -	1 bentanjat	1 unit/set	0.00	99.00	99.00	99.00	91.11	391.11	0.00	0.00	0.00	391.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PP
1212	Pengadaan Peralatan Utama Bidang/Unit	Kab. Tangerang, Banten	Unit Induk Bidang/Unit Pendidikan Penerbangan	Unit	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00	825.00	352.00	352.00	317.00	2.118.00	0.00	0.00	0.00	2.118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PP
1A	Unit A1 : Meningkatnya Keselamatan Transportasi Udara									1.991.20	8.949.01	10.312.77	12.491.40	10.799.72	55.792.11	0.00	27.032.01	1.970.00	85.819.11	134.952.0 0	1.012.00	12.769.00	0.00	148.733.0 0	
1A	Program Peningkatan Keselamatan				1.991.20	8.949.01	10.312.77	12.491.40	10.799.72	55.792.11	0.00	27.032.01	1.970.00	85.819.11	134.952.0 0	1.012.00	12.769.00	0.00	148.733.0 0						
1A	Unit A1 : Meningkatnya keselamatan transportasi udara sesuai standar internasional dan nasional				1.991.20	8.949.01	10.312.77	12.491.40	10.799.72	55.792.11	0.00	27.032.01	1.970.00	85.819.11	134.952.0 0	1.012.00	12.769.00	0.00	148.733.0 0						
1B1	Unit Kegiatan Dalam Wilayah			Paket	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.991.20	8.949.01	10.312.77	12.491.40	10.799.72	55.792.11	0.00	27.032.01	1.970.00	85.819.11	134.952.0 0	1.012.00	12.769.00	0.00	148.733.0 0	
1B2	Operasional Keselamatan Transportasi Perkeretapian									1.991.20	8.949.01	10.312.77	12.491.40	10.799.72	55.792.11	0.00	27.032.01	1.970.00	85.819.11	134.952.0 0	1.012.00	12.769.00	0.00	148.733.0 0	
1B	Meningkatnya Keselamatan Sarana Prasarana Perkeretapian Nasional									1.991.20	8.949.01	10.312.77	12.491.40	10.799.72	55.792.11	0.00	27.032.01	1.970.00	85.819.11	134.952.0 0	1.012.00	12.769.00	0.00	148.733.0 0	
1BX	Jumlah Penjaga Perlintasan Jalur Kereta api Bersalah Sesuai Standar yang Ditetapkan			Jumlah	94	123	212	140	424	1.204.49	8.449.01	11.312.77	9.891.87	11.496.19	42.353.33	0.00	27.032.01	1.970.00	89.848.71	134.952.0 0	1.012.00	12.769.00	0.00	148.733.0 0	
1211	Pembangunan Jalur Kereta Api [Major Project : RPJMN]	DKI Jakarta	DIT Wilayah Jakarta dan Banten	Jumlah	0 -	0 -	10 -	10 -	20 -	0.00	550.00	264.00	264.00	0.00	1.078.00	0.00	0.00	0.00	1.078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PP
1212	Pengembangan/Upgrade Kereta Api Bandara Kulon Progo - Yogyakarta	Kab. Kulon Progo, Bantul, Yogyakarta	DIT Wilayah Jawa Bagian Timur	Kota	1 bentanjat	1 bentanjat	1 bentanjat	1 bentanjat	1 unit/set	0.00	0.00	0.00	424.70	0.00	424.70	0.00	0.00	0.00	424.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PP
1213	Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Kulon Progo - Purwosari - Solo - Yogyakarta - Kutoarjo - Purwokerto - Cilacap	Kab. Kulon Progo, Bantul, Sleman - Kota Yogyakarta, Kab. Purworejo, Kab. Cilacap	DIT Wilayah Jawa Bagian Tengah	Jumlah	0 -	0 -	0 -	0 -	10 bentanjat	0.00	22.00	22.00	22.00	22.07	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PP
1214	Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Kulon Progo - Purwosari - Solo - Yogyakarta - Kutoarjo - Purwokerto - Cilacap [Major Project : RPJMN]	Kab. Bantul, Kulon Progo, Purworejo, Kebumen, Banyumas	DIT Wilayah Jawa Bagian Tengah	Jumlah	40 bentanjat	40 bentanjat	40 bentanjat	40 bentanjat	40 unit/set	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.661.44	0.00	0.00	0.00	1.661.44	PP
1215	Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Kulon Progo - Purwosari - Solo - Yogyakarta - Kutoarjo - Purwokerto - Cilacap [Major Project : RPJMN]	Kab. Kebumen, Purworejo, Banyumas	DIT Wilayah Jawa Bagian Tengah	Jumlah	40	40	20	20	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PP
1216	Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Kulon Progo - Purwosari - Solo - Yogyakarta - Kutoarjo - Purwokerto - Cilacap [Major Project : RPJMN]	Kab. Kulon Progo, Bantul, Sleman - Kota Yogyakarta	DIT Wilayah Jawa Bagian Tengah	Jumlah	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PP
1217	Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Kulon Progo - Purwosari - Solo - Yogyakarta - Kutoarjo - Purwokerto - Cilacap [Major Project : RPJMN]	Kab. Kebumen, Purworejo, Banyumas	DIT Wilayah Jawa Bagian Tengah	Jumlah	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PP
1218	Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Kulon Progo - Purwosari - Solo - Yogyakarta - Kutoarjo - Purwokerto - Cilacap [Major Project : RPJMN]	Kab. Kebumen, Purworejo, Banyumas	DIT Wilayah Jawa Bagian Tengah	Jumlah	0 -	0 -	0 -	0 -	0 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PP
1219	Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Kulon Progo - Purwosari - Solo - Yogyakarta - Kutoarjo - Purwokerto - Cilacap [Major Project : RPJMN]	Kab. Kebumen, Purworejo, Banyumas	DIT Wilayah Jawa Bagian Tengah	Jumlah	0 -	0 -	20 bentanjat	20 bentanjat	20 bentanjat	0.00	0.00	198.70	198.70	198.00	595.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PP
1220	Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Kulon Progo - Purwosari - Solo - Yogyakarta - Kutoarjo - Purwokerto - Cilacap [Major Project : RPJMN]	Kab. Kebumen, Purworejo, Banyumas	DIT Wilayah Jawa Bagian Tengah	Jumlah	11 bentanjat	11 bentanjat	11 unit/set	0 -	0 -	99.00	165.00	165.00	0.00	0.00	429.00	0.00	0.00	0.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PP
1221	Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Kulon Progo - Purwosari - Solo - Yogyakarta - Kutoarjo - Purwokerto - Cilacap	Kab. Lampung Selatan, Lampung	DIT Wilayah Sumatera Bagian Selatan	Jumlah	0 -	0 -	0 -	1 bentanjat	1 unit/set	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PP
1222	Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Kulon Progo - Purwosari - Solo - Yogyakarta - Kutoarjo - Purwokerto - Cilacap [Major Project : RPJMN]	Kab. Kebumen, Purworejo, Banyumas	DIT Wilayah Jawa Bagian Barat	Jumlah	20 bentanjat	17 unit/set	40 bentanjat	40 bentanjat	40 bentanjat	908.10	330.00	660.00	0.00	0.00	1.782.00	0.00	0.00	0.00	1.782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PP

PP: Prioritas Nasional; PB: Prioritas Bidang; KL: Prioritas K/L; DK: Indikasi Non-Opa Kegiatan Dukungan Manajemen / Penunjang Teknis; Opa: Indikasi Belanja Operasional; Keb: Indikasi Kebutuhan di Luar RPJMN

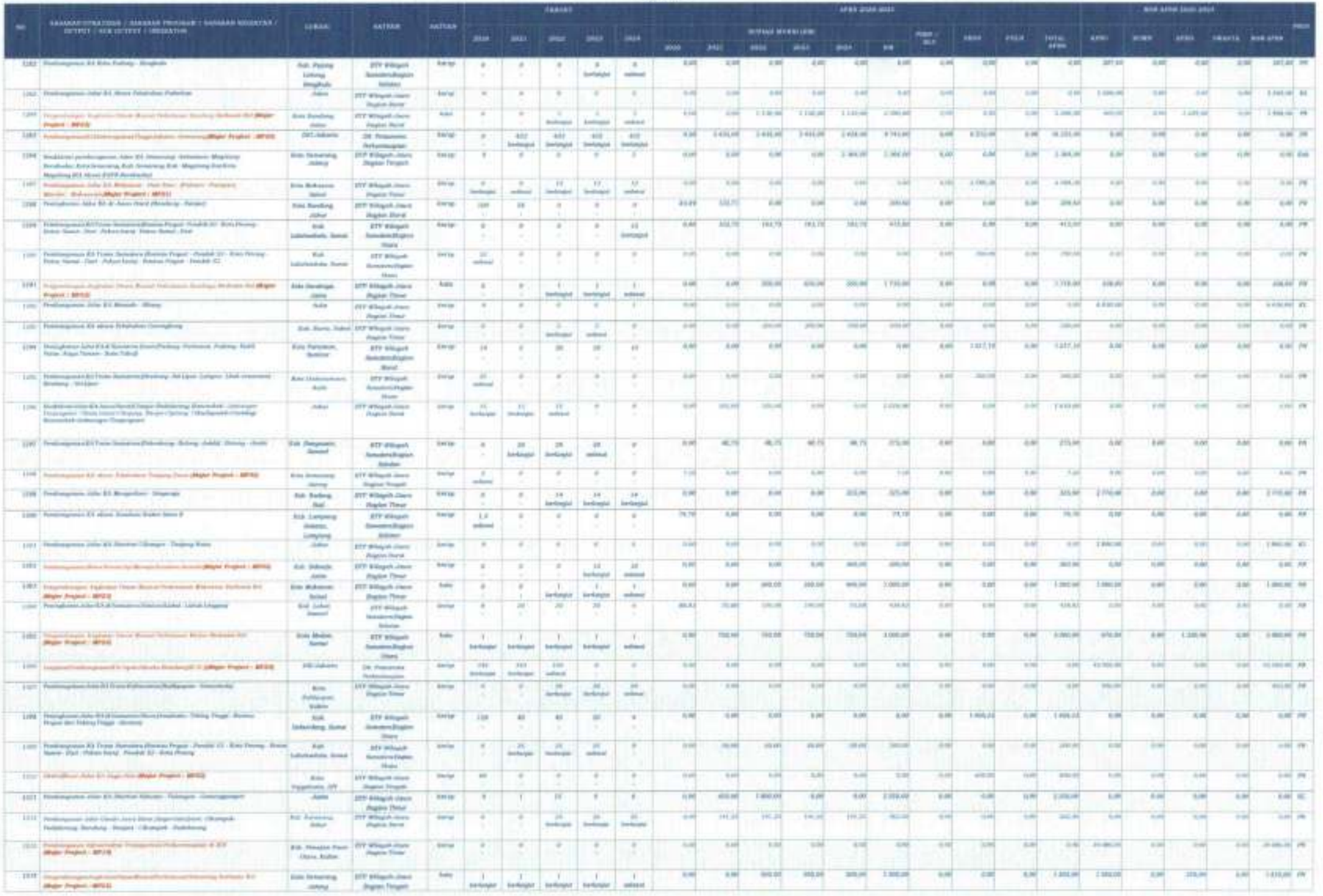

TV: Prioritas Nasional; PB: Prioritas Bidang; KL: Prioritas K/L; DK: Indikasi Non-Opa Kegiatan Dukungan Manajemen / Penunjang Teknis; Opa: Indikasi Belanja Operasional; Keb: Indikasi Kebutuhan di Luar DIPA

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Perhubungan 2020-2024

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / KRO /RO OUTPUT / OPERASIONAL	LOKASI	SATUAN	TARGET					APBN TAHUN 2024										RKAK TAHUN 2025					
				2020	2021	2022	2023	2024	BIAYA MASUK (RM)						PAGU / RAK	REALISASI	SISA	TOTAL APBN	KEPRI	BINBIN	APBN	ONBOARD	RKAK APBN	
									2020	2021	2022	2023	2024	RM											
1112	Pembangunan Kl unor Hidrolisa Tidak Lancar	Kota Gunungan, Jatim	Unit	0	0	0	0	0	0,00	80,00	150,00	40,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1113	Pengembangan Kl unor Hardware Informasi Internal (Major Project - RPTO)	Kota Gunungan, Jatim	Unit	0	0	10	10	10	0,00	0,00	450,00	525,00	450,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1117	Pembangunan Kl Cropping Data - Cropping Apl Apl	Kab. Muara Jaya, Jawa	Unit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
1118	Pembangunan Kl Cross Sumatera/Kepala Kerik - Dgk - Simpang - Pembangunan/ Mentok - Pembangunan	Kota Gunung, Kerik Jawa	Unit	11	11	11	11	11	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1119	Pembangunan Jalur Kl Mesin Kendaraan Kemajuan	Jakarta	Unit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
1120	Pembangunan Kl Cross Sumatera/Pekanbaru - Bintang - Jambi - Palembang - Bintang	Kab. Muara Jaya, Jawa	Unit	0	0	0	0	10	0,00	0,00	117,00	117,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1121	Pembangunan Jalur Jambi Kl Lintas Selatan Jawa/Mandailing - Majalengka - Jambi/ - Majalengka - Jambi/	Kab. Jambi/ Jambi	Unit	21	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1122	Pembangunan Interoperabilitas Kl Kabupaten - Kab Lubuklinggau - Jaka	Kota Gunung, Jatim	Unit	0	0	0	41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1123	Pembangunan Jalur Kl (Lintas Timur/Kab Gunung Kerik - Kerapat - Kerapat - Gunung - Jaka) (Major Project - RPTO)	Kota Tanjung, Jatim	Unit	53	20	20	20	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1124	Pembangunan Jalur Garuda Jawa Kawi (Sugai Sukarame, Cilacap/ Pembelimang, Bandung, Kerapat - Pembelimang, Kerapat)	Kab. Bandung, Jakar	Unit	0	0	20	20	20	0,00	0,00	390,00	312,00	390,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1125	Pembangunan Jalur Kl Jawa Bentuk Sangat Pembelimang (Kerapat - Jambi/ Sugai/ Cilacap/ Gunung/ Kerapat - Cilacap/ Gunung/ Cilacap/ Bandung/ Cilacap/ Bandung/ Cilacap)	Jakar	Unit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
1126	Pembangunan Jalur Jambi Kl Lintas Selatan Jawa/Mandailing - Majalengka - Jambi/ - Majalengka - Jambi/	Kota Gunungan, Jatim	Unit	0	20	20	20	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1127	Pembangunan Jalur Kl Jawa Bentuk Sangat Pembelimang (Kerapat - Jambi/ Sugai/ Cilacap/ Gunung/ Kerapat - Cilacap/ Gunung/ Cilacap/ Bandung/ Cilacap/ Bandung/ Cilacap)	Jakar	Unit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00	
1128	Pembangunan Jalur Bosnia Apl /Kl Endak - Kelak-Kun, (IPT) Mangan Endak	Jawa	Unit	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1129	Pembangunan Jalur Kl Mahasiswa - Data Base - Shopping - Mawar (Major Project - RPTO)	Kota Mahasiswa, Bekasi	Unit	53	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,00	0,00	0,00	0,00	2.648,00	
1130	Pembangunan Jalur Kl Pembelimang Kualitas - Cukup Pintar (Major Project - RPTO)	Kota Pembelimangan, Bumbul	Unit	0	0	11	11	11	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
1131	Pembangunan Kabupaten/Kl (Major Project - RPTO)	Kota Bahasa, Jakar	Unit	17	17	41	41	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,00	0,00	2.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1132	Pembangunan Kl Energi Kabupaten Cianjur Mas - Bintang Kl (Major Project - RPTO)	Kab. Bintang Pagar, Bintang	Unit	44	44	44	44	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	
1133	Pengembangan Kapasitas Unsur Bumbul Pembangunan Jakarta Bandung Kl (Major Project - RPTO)	DKI Jakarta	Kota	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	33.000,00	34.650,00	
1134	Pembangunan Jalur Kl Jawa Bentuk (Pembelimang - Jakarta - Bandung - Kl)	Jakar	Unit	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	
1135	Pembangunan Kl Unor Kl Pembelimang - Kl Pembelimang - Kl Pembelimang -

No	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / SUB OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI	SATUAN	SATUAN	TARGET					APBN 2020-2024										REALISASI 2020-2024					
					2020	2021	2022	2023	2024	RUPIAH MURNI (RM)					PINJ / HLN	HIBAH	PDN/B	TOTAL APBN	KEMEN	DEKON	APBD	VERTIKA	DEK-KOM	TPID
										2020	2021	2022	2023	2024											
1.1.1																									
1.1.2																									
1.1.3																									

No	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PENGADA / SASARAN REGISTER / OUTPUT / KEG OUTPUT / INDIKATOR	LOKASI	SATUAN	TARGET					REALISASI																	PERS
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	JUMLAH	PERSEN (%)											
(XX)	**Tingkat Ketercapaian Sasaran Sebagaimana Kebijakan Transportasi Udara pada (-1)**																									
1.XX	Pencapaian Transportasi Udara di XX	Kota Jakarta Pusat (XX) Jakarta	Pusdiklat Transportasi Udara	Agenda	0	1	1	1	1	0,00	1,00	1,00	1,00	10,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Ket
(XX)	**Tingkat Ketercapaian Sasaran Sebagaimana Kebijakan Transportasi Antarmoda pada (-1)**			20	22	27	32	33	4,82	11,28	2,42	14,21	7,04	42,79	0,00	0,00	0,00	42,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.XX	Biaya Pengembangan Sistem Transportasi Antarmoda Terpadu Lapangan	Kota Jakarta Pusat (DIT) Jakarta	Pusdiklat Transportasi Antarmoda	Agenda	1	1	1	1	1	3,82	10,28	1,42	13,21	7,04	35,77	0,00	0,00	0,00	35,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Ket
1.XX	Biaya Sistem Transportasi Antarmoda Berbasis Digital (**Major Project : SPIP**)	Kota Jakarta Pusat (DIT) Jakarta	Pusdiklat Transportasi Antarmoda	Agenda	1	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Ket
(XX)	**Tingkat Ketercapaian Sasaran Sebagaimana Kebijakan Perkeretaapian Kebijakan Transportasi pada (-1)**			15	17	17	18	19	2,79	0,94	0,84	1,02	1,48	7,12	0,00	0,00	0,00	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.XX	Biaya Pengembangan Sistem Transportasi (**Major Project : SPIP**)	Kota Jakarta Pusat, DIT Jakarta	Sekretariat Ditjen/Biro/Pusdiklat	Agenda	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	1,02	1,48	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Ket
1.XX	Biaya Pengembangan Sistem Transportasi (**Major Project : SPIP**)	Kota Jakarta Pusat, DIT Jakarta	Sekretariat Ditjen/Biro/Pusdiklat	Agenda	1	1	1	1	1	2,79	0,94	0,84	0,00	0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Ket
767	**Tingkat Kesesuaian Sasaran Sebagaimana Kebijakan Strategis di Bidang Perkeretaapian**			80	85	90	95	98	84,02	82,71	84,63	85,01	73,00	342,37	0,00	0,00	0,00	342,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.XX	Biaya dan Kebijakan Kebijakan Transportasi								84,02	82,71	84,63	85,01	73,00	342,37	0,00	0,00	0,00	342,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00	**Optimalnya Kesesuaian Sasaran Sebagaimana Kebijakan ke Strategis Transportasi**								84,02	82,71	84,63	85,01	73,00	342,37	0,00	0,00	0,00	342,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(XX)	**Tingkat Kesesuaian Sasaran Sebagaimana Kebijakan ke Strategis Transportasi Jalan dan (-1)**			23	30	30	33	33	21,00	30,00	11,00	9,10	19,00	90,10	0,00	0,00	0,00	90,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.XX	Biaya Ke Strategis Bidang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian	Kota Jakarta Pusat (DIT) Jakarta	Pusdiklat Transportasi Jalan dan (-1)	Agenda	23	30	0	0	0	21,00	30,00	11,00	9,10	19,00	90,10	0,00	0,00	0,00	90,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		PM
(XX)	**Tingkat Kesesuaian Sasaran Sebagaimana Kebijakan ke Strategis Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan pada (-1)**			23	30	30	33	33	8,00	37,00	37,00	30,10	22,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.XX	Penghitung Ke Strategis Bidang Transportasi Laut	Kota Jakarta Pusat, DIT Jakarta	Pusdiklat Transportasi Laut, Sungai, danau, dan Penyeberangan	Agenda	24	30	30	27	30	8,00	32,00	32,00	13,00	24,00	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Ket
1.XX	Biaya Biaya Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan di XX	Kota Jakarta Pusat, DIT Jakarta	Pusdiklat Transportasi Laut, Sungai, danau, dan Penyeberangan	Agenda	0	1	1	1	1	0,00	21,00	11,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Ket
1.XX	Penghitung Ke Strategis Bidang Transportasi Laut	Kota Jakarta Pusat, DIT Jakarta	Pusdiklat Transportasi Laut, Sungai, danau, dan Penyeberangan	Agenda	0	1	1	1	1	0,00	2,00	2,00	2,70	2,00	11,10	0,00	0,00	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Ket
(XX)	**Tingkat Kesesuaian Sasaran Sebagaimana Kebijakan ke Strategis Transportasi Udara**			20	20	20	22	22	11,97	13,91	15,68	18,44	20,00	81,97	0,00	0,00	0,00	81,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.XX	Biaya Pengembangan Transportasi Udara di Bidang (-1) (**Major Project : SPIP**)	Kota Jakarta Pusat, DIT Jakarta	Pusdiklat Transportasi Udara	Agenda	1	1	1	0	1	1,17	1,11	1,14	1,14	1,00	5,55	0,00	0,00	0,00	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		PM
1.XX	Biaya Ke Strategis Bidang Transportasi Udara	Kota Jakarta Pusat, DIT Jakarta	Pusdiklat Pengawasan Udara	Agenda	17	13	13	18	19	10,80	9,80	10,70	12,00	14,20	58,10	0,00	0,00	0,00	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		PM
1.XX	Biaya Ke Strategis Bidang Transportasi Udara	Kota Jakarta Pusat, DIT Jakarta	Pusdiklat Pengawasan Udara	Agenda	0	1	1	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	11,80	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Ket
(XX)	**Tingkat Kesesuaian Sasaran Sebagaimana Kebijakan ke Strategis Transportasi Antarmoda**			20	20	20	22	22	11,82	8,48	12,00	11,68	11,00	55,48	0,00	0,00	0,00	55,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.XX	Biaya Ke Strategis Bidang Transportasi Antarmoda	Kota Jakarta Pusat, DIT Jakarta	Pusdiklat Transportasi Antarmoda	Agenda	20	20	20	20	20	10,00	7,00	10,00	10,00	10,00	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		PM
1.XX	Biaya Ke Strategis Bidang Transportasi Antarmoda	Kota Jakarta Pusat, DIT Jakarta	Pusdiklat Transportasi Antarmoda	Agenda	0	0	0	0	0	1,82	1,48	2,00	1,68	1,00	7,98	0,00	0,00	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Ket
12	Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian								1.505,21	1.725,00	1.708,00	1.894,21	1.599,00	8.431,42	0,00	0,00	0,00	12.961,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Program Pendidikan dan Pelatihan Teknis								1.505,21	1.725,00	1.708,00	1.894,21	1.599,00	8.431,42	0,00	0,00	0,00	12.961,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	02.01 Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten								1.505,21	1.725,00	1.708,00	1.894,21	1.599,00	8.431,42	0,00	0,00	0,00	12.961,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
107	**Tingkat Kompetensi SDM Transportasi yang Kompeten**			80	80	80	89	90	1.505,21	1.725,00	1.708,00	1.894,21	1.599,00	8.431,42	0,00	0,00	0,00	12.961,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.XX	Pendidikan Transportasi								1.505,21	1.725,00	1.708,00	1.894,21	1.599,00	8.431,42	0,00	0,00	0,00	12.961,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00	**Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi**								1.505,21	1.725,00	1.708,00	1.894,21	1.599,00	8.431,42	0,00	0,00	0,00	12.961,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(XX)	**Prosentase Pengerjaan Lulusan Diklat Perkeretaapian Transportasi**			80	85	85	90	95	487,17	520,10	550,87	570,00	617,11	2.745,24	2.202,72	0,00	0,00	4.947,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.XX	Lulusan Diklat Perkeretaapian Mandiri di Pelatihkan Makassar	Dan Kabupaten Sulsel	Diklat/Bimtek Makassar	orang	160	264	264	312	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		PM

FP: Prioritas Nasional, PB: Prioritas Bidang, KL: Prioritas K/L, IKK: Indikasi Kin-Cpa Kegiatan Dukungan Manajemen / Penunjang Teknis, Cpo: Indikasi Belanja Operasional, Ekt: Indikasi Kebutuhan di Luar APBN

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Perhubungan 2020-2024

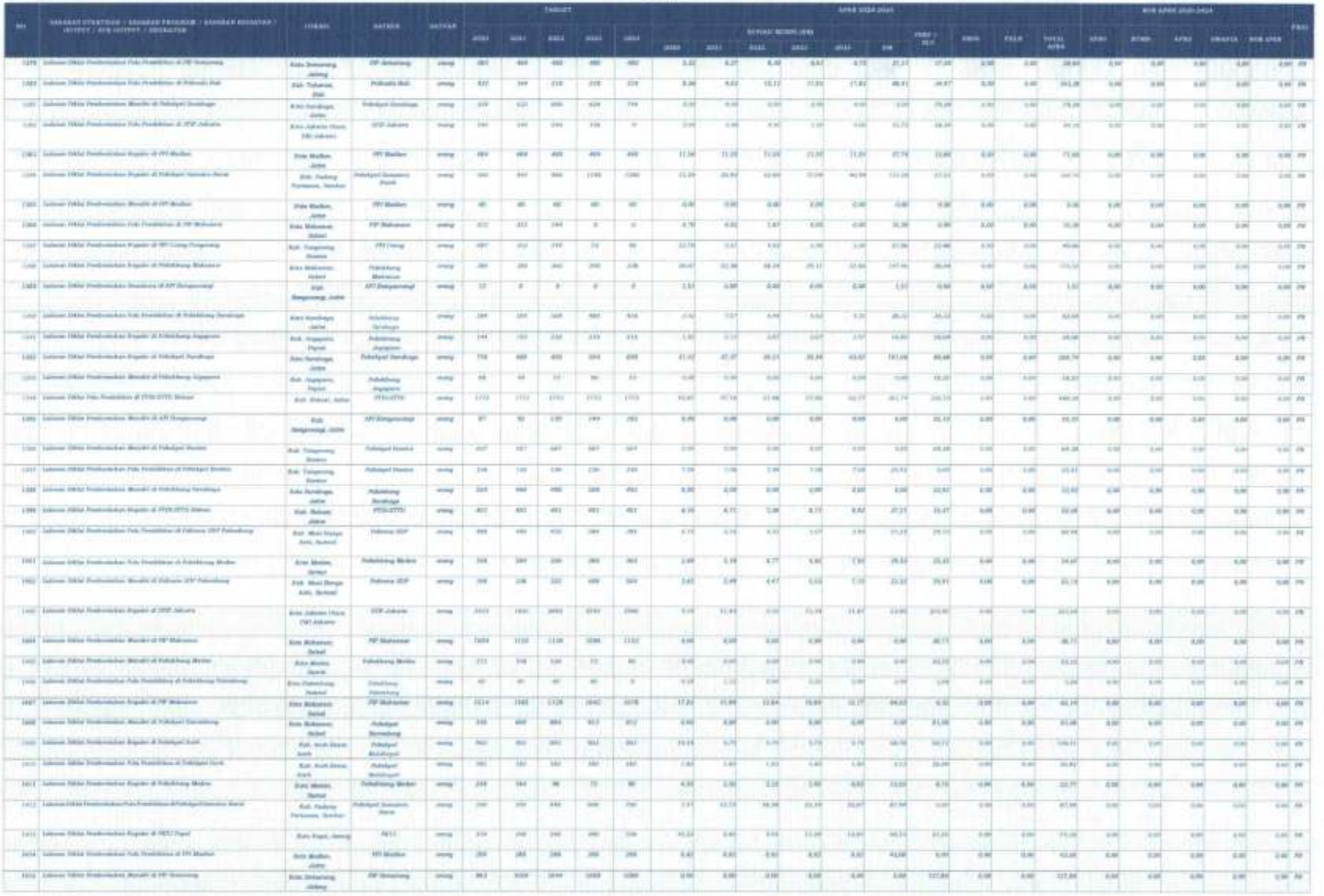

No	Indikator Output / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Output / Sub Output / Indikator	Satuan	Bobot	Target					Alokasi 2020-2024										Realisasi 2020-2024						Ket
				2020	2021	2022	2023	2024	Sumber Dana (DIPA)						Pagu / Biaya	Unit	Paket	Total Alokasi	Unit	Paket	Unit	Paket	Total Realisasi	
									2020	2021	2022	2023	2024	Dst											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Lokasi Dikbal Pembentukan Wasdal di DKTJ Tegal	Kota Tegal, Jateng	DKTJ	orang	172	140	113	92	76	6,20	6,08	6,00	6,00	6,00	6,47	72,57	0,00	0,00	72,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Lokasi Dikbal Pembentukan Bagian di Pokdakat Sukorok Timur	Kab. Mukomuko, Jambi, Bkl	BPSTT Mukomuko Jambi	orang	240	240	240	240	240	16,28	16,27	16,20	16,14	16,07	96,01	71,82	0,00	0,00	167,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Lokasi Dikbal Pembentukan Pagam di PIP Semarang	Kota Semarang, Jateng	PIP Semarang	orang	480	480	480	480	480	29,00	30,49	0,00	29,49	29,43	120,49	109,71	0,00	0,00	230,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Lokasi Dikbal Pembentukan Pola Pembibitan di Pokdakat Sumbawa	Kota Sumbawa, Jatim	Pokdakat Sumbawa	orang	670	600	610	660	660	6,60	6,61	34,84	6,61	6,60	64,87	32,98	0,00	0,00	97,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Lokasi Dikbal Pembentukan Sosialisasi di PPI Cirebon Pengembang	Kab. Tangerang, Banten	PPI Cirebon	orang	47	47	22	8	8	2,28	1,67	0,67	0,00	0,00	4,61	0,00	0,00	0,00	4,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Lokasi Dikbal Pembentukan Pola Pembibitan di Pokdakat Banyuwangi	Kota Makassar, Jateng	Pokdakat Banyuwangi	orang	72	72	72	72	0	0,62	1,20	1,61	0,12	0,00	3,55	2,77	0,00	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Lokasi Dikbal Pembentukan Bagian di Pokdakat Banyuwangi	Kota Makassar, Jateng	Pokdakat Banyuwangi	orang	1207	1199	1219	1240	1244	19,19	13,40	11,68	11,34	11,44	19,47	73,96	0,00	0,00	103,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Lokasi Dikbal Pembentukan Pola Pembibitan di PPI Lanja Tangerang	Kab. Tangerang, Banten	PPI Lanja	orang	976	1254	1132	1046	960	12,71	21,27	21,04	21,84	20,84	106,87	87,41	0,00	0,00	214,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Lokasi Dikbal Pembentukan Bagian di KPI Banyuwangi	Kab. Banyuwangi, Jatim	KPI Banyuwangi	orang	24	24	24	24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Lokasi Dikbal Pembentukan Bagian di Pokdakbang Indramayu	Kota Pekalongan, Jateng	Pokdakbang Cirebon	orang	60	120	180	240	300	1,10	0,07	0,11	0,01	0,07	21,00	0,11	0,00	0,00	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Lokasi Dikbal Pembentukan Bagian di Pokdakbang Sumbaga	Kota Semarang, Jateng	Pokdakbang Semarang	orang	380	430	470	509	552	10,64	2,44	0,20	22,16	11,96	48,84	44,48	0,00	0,00	94,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Lokasi Dikbal Pembentukan Wasdal di PPI Cirebp Pengembang	Kab. Tangerang, Banten	PPI Cirebp	orang	499	214	811	814	1366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,41	0,00	0,00	119,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Lokasi Dikbal Pembentukan Pola Pembibitan di BPSTT Mukomuko	Kab. Mukomuko, Bkl	BPSTT Mukomuko	orang	219	220	250	260	350	5,10	13,00	0,02	11,04	17,30	46,53	5,41	0,00	0,00	51,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Lokasi Dikbal Pembentukan Bagian di Pokdakat Serang	Kota Jenring Hajitu Barat	Pokdakat Serang	orang	840	844	848	812	844	36,87	20,44	30,12	37,07	46,81	181,84	66,12	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Lokasi Dikbal Pembentukan Sistem Tigaru di KPI Banyuwangi	Kab. Banyuwangi, Jatim	KPI Banyuwangi	orang	20	20	20	20	20	7,10	7,19	7,20	7,20	7,20	35,89	9,89	0,00	0,00	87,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Lokasi Dikbal Pembentukan Bagian di Pokdakat SDP Palembang	Kab. Muara Banyuasin, Sumsel	Pokdakat SDP	orang	10	0	0	0	0	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Lokasi Dikbal Pembentukan Pola Pembibitan di Pokdakbang Mukomuko	Kota Mukomuko, Bkl	Pokdakbang Mukomuko	orang	144	284	200	260	200	8,20	15,20	10,40	14,44	13,80	72,24	7,80	0,00	0,00	77,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Lokasi Dikbal Pembentukan Bagian di Pokdakat Dumai	Kab. Tangerang, Banten	Pokdakat Dumai	orang	1207	1844	1874	2081	2244	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	107,11	135,47	0,00	0,00	242,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Lokasi Dikbal Pembentukan Pola Pembibitan di DKTJ Tegal	Kota Tegal, Jateng	DKTJ	orang	540	690	790	790	790	5,01	11,19	19,28	20,48	13,81	90,46	51,40	0,00	0,00	141,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III	**Persentase Lulusan Diklat Transportasi**		%	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**868,72**	**940,97**	**995,40**	**1.069,68**	**1.130,02**	**5.124,27**	**1.793,52**	**0,00**	**0,00**	**6.883,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
20	Lokasi Dikbal Teknis PNBP 3633 di PTDI-DTK Bekasi	Kab. Bekasi, Jabar	PTDI-DTK	orang	960	960	960	960	960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	0,00	0,00	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Lokasi SPM Safety and Security di BPSTT Mukomuko	Kab. Mukomuko, Bkl	BPSTT Mukomuko	orang	2744	10858	10858	11858	11858	11,84	44,11	12,06	54,41	64,06	200,57	0,00	0,00	0,00	200,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Lokasi Dikbal Teknis PNBP 3633 di BP3IP Jakarta	Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta	BP3IP Jakarta	orang	23840	25384	26318	26843	28380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82	0,00	0,00	93,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Lokasi SPM Safety and Security di Pokdakat Sotonero Barat	Kab. Pulang Pisau, Sotonero Barat	Pokdakat Sotonero Barat	orang	3180	3600	3734	3830	4030	21,00	11,00	18,00	37,41	22,57	130,41	0,00	0,00	0,00	129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Lokasi Dikbal Teknis Non Gl PPI Cirebp Pengembang	Kab. Tangerang, Banten	PPI Cirebp	orang	191	191	191	111	111	129,19	93,81	93,44	99,09	85,29	471,27	0,00	0,00	0,00	471,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Lokasi Dikbal Teknis PNBP 3633 di DKTJ Tegal	Kota Tegal, Jateng	DKTJ	orang	1100	700	700	700	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Lokasi Dikbal Teknis PNBP 3633 di Pokdakat Sotonero Timur	Kab. Mukomuko, Sotonero, Sotbd	BPSTT Mukomuko Sotonero	orang	1,011	1,011	1,011	1,044	1,098	31,14	31,14	38,11	25,74	32,04	191,00	16,11	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Lokasi SPM Safety and Security di BPSTT Jakarta	Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta	BPSTT Jakarta	orang	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	32,01	23,81	15,14	18,11	30,01	77,80	0,00	0,00	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Lokasi SPM Safety and Security di PTDI-DTK Bekasi	Kab. Bekasi, Jabar	PTDI-DTK	orang	4838	4838	4838	4838	4838	21,61	24,22	28,44	28,30	32,22	134,41	0,00	0,00	0,00	134,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Lokasi Dikbal Teknis PNBP 3633 di PPI Lanja Tangerang	Kab. Tangerang, Banten	PPI Lanja	orang	2470	2462	2610	2870	3010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,04	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Lokasi SPM Sertifikasi SMK di PPI Lanja Tangerang	Kab. Tangerang, Banten	PPI Lanja	orang	300	300	400	500	500	2,40	2,40	2,40	2,00	2,00	11,60	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Lokasi Dikbal Teknis PNBP 3633 di Pokwas BSP Palembang	Kab. Muara Banyuasin, Sumsel	Pokwas BSP	orang	270	300	1112	1240	1310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Lokasi Dikbal Teknis PNBP 3633 di PPI Muntai	Kota Muntai, Jambi	PPI Muntai	orang	840	1440	2040	2040	2182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,61	0,00	0,00	181,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Lokasi SPM Safety and Security di PIP Makassar	Kota Makassar, Sulsel	PIP Makassar	orang	9900	9711	10668	10108	10110	26,00	21,81	40,74	37,40	36,00	172,22	0,00	0,00	0,00	172,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Lokasi Dikbal Teknis Non Gl DKTJ (CBCS)	Kab. Tangerang, Banten	DKTJ Cirebp	orang	442	428	447	444	448	7,00	10,42	6,10	6,10	10,00	47,22	0,00	0,00	0,00	81,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	Lokasi SPM Safety and Security di Pokdakbang Sugapatin	Kab. Jagapatin, Papua	Pokdakbang Jagapatin	orang	960	960	1000	1020	1030	5,97	4,23	3,79	2,10	3,48	25,07	0,00	0,00	0,00	25,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ket: Prioritas Nasional, PB: Prioritas Bidang, KL: Prioritas K/L, IKK Indikasi Hasil Cipta Kegiatan Dukungan Manajemen / Penunjang Teknis, Cipta: Indikasi Beberja Operasional, Keh: Indikasi Kehadiran di Luar KP/DKP

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Perhubungan 2020-2024

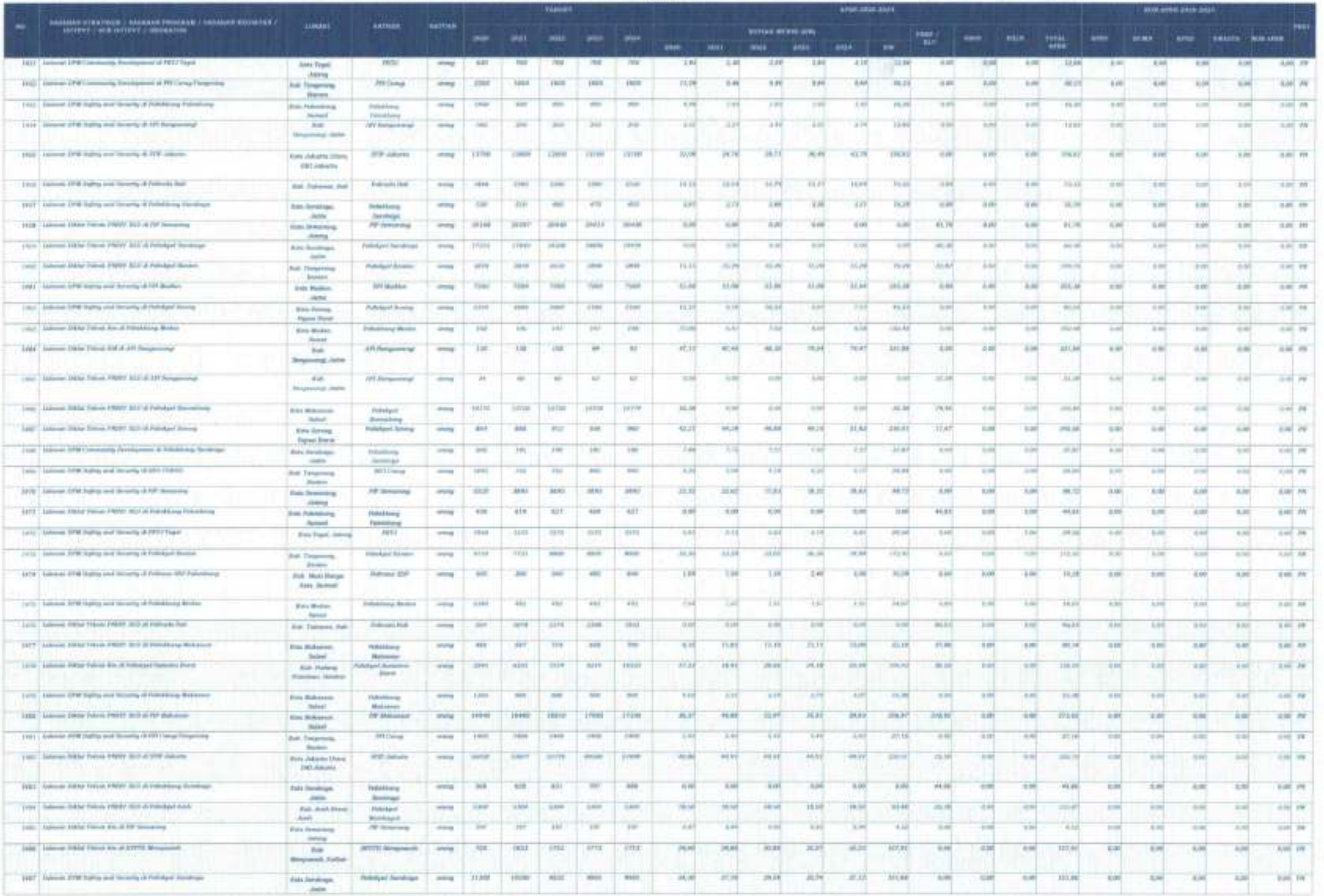

No	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Output / Sub Output / Indikator	Lokasi	Satuan	Tahun	Target					Apbn 2020-2024										Rab Apbn 2020-2024						Pptk
					2020	2021	2022	2023	2024	Actual Blokir 2020						Sisa / Gap	Kmpn	Pjln	Total Apbn	Apbn	Rkmpn	Apbn	Kmpn	Rab Apbn	
										2020	2021	2022	2023	2024	Rm											
1808	Laksana Dikbar Dalam Dan di DPPTI Jakarta	Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta	orang		1650	1650	1650	1700	1600	16,50	16,50	16,50	16,82	15,82	273,64	0,00	0,00	0,00	273,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
1809	Laksana Dikbr Sejlig sesd Security di Politeknik Sainsteel Timur	Kab. Morowali Selatan, Sulut	orang		8.833	7812	7812	8697	8697	11,87	17,61	21,22	26,29	28,87	115,86	0,00	0,00	0,00	115,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
1810	Laksana Dikbar Dalam PKBST &SC di Politeknik Medan	Kota Medan, Sumut	orang		470	400	500	617	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80	0,00	0,00	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
1811	Laksana Dikbar Dalam dan di Politeknik Anggana	Kab. Anggana, Papua	orang		170	170	170	170	170	8,00	11,50	18,00	18,00	32,50	78,00	6,37	0,00	0,00	84,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
1812	Laksana Dikbar Dalam PKBST &SC di DPTI Cilacap	Kab. Tanggerang Banten	orang		1400	1200	1200	1200	1200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,23	0,00	0,00	33,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
1813	Laksana Dikbar Dalam dan di Politeknik Sumbawa	Kota Sumbawa, Jabar	orang		200	50	50	150	150	10,90	10,72	10,90	17,20	10,90	84,16	0,00	0,00	0,00	84,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
1814	Laksana Dikbr Sejlig sesd Security di Politeknik Aceh	Kab. Aceh Besar, Aceh	orang		8000	8000	8000	8000	8000	12,00	12,00	19,00	12,11	10,00	96,11	0,00	0,00	0,00	96,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
1815	Laksana Dikbar Dalam PKBST &SC di DPTI Jakarta	Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta	orang		4150	3150	3850	3850	3700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87	0,00	0,00	73,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
1816	Laksana Dikbr Sejlig sesd Security di Politeknik Sriwijaya	Kota Makassar, Sulsel	orang		2700	2700	2700	2700	2700	12,11	19,70	17,67	11,44	15,04	96,96	0,00	0,00	0,00	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
1817	Laksana Dikbar Dalam dan di Politeknik Palembang	Kota Palembang, Sumsel	orang		80	80	80	80	80	7,17	8,79	7,28	7,83	7,31	90,38	0,00	0,00	0,00	90,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
888	***Persentase Efektivitas Pemanfaatan Barang dan Prasarana Aktivitas BSSR Perkembangan Darat, Laut, Udara dan Infrastruktur yang Berbasis Teknologi Tinggi/Modern***				0	0	0	0	0	79,43	205,28	203,72	206,84	247,00	1.043,77	0,00	0,00	0,00	1.043,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1818	Pemeliharaan/Rehabilitasi/Optimalisasi Prasarana/Sarana Pendukung Aktivitas Perkembangan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perlengkapannya Pelatihan	Kab. Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh	Sekali		1	1	1	1	1	16,43	8,77	17,43	12,84	13,84	69,47	0,00	0,00	0,00	69,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
1819	Pemeliharaan/Rehabilitasi/Optimalisasi Prasarana/Sarana Pendukung Aktivitas Kebakaran Hutan/ Tinggi Transportasi Darat	Kab. Bekasi, Jabar	Sekali		0	1	1	1	1	0,00	7,24	18,22	12,09	21,40	60,78	0,00	0,00	0,00	60,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
1820	Pemeliharaan/Rehabilitasi/Optimalisasi Prasarana/Sarana Pendukung Aktivitas Kebakaran Hutan/ Angkutan Darat/Rel	Kab. Sleman, Jabar	Sekali		0	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	2,70	20,50	23,20	0,00	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
1821	Pemeliharaan/Rehabilitasi/Optimalisasi Prasarana/Sarana Pendukung Aktivitas Kebakaran Hutan/ Angkutan Darat	Kota Serang, Jabar	Sekali		0	1	1	1	1	0,00	22,00	16,77	0,00	0,00	38,74	0,00	0,00	0,00	38,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
1822	Pemeliharaan/Rehabilitasi/Optimalisasi Prasarana/Sarana Pendukung Aktivitas Kebakaran Hutan/ Angkutan Sungai	Kota Bekasi, Jabar	Sekali		1	1	1	1	1	0,00	28,71	1,03	0,00	0,00	29,74	0,00	0,00	0,00	29,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
1823	Pemeliharaan/Rehabilitasi/Optimalisasi Prasarana/Sarana Pendukung Aktivitas Kebakaran Hutan/Rawa/Gambut/Pekarangan	Kota Palembang, Sumsel	Sekali		1	1	1	1	1	8,00	0,00	0,00	0,87	0,00	80,87	0,00	0,00	0,00	80,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
1824	Pemeliharaan/Rehabilitasi/Optimalisasi Prasarana/Sarana Pendukung Aktivitas Kebakaran Hutan/ Angkutan Udara/Helikopter	Kab. Pulang Pisau/Kab. Seruyan	Sekali		0	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00	0,00	0,00	16,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
1825	Pemeliharaan/Rehabilitasi/Optimalisasi Prasarana/Sarana Pendukung Aktivitas Kebakaran Hutan/ Angkutan Laut	Kab. Tanggerang, Banten	Sekali		0	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
1826	Pemeliharaan/Rehabilitasi/Optimalisasi Prasarana/Sarana Pendukung Aktivitas Kebakaran Hutan/ Kebakaran dan Pelatihan Penanganannya Aceh	Kab. Bengkayang, Kalbar	Sekali		1	1	1	1	1	8,37	10,80	11,27	11,72	12,48	54,64	0,00	0,00	0,00	54,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
1827	Pemeliharaan/Rehabilitasi/Optimalisasi Prasarana/Sarana Pendukung Aktivitas Kebakaran Hutan/ Pekarangan/Gambut	Kota Sumbawa, Jabar	Sekali		0	1	1	1	1	0,00	22,84	0,13	7,40	7,49	37,86	0,00	0,00	0,00	37,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
1828	Pemeliharaan/Rehabilitasi/Optimalisasi Prasarana/Sarana Pendukung Aktivitas Kebakaran Hutan/ Transportasi Darat/Rel	Kab. Tahunan, Aceh	Sekali		1	1	1	1	1	16,00	19,70	12,10	12,10	13,44	69,34	0,00	0,00	0,00	69,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
1829	Pemeliharaan/Rehabilitasi/Optimalisasi Prasarana/Sarana Pendukung Aktivitas Kebakaran Hutan/ Pemadaman/Kebakaran	Kab. Tanggerang, Banten	Sekali		0	1	1	1	1	0,00	0,00	6,84	7,50	9,00	24,34	0,00	0,00	0,00	24,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
1830	Pemeliharaan/Rehabilitasi/Optimalisasi Prasarana/Sarana Pendukung Aktivitas Kebakaran Hutan/ Pelatihan/ Operasional	Kota Makassar, Sulsel	Sekali		1	1	1	1	1	4,44	12,89	6,77	9,72	9,06	42,94	0,00	0,00	0,00	42,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
1831	Pemeliharaan/Rehabilitasi/Optimalisasi Prasarana/Sarana Pendukung Aktivitas Kebakaran Hutan/ Pendidikan dan Pelatihan Pemadaman Kebakaran Hutan	Kab. Mesuji, Sulsel	Sekali		1	1	1	1	1	0,00	11,00	10,80	7,20	7,70	36,80	0,00	0,00	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
1832	Pemeliharaan/Rehabilitasi/Optimalisasi Prasarana/Sarana Pendukung Aktivitas Kebakaran Hutan/ Pemadaman/ Angkutan	Kab. Jayapura, Papua	Sekali		1	1	1	1	1	2,02	2,70	7,00	4,79	3,80	21,49	0,00	0,00	0,00	21,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
1833	Pemeliharaan/Rehabilitasi/Optimalisasi Prasarana/Sarana Pendukung Aktivitas Kebakaran Hutan/ Pemadaman Transportasi Udara	Kota Tegal, Jateng	Sekali		2	2	2	2	2	8,23	7,46	3,00	3,41	8,18	32,83	0,00	0,00	0,00	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
1834	Pemeliharaan/Rehabilitasi/Optimalisasi Prasarana/Sarana Pendukung Aktivitas Kebakaran Hutan/ Angkutan Laut	Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta	Sekali		0	1	1	1	1	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	24,79	0,00	0,00	0,00	24,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
1835	Pemeliharaan/Rehabilitasi/Optimalisasi Prasarana/Sarana Pendukung Aktivitas Kebakaran Hutan/ Pendidikan dan Pelatihan Pemadaman Kebakaran Hutan di DPTI Cilacap	Kab. Tanggerang, Banten	Sekali		0	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	28,83	0,00	0,00	0,00	28,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
1836	Pemeliharaan/Rehabilitasi/Optimalisasi Prasarana/Sarana Pendukung Aktivitas Kebakaran Hutan/ Pelatihan Pengelolaan	Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta	Sekali		1	1	1	1	1	0,00	0,11	0,11	30,61	0,11	30,95	0,77	0,00	0,00	30,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
1837	Pemeliharaan/Rehabilitasi/Optimalisasi Prasarana/Sarana Pendukung Aktivitas Kebakaran Hutan/ Pemeliharaan/Perbaikan/Kalibrasi/Modifikasi	Kota Medan, Sumut	Sekali		2	2	2	2	2	0,11	12,53	28,90	37,90	63,80	143,24	0,00	0,00	0,00	143,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
1838	Pemeliharaan/Rehabilitasi/Optimalisasi Prasarana/Sarana Pendukung Aktivitas Kebakaran Hutan/ Pemadaman Medan	Kota Medan, Sumut	Sekali		0	1	1	1	1	0,00	2,19	4,10	8,40	0,00	32,29	0,00	0,00	0,00	32,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
1839	Pemeliharaan/Rehabilitasi/Optimalisasi Prasarana/Sarana Pendukung Aktivitas Kebakaran Hutan/ Pendidikan Pengelolaan dan Penanganan Bnn Pelatihan/ESP/SPI	Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta	Sekali		1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	17,27	15,00	32,27	1,46	0,00	0,00	33,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
1840	Pemeliharaan/Rehabilitasi/Optimalisasi Prasarana/Sarana Pendukung Aktivitas Kebakaran Hutan/ Pelatihan Manajemen	Kab. Aceh Besar, Aceh	Sekali		1	1	1	1	1	3,50	6,47	6,47	6,47	14,50	38,13	0,00	0,00	0,00	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
1841	Pemeliharaan/Rehabilitasi/Optimalisasi Prasarana/Sarana Pendukung Aktivitas Kebakaran Hutan/ Pelatihan Pemadaman	Kota Tanjungpinang, Aceh	Sekali		0	1	1	1	1	0,00	22,00	0,00	6,87	0,00	28,74	0,00	0,00	0,00	28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP
1842	Pemeliharaan/Rehabilitasi/Optimalisasi Prasarana/Sarana Pendukung Aktivitas Kebakaran Hutan/ Pemadaman Pesawat	Kota Makassar, Sulsel	Sekali		0	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP

NO	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / KRO-RO-OUTPUT / INDIKATOR	SATUAN	SUMBER	KEPUTUSAN	TARGET					ASPEK ASPEK KUNCI																	
					2020	2021	2022	2023	2024	KEPUASAN MASYARAKAT																	
										2020	2021	2022	2023	2024	RATA	PROP / KLP	2020	TOTAL ASPEK	ASPEK	ASPEK	ASPEK	ASPEK	RATA ASPEK	
1111	Pelaksanaan Administrasi Kepemerintahan/Pelayanan/Perizinan/PNBP Direktur Kepelabuhanan Internasional	Dok Rencana Jadwal	APO Rencana	Dokumen	1	1	1	1	1	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Kultur Pengelola Transportasi Antarmoda									0,00	17,50	17,50	17,50	17,50	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00		
111	Program Administrasi Kepelabuhanan									0,00	17,50	17,50	17,50	17,50	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00		
1111	1111.01. Terlaksananya Kepelabuhanan Transportasi Antarmoda									0,00	17,50	17,50	17,50	17,50	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00		
1111	**Basis Kepelabuhan Transportasi Perkotaan**			Hasil	0,375	0,438	0,501	0,727	1	0,00	17,50	17,50	17,50	17,50	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00		
1111	1111.01.01. Terlaksananya Kepelabuhanan Transportasi Antarmoda									0,00	17,50	17,50	17,50	17,50	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00		
11	**Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkotaan yang Terpadu**									0,00	17,50	17,50	17,50	17,50	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00		
111	**Modal Share Angkutan Umum Berbasis Jalan**				22	22	22	22	22	0,00	17,50	17,50	17,50	17,50	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00		
1111	Pengembangan Sistem Pelaporan Lalulintas Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Perkotaan Kabupaten/Kota Provinsi Kabupaten	Dok Rekom Jadwal	BPTD	Trip	4	4	4	4	4	0,00	17,50	17,50	17,50	17,50	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Sal

KEPALA BIRO

WAH

PN: Prioritas Nasional, PB: Prioritas Bidang, KL: Prioritas K/L, OM: Indikator Non Ops Kegiatan Dukungan Manajemen / Penunjang Teknis, Ops: Indikator Belanja Operasional, Knh: Indikator Kehadiran di Luar KP/LKP

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Perhubungan 2020-2024

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 80 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024

Matriks Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1.	Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	a. Perkembangan industri dan teknologi kendaraan bermotor; b. Perkembangan jenis angkutan berbasis teknologi informasi (*online*); c. Perkembangan di masyarakat mengenai sepeda motor sebagai alat transportasi umum; dan d. Kewenangan penyelenggaraan Terminal dan UPPKB oleh Pihak Ketiga.	Kemenhub/Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.	a. POLRI; b. Kementerian Perindustrian; dan c. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.	Tahun 2021
2.	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.	Perkembangan industri dan teknologi kendaraan bermotor.		a. Kementerian Perindustrian; dan b. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.	Tahun 2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
3.	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Kewenangan penyelenggaraan Terminal dan UPPKB oleh Pihak Ketiga.		a. Kementerian Perindustrian; dan b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	Tahun 2021
4.	Penyusunan Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK).			a. Kementerian PPN/Bappenas; b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; c. POLRI; dan d. Kementerian Kesehatan.	Tahun 2020
5.	**Penyederhanaan proses perizinan**		Kemenhub/Direktorat Jenderal Perhubungan Laut		
	Omnibus Law	Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *omibus law* di bidang transportasi laut. Perizinan tidak lagi diatur dalam Undang-Undang (UU) tetapi dialihkan dalam turunannya, yakni Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri Perhubungan. Serta mendukung Inpres Nomor 7 Tahun 2019, terkait kewenangan perizinan	Seluruh direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Tahun 2020-2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		usaha dari 22 Kementerian melalui BKPM.			
	Deregulasi perizinan di masing-masing Direktorat dalam rangka meningkatkan kemudahan berinvestasi di bidang pelayaran (EoDB).	Deregulasi perizinan dalam rangka mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi di bidang pelayaran. Peringkat *Ease of Doing Business (EoDB)* dari hasil survei *World Bank* posisi tahun 2020 Indonesia berada di peringkat 73 dari 190 negara. Dengan penyederhanaan perijinan investasi khususnya di bidang transportasi laut akan menjadi acuan para investor di bidang pelayaran untuk melakukan usaha atau berinvestasi di Indonesia. Adapun regulasi yang sudah ada adalah terbitnya Instruksi Presiden No 7 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Dalam Inpres tersebut, terdapat enam poin yang pada poinnya memberikan kewenangan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mengurus perizinan dan insentif investasi.	Seluruh direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Tahun 2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Delegasi kewenangan penerbitan izin pada lini terdepan	Pendelegasian kewenangan penerbitan izin pada lini terdepan, dilaksanakan dengan ketentuan Pasal 88, Pasal 89, Pasal 98, dan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka diperlukan pengaturan mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di bidang Perhubungan Laut, maka diterbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 89 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara lektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut. Dengan Permenhub ini, perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS). Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.	Seluruh direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Tahun 2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
6.	**Peningkatan kualitas pelayanan di bidang pelayaran**				
	Regulasi pendukung penyelenggaraan dan pengusahaan pelayanan di pelabuhan	Diperlukan regulasi pendukung penyelenggaraan dan pengusahaan pelayanan di pelabuhan selain dari Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut, PM 146 tahun 2016 tentang perubahan atas PM 51 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.	Direktorat Kepelabuhanan	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Tahun 2020
	Pengelolaan dan pengusahaan pelabuhan oleh Pemerintah Daerah (Pemda)	Pengelolaan dan pengusahaan pelabuhan telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Aspek-aspek yang perlu dipersiapkan Pemda terkait pengelolaan Pelabuhan: a. mempelajari dan memahami aspek legalitas dengan memperhatikan dan mencermati Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Pelabuhan Regional (PR) dan Pelabuhan Lokal (PL) merupakan urusan Pemerintah	Kementerian Perhubungan c.q Direktorat Kepelabuhanan	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota)	Tahun 2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali urusan keselamatan dan keamanan pelayaran yang menjadi urusan Pemerintah Pusat; b. menyiapkan SDM bidang kepelabuhanan, bidang operasional, bidang kemaritiman, bidang pemasaran, dan bidang ekspor-impor. c. memperhatikan aspek perencanaan, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan. Perencanaan pembangunan pelabuhan di daerah harus berpedoman pada tata ruang wilayah provinsi dan pemerataan pembangunan antar provinsi serta berpedoman pada tata ruang wilayah Kabupaten/Kota serta pemerataan dan peningkatan pembangunan Kabupaten/Kota. d. menyiapkan secara matang aspek operasional yang terdiri dari kegiatan bongkar muat barang, jasa pergudangan, jasa			

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		pemanduan, dan pentarifan. Membangun dan menyiapkan aspek sarana prasarana antara lain adalah fasilitas bongkar muat barang seperti dermaga, peralatan bongkar muat, lapangan penumpukan, gudang, jalan, kendaraan angkutan barang, perlengkapan/peralatan pengemasan, dan kantor penyelenggaraan pelabuhan.			
	Regulasi pendukung pelaksanaan KPBU, KSP, dan KSO pelabuhan	Regulasi pendukung pelaksanaan KPBU, KSP dan KSO sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur kerjasama yang sebelumnya dikenal dengan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) selanjutnya disebut KPBU.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Tahun 2020
	Revisi peraturan dalam rangka memenuhi ketentuan internasional di bidang pelayaran	Revisi peraturan terkait dengan regulasi nasional di bidang pelayaran juga datang dari dunia pelayaran internasional. Berbagai konvensi internasional yang dikeluarkan oleh IMO (*International Maritime Organization*) terutama SOLAS (*International Convention for the Safety of Life at Sea*), MARPOL (*International Convention for the Prevention of*	Kementerian Perhubungan	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	2020-2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		Pollution from Ships), dan STCW (*Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers*)			
7.	**Transformasi kelembagaan di bidang pelayaran**				
	Penetapan PP tentang Penjagaan Laut dan Pantai.	Penyusunan kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan penataan kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai dengan mengusulkan revisi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai serta Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai.	2020-2021
	Penguatan kelembagaan di bidang PLP.	Usulan penguatan kelembagaan *Sea and Coast Guard Base* tersebut dituangkan dalam naskah akademik usulan revisi KM Nomor 65 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai.	Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, serta Pangkalan.	2020-2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Revisi Peraturan terkait Perubahan Kelembagaan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Revisi KM Nomor 65 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai. Untuk penguatan kelembagaan Sea and *Coast Guard*.	Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai serta Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai	2020-2021
	Penetapan regulasi mengenai P3D pelabuhan kepada daerah.	Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor IM 16 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018, khususnya Direktur Jenderal Perhubungan Laut terkait penyusunan Roadmap pengalihan Pelabuhan Pengumpan kepada Pemerintah Daerah, menyusun dan menyempurnakan NSPK baik proses pengalihan maupun pembinaan bidang laut kepada Pemerintah Daerah.	Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Direktorat Kepelabuhanan	2020-2021
	Regulasi pendukung pembentukan BLU atau Bentuk Kelembagaan Lainnya di bidang pelayaran.	Badan Layanan Umum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum belum dapat diimplementasikan dengan baik.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	2020-2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
8.	**Standarisasi teknis sarana, prasarana, dan SDM bidang transportasi laut.**				
	Reviu RIPN	Reviu atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional yang telah dirumuskan dengan pertimbangan perkembangan isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap kepelabuhanan, diantaranya adalah pengembangan jaringan jalan, kereta api dan layanan kepelabuhanan, teknologi dan industri dalam pembangunan dan pengembangan kepelabuhanan, teknologi dan industri perkapalan, pengembangan kepelabuhanan yang berwawasan lingkungan, mendukung disabilitas, kesetaraan gender, *poor*, *elderly*, dan anak-anak, investasi dan pendanaan, Otonomi daerah dan seterusnya	Direktorat Kepelabuhanan	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	2020-2021
	Standarisasi pelabuhan pada IPN	Perlu adanya sebuah Peraturan Presiden/Perpres untuk Implementasi *Integrated Port Network* (IPN) yang di dalamnya berdasar pada tiga pilar strategis. "yaitu standardisasi infrastruktur, suprastruktur dan pola operasional di 7 pelabuhan utama, integrasi kawasan industri dengan	Kementerian Perhubungan	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	2020-2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		pelabuhan, dan membentuk aliansi pelayaran untuk efisiensi operasional jaringan pelayaran melalui peningkatan ukuran kapal dan aktivasi *rute pendulum (looping service)*".			
	Blue Print/ Masterplan penyelenggaraan tol laut/perintisan	Pemerintah perlu segera merancang dan menetapkan rencana induk (*masterplan*) Tol Laut/Perintis. Rencana induk diperlukan sebagai acuan Kementerian atau Lembaga terkait dalam mengimplementasikan Tol Laut. acuan ini juga diperlukan bagi para pelaku dan para pihak (stakeholders) lainnya untuk terlibat dalam Program Tol Laut, termasuk perusahaan-perusahaan pelayaran. Rencana induk itu mencakup perencanaan rute, pelaku, mekanisme, rencana pengembangan pelabuhan dan infrastruktur lainnya, serta industri pendukung, termasuk galangan kapal.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	2020-2021
	Restrukturisasi jaringan trayek pelayaran nasional	Pembuatan dasar hukum penataan jaringan trayek pelayaran nasional	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	2020-2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Rencana umum pengembangan bidang kenavigasian (masterplan kenavigasian, penataan ruang wilayah perairan)	tinjau ulang terhadap *masterplan* Rencana Pengembangan Sistem Keselamatan Lalu Lintas Maritim (MTSDP) tahun 2002, dengan menyusun Masterplan Kenavigasian yang efektif dan efisien, yang mencakup aspek SBNP, Telekomunikasi pelayaran, penetapan alur pelayaran, serta penyediaan sarana kapal negara kenavigasian.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	2020-2021
	Rencana umum pengembangan bidang PLP	Revisi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM Nomor 65 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai. guna penguatan kelembagaan *Sea and Coast Guard*	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Direktorat Kepelabuhanan	2020-2021
	Penguatan pelaksanaan regulasi NCVS	Implementasi Aturan standar kapal nonkonvensi yang tertuang pada Keputuswan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia, dan SK Dirjen Perhubungan Laut No. Um.008/9/20/DJPL-12 tentang Pemberlakuan Standar dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal nonkonvensi berbendera Indonesia.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	2020-2021
	Kewajiban penggunaan AIS terhadap seluruh kapal	Implementasi dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis (AIS) bagi Kapal yang Berlayar di wilayah Perairan Indonesia.		Perhubungan Laut	
	Penerapan SOLAS secara bertahap hingga mencapai standar maksimal	Implementasi SOLAS yang menjadi standar keselamatan maritim yang wajib diterapkan pada kapal niaga (*merchant vessel*) berukuran > 500 DWT dan menjadi induk bagi terbitnya berbagai standar (*code*) bagi konstruksi kapal, peralatan, dan pengoperasian.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	2020-2021
9.	**Pemenuhan (*compliance*) terhadap ketentuan internasional**				
	Ratifikasi sejumlah konvensi IMO terkait dengan kepelabuhanan, kepelautan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim.	Ratifikasi konvensi IMO yang belum dilaksanakan, beberapa ratifikasi yang sudah dilaksanakan adalah Perpres Nomor 57 tahun 2017 tentang pengesahan *Protocol of 1988 Relating to The International Convention for the Safety of Life at Sea* (SOLAS), 1974 terkait dengan konvensi internasional untuk keselamatan jiwa di laut, Instrumen IMO di bidang perlindungan lingkungan maritim, yaitu *Anti Fouling System Convention* (AFS), *Ballast Water Management Convention* (BWM) 2004, MARPOL Annex V terkait pencemaran dari	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	2020-2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		sampah kapal, dan London *Convention/ Protocol.*			
10.	**Pemberdayaan angkutan laut nasional**				
	Pelaksanaan *beyond cabotage*	Penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu, yang mewajibkan penggunaan kapal nasional untuk ekspor CPO dan batu bara, serta impor beras dilakukan oleh perusahaan pelayaran nasional dengan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	2020-2021
	Fasilitasi permodalan bagi perusahaan pelayaran nasional.	Pasca berlakunya kebijakan *scrapping* yang mengharuskan semua kapal yang umurnya lebih dari 25 tahun	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal	2020-2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		harus dilebur, pemerintah perlu membantu pengadaan kapal baru dalam hal ini dukungan kebijakan pendanaan terhadap kredit perbankan untuk pengadaan kapal baru.		Perhubungan Laut	
	Pemberdayaan pelayaran rakyat.	Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan diamanatkan bahwa pembinaan angkutan laut pelayaran rakyat dilaksanakan agar kehidupan usaha dan peranan penting angkutan laut Pelayaran Rakyat tetap terpelihara sebagai bagian dari potensi angkutan laut nasional yang merupakan satu kesatuan sistem transportasi nasional. keberadaan Pelayaran Rakyat akan membantu sistem transportasi nasional, terutama untuk daerah pedalaman, terpencil, dan terisolir.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	2020-2021
	Penyiapan implementasi MEA.	Untuk menghadapi MEA yang berpotensi meningkatkan transaksi ekonomi antar negara ASEAN, salah satunya adalah *Beyond Cabotage*.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	2020-2021
11.	**Fasilitasi peran *stakeholders***				
	Pengembangan kelembagaan penyelenggaraan pelayaran di Daerah (P3D).	Pembuatan dasar hukum untuk pembuatan NSPK baik proses pengalihan maupun pembinaan bidang laut kepada Pemerintah	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	2020-2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		Daerah.		beserta pemerintah daerah.	
	Regulasi pendukung UMKM (termasuk TKBM) dalam perkuatan peran dan pengusahaannya.	Revisi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	2020-2021
12.	**Fasilitasi kepada seluruh lapisan masyarakat (secara fisik, ekonomi, dan sosial)**				
	Penyesuaian dasar hukum pelaksanaan pelayaran perintis, *Public Service Obligation* angkutan barang, dan kapal ternak.	Pembuatan dasar hukum khusus pelaksanaan pelayaran perintis, *Public Service Obligation* angkutan barang, dan kapal ternak, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	2022
	Standar pelayanan penumpang difabel serta ibu hamil dan menyusui pada angkutan laut penumpang.	Implementasi dan penyusunan SPM dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus.	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	Seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	2022
13.	**Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan**	a. hasil *final report* ICAO *Coordinated Validation Mission* tanggal 10-18 Oktober 2018 yang merekomendasikan terhadap *Primary Aviation Law* terkait pelimpahan fungsi dan tanggung jawab dari negara pendaftaran dalam konteks perjanjian sewa dan pengakuan terhadap lisensi	Bagian Hukum.	Seluruh Direktorat dan Bagian di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Pusat Penelitan dan Pengembangan Perhubungan Udara, Biro Hukum, dan	2022

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		personil pesawat udara, sertifikat kelaikudaraan dan sertifikat radio pesawat udara; ketentuan sanksi untuk pelanggaran terkait intersepsi udara sipil; ketentuan untuk menjamin bahwa KNKT tidak terlibat dalam tindakan penegakan hukum; b. kewenangan bagi KNKT dan investigatornya untuk dapat mengakses dan berwenang terhadap lokasi kecelakaan dan puing-puing pesawat, ketentuan untuk menjamin perlindungan dan kerahasiaan dari seluruh hasil laporan investigasi; c. perubahan lingkungan strategis; d. kekosongan hukum; e. mengakomodir kemajuan teknologi; dan f. kebutuhan masyarakat.		Komite Nasional Keselamatan Transportasi.	
14.	**Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2013 tentang Jaringan dan Rute Penerbangan.**	a. dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2013 tentang Jaringan dan Rute Penerbangan, bahwa jaringan rute hanya ditetapkan sampai dengan Tahun 2017, sehingga butuh penyesuaian. b. saat ini telah banyak perubahan dan penambahan rute-rute baru; dan c. rencana pengaturan penyeimbangan rute (mengatur komposisi berapa % (persen) rute	Direktorat Angkutan Udara.	Direktorat Bandar Udara, Direktorat Navigasi Penerbangan, Pemerintah Daerah, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		sangat padat, padat, kurang padat dan tidak padat yang bisa diambil *airline*).			
15.	**Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2017 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional.**	*mengupdate* amandemen ke-17 dari Annex 17 dan dalam rangka menutup *finding* Audit USAP.	Direktorat Keamanan Penerbangan	Direktorat Keamanan Penerbangan, BUBU, Unit Penyelenggara Bandar Udara, *AIRLINES*, dan *AIRNAV*.	2020
16.	**Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2016 tentang Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional.**	Dalam rangka mengakomodir penambahan lokasi kawasan pelatihan terbang (*training* area) dan pemutakhiran (*updating*) program kerja *i* (FIR) ruang udara Jakarta di atas Kepulauan Riau dan Natuna, dipandang perlu menyesuaikan ketentuan yang diatur dalam Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional.	Direktorat Navigasi Penerbangan	Direktorat Bandar Udara, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.	2020
17.	**Penyusunan peraturan terkait keamanan siber (*cyber security*).**	a. mengakomodir kemajuan teknologi; b. kebutuhan masyarakat; dan c. mempercepat konektivitas transportasi.	Direktorat Bandar Udara, Direktorat Angkutan Udara, dan Direktorat Navigasi Penerbangan.	Direktorat Bandar Udara, Direktorat Angkutan Udara, dan Direktorat Navigasi Penerbangan.	2021
18.	Penyusunan peraturan terkait pengoperasian *drone*	a. mengakomodir kemajuan teknologi; dan b. kebutuhan masyarakat.	Direktorat Navigasi Penerbangan dan Direktorat Kelaikudaraan Pesawat Udara	Direktorat Navigasi Penerbangan, DKPPU, dan Direktorat Bandar Udara.	2020
19.	Penyusunan peraturan terkait pengoperasian *waterbase*	a. mengakomodir kemajuan teknologi; b. kebutuhan masyarakat; dan c. konektivitas transportasi.	Direktorat Bandar Udara	Direktorat Bandar Udara, Direktorat Navigasi Penerbangan, dan	2022

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
				Direktorat Keamanan Penerbangan.	
20.	Penyusunan peraturan terkait penerapan konsep *smart airport*.	a. mengakomodir kemajuan teknologi; dan b. kebutuhan masyarakat.	Direktorat Bandar Udara	Direktorat Bandar Udara, Direktorat Keamanan Penerbangan, DKPPU.	2021
21.	Penyusunan peraturan terkait penerapan konsep *eco airport*	a. mengakomodir kemajuan teknologi; b. kebutuhan masyarakat; dan c. mengakomodir ketentuan ICAO.	Direktorat Bandar Udara	Direktorat Bandar Udara, Direktorat Keamanan Penerbangan, DKPPU.	2021
22.	Revisi regulasi yang berkaitan dengan kemudahan perizinan berusaha.	Mempermudah proses perizinan dan menarik investasi.	Bagian Hukum	Seluruh Direktorat dan Bagian di Lingkungan Direktorat Jenderal Udara.	2020
23.	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2016 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional.	a. dengan terbitnya ICAO Annex 19 masing-masing negara anggota ICAO harus menetapkan dan menjalankan Program Keselamatan Penerbangan Nasional; dan b. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2016 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional belum mengakomodir regulasi terkait sistem pelaporan kejadian keselamatan penerbangan yang bersifat wajib dan sistem pelaporan sukarela terkait kejadian yang berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan	Bagian Kerjasama Internasional, Humas dan Umum	Seluruh Direktorat dan Bagian di Lingkungan Direktorat Jenderal Udara.	2022

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		(*Mandatory Occurrence Report/ MOR* dan *Voluntary Reporting System/ VRS*).			
24.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.	mempermudah investasi di bidang perkeretaapian.	Kemenhub/Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Hukum dan HAM, dan Sekretariat Negara.	2021-2022
25.	Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian.	a. peraturan turunan atau pelaksana berupa Peraturan Menteri diharapkan dapat segera disusun dan ditetapkan; b. mempermudah Investasi di bidang perkeretaapian; dan c. menyederhanakan persyaratan perizinan berusaha dan perizinan teknis di bidang perkeretaapian.		Kementerian Hukum dan HAM dan Sekretariat Negara	2021-2024
26	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang PNBP di Lingkungan Kementerian Perhubungan	a. merevisi formula perhitungan biaya penggunaan prasarana milik Negara (*Track Acsess Charge*/TAC) dan perubahan besaran tarif/pengenaan PNBP lainnya di bidang perkeretaapian; dan b. beberapa ketentuan yg diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak agar menjadi acuan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang PNBP di Lingkungan Kementerian Perhubungan.		Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Sekretariat Negara	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
27	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus.	menyederhanakan persyaratan perizinan berusaha dan perizinan teknis di bidang perkeretaapian Menyesuaikan SOP Perizinan Mengakomodir sektor lain dalam penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus.		Kementerian Hukum dan HAM.	2020-2024
28	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain.	Peningkatan keselamatan, serta menyesuaikan SOP Perizinan.		Kementerian Hukum dan HAM.	2020-2021
29.	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api.	mengakomodir perkembangan teknologi di bidang perkeretaapian.		Kementerian Hukum dan HAM, PT Industri Kereta Api, dan PT Kereta Api Indonesia.	2020-2022
30.	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase Jalur Kereta Api.	mengakomodir perkembangan teknologi di bidang perkeretaapian.		Kementerian Hukum dan HAM dan PT Kereta Api Indonesia.	2020
31.	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 156 Tahun 2015 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara.	mengoptimalkan penggunaan anggaran IMO yang lebih tepat sasaran.		Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM.	2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
32.	Perubahan Instrumen Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional menjadi Rancangan Undang-Undang.	Revisi Sistem Transportasi Nasional akan dinaikkan posisinya dalam bentuk Undang-Undang sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan transportasi nasional.	Kemenhub/Litbang		2020-2024
33.	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Transportasi Nasional.	Pedoman dalam penyusunan Rencana Induk Transportasi yang mengakomodir semua perencanaan transportasi secara holistik, integratif, tematik dan spasial.	Kemenhub/Setjen		2020-2024
34.	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Jabodetabek.	Melengkapi perkembangan trayek-trayek perkotaan di wilayah Jabodetabek untuk melengkapi pelayanan transportasi masyarakat di wilayah aglomerasi perkotaan Jabodetabek.	Kemenhub/BPTJ	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Dinas Perhubungan kabupaten/kota di wilayah Jabodetabek.	Tahun 2021-2022
35.	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.	Kewenangan Menteri Perhubungan dalam pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Nasional hanya kepada Dirjen Perhubungan Darat, seharusnya untuk jalan nasional wilayah Jabodetabek kewenangannya oleh BPTJ.	Kemenhub/BPTJ	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Dinas Perhubungan kabupaten/kota di wilayah Jabodetabek.	Tahun 2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan /atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
36.	Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Angkutan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.	Kewenangan penyelenggaraan terminal penumpang tipe a di wilayah Jabodetabek masih berada di Dirjen Perhubungan Darat sehingga harus diubah untuk kepastian hukum kepada BPTJ.	Kemenhub/BPTJ	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Dinas Perhubungan kabupaten/kota di wilayah Jabodetabek.	Tahun 2021

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan
KEPALA BIRO

WAHJU